



Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir di masa pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCH. JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 08/1534/LTM/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan RPJPD untuk pembangunan 20 tahun, RPJMD untuk pembangunan 5 tahun, dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 merupakan tahapan ke-2 (kedua) pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi RPJPD.

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Bupati, dan selanjutnya akan menjadi dasar bagi Bupati terpilih dalam menyusun RPJMD dan kepala perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan kinerja kepala perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 08

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

**DAFTAR ISI**

Peraturan Daerah .....	i
Lampiran Peraturan Daerah .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Grafik .....	xv
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I - 19
1.5 Sistematika Penulisan .....	I - 19
<b>Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah</b>	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 4
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 58
2.3 Aspek Daya Saing .....	II - 93
2.4 Aspek Pelayanan Umum .....	II - 131
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 .....	II - 149
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik .....	II - 155
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II - 169
<b>Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis</b>	
3.1 Permasalahan .....	III - 1
3.2 Isu Strategis .....	III -12
<b>Bab IV. Visi dan Misi Daerah</b>	
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045 .....	IV - 1
4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045 .....	IV - 22



**Bab V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**

- 5.1 Arah Kebijakan Transformasi dan Landasan Transformasi ..... V – 3
- 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana ..... V – 27
- 5.3 Kestinambungan Pembangunan Daerah ..... V – 72

**Bab VI. Penutup**

- 6.1 Kaidah Pelaksanaan ..... VI – 2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah .....	I – 5
Gambar 1.2 Taman Nasional Way Kambas .....	I – 7
Gambar 1.3 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera .....	I – 10
Gambar 1.4 Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Sukadana .....	I – 12
Gambar 1.5 Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Way Jepara .....	I – 13
Gambar 1.6 Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Labuhan Maringgai .....	I – 13
Gambar 1.7 Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung .....	I – 15
Gambar 1.8 Kawasan Strategis Kabupaten .....	I – 18
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur .....	II – 4
Gambar 2.2 Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 5
Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur .....	II – 7
Gambar 2.4 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur .....	II – 9
Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur .....	II – 11
Gambar 2.6 Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur .....	II – 13
Gambar 2.7 Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur .....	II – 14
Gambar 2.8 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur .....	II – 17
Gambar 2.9 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung Timur .....	II – 22
Gambar 2.10 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur .....	II – 26
Gambar 2.11 Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lampung Timur .....	II – 27
Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Abrasi dan Gelombang Ekstrem Kabupaten Lampung Timur .....	II – 28
Gambar 2.13 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur .....	II – 32
Gambar 2.14 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 33
Gambar 2.15 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 39
Gambar 2.16 Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Lampung Timur .....	II – 40
Gambar 2.17 Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 41
Gambar 2.18 Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kab. Lampung Timur .....	II – 41
Gambar 2.19 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Lampung Timur .....	II – 42
Gambar 2.20 Peta Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Kab. Lampung Timur .....	II – 43
Gambar 2.21 Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung .....	II – 45
Gambar 2.22 Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lampung Timur .....	II – 46

Gambar 2.23 Peta Daya Tampung Lahan .....	II – 48
Gambar 2.24 Sebaran Keluarga Miskin Ekstrim per Kecamatan 2023 .....	II – 65
Gambar 2.25 Pantai Mutiara Baru .....	II – 113
Gambar 2.26 Taman Nasional Way Kambas .....	II – 113
Gambar 2.27 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Timur .....	II – 181
Gambar 2.28 Kawasan Perkotaan Sukadana .....	II – 185
Gambar 2.29 Kawasan Perkotaan Way Jepara.....	II – 187
Gambar 2.30 Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai .....	II – 188
Gambar 2.31 Kawasan Perkotaan Pekalongan.....	II – 190
Gambar 2.32 Kawasan Perkotaan Sekampung Udik .....	II – 191
Gambar 2.33 Kawasan Perkotaan Bandar Sribhawono.....	II – 193
Gambar 2.34 Peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur .....	II – 195
Gambar 2.35 Peta Struktur Ruang Kabupaten Lampung Timur .....	II – 199
Gambar 3.1 Megatren Global .....	III – 13
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 .....	IV – 15
Gambar 4.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 .....	IV – 24
Gambar 5.1 Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJPD .....	V – 3
Gambar 5.2 Peta Jaringan Jalan Kewenangan Nasional dan Provinsi Lampung .....	V – 31
Gambar 5.3 Peta Wilayah Prioritas Penanganan Infrastruktur Bagi Masyarakat Miskin Ekstrim .....	V – 38
Gambar 5.4 Peta Wilayah Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kab. Lam Tim .....	V – 39
Gambar 5.5 Peta Wilayah Prioritas Peningkatan Sanitasi Lingkungan di Kawasan Berisiko Tinggi Stunting .....	V – 41
Gambar 5.6 Klaster Pengembangan Wilayah Kecamatan .....	V – 50
Gambar 5.7 Peta Pusat Pertumbuhan Klaster I Kec. Sukadana, Kec. Purbolingo, Kec. Way Bungur, Kec. Bumi Agung, Kec. Marga Tiga .....	V – 54
Gambar 5.8 Peta Pusat Pertumbuhan Klaster II Kec. Pekalongan, Kec. Raman Utara, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Sekampung, Kec. Batanghari, Kec. Metro Kibang .....	V – 58
Gambar 5.9 Peta Pusat Pertumbuhan Klaster III Kec. Way Jepara, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Braja Sebah, Kec. Mataram Baru .....	V – 61
Gambar 5.10 Peta Pusat Pertumbuhan Klaster IV Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Pasir Sakti, Kec. Melinting, Kec. Gunung Pelindung .....	V – 65
Gambar 5.11 Peta Pusat Pertumbuhan Klaster V Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Sekampung Udik, Kec. Marga Sekampung, Kec. Jabung, Kec. Waway Karya .....	V – 69

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rata-Rata Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kab. Lampung Timur ...	II – 6
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur .....	II – 10
Tabel 2.3	Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur .....	II – 11
Tabel 2.4	Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur .....	II – 12
Tabel 2.5	Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur .....	II – 13
Tabel 2.6	Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha) .....	II – 17
Tabel 2.7	Bencana yang Terjadi di Kabupaten Lampung Timur .....	II – 18
Tabel 2.8	Luas Risiko Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung Timur .....	II – 19
Tabel 2.9	Luas Risiko Cuaca Ekstrem per Kecamatan .....	II – 19
Tabel 2.10	Luas Risiko Banjir Kabupaten Lampung Timur .....	II – 23
Tabel 2.11	Luas Risiko Banjir per Kecamatan .....	II – 23
Tabel 2.12	Luas Risiko Tanah Longsor Kabupaten Lampung Timur .....	II – 26
Tabel 2.13	Luas Risiko Tanah Longsor per Kecamatan .....	II – 27
Tabel 2.14	Luas Risiko Abrasi dan Gelombang Ekstrem Kabupaten Lampung Timur ...	II – 28
Tabel 2.15	Luas Risiko Abrasi dan Gelombang Ekstrem per Kecamatan .....	II – 28
Tabel 2.16	Luas Risiko Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur .....	II – 29
Tabel 2.17	Luas Risiko Gempa Bumi per Kecamatan .....	II – 29
Tabel 2.18	Luas Risiko Kekeringan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 33
Tabel 2.19	Luas Risiko Kekeringan per Kecamatan .....	II – 33
Tabel 2.20	Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 36
Tabel 2.21	Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan .....	II – 37
Tabel 2.22	Luas Risiko Multi Risiko Kabupaten Lampung Timur .....	II – 39
Tabel 2.23	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan .....	II – 42
Tabel 2.24	Status Daya Dukung Air Permukaan .....	II – 43
Tabel 2.25	Luas Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur .....	II – 44
Tabel 2.26	Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022	II – 45
Tabel 2.27	Daya Tampung Lahan Tahun 2022 .....	II – 47
Tabel 2.28	Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas .....	II – 51
Tabel 2.29	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Tahun 2020 .....	II – 53
Tabel 2.30	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018, 2022, dan Juni 2023 .....	II – 67
Tabel 2.31	Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur .....	II – 77
Tabel 2.32	Capaian Kinerja RSUD Sukadana Kab. Lampung Timur Tahun 2023 .....	II – 86
Tabel 2.33	Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 .....	II – 91



Tabel 2.34 Potensi Budaya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 .....	II – 92
Tabel 2.35 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur (kuintal) .....	II – 101
Tabel 2.36 Jumlah Pedagang Menurut Lokasi Pasar dan Jenis Bangunan yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar di Kab. Lam Tim Tahun 2023 .....	II – 107
Tabel 2.37 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 .....	II – 109
Tabel 2.38 Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri Tahun 2023 .....	II – 109
Tabel 2.39 Jumlah Omset Usaha Koperasi Menurut Kelompok Koperasi (Juta Rupiah) .....	II – 111
Tabel 2.40 Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lampung Timur (km) .....	II – 120
Tabel 2.41 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2022 .....	II – 121
Tabel 2.42 Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur .....	II – 125
Tabel 2.43 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur .....	II – 132
Tabel 2.44 Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lampung Timur .....	II – 133
Tabel 2.45 Rasio Jumlah Guru terhadap Murid Kabupaten Lampung Timur .....	II – 134
Tabel 2.46 Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 .....	II – 137
Tabel 2.47 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan .....	II – 138
Tabel 2.48 Hasil Perolehan Medali Porprov Lampung Tahun 2022 .....	II – 145
Tabel 2.49 Capaian dan Proyeksi Kinerja Makro Pembangunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 .....	II – 150
Tabel 2.50 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Timur per Kecamatan.....	II – 156
Tabel 2.51 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur per Kecamatan .....	II – 157
Tabel 2.52 Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Lampung Timur .....	II – 158
Tabel 2.53 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal .....	II – 162
Tabel 2.54 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih .....	II – 163
Tabel 2.55 Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah/Tempat Tinggal .....	II – 165
Tabel 2.56 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan .....	II – 168
Tabel 2.57 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan .....	II – 169
Tabel 2.58 Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 .....	II – 182
Tabel 2.59 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur .....	II – 196
Tabel 3.1 Keselarasan Isu Strategis Jangka Panjang Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur .....	III – 59
Tabel 3.2 Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota Sekitar .....	III – 62
Tabel 4.1 Sasaran Umum Visi Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 .....	IV – 21
Tabel 5.1 17 (Tujuh Belas) Arah Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 .....	V – 2



Tabel 5.2	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1 .....	V – 5
Tabel 5.3	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1 .....	V – 7
Tabel 5.4	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2 .....	V – 9
Tabel 5.5	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2 .....	V – 16
Tabel 5.6	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3 .....	V – 17
Tabel 5.7	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3 .....	V – 18
Tabel 5.8	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-IV .....	V – 19
Tabel 5.9	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4 .....	V – 21
Tabel 5.10	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-V .....	V – 22
Tabel 5.11	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5 .....	V – 26
Tabel 5.12	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6 .....	V – 28
Tabel 5.13	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7 .....	V – 29
Tabel 5.14	Sistem Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten .....	V – 30
Tabel 5.15	Sistem Jaringan Jalan Kewenangan Nasional dan Provinsi Lampung .....	V – 32
Tabel 5.16	Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Hirarki Wilayah RTRW ...	V – 51
Tabel 5.17	Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Potensi Wilayah .....	V – 52
Tabel 5.18	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8 .....	V – 72

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Timur .....	II-50
Grafik 2.2	Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Lampung Timur (ton) .....	II-51
Grafik 2.3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung .....	II-52
Grafik 2.4	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur .....	II-53
Grafik 2.5	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kab. Lampung Timur .....	II-54
Grafik 2.6	Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	II-55
Grafik 2.7	Jumlah Penduduk Kab Lam Tim Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 .....	II-56
Grafik 2.8	Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 .....	II-57
Grafik 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 .....	II-57
Grafik 2.10	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur .....	II-58
Grafik 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-59
Grafik 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Prov. Lampung Tahun 2023 ...	II-60
Grafik 2.13	Laju Inflasi Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional .....	II-61
Grafik 2.14	Tingkat Kemiskinan Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional ..	II-62
Grafik 2.15	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 ...	II-63
Grafik 2.16	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur .....	II-64
Grafik 2.17	Perkembangan Indeks Gini Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional .....	II-66
Grafik 2.18	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-66
Grafik 2.19	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur .....	II-68
Grafik 2.20	Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-68
Grafik 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-69
Grafik 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional .....	II-69
Grafik 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-70
Grafik 2.24	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-71

Grafik 2.25	Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-71
Grafik 2.26	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Prov. Lampung Tahun 2023 ....	II-72
Grafik 2.27	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-72
Grafik 2.28	Rata-Rata Lama Sekolah Kab./Kota di Prov. Lampung Tahun 2023 .....	II-73
Grafik 2.29	Harapan Lama Sekolah Kab. Lam Tim, Prov. Lampung, dan Nasional .....	II-73
Grafik 2.30	Harapan Lama Sekolah Kab./Kota di Prov. Lampung Tahun 2023 .....	II-74
Grafik 2.31	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	II-74
Grafik 2.32	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Prov. Lampung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2023 .....	II-75
Grafik 2.33	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur .....	II-76
Grafik 2.34	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur .....	II-76
Grafik 2.35	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur .....	II-78
Grafik 2.36	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur .....	II-79
Grafik 2.37	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur .....	II-80
Grafik 2.38	Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Timur .....	II-80
Grafik 2.39	Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 ....	II-81
Grafik 2.40	Prevalensi Wasting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 ....	II-81
Grafik 2.41	Persentase Penemuan dan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur ....	II-82
Grafik 2.42	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur .....	II-82
Grafik 2.43	Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR) DBD di Kab. Lam Tim ....	II-83
Grafik 2.44	Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-86
Grafik 2.45	Indeks Pembangunan Gender Kab./Kota di Prov. Lampung Tahun 2023...	II-89
Grafik 2.46	Indeks Pembangunan Gender Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional.....	II-89
Grafik 2.47	Indeks Ketimpangan Gender Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional.....	II-90
Grafik 2.48	Indeks Ketimpangan Gender Kab./Kota di Prov. Lampung Tahun 2022 ....	II-90
Grafik 2.49	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung dan Nasional .....	II-92
Grafik 2.50	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Nasional .....	II-93
Grafik 2.51	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur .....	II-94
Grafik 2.52	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah) .....	II-95
Grafik 2.53	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah) .....	II-96
Grafik 2.54	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab./Kota di Prov. Lampung Tahun 2023 (Juta Rupiah).....	II-96
Grafik 2.55	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 (Juta Rupiah) .....	II-97

Grafik 2.56 Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Padi Kab. Lam Tim .....	II-97
Grafik 2.57 Produksi Padi (ton) per Kecamatan di Kab Lam Tim Tahun 2023 .....	II-98
Grafik 2.58 Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Jagung Kab Lam Tim ....	II-98
Grafik 2.59 Produksi Jagung (ton) per Kecamatan di Kab Lam Tim Tahun 2023.....	II-99
Grafik 2.60 Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Ubi Kayu Kab Lam Tim..	II-99
Grafik 2.61 Produksi Ubi Kayu (ton) per Kecamatan di Kab Lam Tim Tahun 2023.....	II-100
Grafik 2.62 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (ton).....	II-102
Grafik 2.63 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Timur (ekor) .....	II-103
Grafik 2.64 Produksi Daging Kabupaten Lampung Timur (kg) .....	II-103
Grafik 2.65 Populasi Unggas Kabupaten Lampung Timur (ekor) .....	II-104
Grafik 2.66 Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Lampung Timur (kg) .....	II-105
Grafik 2.67 Produksi Telur Kabupaten Lampung Timur (ton).....	II-105
Grafik 2.68 Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur (ton) .....	II-106
Grafik 2.69 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Timur....	II-107
Grafik 2.70 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-108
Grafik 2.71 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lampung Timur .....	II-108
Grafik 2.72 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Timur .....	II-110
Grafik 2.73 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kab Lam Tim Tahun 2023.....	II-110
Grafik 2.74 Perkembangan Deviden BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	II-112
Grafik 2.75 Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Timur.....	II-114
Grafik 2.76 Indeks Pendidikan Kab Lam Tim, Provinsi Lampung, dan Nasional .....	II-115
Grafik 2.77 Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-116
Grafik 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab./Kota di Prov.Lampung 2023.....	II-116
Grafik 2.79 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab Lampung Timur, Prov. Lampung, dan Nasional .....	II-117
Grafik 2.80 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin.....	II-117
Grafik 2.81 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Lampung Timur .....	II-118
Grafik 2.82 Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur .....	II-119
Grafik 2.83 Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 (km).....	II-121
Grafik 2.84 Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Timur.....	II-122
Grafik 2.85 Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021.....	II-122
Grafik 2.86 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 .....	II-123
Grafik 2.87 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama di Kab. Lam Tim Tahun 2022.....	II-124
Grafik 2.88 Jumlah Base Transceiver Station di Kabupaten Lampung Timur .....	II-126



Grafik 2.89	Nilai Investasi di Kabupaten Lampung Timur.....	II-127
Grafik 2.90	Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kab Lam Tim.....	II-128
Grafik 2.91	Jumlah dan Persentase Desa yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021.....	II-128
Grafik 2.92	Proporsi Penduduk Provinsi Lampung yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya .....	II-129
Grafik 2.93	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan Nasional .....	II-130
Grafik 2.94	Indeks Demokrasi Indonesia dan Provinsi Lampung .....	II-131
Grafik 2.95	Angka Melanjutkan dan Angka Putus Sekolah Kab. Lampung Timur .....	II-133
Grafik 2.96	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kab. Lam Tim ..	II-135
Grafik 2.97	Capaian Desa Siaga Mandiri Dibandingkan Target Kab.Lam Tim .....	II-136
Grafik 2.98	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Lam Tim.....	II-137
Grafik 2.99	Capaian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur .....	II-139
Grafik 2.100	Status Indeks Desa Membangun Kab. Lampung Timur Tahun 2023 .....	II-140
Grafik 2.101	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Timur .....	II-141
Grafik 2.102	Perkembangan Desa Layak Anak Kabupaten Lampung Timur .....	II-142
Grafik 2.103	Jumlah Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Kab. Lam Tim .....	II-144
Grafik 2.104	Penilaian SAKIP Kabupaten Lampung Timur.....	II-146
Grafik 2.105	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur.....	II-147
Grafik 2.106	Penilaian Ombudsman Kabupaten Lampung Timur .....	II-148
Grafik 2.107	Skor Survei Penilaian Integritas Kabupaten Lampung Timur.....	II-149
Grafik 2.108	Piramida Proyeksi Kelompok Umur Penduduk Tahun 2022-2030.....	II-159
Grafik 2.109	Piramida Proyeksi Kelompok Umur Penduduk Tahun 2035-2045.....	II-160
Grafik 2.110	Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak Kabupaten Lampung Timur.....	II-161
Grafik 2.111	Proyeksi Timbulan Sampah (ton).....	II-166



**Perda Kab Lam Tim  
Nomor 08 Tahun 2024  
tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Way Kambas National Park

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah penyusunan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan. Tema pembangunan ini mencerminkan arah dan fokus pembangunan yang akan dijalankan dalam jangka panjang. Sehingga RPJPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2045 mencerminkan komitmen dan upaya daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dokumen RPJPD 2025-2045 nantinya akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

---

*Perda RPJPD Kab. Lam Tim 2025-2045*

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus tahun 2024.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan penyusunan, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJPD. Pada tahap persiapan penyusunan, telah dibentuk tim penyusun RPJPD yang selanjutnya menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan pembahasan bersama Perangkat Daerah, hasil konsultasi publik, serta hasil kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD, kemudian dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Setelah diberikan rekomendasi, rancangan RPJPD diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD. Hasil Musrenbang RPJPD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi Rancangan Akhir RPJPD. Rancangan Akhir RPJPD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
2. Pendekatan Partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, yang bermaksud bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala pada saat kampanye berpedoman pada RPJPD.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Sedangkan secara substansi RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan menggunakan:

1. Pendekatan Holistik-Tematik, di mana substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan, atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif), dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif, di mana substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan Spasial, di mana substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);

Selain dasar hukum di atas, guna menjamin keselarasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

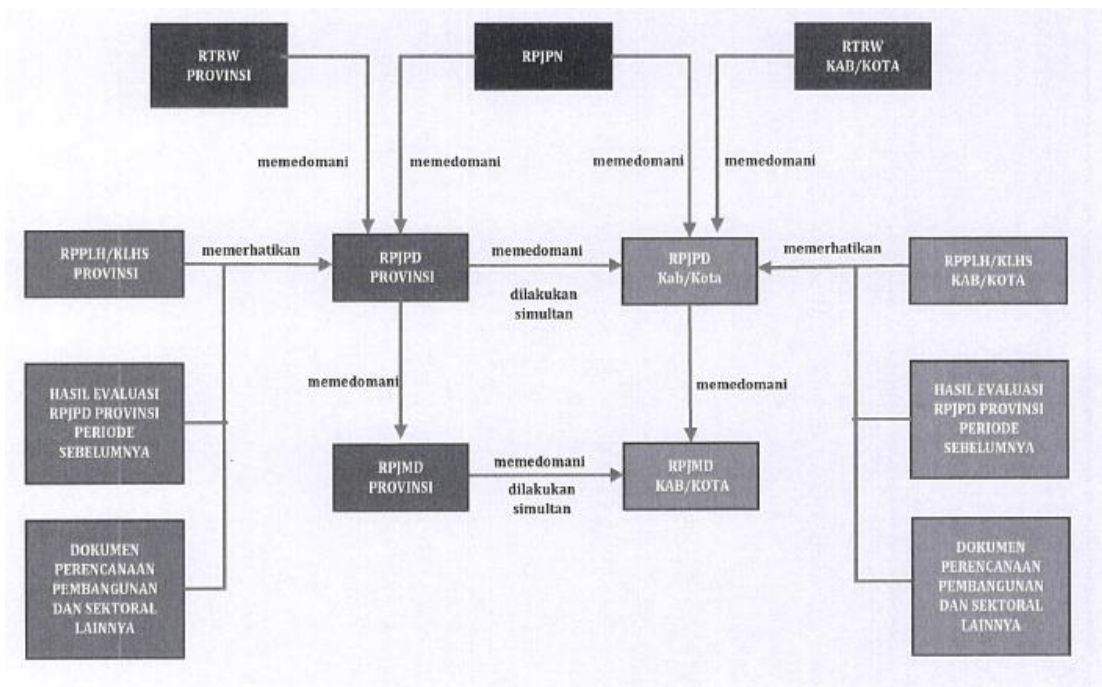
Lebih lanjut, terkait dengan integrasi dokumen rencana jangka panjang daerah dengan kajian lingkungan hidup strategis, dalam penyusunan dokumen ini juga memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/ RPJMD.

### **1.3 Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunannya RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Agar RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJPN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJPD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1  
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



### 1.3.1 RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan sekitarnya. TNWK adalah satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Propinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kawasan TNWK mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha.

TNWK berada pada ketinggian antara 0-50 m dpl dengan topografi datar sampai dengan landai, kawasan ini mempunyai 4 (empat) tipe ekosistem utama yaitu, ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan rawa, ekosistem mangrove, ekosistem hutan pantai. Penciri utama dari keberadaan ekosistem tersebut ditandai dengan formasi vegetasinya. Selain itu terdapat juga tipe-tipe ekosistem peralihan seperti ekosistem riparian. Ekosistem tersebut terbentuk dikarenakan terjadinya perubahan dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Sebagai contoh adalah formasi vegetasi dari daerah darat ke air.

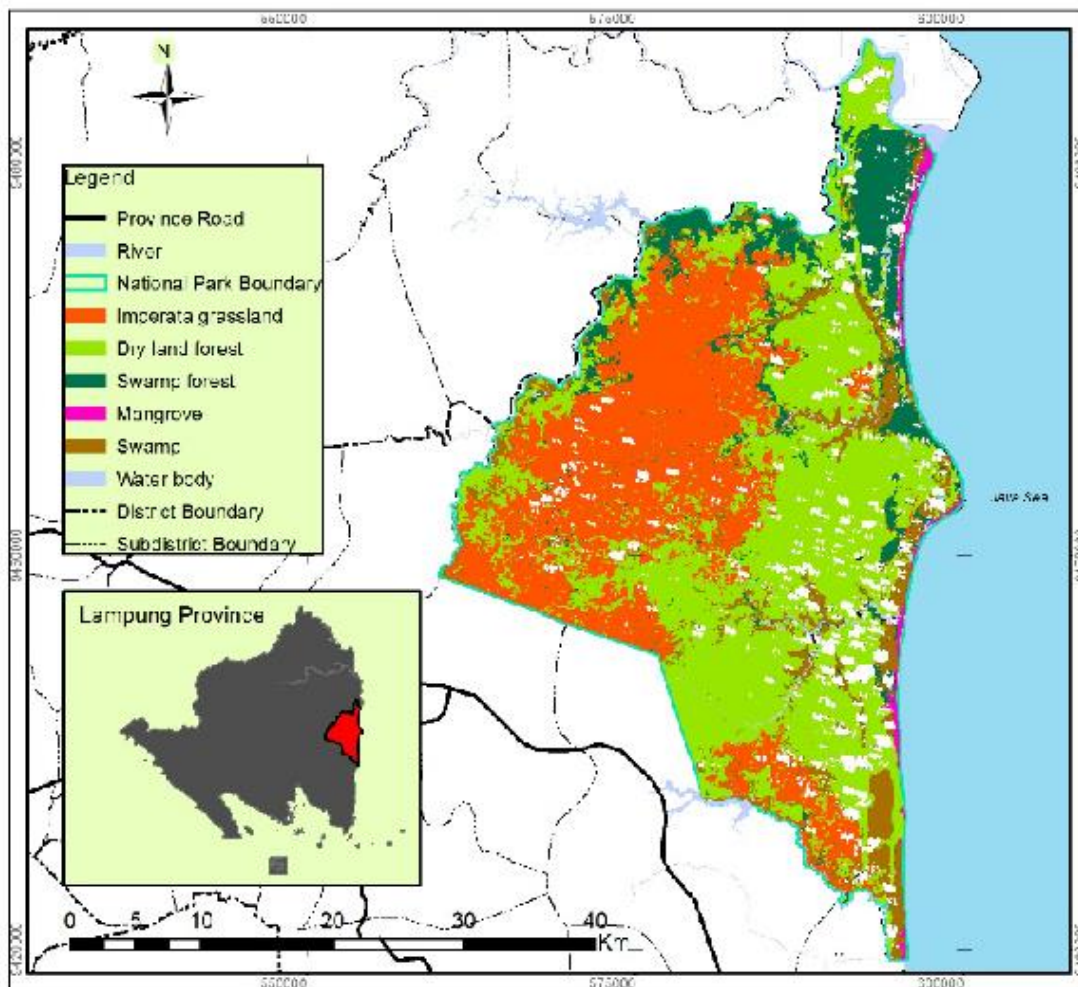
Ekosistem hutan hujan dataran rendah mendominasi di daerah sebelah barat kawasan. Daerah ini terletak pada daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan lain. Jenis yang mendominasi adalah meranti (*Shorea sp*), rengas (*Gluta renghas*), keruing (*Dipterocarpus sp*), puspa (*Schima walichii*) dan banyak jenis lain. Ekosistem tersebut rata-rata mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dengan stratum tajuk yang lengkap, sehingga jenis flora dan faunanya cukup beragam. Ekosistem riparian di way

kambas bukan ekosistem lazim yang telah dikenal selama ini. Ekosistem ini berada pada zona peralihan antara air dan darat, sehingga belum dikategorikan kedalam ekosistem yang ada. Dengan semakin luasnya wilayah atau badan air persatuan tempat, maka kemungkinan semakin besar ekosistem tersebut. Beberapa jenis yang biasa terdapat pada zona peralihan antara lain putat, dan beberapa jenis tanaman merambat/liana.

Selanjutnya, ekosistem hutan pantai di way kambas atau lebih dikenal pantai saja, ini dicirikan dengan kondisi lingkungan yang terletak di dekat laut namun tidak mendapat genangan baik air laut dan tawar. Dengan jenis tanah biasanya didominasi oleh pasir. Ekosistem hutan pantai ini khususnya terletak di sepanjang pantai timur Taman Nasional Way Kambas. Salah satu penciri hutan pantai antara lain ketapang (*Terminalia cattapa*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*). Ekosistem hutan mangrove/payau di way Kambas terletak disekitar pantai dimana terdapat pergantian/salinasi antara air asin dan tawar secara teratur. Umumnya terletak disepanjang pantai timur kawasan TNWK. Ekosistem ini mempunyai peran atau manfaat nyata dalam mendukung sumber kehidupan manusia. Sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi jenis-jenis ikan dan udang laut. Sehingga menjaga tingkat ketersediaan suplai ikan dan biota lainnya. Di sekitar pantai TNWK telah berdiri ratusan bagan yang dipergunakan untuk menangkap cumi, pemasangan jaring untuk menangkap ikan sekitar pantai, dengan demikian hal tersebut merupakan tanda bahwa dengan adanya TNWK memberikan lingkungan laut yang baik sehingga biota laut dapat hidup dengan baik.

Lebih lanjut, pada ekosistem hutan rawa di way kambas menempati daerah sekitar sungai, terutama terletak di wilayah timur kawasan. Ekosistem tersebut terbentuk karena adanya daerah atau wilayah yang tergenang air tawar relatif lama yang dikarenakan wilayah tersebut lebih rendah dari wilayah sekitarnya. Jenis tanah tersebut mempunyai tingkat keasaman yang cukup tinggi, proses dekomposisi relatif lama. Tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Satwa jenis burung lebih suka pada ekosistem hutan rawa. Jenis dominan untuk hutan rawa antara lain *Nepenthes* atau kantung semar, palm merah, pandan dan nibung. Salah satu ciri utama vegetasi rawa mempunyai akar lutut dan tunggang.

Gambar 1.2  
Taman Nasional Way Kambas



Kawasan pelestarian alam yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, rekreasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Indikasi arahan pengembangan kawasan Taman Nasional Way Kambas disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam, ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum, pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam, dan pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan. Program utama yang dapat diarahkan pada kawasan TNWK meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pengembangan destinasi pariwisata daerah. Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam dan cagar budaya antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

### 1.3.2 RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJP Nasional

Penyusunan RPJPD memperhatikan dan mempedomani RPJPN yang telah ditetapkan. Visi Presiden dalam RPJPN 2025-2045, adalah: “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi; dan
3. Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta
8. Kestinambungan Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 5 (lima) sasaran utama yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju  
Peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan PDB kemaritiman berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang  
Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat  
Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI).
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat  
Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*  
Melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK.

Terkait dengan arah pengembangan wilayah, pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat

---

pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan meliputi : (1) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi, (2) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam, (3) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata, (4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

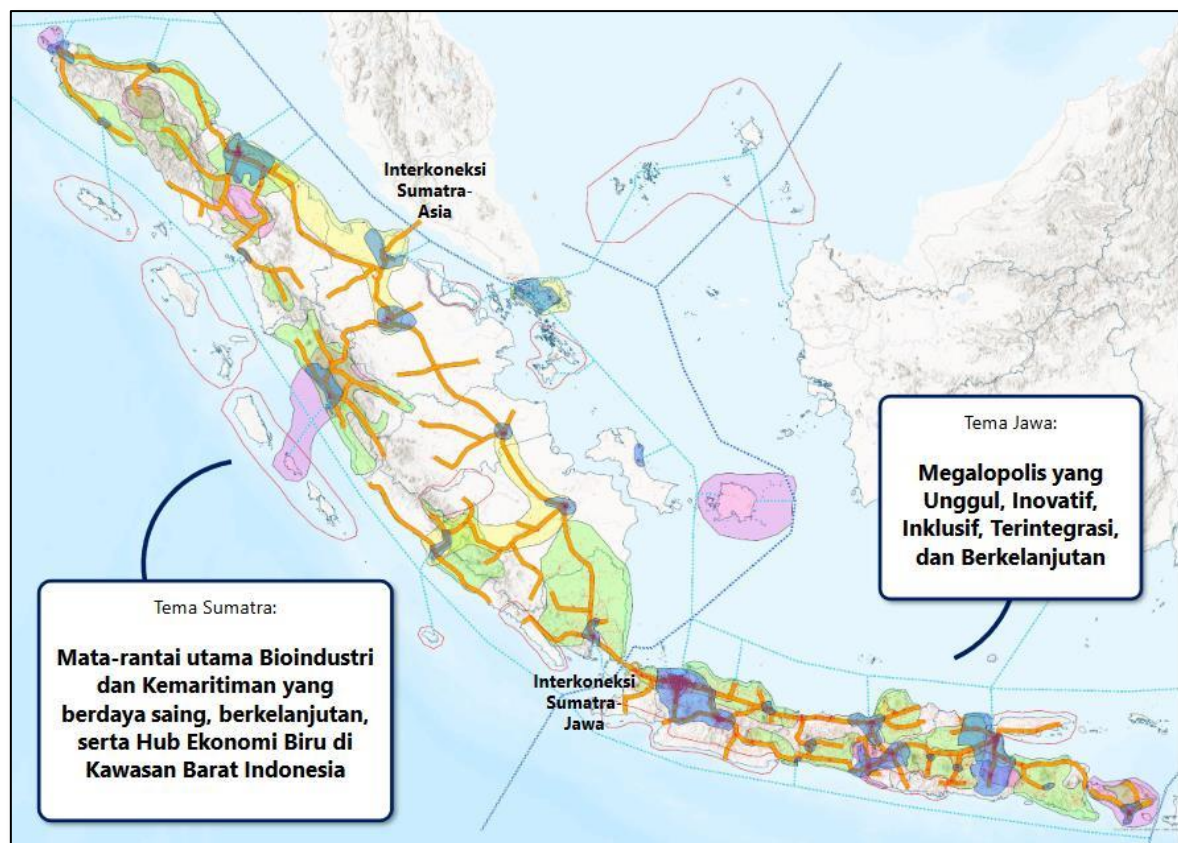
Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pembangunan, diarahkan pada: (1) pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland*, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok, (2) percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN, (3) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, (4) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Wilayah Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya, serta pertambangan dan migas. Secara nasional, 50-70 persen pasokan karet, kopi, dan kelapa sawit berasal dari wilayah Sumatera dan diperkirakan dapat ditingkatkan volume produksinya di masa mendatang. Di sisi lain, produksi tanaman pangan yang tinggi membuat beberapa provinsi di wilayah Sumatera menjadi lumbung pangan nasional. Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22,0 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2045 berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 23,2 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 5,7-6,7 persen per tahun.

Peluang kontribusi ekonomi Wilayah Sumatera bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra (*silk road*) dan silayah ALKI I serta SloC (*Sea Line of Communication*) sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Terdapat beberapa kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengungkit ekonomi baru, seperti kawasan strategis, industri, pertanian-agroindustri, pariwisata, perkotaan, dan kawasan konservasi strategis. Termasuk optimalisasi kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Wilayah Metropolitan (WM), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan ini adalah mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

Untuk mendukung ini, *backward and forward linkage* serta konektivitas untuk efisiensi biaya produksi perlu ditingkatkan. Pusat-pusat pertumbuhan harus lebih diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi melalui upaya peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarnya, serta kereta api, terutama untuk angkutan barang. Sementara itu, pada beberapa wilayah di Sumatera telah diterapkan rintisan *smart city*, *creative financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam optimalisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Gambar 1.3  
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi **“Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun kedepan, pengembangan wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi.
2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan, pengembangan kawasan strategis pertanian

mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian, pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik, dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*.

3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multiinfrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone* yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema kerjasama regional seperti IMT-GT
6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

### 1.3.3 RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan RTRW Provinsi Lampung

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, menetapkan bahwa beberapa perkotaan kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu pusat kegiatan di wilayah kabupaten yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Pusat kegiatan lokal meliputi Perkotaan Sukadana, Perkotaan Way Jepara, dan Perkotaan Labuhan Maringgai.

Penetapan PKL di kawasan Perkotaan Sukadana memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, dan pusat perdagangan dan jasa. Program utama dalam pengembangan kawasan pusat pertumbuhan tersebut meliputi akselerasi perwujudan sistem pusat dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang merupakan kewenangan Provinsi, yang meliputi :

1. Penanganan jalan penghubung lintas tengah dan lintas timur (Gedong Dalam-Batas Kota Sukadana; dan jalan Sukarno-Hatta),
2. Pengembangan jaringan jalur kereta api jalur Kota Metro-Sukadana,
3. Pengembangan jaringan transmisi baru Sukadana-Inc.2 Pi (Sribhawono - Seputih Banyak), dan
4. Pengembangan Gardu Induk baru Sukadana.

Gambar 1.4  
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Sukadana



Selanjutnya, penetapan PKL di kawasan Perkotaan Way Jepara memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura. Rencana pengembangan wilayah meliputi :

1. Penanganan jaringan jalan arteri primer Batas Kabupaten Lampung Tengah-Way Jepara,
2. Penanganan jalan Way Jepara-Way Sekampung Bunut,
3. Pengembangan sistem jaringan Dermaga Bendungan Way Jepara,
4. Pengembangan bendungan Way Jepara, dan
5. Pengembangan jaringan irigasi Way Jepara.

Gambar 1.5  
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Way Jepara



Lebih lanjut, penetapan PKL di kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai memiliki fungsi pusat perikanan, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian. Rencana pengembangan wilayah meliputi pengembangan jaringan jalan strategis provinsi (Jabung-Sp Labuhan Maringgai), pengembangan pelabuhan pengumpan Pelabuhan Labuhan Maringgai, penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung.

Gambar 1.6  
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Labuhan Maringgai



### 1.3.4 RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Provinsi Lampung

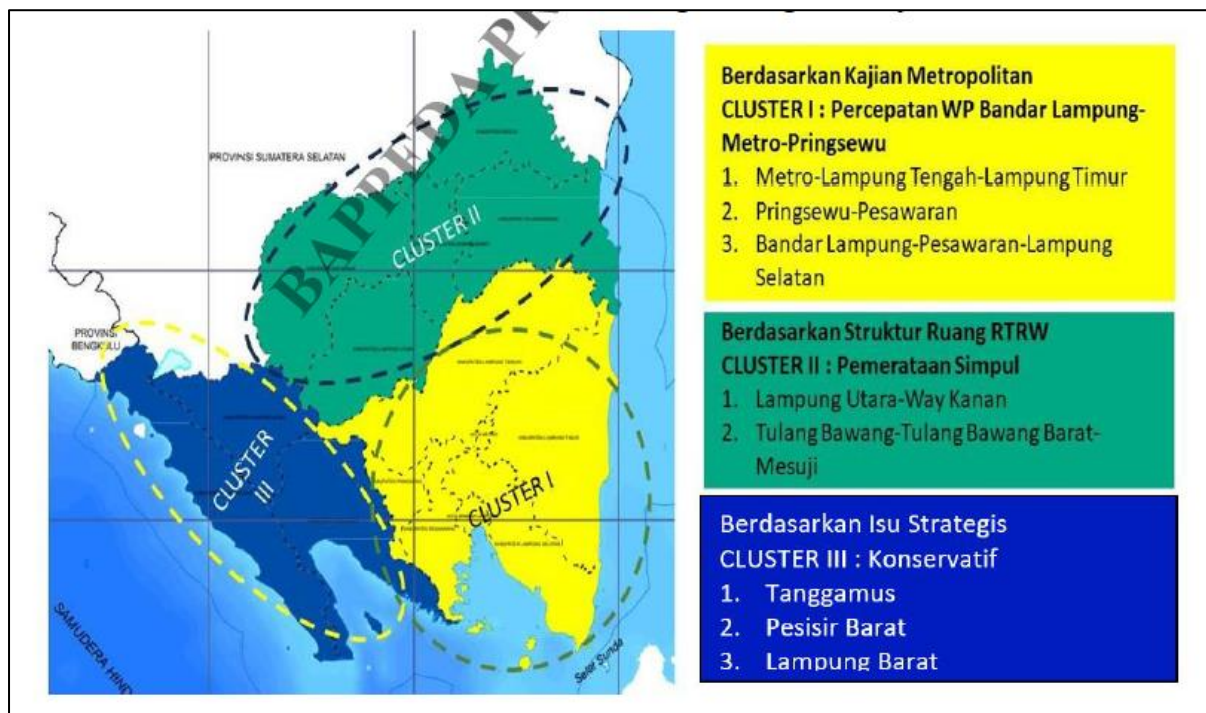
Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Lampung. Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Merujuk pada Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, visi daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan adalah Lampung SMART 2045 : " Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan", yang akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Sosial, dengan sasaran pokok :
  - IE1. Kesehatan untuk Semua
  - IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
  - IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Transformasi Ekonomi, dengan sasaran pokok :
  - IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
  - IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
  - IE6. Transformasi Digital
  - IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
  - IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola, dengan sasaran pokok :
  - IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, dengan sasaran pokok :
  - IE10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah
  - IE11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
  - IE12. Daya Saing Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan sasaran pokok :
  - IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
  - IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
  - IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
  - IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
  - IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

Terkait dengan arahan pengembangan wilayah, merujuk dokumen RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, Pemerintah Provinsi Lampung membagi kabupaten/kota menjadi tiga klaster wilayah pengembangan, yang meliputi :

1. Klaster I, dengan Wilayah Pengembangan (WP) :
  - a. Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur
  - b. Pringsewu – Pesawaran
  - c. Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan
2. Klaster II, dengan Wilayah Pengembangan (WP) :
  - a. Lampung Utara – Way Kanan
  - b. Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat - Mesuji
3. Klaster III, dengan Wilayah Pengembangan (WP)
  - a. Tanggamus – Pesisir Barat – Lampung Barat

Gambar 1.7  
Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung



Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah Perkotaan Bandar Lampung :

1. Pendorong pertumbuhan wilayah metropolitan Lampung Raya dimana Kota Bandar Lampung sebagai PKN dan wilayah-wilayah hinterlandnya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera.
3. Pemantapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai interkoneksi antar Pulau.
4. Pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan pembangunan sarana prasarana lainnya.

5. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
6. Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan simpul utama di Sumatera di provinsi Lampung simpul domestik (Dumai Riau-Panjang Lampung).
7. Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.
8. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (*smart grid*).
9. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan Pringsewu-Pesawaran-Bandar Lampung- Lampung Tengah-Lampung Timur-Lampung Selatan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung jika dilihat dari arahan pola ruangnya WP I yang ditetapkan berdasarkan kajian kawasan metropolitan berdasarkan pusat kegiatan memberikan arahan pembangunan berupa :

1. Mengendalikan pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional Kota Bandar Lampung, melalui pemantapan Metropolitan Lampung Raya sebagai PKN dan kawasan hinterlandnya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandar Lampung mencakup Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
3. Memantapkan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung pada kawasan Kota Baru Lampung.
4. Perwujudan *Coastal City*
5. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.
6. Rehabilitasi pengamananan, rehabilitasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (*stress*) WS Seputih Sekampung

### **1.3.5 RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031**

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, ditetapkan bahwa kawasan strategis dan cepat tumbuh, sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, meliputi :

1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. kawasan Gunung Balak yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung;
- b. jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti;
- c. kawasan hutan kota di Kecamatan Sukadana.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup tersebut meliputi: penetapan Gunung Balak sebagai kawasan lindung yang berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung; penetapan jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti; dan penetapan hutan kota di Kecamatan Sukadana.

2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
  - a. kawasan minapolitan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti;
  - b. kawasan pembibitan dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan;
  - c. kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
  - d. kawasan perdagangan, jasa dan agroindustri di Perkotaan Sekampung Udik.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi tersebut meliputi: pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan di Kecamatan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti; pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan, pemantapan, pembibitan tanaman hortikultura dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan; pengembangan dan pemantapan kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan minapolitan, kawasan agrobisnis dan kawasan industri.

3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya adalah Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik.

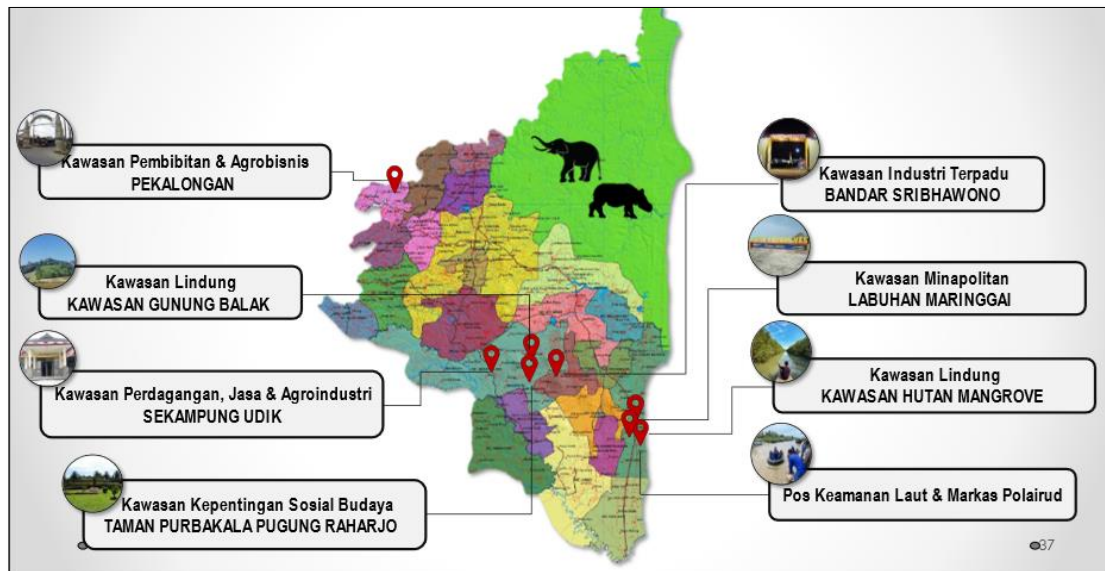
Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya tersebut meliputi: penetapan Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik sebagai kawasan strategis; perlindungan terhadap lingkungan di kawasan sekitar Taman Purbakala Pugung Raharjo; dan penyusunan rencana rinci untuk kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo.

4. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi:
  - a. pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;
  - b. markas polisi air dan udara di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan

c. Kodim di Kecamatan Sukadana.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi: pembangunan pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai; penetapan markas polisi air di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan penetapan markas Kodim di Kecamatan Sukadana.

Gambar 1.8  
Kawasan Strategis Kabupaten



### 1.3.6 RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah pembangunan wilayah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan aspek krusial yang menilai dampak lingkungan dari kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam RPJPD.

KLHS menjadi landasan penting yang harus diperhatikan secara serius. KLHS mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan yang diusulkan dalam RPJPD. Ini termasuk analisis dampak terhadap lahan, air, udara, serta flora dan fauna lokal. Selain itu, KLHS juga memberikan saran-saran tentang upaya mitigasi dan kompensasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJPD. Dengan demikian, KLHS bukan hanya menjadi perangkat penilaian, tetapi juga panduan bagi pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa pembangunan wilayah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil dari KLHS akan memandu proses perencanaan untuk meminimalkan risiko negatif terhadap lingkungan, dan memastikan bahwa pembangunan yang diusulkan berada dalam batas-batas yang dapat diterima secara ekologis.

Dalam mendukung Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD, Keementrian Dalam Negeri RI telah menerbitkan Surat Nomor 660/5112/Bangda dan 660/5113/Bangda perihal arahan penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan Surat Nomor 660.11.2/8754/Bangda dan 660.11.2/8755/Bangda perihal pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, dimana salah satu amanat dalam surat tersebut agar seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan setiap progres penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1 Maksud**

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk memberikan arah strategis dan panduan bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang. RPJPD Kabupaten Lampung Timur menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Lampung Timur, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

##### **1.4.2 Tujuan**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 memiliki tujuan yaitu:

1. Memberikan arah pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Lampung yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan riil di Kabupaten Lampung Timur.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
3. Memberikan acuan dasar bagi penyusunan RPJMD dan RKPD di Kabupaten Lampung Timur.
4. Memberikan koridor bagi Kepala Daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program kerja dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, terdiri dari:

---

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan gambaran kondisi yang mendasari penyusunan dokumen RPJPD, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, serta memberikan penjelasan singkat mengenai keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJPD 2005-2025, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kabupaten Lampung Timur dalam pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar utama dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

**BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Bab ini memuat uraian visi dan misi Kabupaten Lampung Timur yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Lampung Timur selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang mencakup keterhubungan antara arah kebijakan dengan sasaran pokok dan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.



**Perda Kab Lam Tim**  
**Nomor 08 Tahun 2024**  
**tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KONDISI DAERAH**



Situs Purbakala  
Pugung Raharjo

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu ***Bumei Tuwah Bepadan***, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Kabupaten

Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Lampung Timur hampir mencapai tahun akhir periode, dan telah dilakukan evaluasi. Evaluasi RPJPD merupakan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur. Evaluasi RPJPD bertujuan untuk memberikan gambaran atau refleksi yang komprehensif mengenai pencapaian, hambatan, dan rekomendasi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 memuat visi : **Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang dilaksanakan meliputi:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan sosial antarmasyarakat. Pengurangan kesenjangan sosial diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata serta kesempatan kerja yang sama sehingga dapat mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian akses yang adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan upaya membangun, mengembangkan dan memperkuat perekonomian Lampung Timur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.

Ekonomi berbasis agro terus dipertahankan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi yang berdaya saing.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Misi ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang melalui transparansi pemerintahan yang didukung oleh akuntabilitas dan profesionalitas personil serta efesiensi dan efektifitas kelembagaan. Melalui dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang sinergis, terpadu, dan harmonis sehingga berdampak pada peningkatan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara otonom.

3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan prasarana dan sarana daerah melingkupi transportasi, pengairan, energi listrik, dan telekomunikasi. Perwujudan misi ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi upaya perwujudan daya saing Kabupaten Lampung Timur khususnya dan serta daya saing Provinsi Lampung dan nasional pada umumnya melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pendidikan berkualitas disemua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang adil, bersih dan berwibawa serta didukung oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dan sebagai bagian dari perwujudan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

6. Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Misi ini merupakan upaya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama disemua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya.

7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam (lahan, air, hutan, dan mineral) secara keberlanjutan sehingga seluruh aktivitas pembangunan tidak berdampak negatif pada kelestarian dan keasrian lingkungan hidup. Destruktivitas lingkungan pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas lingkungan yang tidak sehat dan dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan misi ini akan sangat tergantung dari komitmen politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan

yang mengikat serta peranserta seluruh masyarakat yang ada sehingga keterpaduan seluruh sektor merupakan prasyarat bagi lingkungan yang asri dan lestari.

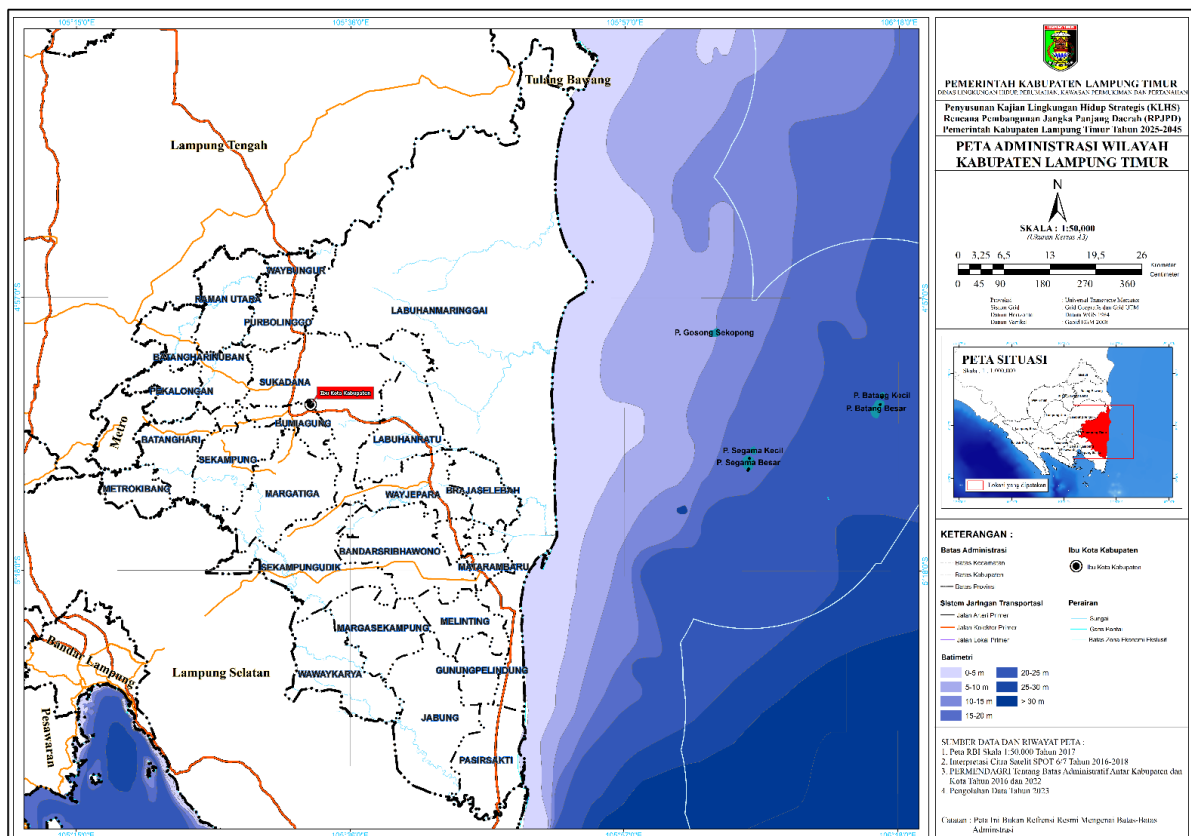
## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Aspek Geografi

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105°15' BT-106°20'BT dan 4°37'LS -5°37' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 3.860,92 km<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Data Wilayah Administrasi, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Permendagri No. 111 Tahun 2016; Permendagri No. 10 Tahun 2022; Permendagri No. 11 Tahun 2022; dan Permendagri No. 12 Tahun 2022

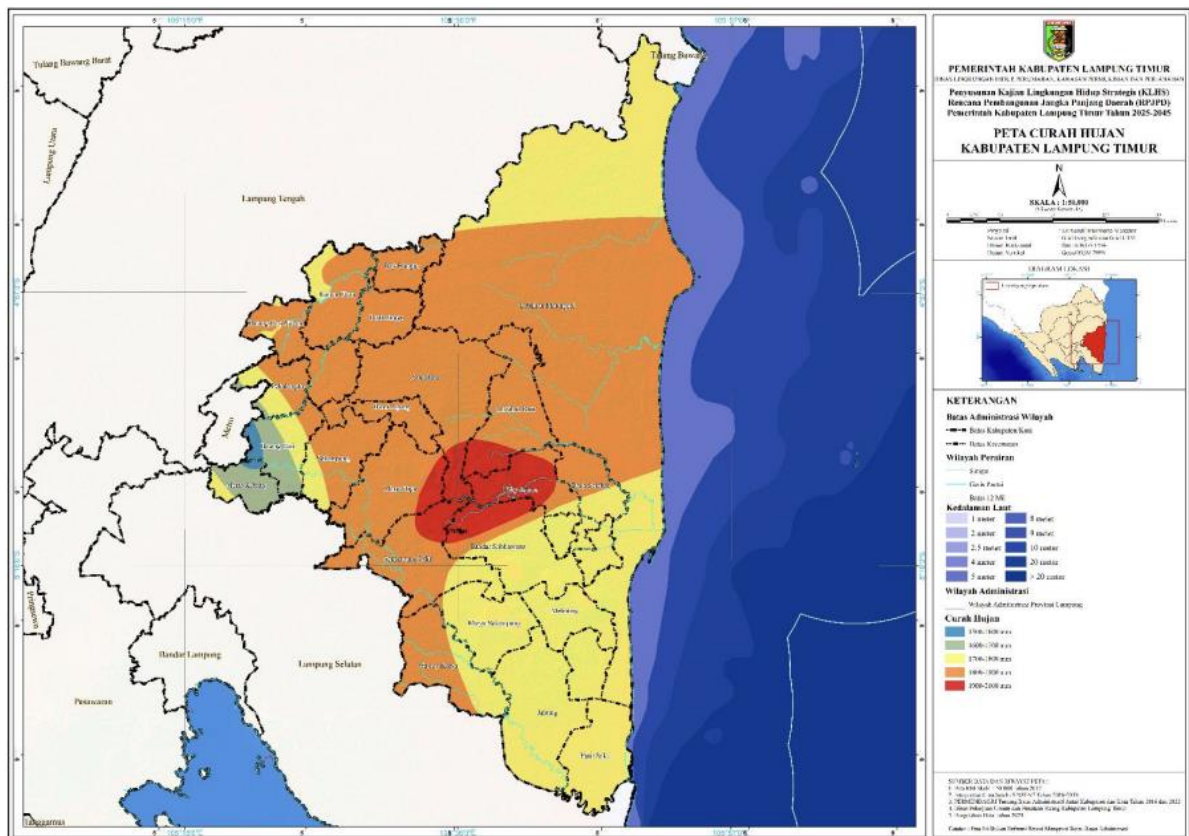
Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- a. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- b. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 2.1.1.1 Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 26,7°C dan kelembaban udara rata-rata 82,76 persen selama satu tahun.

Gambar 2.2  
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

Tabel 2.1  
Rata-Rata Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur

Bulan	Rata-Rata Curah Hujan						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	161,6	419,4	294,6	311,6	535,6	265	600,5
Februari	305,2	509,8	519,8	235,5	291,4	383	174,8
Maret	316,2	334	336,6	355,9	226,0	184	249,6
April	262,8	184,4	212,8	171,6	211,8	142	168,5
Mei	126,8	134,6	169,2	76,1	299,6	146	153,1
Juni	98,4	113	113,0	58,8	212,6	159	175,1
Juli	103,2	59,8	18,2	69,0	129,2	68	80,4
Agustus	78,2	67,2	16,4	22,1	130,8	93	298,1
September	211,6	72,2	125,2	0,0	108,4	252	169,9
Oktober	261	117,8	35,2	25,8	68,2	76	168,4
November	206,8	189	121,4	43,1	102,6	270	145,4
Desember	201	218,6	119,8	226,2	288,2	383	117

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023 (diolah)

Data Awal: 2016

#### 2.1.1.2 Hidrologi

##### a. Sungai

Di Kabupaten Lampung Timur dilalui 2 (dua) sungai utama yaitu Way Sekampung dan Way Seputih dengan anak sungai yang tersebar. Kabupaten Lampung Timur merupakan penerima, sedangkan hulu sungai berada di kabupaten lain. Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih-Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. SWS Seputih-Sekampung sendiri terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), 3 (tiga) DAS masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu: DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Jepara-Kambas, dan 1 (satu) DAS Bandar Lampung-Kalianda.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 kilometer, untuk Lampung Timur sebesar 174 km, dengan lebar antara 3,7-21 m, dengan jumlah anak sungai sebanyak 22 aliran anak sungai.

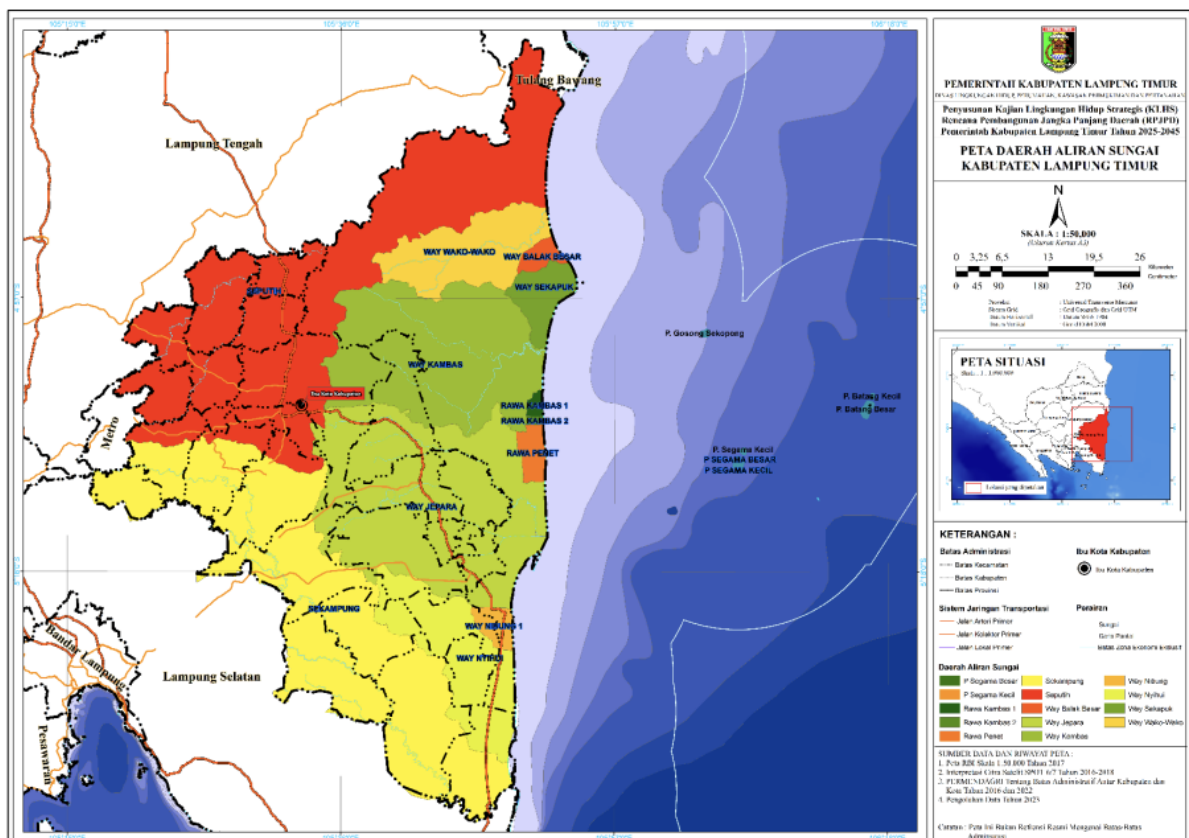
Way Sekampung merupakan salah satu sungai terpanjang di provinsi Lampung, dengan panjang dari hulu sampai ke hilir 174 km. Way Sekampung mempunyai

karakteristik fisik bentuk sungai berkelok- kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang anak sungai sebanyak 22 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memiliki lebar berkisar 50-60 m, kedalaman bervariasi 3,2–4,5 m, kecepatan aliran rata- rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 m, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 128 m.

DAS Sungai Way Seputih seluas 1.296,29 km<sup>2</sup>, debit rata-rata minimal tahunan 3,78 m<sup>3</sup>/detik dan volume air tahunannya 119,206 juta m<sup>3</sup>. Panjang Way Seputih di bagian Lampung Timur berkisar 15,5 km, dengan 36 aliran anak sungai. DAS Way Seputih diapit oleh dua sungai utama yakni; Way Pengubuan dan Way Pegadungan. Untuk Way Pegadungan, sebagian besar memisahkan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

Secara administratif DAS Way Seputih di bagian hulu terletak di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Padang Ratu. Di bagian hilir, Way Seputih termasuk dalam kecamatan Way Bungur Lampung Timur, setempat dikenal dengan daerah cabang, sebagai muara sungai way seputih yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang.

Gambar 2.3  
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Timur, 2023 (diolah)

---

**b. Danau**

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa

**c. Rawa**

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah di sekitarnya menjadi tergenang air jika topografi di sekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara, dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting, dan Gunung Pelindung.

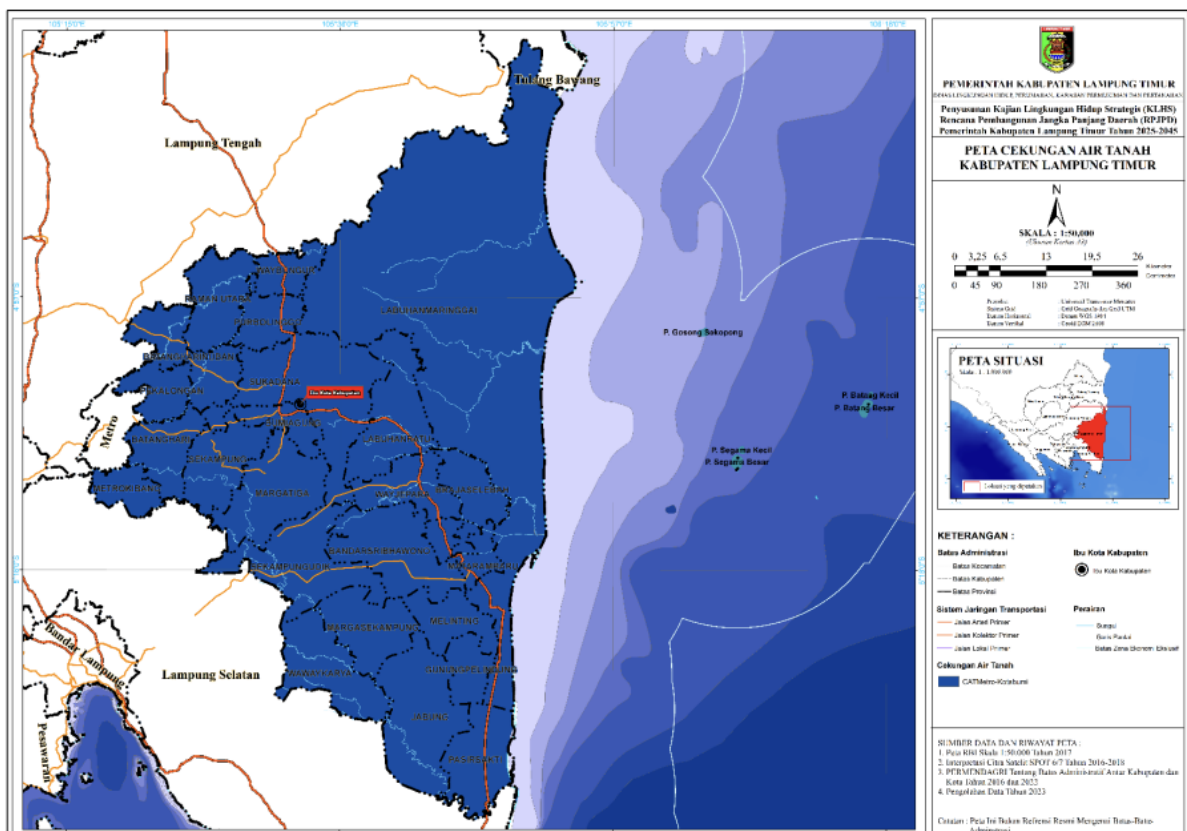
Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

## d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), di mana sungai mudah tercemar. Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuan ini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 m dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 m. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Gambar 2.4  
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPKHTL Wilayah XX, 2023 (diolah)

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20-30 m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8-14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7-13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada

daerah elevasi ini berkisar antara 0,7-3 m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 m dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8-7 m, dengan muka air tanah bebas (TKA/ *static water level*) berkisar antara 0,2-4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

### 2.1.1.3 Topografi

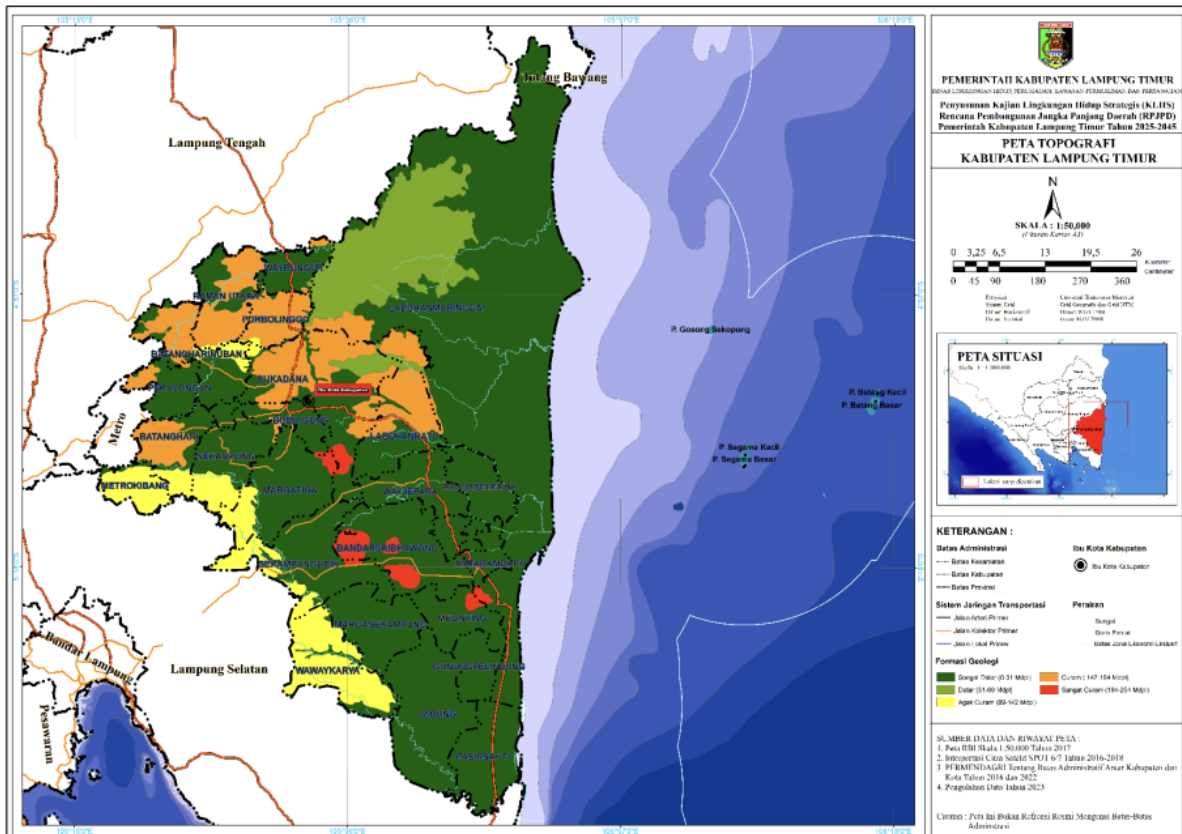
Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas kelerengan datar, berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Sebagian besar daerah di Kabupaten Lampung Timur memiliki topografi datar dan berombak. Topografi datar mencapai luasan 100.546,09 Ha atau 25,47% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Timur. Wilayah dengan kelerengan sebagian besar dataran mencakup Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Purbolinggo, Pekalongan, dan Batanghari, sedangkan topografi berombak mencapai luasan 124.468,23 Ha atau mencapai 31,53%. Wilayah dengan kelerengan sebagian besar berombak meliputi Kecamatan Sukadana, Labuhan Ratu, Metro Kibang, Marga Sekampung, dan Way Jepara. Wilayah dengan topografi bergelombang terdapat di kecamatan Bandar Sribawono, Melinting dan Waway Karya. Luasan total wilayah dengan kelerengan bergelombang mencapai 47.407,67 Ha atau 12,01% dari luasan wilayah Kabupaten Lampung Timur. Topografi ini tersebar di beberapa kecamatan antara lain Bumi Agung, Sukadana, Sekampung Udik, Bandar Sribawono, Marga Sekampung, Melinting, dan Jabung. Berikut ini adalah rincian kelerengan lahan beserta luasnya di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.2  
Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

No.	Topologi	
	Morfologi	Luas (Ha)
1	Sangat Datar (0 – 31 Mdpl)	272.165,37
2	Datar (31 – 89 Mdpl)	32.198,82
3	Agak Curam (89 – 142 Mdpl)	29.615,58
4	Curam (142 – 194 Mdpl)	45.863,99
5	Sangat Curam (194 – 254 Mdpl)	5.969,00

Sumber: DEM Nasional, 2023

Gambar 2.5  
Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DEM Nasional, 2023

#### 2.1.1.4 Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter. Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.3  
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Batuan Kuarter	
(Qal)	Alluvium: bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, dan lempung
(Qbs)	Basalt Sukadana: basalt berongga
(Qak)	Pasir Kuarsa: pasir kuarsa halus
(Qs)	Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman
Batuan Tersier	
(Qpt)	Formasi Terbanggi: batu pasir dengan sisipan batu lempung
(Qty)	Formasi Lampung: tuffa berbatu apung, tuffa riolitik

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Tabel 2.4  
Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur

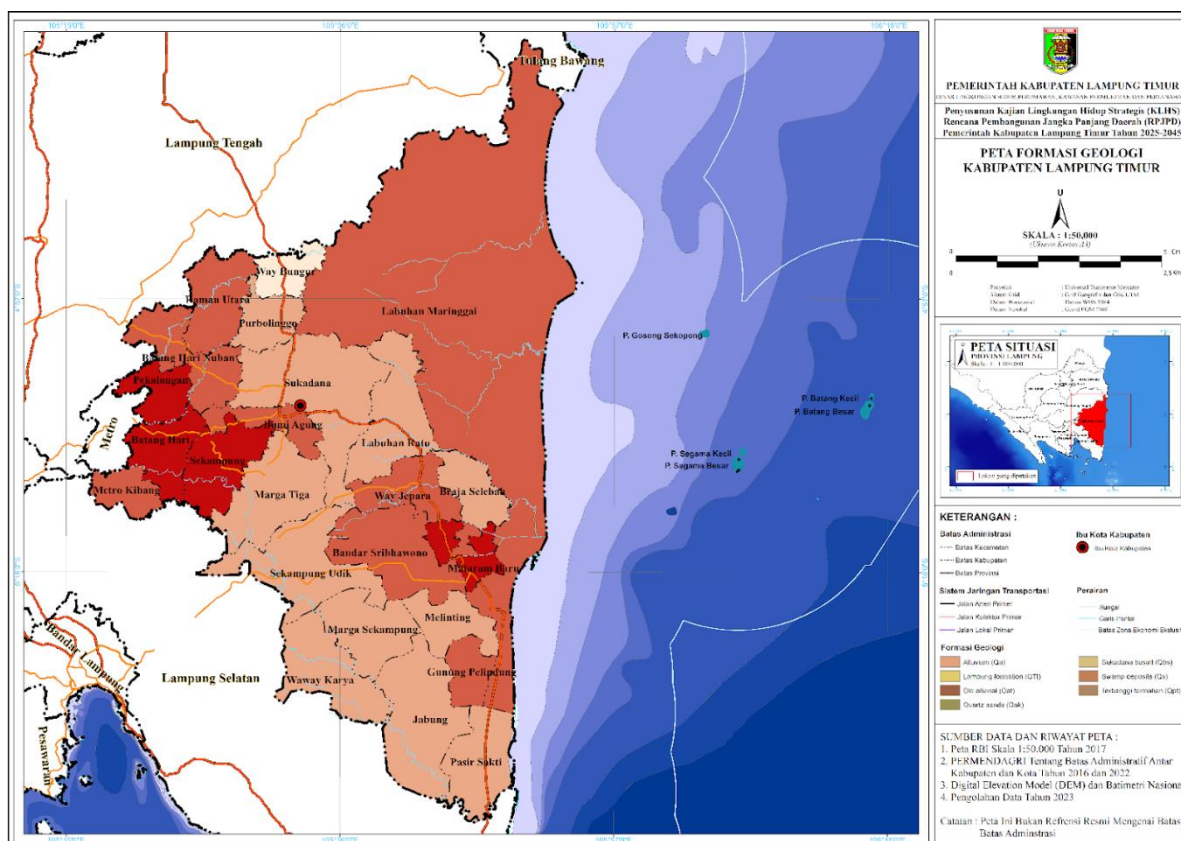
No	Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Alluvium (Qal)	47,694.95
2	Lampung formation (Qty)	100,277.14
3	Old alluvial (Qat)	107.69
4	Quartz sands (Qak)	1,204.95
5	Sukadana basalt (Qbs)	89,492.36
6	Swamp deposits (Qs)	25,755.48
7	Terbanggi formation (Qpt)	121,280.20

Sumber: Peta RBI, 2023

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan litologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

- Endapan permukaan (alluvium) terdiri dari dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
- Batuan gunung api (formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
- Batuan sedimen (formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Sebagian besar terdapat di utara didominasi di Kecamatan Way Bungur (37.638 Ha) dan sedikit di selatan.
- Batuan beku (basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

Gambar 2.6  
Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Peta RBI, 2023

### 2.1.1.5 Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning seluas 238.976,87 Ha. Kemudian jenis tanah yang paling sedikit dijumpai di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu jenis tanah organosol seluas 2.466,12 Ha. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

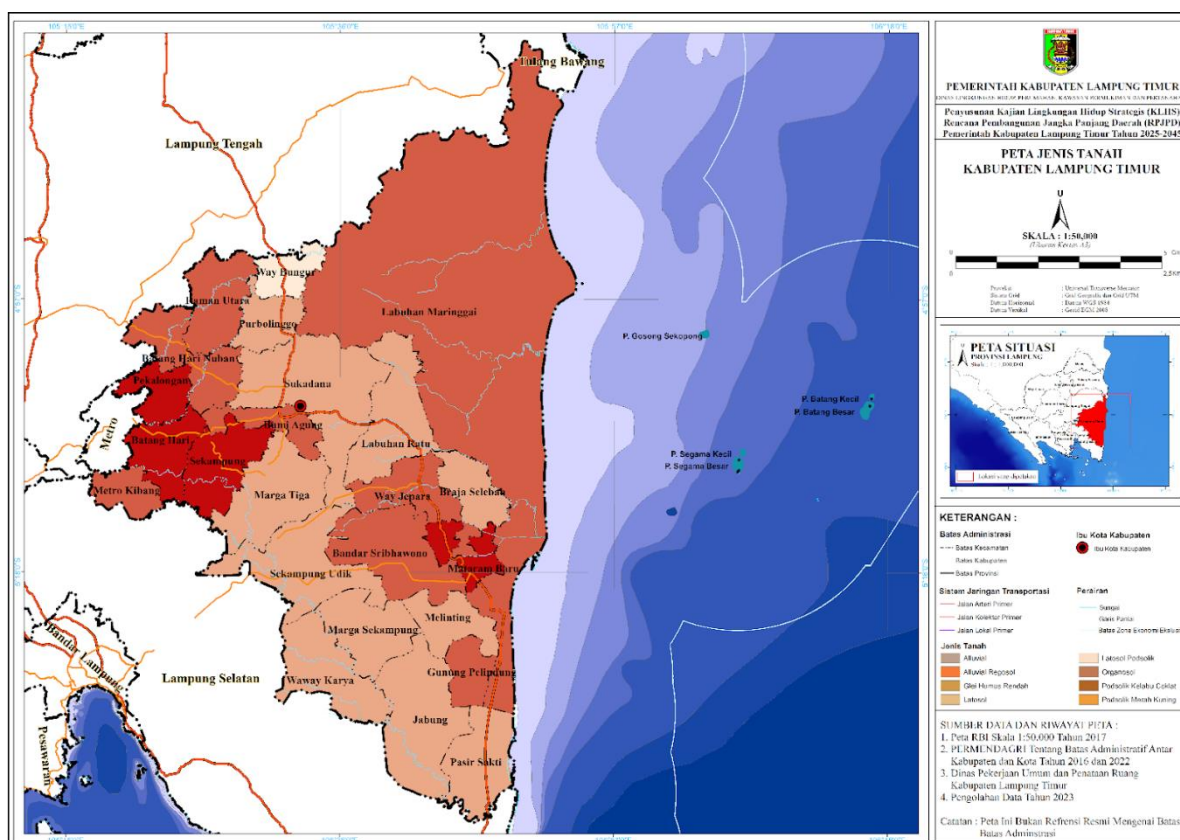
Tabel 2.5  
Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	16,290.71
2	Alluvial Regosol	26,534.57
3	Glei Humus Rendah	24,450.62
4	Latosol	32,829.78
5	Latosol Podsolik	11,513.36
6	Organosol	2,466.12
7	Podsolik Kelabu Coklat	33,618.35
8	Podsolik Merah Kuning	238,976.87

Sumber: Peta RBI, 2023

Dari kedelapan jenis tanah tersebut, jenis tanah yang paling banyak ditemui di Kabupaten Lampung Timur adalah jenis tanah podsolik merah kuning dengan luasan seluas 238.976,86 Ha. Kendala dari jenis tanah podsolik merah kuning ini yaitu tingkat kemasaman rendah, sehingga fosfor salah satu hara penting bagi tumbuhan tidak tersedia bagi akar untuk diserap. Selain itu kendala lainnya adalah tingginya kandungan aluminum terlarut, kandungan ini bersifat racun bagi banyak tanaman. Oleh karena itu, jenis tanah podsol ini dikenal bermasalah untuk digunakan dalam budidaya tanaman. Namun, banyak tanaman pohon yang tidak terlalu terkendala atau terpengaruh oleh kondisi ini karena membentuk lapisan humus pada permukaannya.

Gambar 2.7  
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Peta RBI, 2023

Klasifikasi kemampuan lahan (land capability classification) merupakan penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut:

- Kelas 1 : Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat digunakan untuk segala macam aktivitas.
- Kelas 2 : Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 3 : Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian.

- Kelas 4 : Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan peternakan.
- Kelas 5 : Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung aktivitasnya yang relatif besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan tingginya tingkat kestabilan lereng, ketersediaan air yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selehah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukkan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukkan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosivitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktivitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktivitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Waway Karya, dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut di antaranya

tingkat erosititas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam di antaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kestabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktivitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah Kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selebah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relatif curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

#### **2.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana**

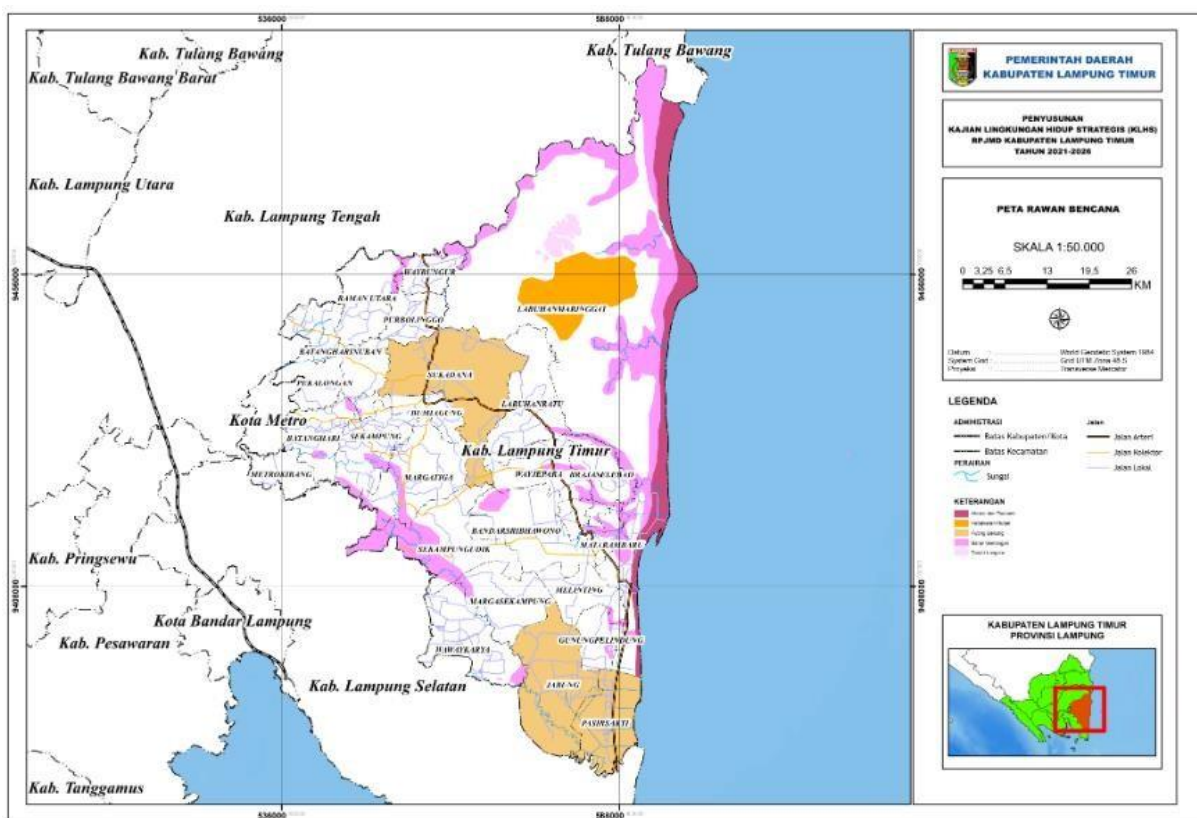
Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam di antaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

Tabel 2.6  
Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha)

No.	Bencana	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Cuaca Ekstrim	141.380,045	1.296,505	97.893,737	64.616,046	83.982,131
2	Banjir	83.065,406	7.336,809	2.827,995	7.193,852	11.431,895
3	Tanah Longsor	360,743	58,616	-	-	-
4	Abrasi & Gelombang Ekstrim	977,546	1.654,859	78,623	279,528	34,225
5	Gempa Bumi	141.545,882	87.235,912	45.534,960	111.692,732	3.157,949
6	Kekeringan	112.582,637	109.731,836	71.854,473	55.975,963	39.043,059
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	44.489,270	831,210	40.066,528	13.707,351	35.428,164
8	Multi Risiko	379.637,575	3.942,764	334,998	2.468,810	2.783,287

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.8  
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berikut Kawasan Rawan Bencana, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, meliputi:

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
2. Kawasan Rawan Abrasi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
3. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung terdapat di Kecamatan Sukadana, Jabung, dan Pasir Sakti.

4. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan terdapat di Kecamatan Way Bungur, Purbolinggo, Raman Utara, Sukadana, Bumi Agung, Sekampung, Batanghari, Margatiga, Labuhan Ratu, Way Jepara, Braja Selebah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, dan Sekampung Udik.
5. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan terdapat di Taman Nasional Way Kambas.
6. Kawasan Rawan Gelombang Tinggi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Segama Besar, Segama Kecil, Gosong Sekopong, Batang Besar, dan Batang Kecil.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2022), Lampung Timur berada di posisi 32 daerah yang berisiko untuk multi ancaman dengan skor sebesar 183,20 atau berkategori tinggi. Indeks risiko bencana banjir berkategori tinggi dengan skor 36, indeks risiko bencana gempa bumi berkategori tinggi dengan skor 21,6, indeks risiko bencana tsunami berkategori tinggi dengan skor 16, indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana tanah longsor berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana gelombang tinggi dan abrasi berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana kekeringan berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana cuaca ekstrim berkategori tinggi dengan skor 13,6.

Tabel 2.7  
Bencana yang Terjadi di Kabupaten Lampung Timur

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabung</li> <li>Batanghari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Pasir Sakti</li> <li>Way Bungur</li> <li>Mataram Baru</li> <li>Bumi Agung</li> <li>Jabung</li> <li>Sukadana</li> <li>Marga Sekampung</li> <li>Sekampung Udik</li> <li>Batanghari</li> <li>Margatiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Bumi Agung</li> <li>Raman Utara</li> <li>Sukadana</li> <li>Way Bungur</li> <li>Batanghari</li> <li>Margatiga</li> <li>Jabung</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Way Jepara</li> <li>Sukadana</li> <li>Batanghari Nuban</li> <li>Way Bungur</li> <li>Labuhan Maringgai</li> </ul>
2	Angin Puting Beliung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sukadana</li> <li>Way Jepara</li> <li>Pasir Sakti</li> <li>Raman Utara</li> <li>Way Bungur</li> <li>Sekampung Udik</li> <li>Sukaraja Tiga</li> <li>Margatiga</li> <li>Bumi Agung</li> <li>Pekalongan</li> <li>Batanghari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasir Sakti</li> <li>Pekalongan</li> <li>Way Bungur</li> <li>Purbolinggo</li> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Margatiga</li> <li>Labuhan Ratu</li> <li>Way Jepara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labuhan Maringgai</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Way Jepara</li> <li>Braja Selebah</li> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Sekampung</li> <li>Sukadana</li> <li>Batanghari Nuban</li> </ul>
3	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekalongan</li> <li>Batanghari Nuban</li> <li>Margatiga</li> <li>Bumi Agung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Way Jepara</li> <li>Margatiga</li> <li>Sukadana</li> <li>Batanghari Nuban</li> <li>Sekampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batanghari</li> <li>Sukadana</li> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Sekampung</li> <li>Mataram Baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Sekampung</li> <li>Bumi Tinggi</li> <li>Margatiga</li> <li>Way Bungur</li> <li>Pekalongan</li> <li>Sukadana</li> <li>Pasir Sakti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasir Sakti</li> <li>Way Jepara</li> <li>Labuhan Ratu</li> <li>Batanghari</li> <li>Sribawono</li> </ul>

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Batanghari Nuban</li> <li>Gunung Pelindung</li> <li>Labuan Ratu</li> <li>Pasir Sakti</li> <li>Way Jepara</li> </ul>	
4	Pohon Tumbang	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rajabasa</li> <li>Sekampung</li> </ul>
5	Orang Tenggelam	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Way Jepara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labuhan Maringgai</li> <li>Labuhan Ratu</li> </ul>
6	Keracunan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Margatiga</li> </ul>	-	-	-	-
7	Tersambar Petir	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Braja Selebah</li> <li>Gunung Pelindung</li> </ul>	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2021

Data Awal: 2016

Data Termutakhir: 2020

Berdasarkan data InaRISK BNPB, berikut merupakan luasan risiko bencana di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

Tabel 2.8  
Luas Risiko Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Cuaca Ekstrem	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	141.380,045
2	Rendah	1.296,505
3	Sedang	97.893,737
4	Tinggi	64.616,046
5	Sangat Tinggi	83.982,131

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori sangat rendah. Kategori cuaca ekstrem sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 141.380,045 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori rendah seluas 1.296,505 Ha. Berikut kategori tingkat risiko per kecamatan, sebagai berikut.

Tabel 2.9  
Luas Risiko Cuaca Ekstrem per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Bandar Sribhawono	Sangat Rendah	607.19
	Rendah	71.74
	Sedang	10919.34
	Tinggi	476.12
	Sangat Tinggi	4351.74
Batang Hari	Rendah	1.00
	Sedang	1708.92
	Tinggi	1483.81
	Sangat Tinggi	5425.10

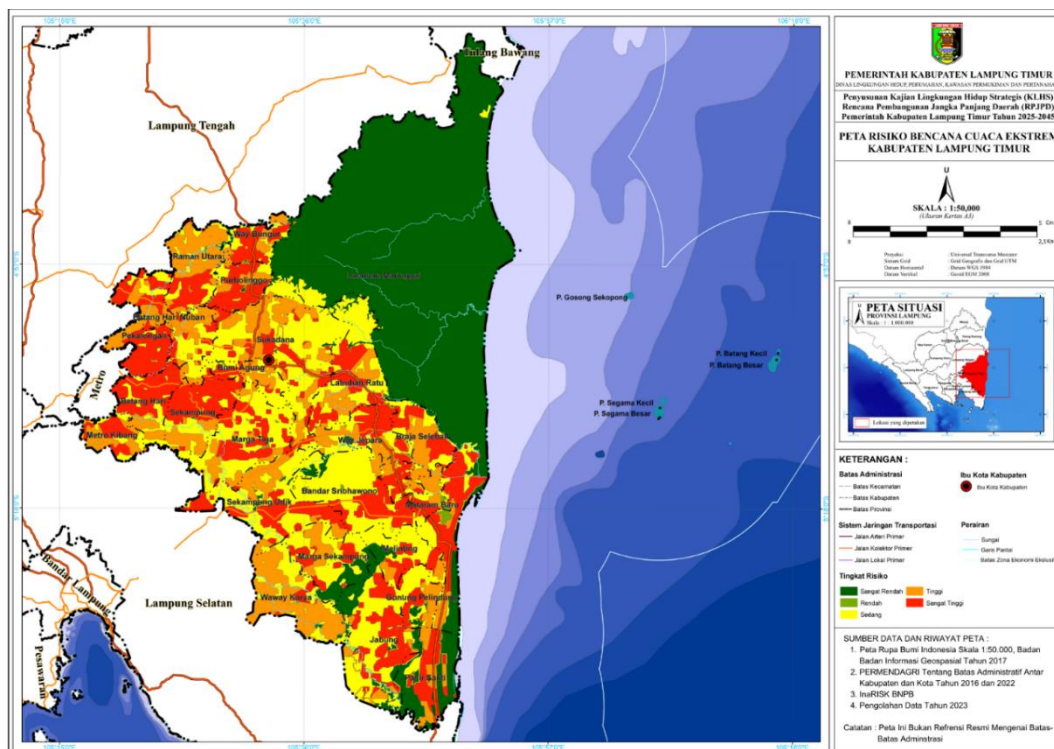
Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Batang Hari Nuban	Sangat Rendah	21.75
	Rendah	22.36
	Sedang	3375.59
	Tinggi	4199.80
	Sangat Tinggi	3901.77
Braja Selehah	Sangat Rendah	240.21
	Rendah	7.79
	Sedang	1853.92
	Tinggi	2291.68
	Sangat Tinggi	2467.24
Bumi Agung	Sangat Rendah	18.66
	Rendah	1.28
	Sedang	2895.42
	Tinggi	1917.02
	Sangat Tinggi	986.12
Gunung Pelindung	Sangat Rendah	391.06
	Rendah	41.26
	Sedang	1973.92
	Tinggi	1461.97
	Sangat Tinggi	1328.74
Jabung	Sangat Rendah	3005.95
	Rendah	111.86
	Sedang	8903.85
	Tinggi	1231.42
	Sangat Tinggi	6065.85
Labuhan Maringgai	Sangat Rendah	126195.83
	Sangat Rendah	1.03
	Rendah	327.10
	Sedang	4753.98
	Sedang	1.03
	Tinggi	1687.99
	Sangat Tinggi	5528.18
Labuhan Ratu	Sangat Rendah	758.28
	Sedang	7206.71
	Tinggi	2808.01
	Sangat Tinggi	4255.75
Marga Sekampung	Sangat Rendah	2411.14
	Rendah	48.37
	Sedang	4603.16
	Tinggi	1979.68
	Sangat Tinggi	2016.12
Marga Tiga	Rendah	69.90
	Sedang	8150.71
	Tinggi	2565.21

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	4693.70
Mataram Baru	Rendah	143.29
	Sedang	1162.38
	Tinggi	1938.21
	Sangat Tinggi	2344.51
Melinting	Sangat Rendah	707.05
	Rendah	13.45
	Sedang	3946.82
	Tinggi	926.24
	Sangat Tinggi	1860.62
Metro Kibang	Rendah	7.51
	Sedang	1317.15
	Tinggi	1915.74
	Sangat Tinggi	1946.06
Pasir Sakti	Sangat Rendah	5400.88
	Rendah	98.14
	Sedang	770.81
	Tinggi	1938.50
	Sangat Tinggi	3325.63
Pekalongan	Sangat Rendah	17.05
	Rendah	17.93
	Sedang	224.66
	Tinggi	1363.57
	Sangat Tinggi	4553.98
Purbolinggo	Sangat Rendah	91.93
	Rendah	55.94
	Sedang	997.80
	Tinggi	1500.08
	Sangat Tinggi	3770.18
Raman Utara	Sangat Rendah	159.57
	Rendah	23.32
	Sedang	2075.06
	Tinggi	5745.38
	Sangat Tinggi	2735.34
Sekampung	Sangat Rendah	15.16
	Sedang	2449.01
	Tinggi	2324.90
	Sangat Tinggi	6093.17
Sekampung Udik	Sangat Rendah	208.43
	Rendah	33.40
	Sedang	8004.36
	Tinggi	3624.27
	Sangat Tinggi	5544.52
Sukadana	Sangat Rendah	124.18

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Rendah	15.05
	Sedang	13110.88
	Tinggi	7783.84
	Sangat Tinggi	3812.76
Waway Karya	Sangat Rendah	178.86
	Rendah	67.05
	Sedang	3537.04
	Tinggi	8854.20
	Sangat Tinggi	690.88
Way Bungur	Sangat Rendah	254.58
	Rendah	18.31
	Sedang	1094.02
	Tinggi	1160.36
	Sangat Tinggi	2687.89
Way Jepara	Sangat Rendah	208.71
	Rendah	100.45
	Sedang	2858.13
	Tinggi	3437.85
	Sangat Tinggi	3596.22

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.9  
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Risiko bencana berikutnya adalah banjir. Luas risiko bencana banjir di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10  
Luas Risiko Banjir Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Banjir	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	83.065,406
2	Rendah	7.336,809
3	Sedang	2.827,995
4	Tinggi	7.193,852
5	Sangat Tinggi	11.431,895

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko banjir di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori sangat rendah. Kategori banjir sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 83.065,406 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 2.827,995 Ha. Berikut kategori tingkat risiko per kecamatan, sebagai berikut.

Tabel 2.11  
Luas Risiko Banjir per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Bandar Sribhawono	Sangat Rendah	2514.31
	Rendah	21.37
	Sedang	2.64
	Tinggi	22.99
	Sangat Tinggi	24.49
Batang Hari	Sangat Rendah	2342.16
	Rendah	91.70
	Sedang	24.32
	Tinggi	87.15
	Sangat Tinggi	132.22
Batang Hari Nuban	Sangat Rendah	2513.69
	Rendah	65.55
	Sedang	26.60
	Tinggi	71.12
	Sangat Tinggi	61.07
Braja Selehah	Sangat Rendah	2122.00
	Rendah	103.91
	Sedang	29.22
	Tinggi	77.16
	Sangat Tinggi	108.07
Bumi Agung	Sangat Rendah	621.00
	Rendah	45.22
	Sedang	29.97
	Tinggi	34.59
	Sangat Tinggi	38.40
Gunung Pelindung	Sangat Rendah	1060.99
	Rendah	24.07

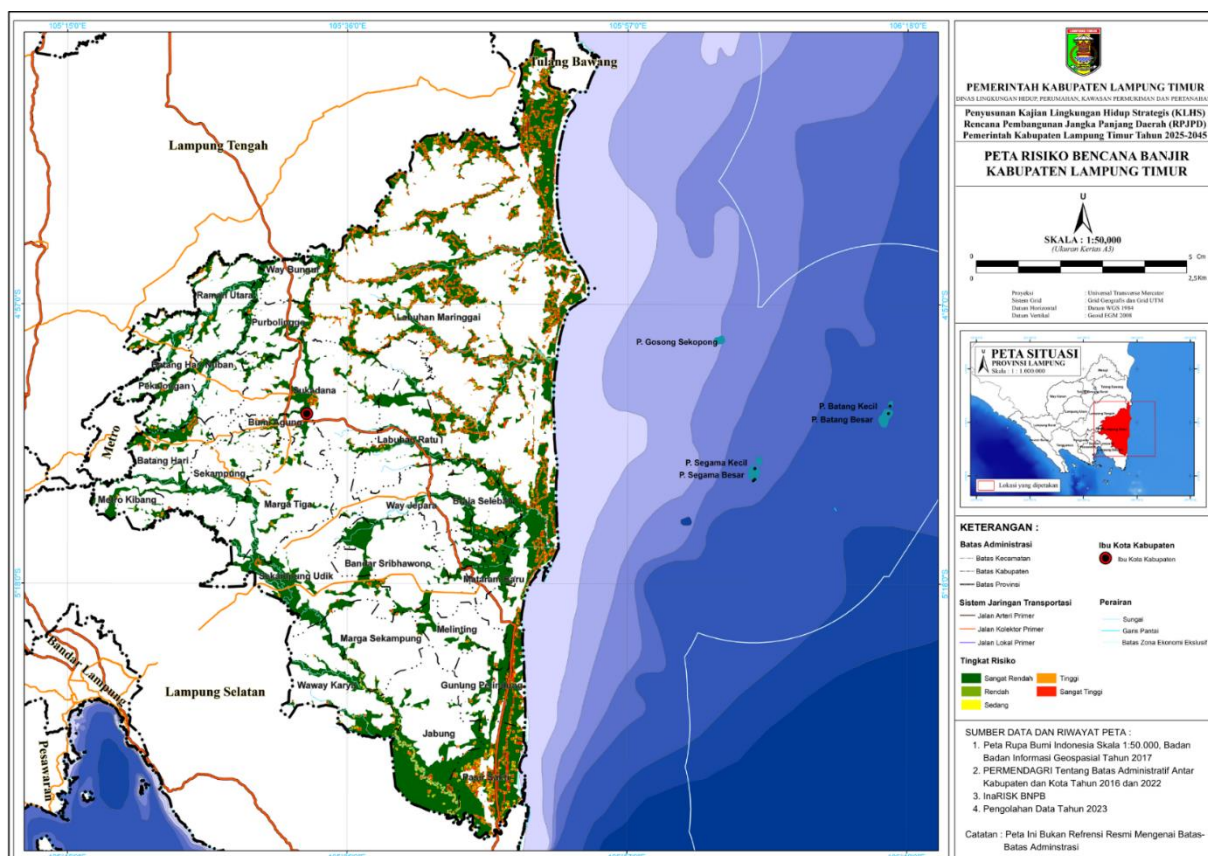
Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sedang	13.57
	Tinggi	24.47
	Sangat Tinggi	34.50
Jabung	Sangat Rendah	6827.99
	Rendah	444.20
	Sedang	299.13
	Tinggi	275.43
	Sangat Tinggi	121.28
Labuhan Maringgai	Sangat Rendah	29077.66
	Rendah	4915.66
	Sedang	1573.22
	Tinggi	4962.10
	Sangat Tinggi	8899.71
Labuhan Ratu	Sangat Rendah	2653.84
	Rendah	66.64
	Sedang	44.99
	Tinggi	62.60
	Sangat Tinggi	118.50
Marga Sekampung	Sangat Rendah	564.87
	Rendah	56.82
	Sedang	37.45
	Tinggi	42.67
	Sangat Tinggi	29.76
Marga Tiga	Sangat Rendah	1832.44
	Rendah	54.18
	Sedang	29.95
	Tinggi	47.58
	Sangat Tinggi	43.96
Mataram Baru	Sangat Rendah	1884.22
	Rendah	55.32
	Sedang	26.60
	Tinggi	61.72
	Sangat Tinggi	54.87
Melinting	Sangat Rendah	1431.82
	Rendah	30.16
	Sedang	10.14
	Tinggi	26.94
	Sangat Tinggi	22.61
Metro Kibang	Sangat Rendah	1041.11
	Rendah	25.96
	Sedang	10.99
	Tinggi	20.97
	Sangat Tinggi	17.62
Pasir Sakti	Sangat Rendah	6240.64

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Rendah	776.51
	Sedang	386.30
	Tinggi	835.29
	Sangat Tinggi	1175.26
Pekalongan	Sangat Rendah	1367.83
	Rendah	21.66
	Sedang	15.37
	Tinggi	20.41
	Sangat Tinggi	19.40
Purbolinggo	Sangat Rendah	1666.17
	Rendah	42.15
	Sedang	22.80
	Tinggi	49.15
	Sangat Tinggi	46.54
	Sangat Rendah	0.00
Raman Utara	Sangat Rendah	2418.89
	Rendah	54.93
	Sedang	37.27
	Tinggi	57.93
	Sangat Tinggi	61.62
	Sangat Rendah	0.00
Sekampung	Sangat Rendah	1281.92
	Rendah	16.63
	Sedang	10.63
	Tinggi	17.66
	Sangat Tinggi	15.94
Sekampung Udik	Sangat Rendah	4608.95
	Rendah	73.31
	Sedang	33.88
	Tinggi	71.15
	Sangat Tinggi	85.75
Sukadana	Sangat Rendah	2925.54
	Rendah	141.68
	Sedang	48.94
	Tinggi	162.78
	Sangat Tinggi	200.35
Waway Karya	Sangat Rendah	3130.56
	Rendah	151.19
	Sedang	91.30
	Tinggi	110.47
	Sangat Tinggi	69.06
Way Bungur	Sangat Rendah	1142.25
	Rendah	43.36
	Sedang	14.68

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Way Jepara	Tinggi	33.05
	Sangat Tinggi	31.06
	Sangat Rendah	1794.54
	Rendah	14.62
	Sedang	8.03
	Tinggi	18.45
	Sangat Tinggi	19.82

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.10  
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah tanah longsor. Luas risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

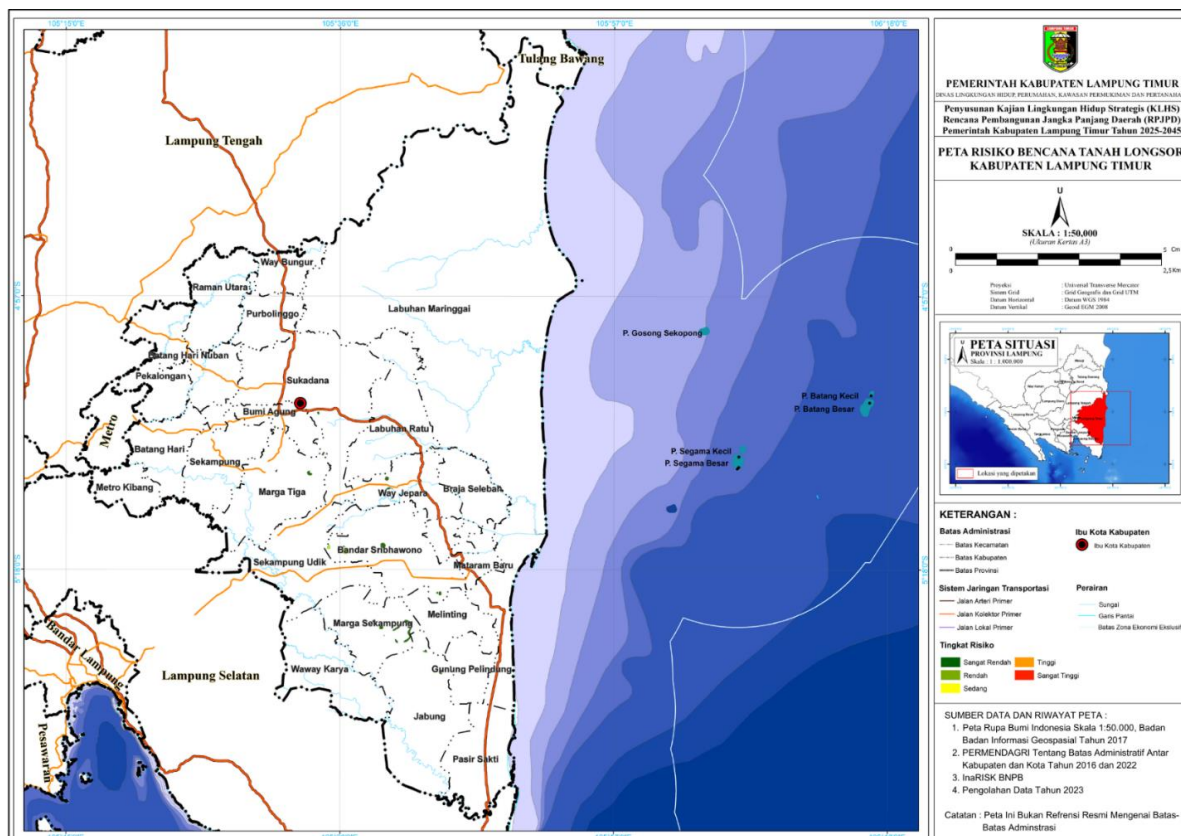
Tabel 2.12  
Luas Risiko Tanah Longsor Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Tanah Longsor	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	360,743
2	Rendah	58,616

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko tanah longsor di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori sangat rendah. Kategori tanah longsor sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 360,743 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 58,616 Ha.

Gambar 2.11  
Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

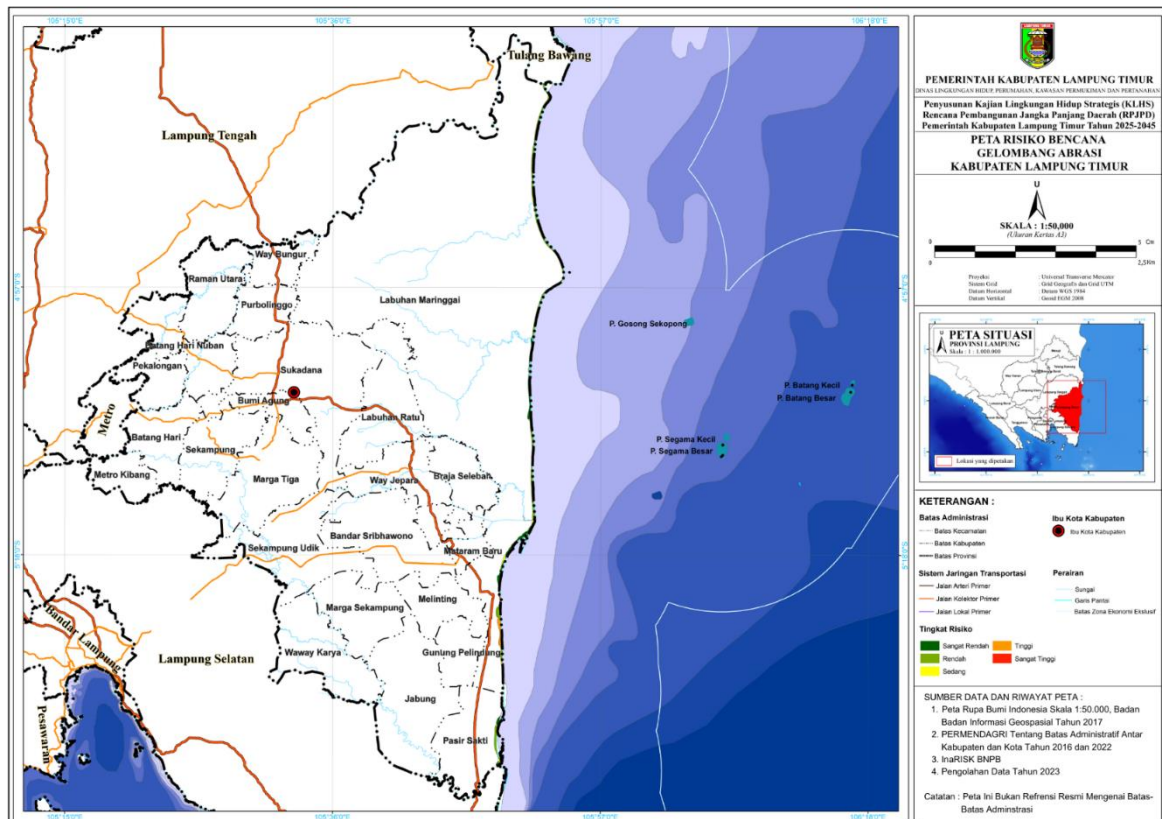
Tabel 2.13  
Luas Risiko Tanah Longsor per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Bandar Sribhawono	Sangat Rendah	41.44
	Rendah	58.52
	Sangat Rendah	23.43
	Rendah	0.10
Jabung	Sangat Rendah	30.17
Marga Sekampung	Sangat Rendah	179.37
Marga Tiga	Sangat Rendah	38.56
Sukadana	Sangat Rendah	12.60
Way Jepara	Sangat Rendah	37.93

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah abrasi dan gelombang ekstrim. Risiko bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada peta dan tabel di bawah ini.

Gambar 2.12  
Peta Risiko Bencana Abrasi dan Gelombang Ekstrim Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Tabel 2.14  
Luas Risiko Abrasi dan Gelombang Ekstrim Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Abrasi dan Gelombang Ekstrim	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	977,546
2	Rendah	1.654,859
3	Sedang	78,623
4	Tinggi	279,528
5	Sangat Tinggi	34,225

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Tabel 2.15  
Luas Risiko Abrasi dan Gelombang Ekstrim per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Labuhan Maringgai	Sangat Rendah	743.99
	Rendah	1406.27
	Sedang	68.98
	Tinggi	216.32
	Sangat Tinggi	29.14
Pasir Sakti	Sangat Rendah	130.00
	Rendah	161.43
	Sedang	9.64

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori rendah. Kategori abrasi dan gelombang ekstrim rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 1.654,859 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sangat tinggi seluas 34,225 Ha. Risiko abrasi dan gelombang ekstrim tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan Labuhan Maringgai.

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah gempa bumi. Luas risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16  
Luas Risiko Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Gempa Bumi	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	141.545,882
2	Rendah	87.235,912
3	Sedang	45.534,960
4	Tinggi	111.692,732
5	Sangat Tinggi	3.157,949

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori rendah. Kategori gempa bumi sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 141.545,882 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sangat tinggi seluas 3.157,949 Ha. Berikut kategori tingkat risiko per kecamatan, sebagai berikut.

Tabel 2.17  
Luas Risiko Gempa Bumi per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Bandar Sribhawono	Sangat Rendah	612.11
	Rendah	10032.48
	Sedang	1296.93
	Tinggi	4372.79
	Sangat Tinggi	111.82
Batang Hari	Rendah	1714.67
	Sedang	1278.48
	Tinggi	5579.34
	Sangat Tinggi	46.34
Batang Hari Nuban	Sangat Rendah	131.57
	Rendah	3306.52
	Sedang	2369.18
	Tinggi	5706.56
	Sangat Tinggi	7.44
Braja Selehah	Sangat Rendah	249.58
	Rendah	1432.32

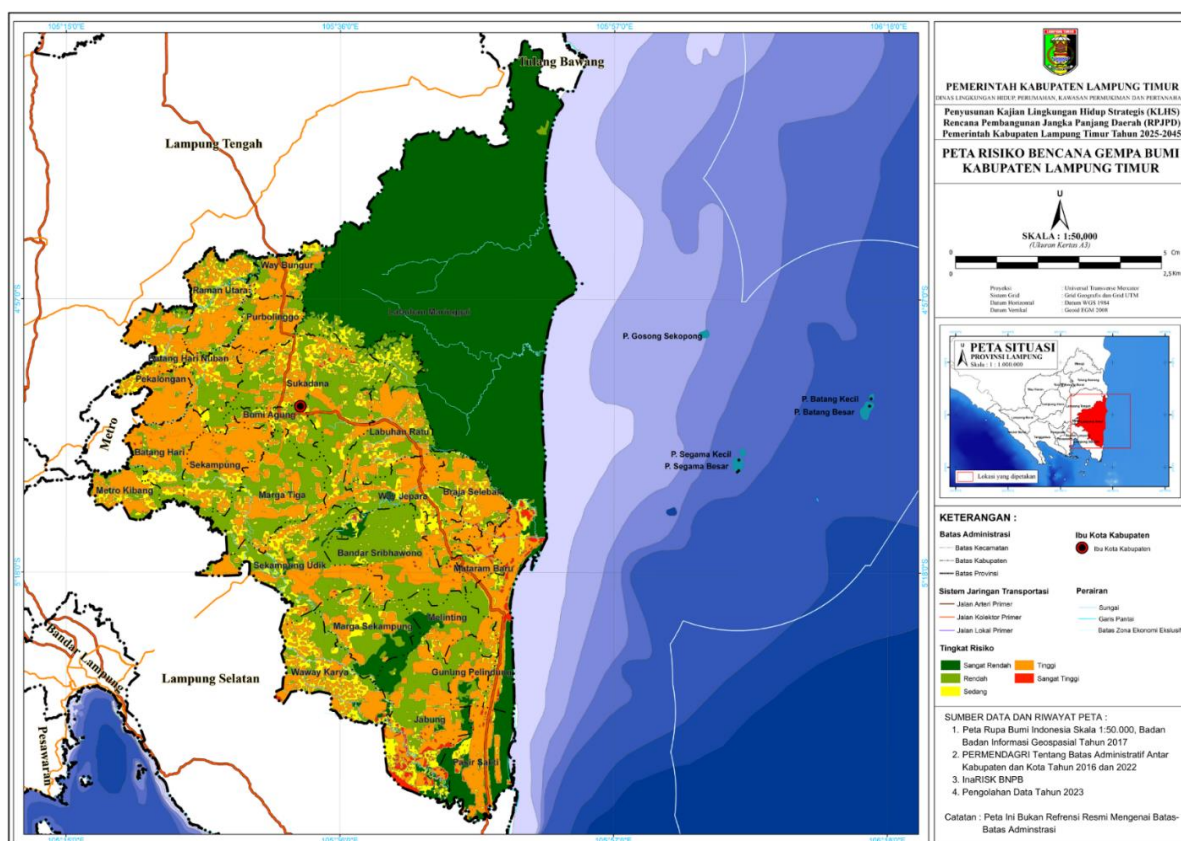
Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sedang	1518.23
	Tinggi	3609.45
	Sangat Tinggi	51.26
Bumi Agung	Sangat Rendah	20.72
	Rendah	3074.50
	Sedang	1295.77
	Tinggi	1425.78
	Sangat Tinggi	1.73
Gunung Pelindung	Sangat Rendah	433.10
	Rendah	1960.70
	Sedang	236.17
	Tinggi	2547.98
	Sangat Tinggi	18.99
Jabung	Sangat Rendah	3088.28
	Rendah	5208.27
	Sedang	2919.74
	Tinggi	6872.06
	Sangat Tinggi	1230.57
Labuhan Maringgai	Sangat Rendah	126147.49
	Rendah	3179.78
	Sedang	2051.95
	Tinggi	6169.11
	Sangat Tinggi	945.77
Labuhan Ratu	Sangat Rendah	755.68
	Rendah	6287.61
	Sedang	2800.77
	Tinggi	5184.69
Marga Sekampung	Sangat Rendah	2418.52
	Rendah	4707.19
	Sedang	1651.18
	Tinggi	2280.89
	Sangat Tinggi	0.69
Marga Tiga	Rendah	8349.92
	Sedang	2205.09
	Tinggi	4922.20
	Sangat Tinggi	2.32
Mataram Baru	Rendah	851.51
	Sedang	922.14
	Tinggi	3690.41
	Sangat Tinggi	124.33
Melinting	Sangat Rendah	720.05
	Rendah	3813.10
	Sedang	547.13
	Tinggi	2367.78

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	6.12
Metro Kibang	Rendah	1311.12
	Sedang	1160.53
	Tinggi	2711.82
	Sangat Tinggi	2.98
Pasir Sakti	Sangat Rendah	5091.90
	Rendah	347.99
	Sedang	962.79
	Tinggi	4869.49
	Sangat Tinggi	261.79
Pekalongan	Sangat Rendah	10.60
	Rendah	229.71
	Sedang	799.40
	Tinggi	5119.96
	Sangat Tinggi	17.53
Purbolinggo	Sangat Rendah	99.80
	Rendah	1047.90
	Sedang	807.38
	Tinggi	4447.92
	Sangat Tinggi	12.93
Raman Utara	Sangat Rendah	310.19
	Rendah	1917.05
	Sedang	2908.05
	Tinggi	5597.40
	Sangat Tinggi	5.98
Sekampung	Sangat Rendah	16.34
	Rendah	2349.00
	Sedang	1719.25
	Tinggi	6785.10
	Sangat Tinggi	12.55
Sekampung Udik	Sangat Rendah	237.25
Sekampung Udik	Rendah	7125.49
	Sedang	3355.57
	Tinggi	6663.68
	Sangat Tinggi	33.00
Sukadana	Sangat Rendah	135.81
	Rendah	11789.12
	Sedang	5624.31
	Tinggi	7215.03
	Sangat Tinggi	82.44
Waway Karya	Sangat Rendah	224.91
	Rendah	3238.40
	Sedang	3886.34
	Tinggi	5887.68

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	90.70
Way Bungur	Sangat Rendah	265.70
	Rendah	1060.02
	Sedang	1117.54
	Tinggi	2769.84
	Sangat Tinggi	2.05
Way Jepara	Sangat Rendah	213.79
	Rendah	2902.02
	Sedang	2101.43
	Tinggi	4895.49
	Sangat Tinggi	88.62

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.13  
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

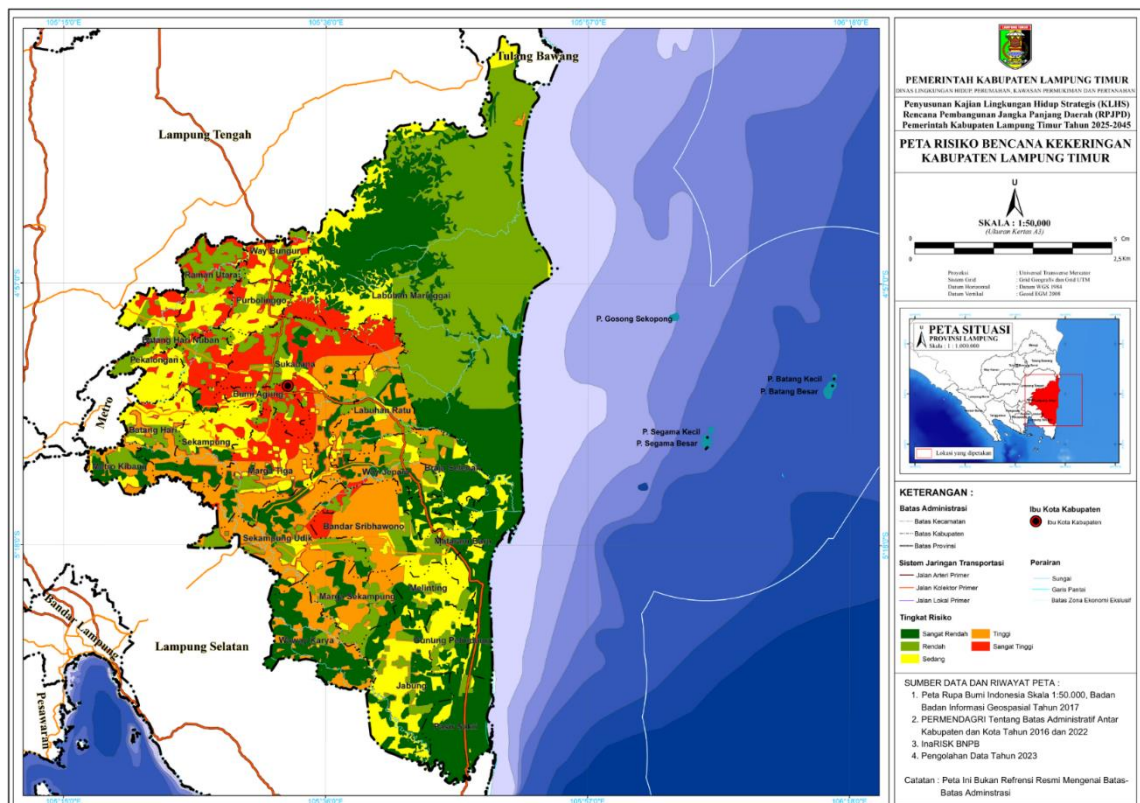
Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah kekeringan. Risiko kekeringan di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori rendah. Kategori kekeringan sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 112.582,637 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sangat tinggi seluas 39.043,059 Ha.

Tabel 2.18  
Luas Risiko Kekeringan Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Kekeringan	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	112.582,637
2	Rendah	109.731,836
3	Sedang	71.854,473
4	Tinggi	55.975,963
5	Sangat Tinggi	39.043,059

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.14  
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Tabel 2.19  
Luas Risiko Kekeringan per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Bandar Sribhawono	Sangat Rendah	931.81
	Rendah	3235.92
	Sedang	2136.35
	Tinggi	8792.07
	Sangat Tinggi	1329.99
Batang Hari	Sangat Rendah	1184.40
	Rendah	1172.82
	Sedang	3647.72
	Tinggi	1909.36

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	704.52
Batang Hari Nuban	Sangat Rendah	2.89
	Rendah	3664.50
	Sedang	3403.05
	Tinggi	40.54
	Sangat Tinggi	4410.29
Braja Selehah	Sangat Rendah	3473.13
	Rendah	1024.07
	Sedang	1339.04
	Tinggi	1024.60
Bumi Agung	Sangat Rendah	268.97
	Rendah	1223.78
	Sedang	770.14
	Sangat Tinggi	3555.63
Gunung Pelindung	Sangat Rendah	1689.65
	Rendah	1076.39
	Sedang	2382.00
	Tinggi	48.90
Jabung	Sangat Rendah	7757.13
	Rendah	1774.01
	Sedang	8766.84
	Tinggi	1020.95
Labuhan Maringgai	Sangat Rendah	54316.97
	Rendah	67412.45
	Sedang	14198.88
	Tinggi	231.45
	Sangat Tinggi	2354.88
Labuhan Ratu	Sangat Rendah	2430.38
	Rendah	2450.38
	Sedang	1688.67
	Tinggi	5909.27
	Sangat Tinggi	2550.05
Marga Sekampung	Sangat Rendah	2557.72
	Rendah	2843.31
	Sedang	207.22
	Tinggi	5434.94
	Sangat Tinggi	15.28
Marga Tiga	Sangat Rendah	1537.95
	Rendah	1130.12
	Sedang	2755.70
	Tinggi	5536.38
	Sangat Tinggi	4519.38
Mataram Baru	Sangat Rendah	3315.63
	Rendah	383.50

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Sedang	1862.83
	Tinggi	26.44
Melinting	Sangat Rendah	2081.30
	Rendah	933.43
	Sedang	3743.92
	Tinggi	695.55
Metro Kibang	Sangat Rendah	1652.81
	Rendah	1112.62
	Sedang	574.57
	Tinggi	1665.76
	Sangat Tinggi	180.69
Pasir Sakti	Sangat Rendah	10357.94
	Rendah	479.95
	Sedang	695.26
	Tinggi	0.82
Pekalongan	Rendah	1233.42
	Sedang	4339.41
	Tinggi	57.87
	Sangat Tinggi	546.50
Purbolinggo	Sangat Rendah	17.10
	Rendah	1185.27
	Sedang	3554.85
	Tinggi	53.23
	Sangat Tinggi	1605.47
Raman Utara	Sangat Rendah	37.74
	Rendah	4867.78
	Sedang	2530.35
	Tinggi	40.68
	Sangat Tinggi	3262.12
Sekampung	Sangat Rendah	1766.48
	Rendah	453.94
	Sedang	5276.47
	Tinggi	2144.95
	Sangat Tinggi	1240.39
Sekampung Udik	Sangat Rendah	3041.96
	Rendah	3754.60
	Sedang	1107.65
	Tinggi	8442.81
	Sangat Tinggi	1067.96
Sukadana	Sangat Rendah	2413.20
	Rendah	4577.18
	Sedang	2677.05
	Tinggi	5431.31
	Sangat Tinggi	9747.97

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Waway Karya	Sangat Rendah	8228.28
	Rendah	513.74
	Sedang	63.05
	Tinggi	4515.87
	Sangat Tinggi	7.09
Way Bungur	Sangat Rendah	34.88
	Rendah	1000.12
	Sedang	2523.53
	Sangat Tinggi	1656.63
Way Jepara	Sangat Rendah	3121.00
	Rendah	2228.34
	Sedang	1611.76
	Tinggi	2952.10
	Sangat Tinggi	288.15

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Luas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20  
Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	44.489,270
2	Rendah	831,210
3	Sedang	40.066,528
4	Tinggi	13.707,351
5	Sangat Tinggi	35.428,164

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori rendah. Kategori kebakaran hutan dan lahan sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 44.489,270 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori rendah seluas 831,210 Ha. Lokasi risiko bencana dominasn berada pada kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Berikut kategori tingkat risiko per kecamatan, sebagai berikut.

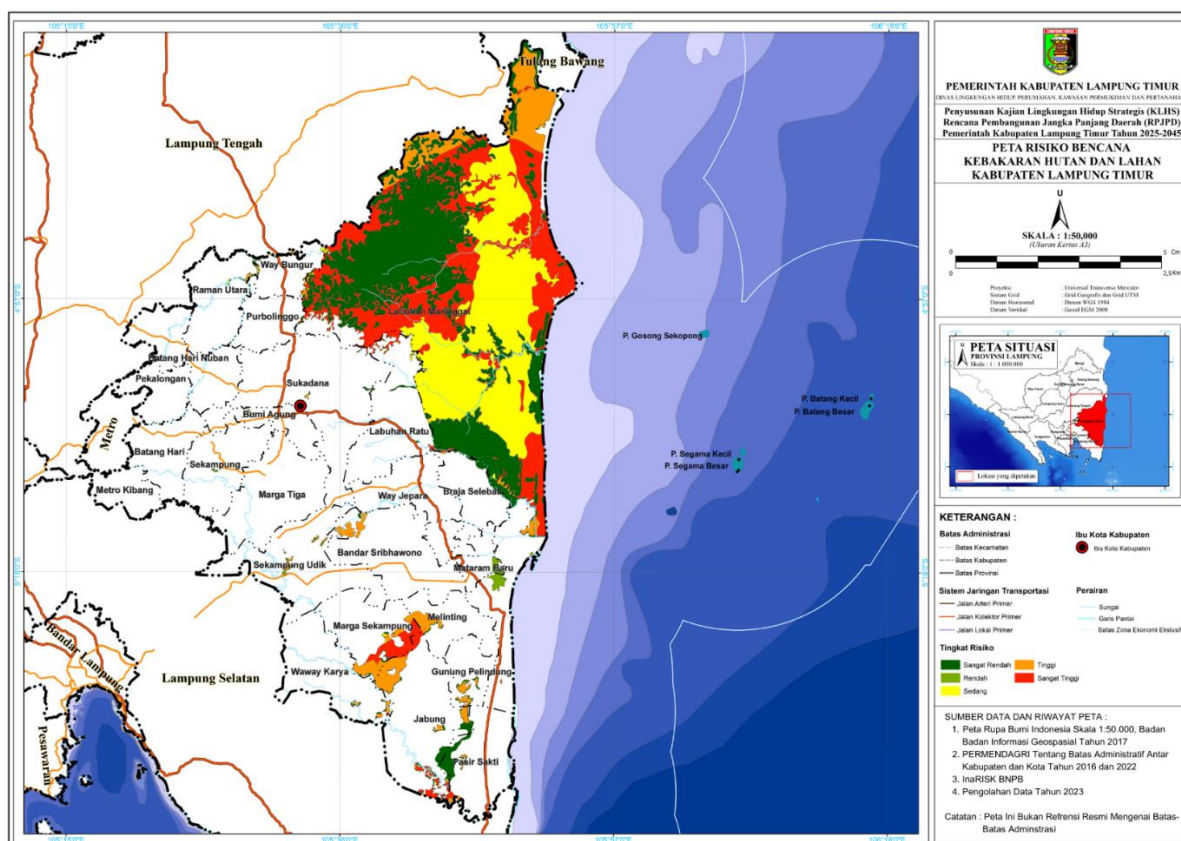
Tabel 2.21  
Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
Bandar Sribhawono	Sangat Rendah	21.56
	Rendah	4.09
	Sedang	3.62
	Tinggi	582.26
	Sangat Tinggi	17.48
Braja Selehah	Sangat Rendah	321.39
	Rendah	18.00
	Sedang	22.15
	Sangat Tinggi	27.78
Bumi Agung	Sangat Rendah	18.70
	Sedang	11.14
Gunung Pelindung	Sangat Rendah	135.34
	Rendah	49.61
	Sedang	4.88
	Tinggi	326.66
	Sangat Tinggi	2.55
Jabung	Sangat Rendah	749.75
	Rendah	12.08
	Sedang	41.11
	Tinggi	1580.11
	Sangat Tinggi	772.45
Labuhan Maringgai	Sangat Rendah	41480.82
	Rendah	389.23
	Sedang	39958.54
	Tinggi	8912.66
	Sangat Tinggi	32506.60
Labuhan Ratu	Sangat Rendah	290.41
	Rendah	14.97
	Sedang	218.61
	Tinggi	18.38
	Sangat Tinggi	386.73
Marga Sekampung	Sangat Rendah	97.30
	Sedang	40.71
	Tinggi	975.67
	Sangat Tinggi	1439.85
Mataram Baru	Rendah	187.03
Melinting	Sangat Rendah	79.80
	Sedang	0.69
	Tinggi	628.51
	Sangat Tinggi	4.14
Pasir Sakti	Sangat Rendah	857.52
	Sedang	1.90

Kecamatan	Risiko	Luas (Ha)
	Tinggi	160.04
	Sangat Tinggi	134.41
Purbolinggo	Sangat Rendah	36.78
	Sedang	0.43
	Sedang	6.99
	Tinggi	15.21
	Sangat Tinggi	40.39
Raman Utara	Sangat Rendah	77.90
	Rendah	36.85
	Sedang	37.46
	Tinggi	101.87
Sekampung	Sangat Rendah	12.87
	Rendah	13.17
Sekampung Udik	Sangat Rendah	83.56
	Rendah	48.81
	Tinggi	126.11
	Sangat Tinggi	1.03
Sukadana	Sangat Rendah	66.08
	Rendah	20.90
	Sedang	12.59
	Tinggi	23.87
	Sangat Tinggi	21.63
Waway Karya	Sangat Rendah	89.87
	Rendah	5.03
	Tinggi	156.97
	Sangat Tinggi	11.56
Way Bungur	Sangat Rendah	68.25
	Rendah	31.43
	Sedang	96.29
	Tinggi	87.93
	Sangat Tinggi	61.61
Way Jepara	Sangat Rendah	1.36
	Sedang	1.18
	Tinggi	11.72

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.15  
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah multi risiko. Luas risiko bencana multi risiko di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

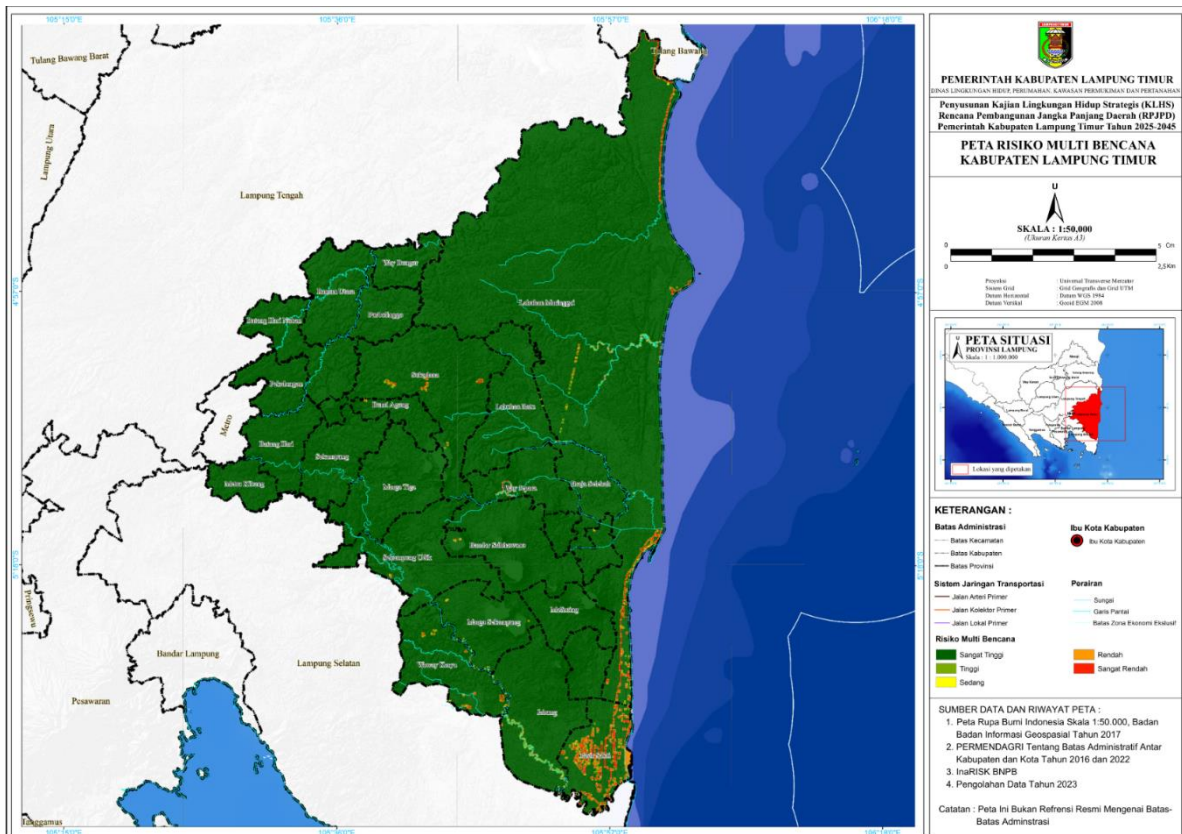
Tabel 2.22  
Luas Risiko Multi Risiko Kabupaten Lampung Timur

No.	Multi Risiko	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	379.637,575
2	Rendah	3.942,764
3	Sedang	334,998
4	Tinggi	2.468,810
5	Sangat Tinggi	2.783,287

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko multi bencana di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori rendah. Kategori multi bencana sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 379.637,575 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 334,998 Ha.

Gambar 2.16  
Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

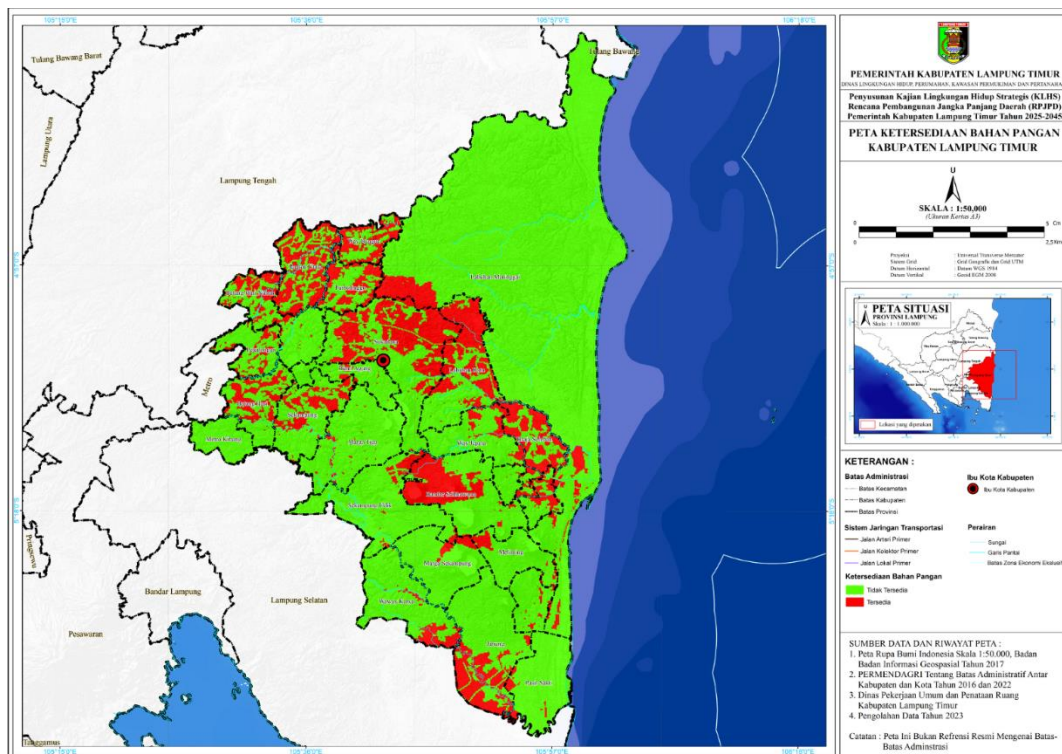
#### 2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih. Dalam kerangka keberlanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

##### a. Daya Dukung Pangan

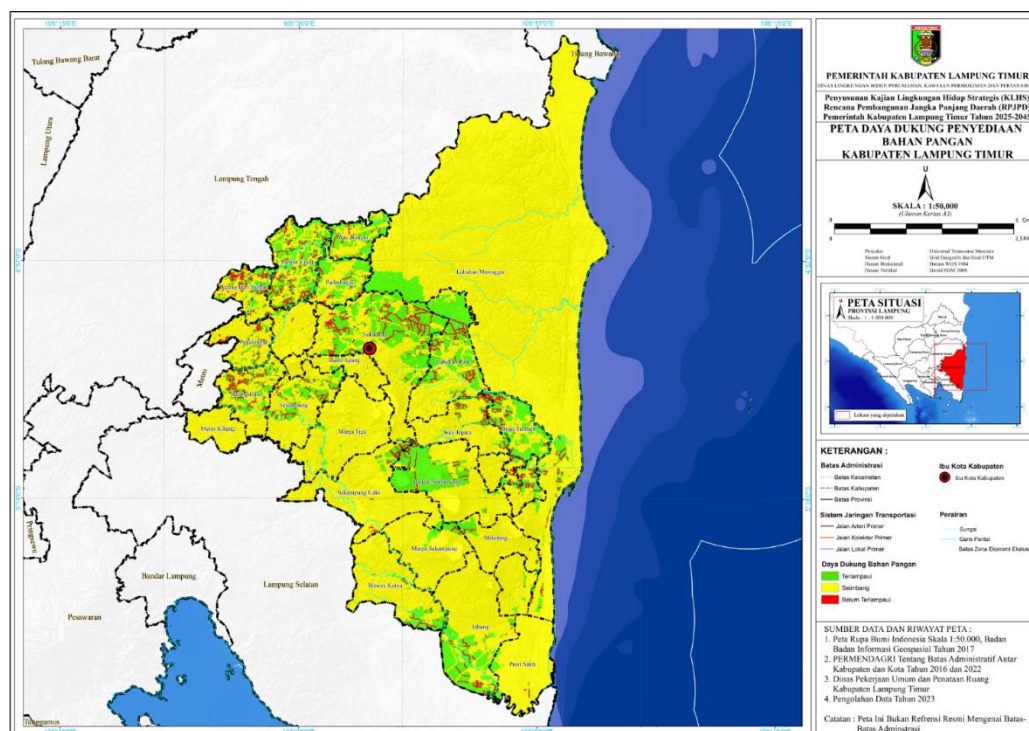
Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah.

Gambar 2.17  
Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

Gambar 2.18  
Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

Daya dukung pangan Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23  
Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan

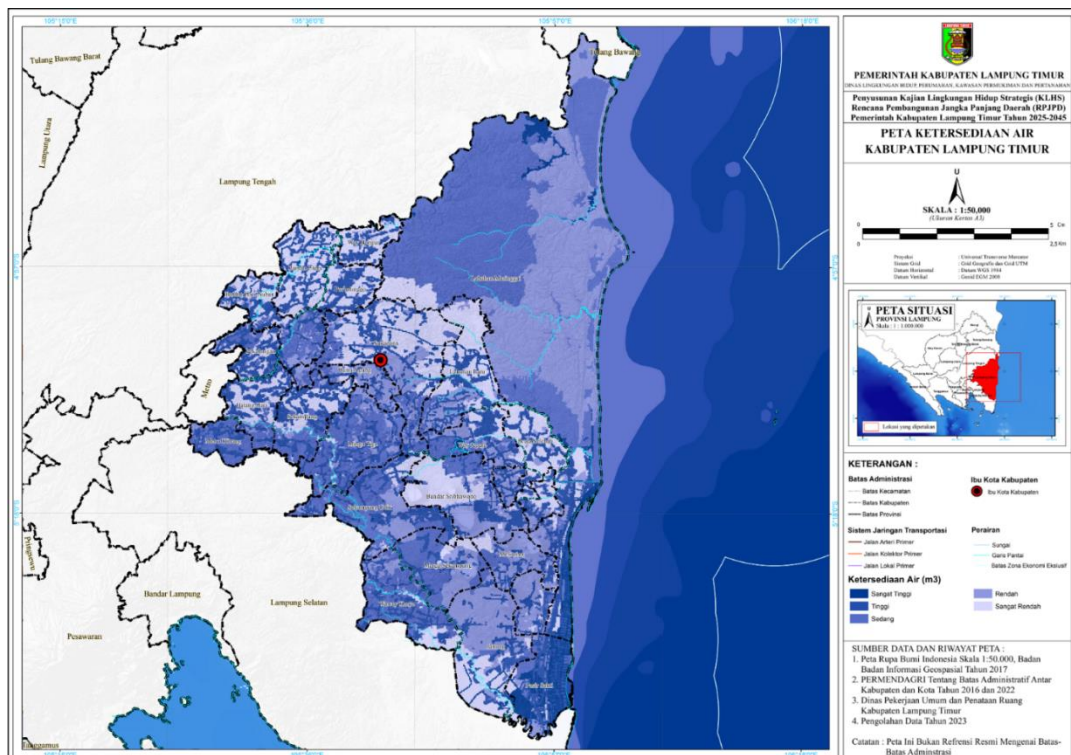
Kkal/tahun		Ambang Batas (Jiwa)	Selisih (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlampau	Terlampau	
3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	4.095.397,7	2.328.707.743.474,8	358.258,0	26.131,4	384.389,4

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, 2024

#### b. Daya Dukung Air Permukaan

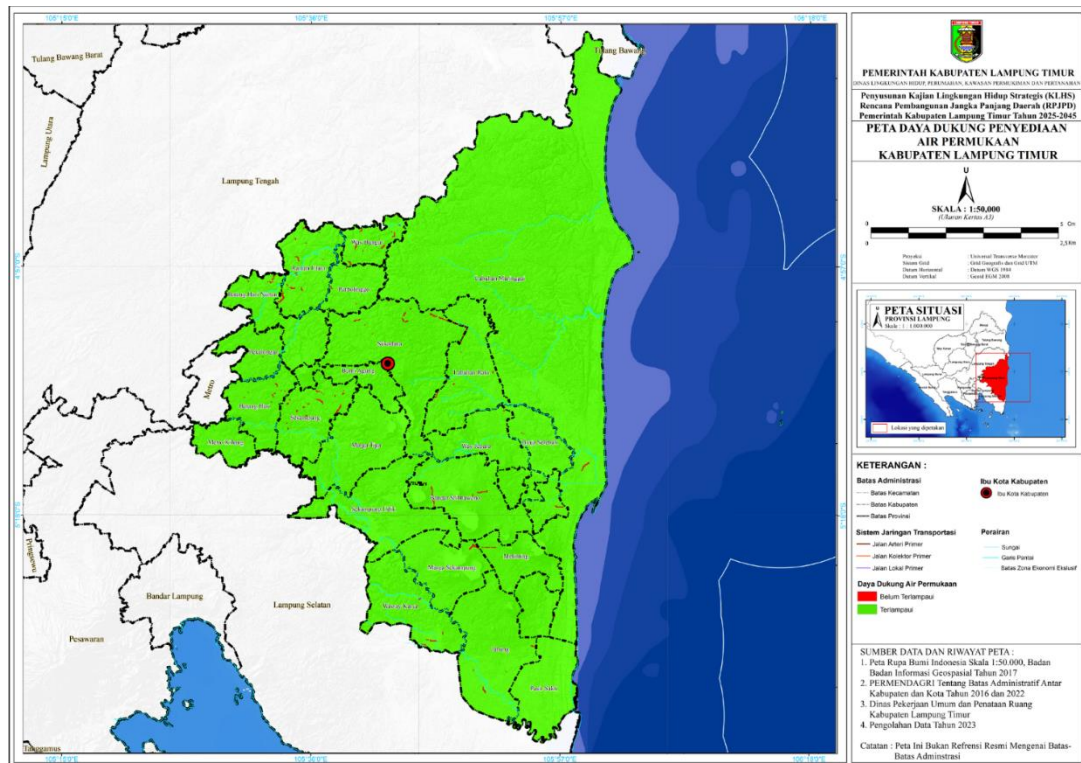
Status daya dukung air permukaan atau dalam hal ini adalah kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah yang dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya.

Gambar 2.19  
Peta Ketersediaan Air Kabupaten Lampung Timur



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

Gambar 2.20  
Peta Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

Tabel 2.24  
Status Daya Dukung Air Permukaan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	Status
1	Bandar Sribhawono	53.215	66,659,934.85	161,091,102.05	94,431,167.20	Belum Terlampau
2	Batang Hari	60.661	56,347,638.76	118,107,760.62	61,760,121.86	Belum Terlampau
3	Batang Hari Nuban	48.455	78,621,163.77	179,419,569.32	100,798,405.55	Belum Terlampau
4	Braja Selebah	27.386	27,829,549.33	102,863,047.35	75,033,498.02	Belum Terlampau
5	Bumi Agung	20.869	43,526,884.19	110,478,677.33	66,951,793.14	Belum Terlampau
6	Gunung Pelindung	24.953	25,690,074.78	76,566,135.14	50,876,060.36	Belum Terlampau
7	Jabung	55.767	74,892,816.85	212,405,176.94	137,512,360.09	Belum Terlampau
8	Labuhan Maringgai	78.077	70,778,818.50	188,685,532.70	117,906,714.20	Belum Terlampau
9	Labuhan Ratu	53.152	71,255,853.79	232,475,489.71	161,219,635.92	Belum Terlampau
10	Marga Sekampung	29.617	122,679,396.31	168,093,704.93	45,414,308.62	Belum Terlampau
11	Marga Tiga	50.939	213,471,569.59	573,197,388.67	359,725,819.08	Belum Terlampau
12	Mataram Baru	32.085	33,704,555.08	104,788,403.51	71,083,848.43	Belum Terlampau
13	Melinting	30.434	38,461,688.96	122,175,683.02	83,713,994.06	Belum Terlampau
14	Metro Kibang	24.641	63,874,738.42	67,347,525.01	3,472,786.59	Belum Terlampau
15	Pasir Sakti	44.424	66,698,155.14	116,315,804.93	49,617,649.79	Belum Terlampau
16	Pekalongan	53.877	33,563,456.08	106,204,001.27	72,640,545.19	Belum Terlampau

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	Status
17	Purbolinggo	46.393	32,982,105.24	99,315,066.15	66,332,960.91	Belum Terlampaui
18	Raman Utara	41.929	47,588,006.34	159,355,480.48	111,767,474.14	Belum Terlampaui
19	Sekampung	68.140	107,716,293.48	127,722,511.72	20,006,218.24	Belum Terlampaui
20	Sekampung Udik	78.057	189,747,397.49	191,120,722.85	1,373,325.36	Belum Terlampaui
21	Sukadana	76.016	151,192,025.70	357,039,647.94	205,847,622.24	Belum Terlampaui
22	Waway Karya	43.345	163,339,470.81	189,731,472.85	26,392,002.04	Belum Terlampaui
23	Way Bungur	26.801	27,230,381.51	95,388,375.02	68,157,993.51	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

c. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan suatu keadaan lahan untuk mendukung seluruh kegiatan manusia, baik Pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya. Daya dukung lahan pada dasarnya ditentukan oleh adanya ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini, sebagai berikut:

1. Klasifikasi lahan potensial dijadikan sebagai Kawasan Budidaya seluas 136.855,06 Ha.
2. Klasifikasi lahan memiliki kendala untuk pembangunan dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya seluas 98.184,77 Ha.
3. Klasifikasi lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 150.891,96 Ha.

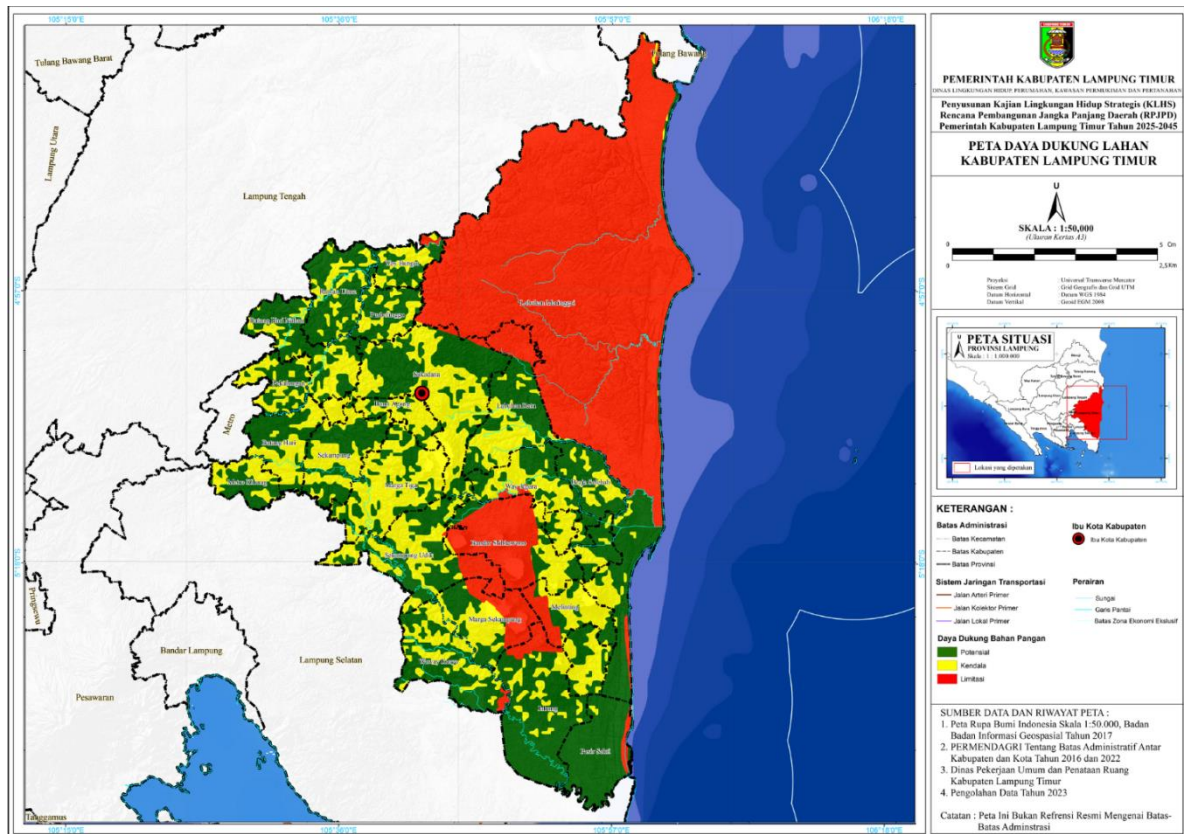
Tabel 2.25  
Luas Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur

Daya Dukung Lahan (ha)			Total
Limit	Kendala	Potensial	
152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, 2024

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur dapat digambarkan dalam sebuah peta sehingga dapat dilihat kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kesinambungan diantaranya.

Gambar 2.21  
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

#### d. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan permukiman Kabupaten Lampung Timur yaitu kemampuan lahan Kabupaten Lampung Timur dalam menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan daya dukung lahan permukiman Kabupaten Lampung Timur masuk dalam klasifikasi daya dukung lahan permukiman tinggi atau mampu menampung kebutuhan lahan permukiman untuk penduduknya. Berikut klasifikasi daya dukung lahan permukiman per kecamatan.

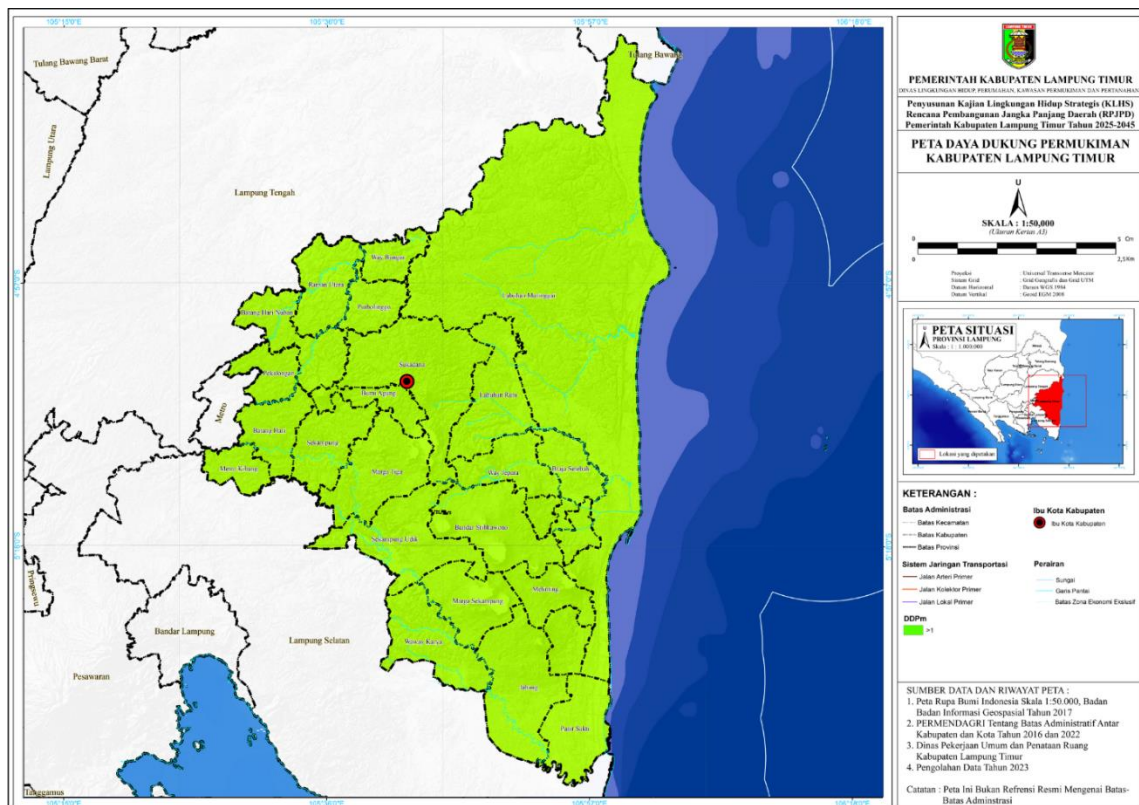
Tabel 2.26  
Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	LPM (Ha)	$\alpha$	DDPm	Klasifikasi
1	Bandar Sribhawono	53215	1435.95	0.0133	2.03	Tinggi
2	Batang Hari	60661	2571.83	0.0133	3.19	Tinggi
3	Batang Hari Nuban	48455	4305.51	0.0133	6.68	Tinggi
4	Braja Selebah	27386	2937.71	0.0133	8.07	Tinggi
5	Bumi Agung	20869	919.82	0.0133	3.31	Tinggi
6	Gunung Pelindung	24953	1335.72	0.0133	4.02	Tinggi
7	Jabung	55767	8626.83	0.0133	11.63	Tinggi
8	Labuhan Maringgai	78077	6576.45	0.0133	6.33	Tinggi

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	LPM (Ha)	α	DDPm	Klasifikasi
9	Labuhan Ratu	53152	4156.21	0.0133	5.88	Tinggi
10	Marga Sekampung	29617	1897.32	0.0133	4.82	Tinggi
11	Marga Tiga	50939	2922.18	0.0133	4.31	Tinggi
12	Mataram Baru	32085	1686.70	0.0133	3.95	Tinggi
13	Melinting	30434	1174.79	0.0133	2.90	Tinggi
14	Metro Kibang	24641	1649.43	0.0133	5.03	Tinggi
15	Pasir Sakti	44424	6503.13	0.0133	11.01	Tinggi
16	Pekalongan	53877	1951.11	0.0133	2.72	Tinggi
17	Purbolinggo	46393	237.28	0.0133	0.38	Tinggi
18	Raman Utara	41929	4626.81	0.0133	8.30	Tinggi
19	Sekampung	68140	3468.71	0.0133	3.83	Tinggi
20	Sekampung Udik	78057	4550.31	0.0133	4.38	Tinggi
21	Sukadana	76016	7152.05	0.0133	7.07	Tinggi
22	Waway Karya	43345	4702.88	0.0133	8.16	Tinggi
23	Way Bungur	26801	1583.36	0.0133	4.44	Tinggi
24	Way Jepara	58713	3005.43	0.0133	3.85	Tinggi
Kabupaten Lampung Timur		1127946	79977.51	0.0133	5.33	Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

Gambar 2.22  
Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lampung Timur



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

e. Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m<sup>2</sup>. Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 9 m<sup>2</sup>/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 1.015,15 Ha. Berikut merupakan data daya tampung lahan di Kabupaten Lampung Timur.

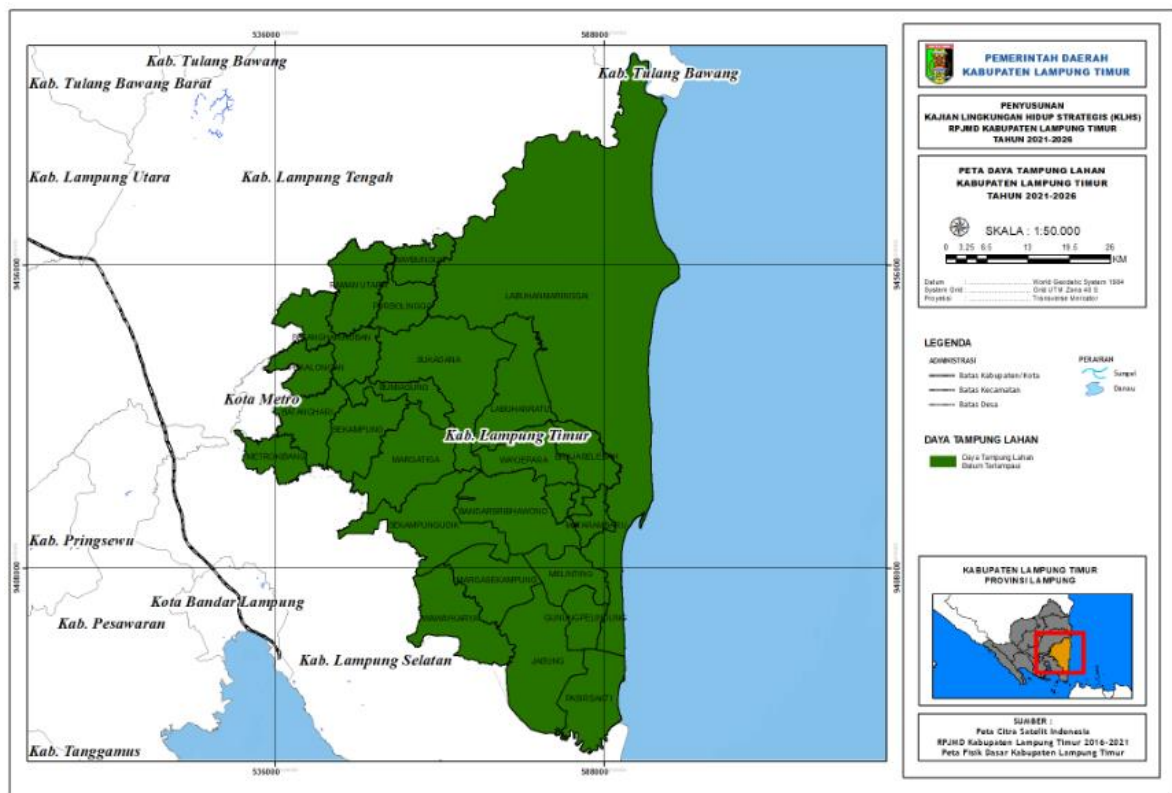
Tabel 2.27  
Daya Tampung Lahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Ketersediaan Lahan Pemukiman (Ha)	Rasio Daya Tampung Lahan	Keterangan
1	Bandar Sribhawono	53.215	47,89	1.388,05	2,03	Belum terlampaui
2	Batang Hari	60.661	54,59	2.517,24	3,19	Belum terlampaui
3	Batang Hari Nuban	48.455	43,61	4.261,90	6.68	Belum terlampaui
4	Braja Selehah	27.386	24,65	2.913,06	8.07	Belum terlampaui
5	Bumi Agung	20.869	18,78	901,04	3.31	Belum terlampaui
6	Gunung Pelindung	24.953	22,46	1.313,27	4.02	Belum terlampaui
7	Jabung	55.767	50,19	8.576,64	11.63	Belum terlampaui
8	Labuhan Maringgai	78.077	70,27	6.506,18	6.33	Belum terlampaui
9	Labuhan Ratu	53.152	47,84	4.108,38	5.88	Belum terlampaui
10	Marga Sekampung	29.617	26,66	1.870,66	4.82	Belum terlampaui
11	Marga Tiga	50.939	45,85	2.876,33	4.31	Belum terlampaui
12	Mataram Baru	32.085	28,88	1.657,83	3.95	Belum terlampaui
13	Melinting	30.434	27,39	1.147,39	2.90	Belum terlampaui
14	Metro Kibang	24.641	22,18	1.627,25	5.03	Belum terlampaui
15	Pasir Sakti	44.424	39,98	6.463,15	11.01	Belum terlampaui
16	Pekalongan	53.877	48,49	1.902,62	2.72	Belum terlampaui
17	Purbolinggo	46.393	41,75	195,53	0.38	Belum terlampaui
18	Raman Utara	41.929	37,74	4.589,07	8.30	Belum terlampaui
19	Sekampung	68.140	61,33	3.407,38	3.83	Belum terlampaui
20	Sekampung Udik	78.057	70,25	4.480,06	4.38	Belum terlampaui

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Ketersediaan Lahan Pemukiman (Ha)	Rasio Daya Tampung Lahan	Keterangan
21	Sukadana	76.016	68,41	7.083,63	7.07	Belum terlampaui
22	Waway Karya	43.345	39,01	4.663,87	8.16	Belum terlampaui
23	Way Bungur	26.801	24,12	1.559,23	4.44	Belum terlampaui
24	Way Jepara	58.713	52,84	2.952,59	3.85	Belum terlampaui
Kabupaten Lampung Timur		1,127,946	1.015,15	78.962,36	5,26	Belum terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

Gambar 2.23  
Peta Daya Tampung Lahan



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Timur, 2024

#### 2.1.1.8 Indeks Ketahanan Daerah

Pada awalnya, indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator HFA (Hyogo Framework for Actions) yang telah tertuang di dalam Perka BNPB 3/2012. Kemudian diperbaharui berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-2019 yaitu pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Hasil perumusan pembaharuan tersebut disebut sebagai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diimplementasikan mulai tahun 2016 pada beberapa wilayah di Indonesia. IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

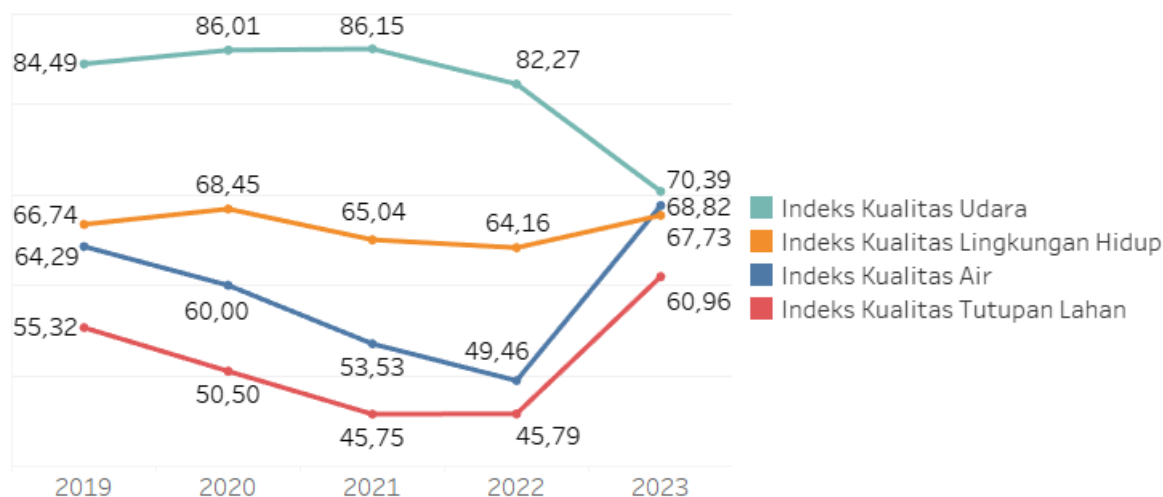
Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi serta diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan, pengembangan sistem pemulihan bencana. Pada tahun 2023, IKD Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,26, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0,22. Capaian ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah pada kategori "Rendah". Capaian IKD Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 0,48.

#### **2.1.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjelaskan bahwa IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLH bersifat komparatif yang memiliki makna bahwa nilai satu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan pada tahun 2020-2022 sebelum kembali meningkat menjadi 67,73 di tahun 2023. Berdasarkan capaian tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sedang. Dalam skala provinsi, Kabupaten Lampung Timur berada pada peringkat 6 dari 15 Kabupaten/Kota.

Grafik 2.1  
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DLHKPP Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2019

Indeks Kualitas Udara secara konsisten meningkat pada tahun 2019-2021, sebelum turun menjadi 70,39 di tahun 2023. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Timur dapat diklasifikasikan ke dalam kategori baik. Dalam skala provinsi, Kabupaten Lampung Timur berada pada peringkat 11 dari 15 Kabupaten/Kota.

Indeks Kualitas Air menurun secara signifikan pada tahun 2019-2022 sebelum kembali meningkat menjadi 68,82 di tahun 2023. Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sedang. Dalam skala provinsi, Kabupaten Lampung Timur berada pada peringkat 7 dari 15 Kabupaten/Kota.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menurun pada tahun 2019-2021 dan kembali meningkat di dua tahun terakhir mencapai 60,96. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sedang. Dalam skala provinsi, Kabupaten Lampung Timur berada pada peringkat 7 dari 15 Kabupaten/Kota.

#### 2.1.1.10 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

Merujuk dokumen rancangan RPJPD Provinsi Lampung, tingkat keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung diasumsikan dengan menggunakan jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas. Sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas sedang dengan luasan sebesar 1.895.294,3 hektar. Untuk Kabupaten Lampung Timur, jasa lingkungan hidup biodiversitas berkategori sangat tinggi seluas 1.904,5 hektar.

Tabel 2.28  
Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

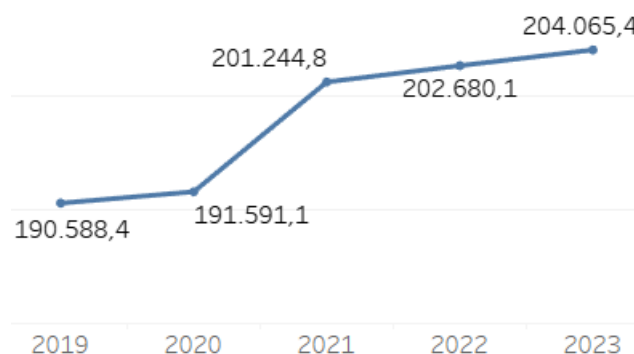
Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas (ha)					Jumlah
Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
72.678,8	2.619,6	258.543,9	50.630,1	1.904,5	386.376,9

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, 2024

#### 2.1.1.11 Kondisi Persampahan

Meningkatnya timbunan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas penduduk dari waktu ke waktu menyebabkan timbunan sampah banyak yang belum terkelola. Saat ini, pengelolaan sampah masih sebatas pada penanganan konvensional yaitu sampah ditaruh di tempat terbuka untuk dibiarkan membusuk dengan sendirinya atau dengan pola angkut-kumpul-buang. Saat ini operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal. Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki 1 TPA yang kapasitasnya nantinya tidak akan memenuhi daya tampung timbunan sampah yang terus meningkat. Kondisi ini tentunya dapat memperburuk kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius di kemudian hari.

Grafik 2.2  
Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Lampung Timur (ton)



Sumber: DLHPKPP Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2019

Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 204.065,4 ton pada tahun 2023. Sarana dan prasarana persampahan yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 terdiri dari 2 bendor, 1 *excavator*, 8 *dump truck*, dan 16 bak sampah.

#### 2.1.1.12 Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim merupakan isu yang sedang gencar untuk diperjuangkan bersama di seluruh negara. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi. Emisi GRK menyebabkan *global warming* dan mendorong terjadinya perubahan-

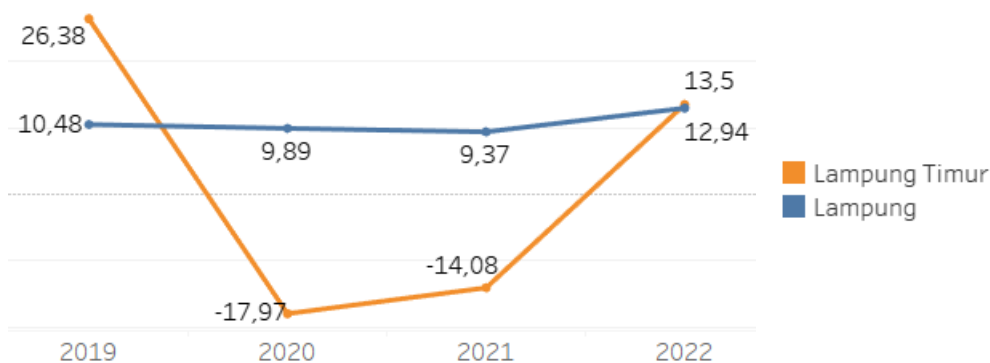
perubahan iklim sehingga membawa banyak dampak negatif yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem.

Komitmen penurunan emisi GRK sejalan dengan dengan tujuan SDGs yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 juta ton CO<sub>2</sub>e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 juta ton CO<sub>2</sub>e.

Terbaru, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan Business As Usual (BAU) baseline tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni sebesar 2.320.958,83 ton CO<sub>2</sub>e dari skenario BAU baseline 27.629.786,24 ton CO<sub>2</sub>e.

Penurunan Emisi GRK Kabupaten Lampung Timur mencapai 13,5 persen pada tahun 2023, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai -14,08 persen. Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten Lampung Timur sudah melampaui capaian Provinsi Lampung yang sebesar 12,94 persen.

Grafik 2.3  
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung



Sumber: DLHPKPP Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2019

#### 2.1.1.13 Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti yang tersebut pada pasal 3, bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi

aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang mana masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kawasan lainnya.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031. Terkait dengan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.29  
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Tahun 2020

Uraian	Capaian	Target RPJMD	%
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	54,84	60	91,40

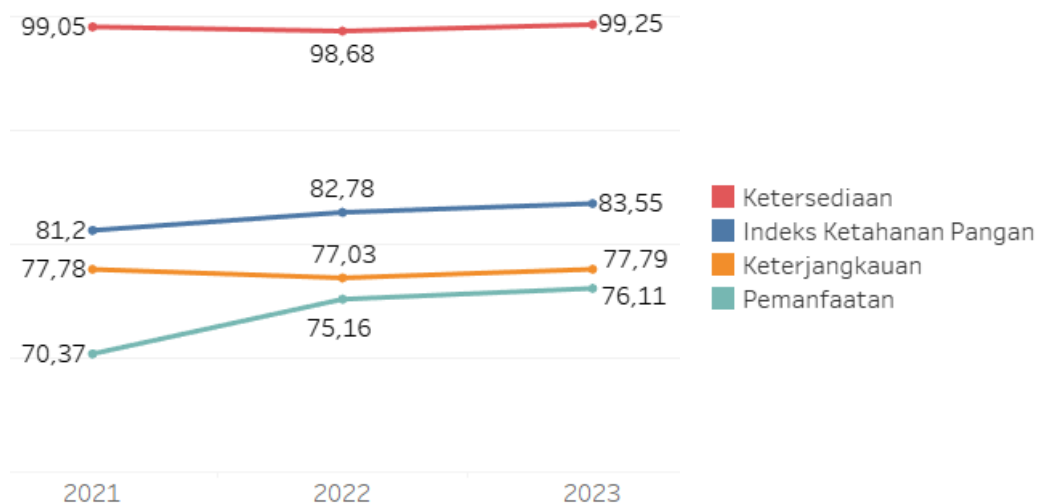
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

Data Termutakhir: 2020

#### 2.1.1.14 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Indeks Ketahanan Pangan disusun berdasarkan sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Grafik 2.4  
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Data Awal: 2021

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur di atas menunjukkan terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

## 2.1.2 Aspek Demografi

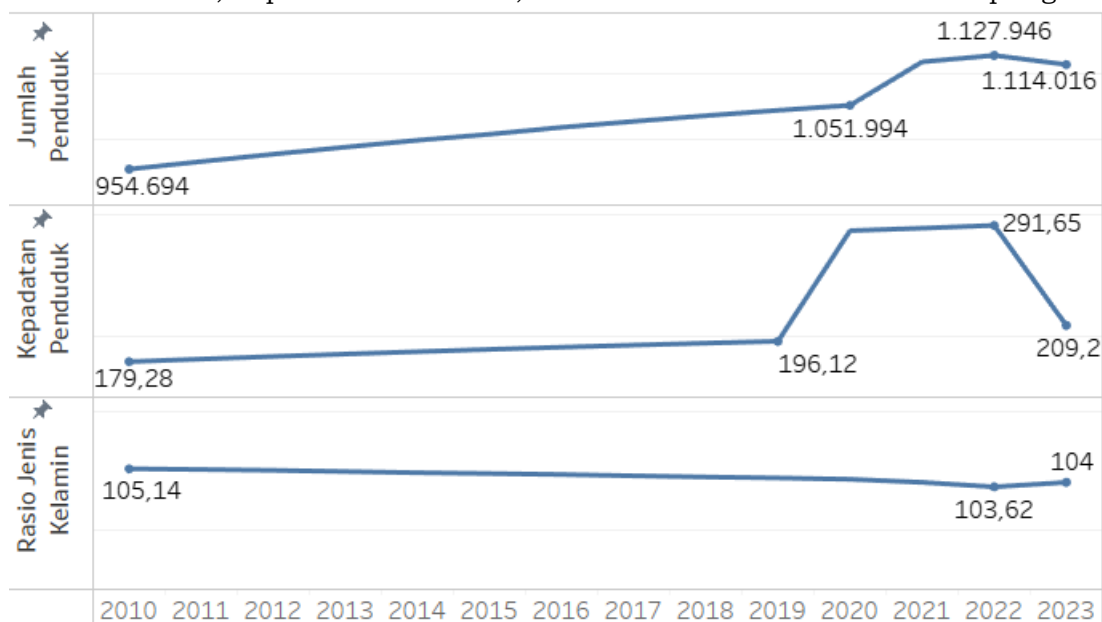
### 2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Jumlah dan struktur penduduk merujuk pada ukuran populasi suatu wilayah atau negara serta komposisi usia, jenis kelamin, dan distribusi penduduk dalam kelompok usia tertentu. Ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Selama periode 2010-2023, jumlah penduduk Lampung Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 954.694 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 1.114.016 jiwa pada tahun 2023 meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin Kabupaten Lampung Timur sebesar 104 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk Lampung Timur juga meningkat pada periode 2010-2023. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk mencapai 179,28 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian terus meningkat menjadi 291,65 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 209,2 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2023.

Grafik 2.5

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kab. Lampung Timur

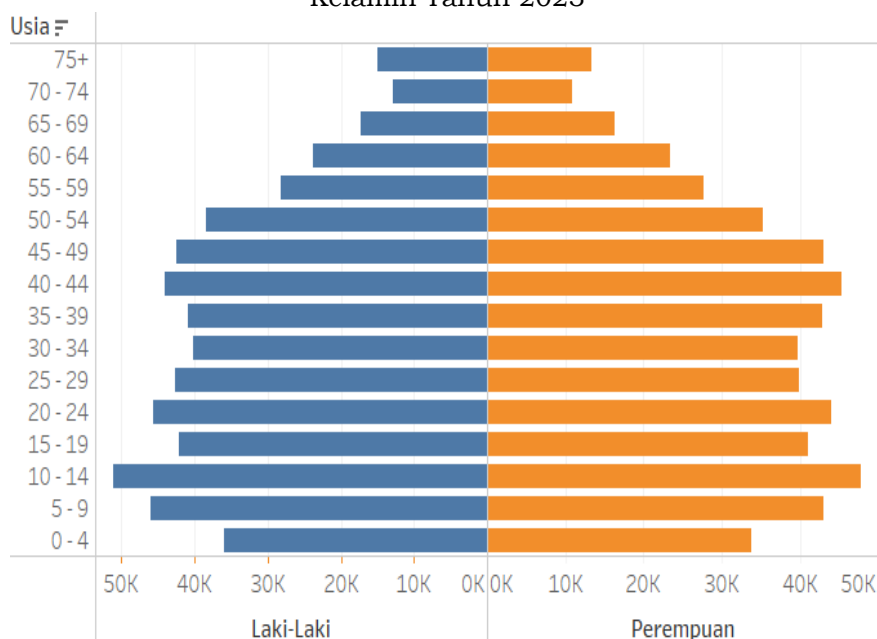


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2010

Komposisi penduduk tahun 2023 menunjukkan mayoritas penduduk Lampung Timur didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 69,19% atau lebih dari 770 ribu jiwa, kemudian kelompok usia anak sebesar 23,11% atau sebanyak 257 ribu jiwa dan kelompok usia lanjut 7,7% atau sebanyak 85 ribu jiwa.

Grafik 2.6  
Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

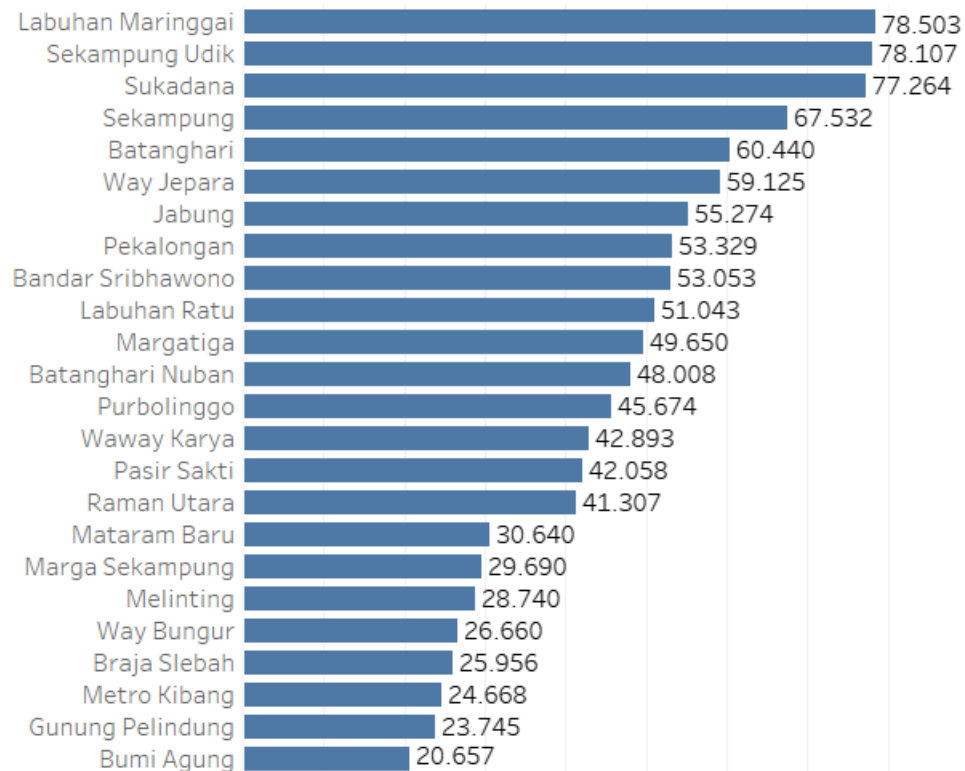
Besarnya kelompok usia produktif, memiliki efek yang signifikan dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Kelompok usia produktif yang besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mereka mewakili angkatan kerja yang aktif dan produktif, yang dapat meningkatkan produksi, investasi, dan konsumsi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kelompok usia produktif dapat menyediakan tenaga kerja yang memadai untuk industri dan sektor ekonomi yang berbeda. Kelompok usia produktif biasanya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi karena mereka umumnya memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih baik dalam dunia kerja. Mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal inovasi, kreativitas, dan efisiensi kerja. Ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

#### 2.1.2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk merujuk pada cara penduduk ditempatkan atau tersebar di suatu wilayah atau negara. Hal ini dapat berkaitan dengan konsentrasi penduduk di daerah perkotaan atau pedesaan, regional, atau bahkan distribusi penduduk di seluruh negara. Persebaran penduduk dapat memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Secara administratif penduduk Lampung Timur tersebar di 24 Kecamatan, di mana penduduk terbanyak bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Maringgai, sedangkan kecamatan dengan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Bumi Agung.

Grafik 2.7

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

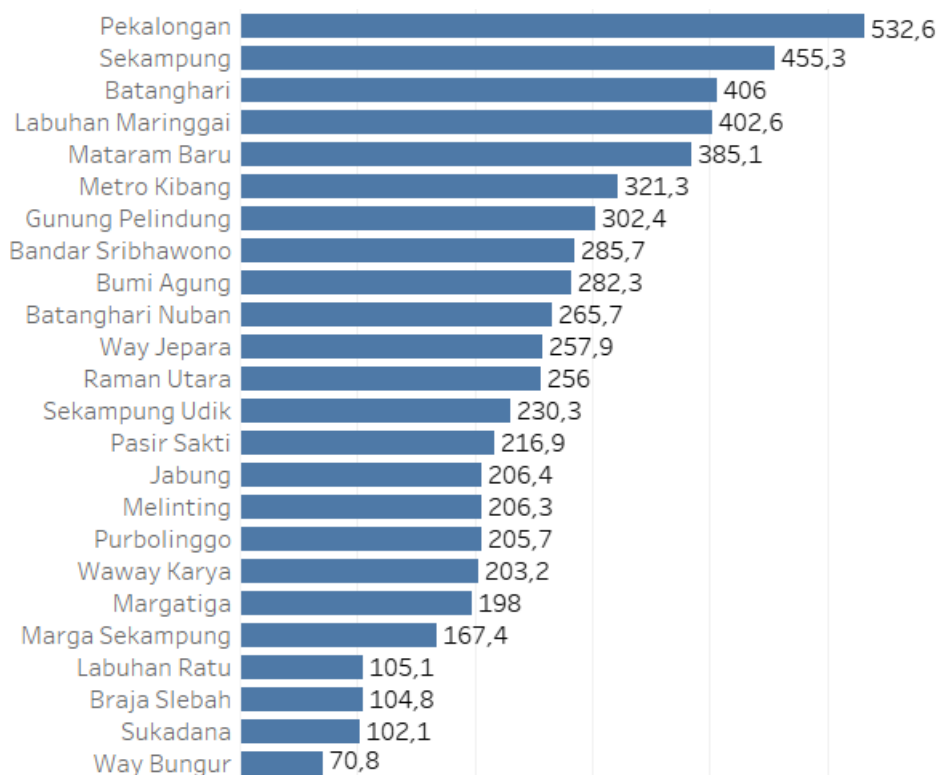


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Bila ditinjau dari kepadatannya, di mana Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalongan dengan kepadatan penduduk sebesar 532,6 jiwa/km<sup>2</sup>, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Way Bungur dengan kepadatan penduduk sebesar 70,8 jiwa/km<sup>2</sup>.

Grafik 2.8

Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023



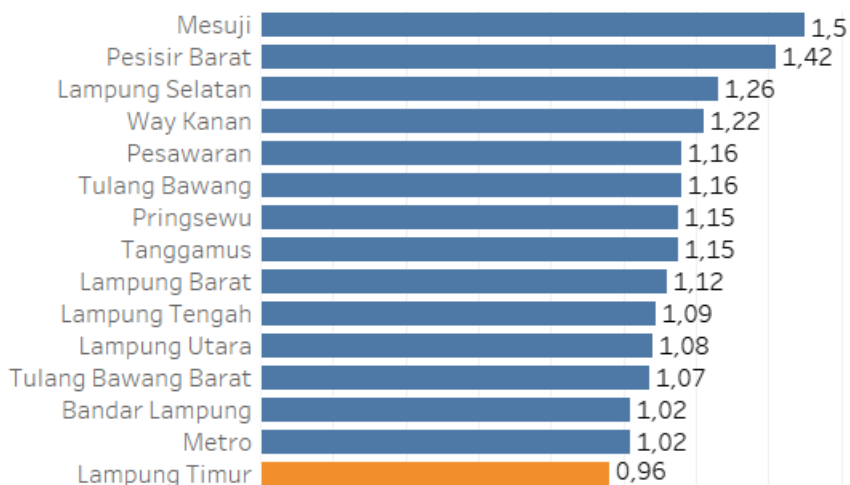
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

### 2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Terkait dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2011-2023 memiliki kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2020 dan naik pada tahun 2021, sebelum kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah dengan capaian 0,96 persen.

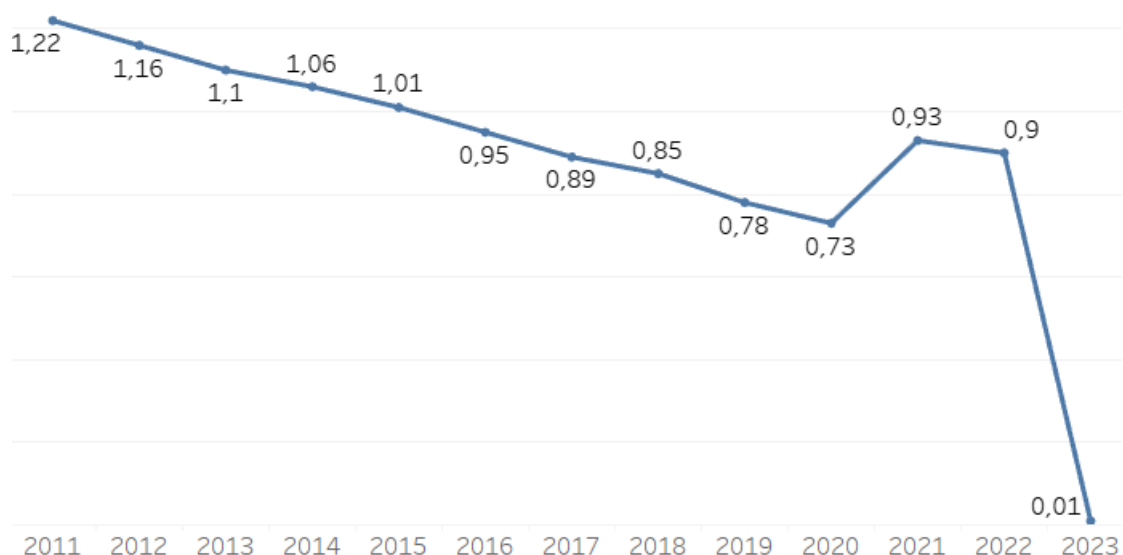
Grafik 2.9

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2.10  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2011

#### 2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Adat

Saat ini, berdasarkan data yang tersedia, terdapat sekitar 50.000 masyarakat adat di Kabupaten Lampung Timur. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 20.000 masyarakat adat berada di wilayah pesisir yang tersebar di kecamatan-kecamatan seperti Labuhan Maringgai dan Way Jepara. Wilayah tengah Kabupaten Lampung Timur seperti Kecamatan Sukadana dan Batanghari Nuban, menjadi tempat tinggal bagi sekitar 15.000 masyarakat adat. Kemudian, sekitar 10.000 masyarakat adat mendiami wilayah pegunungan di Kecamatan Sekampung dan Mataram Baru.

Menurut jenis kelaminnya, sebanyak 26.000 masyarakat adat di Kabupaten Lampung Timur merupakan laki-laki, sementara masyarakat adat perempuan berjumlah sekitar 24.000 jiwa. Pemerintah daerah terus berupaya melindungi dan memberdayakan masyarakat adat melalui berbagai program, seperti pengakuan hak atas tanah ulayat dan pelestarian budaya tradisional.

### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

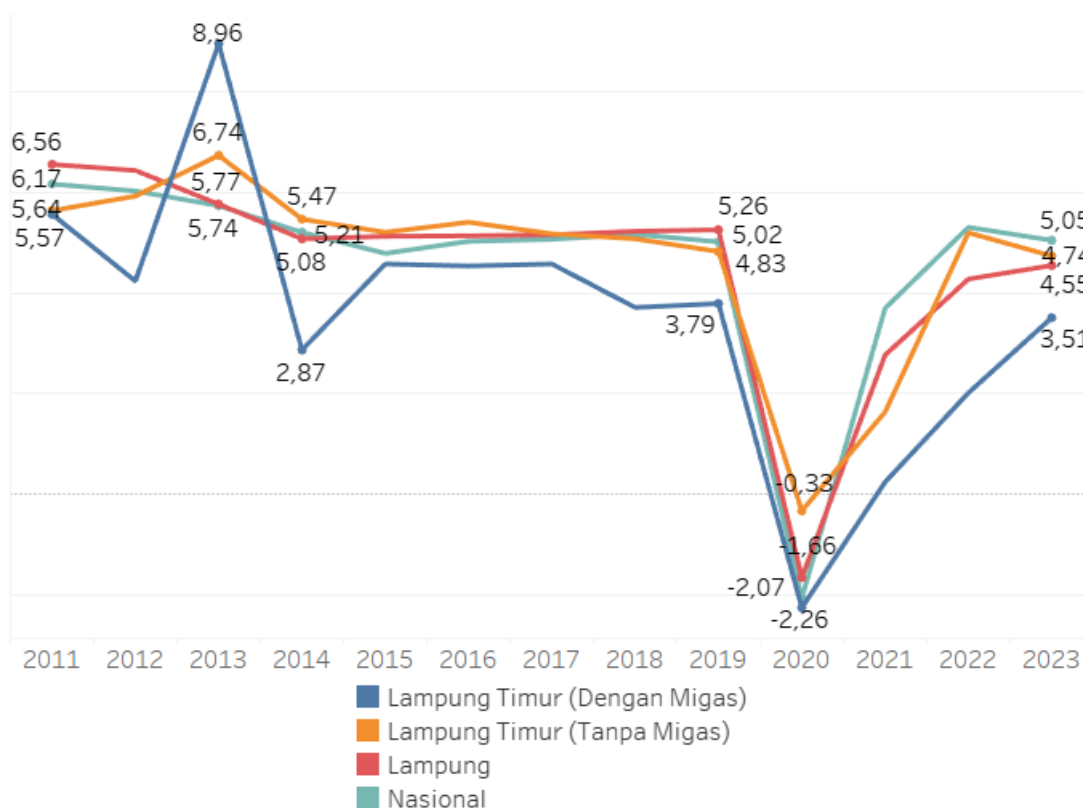
#### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

##### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau wilayah tertentu,

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Grafik 2.11  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2011

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 13 tahun terakhir menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen, sebelum kembali tumbuh positif pada tahun 2021-2023. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 terendah kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu sebesar 3,51 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang mencapai 4,99 persen di tahun 2023.

Grafik 2.12  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

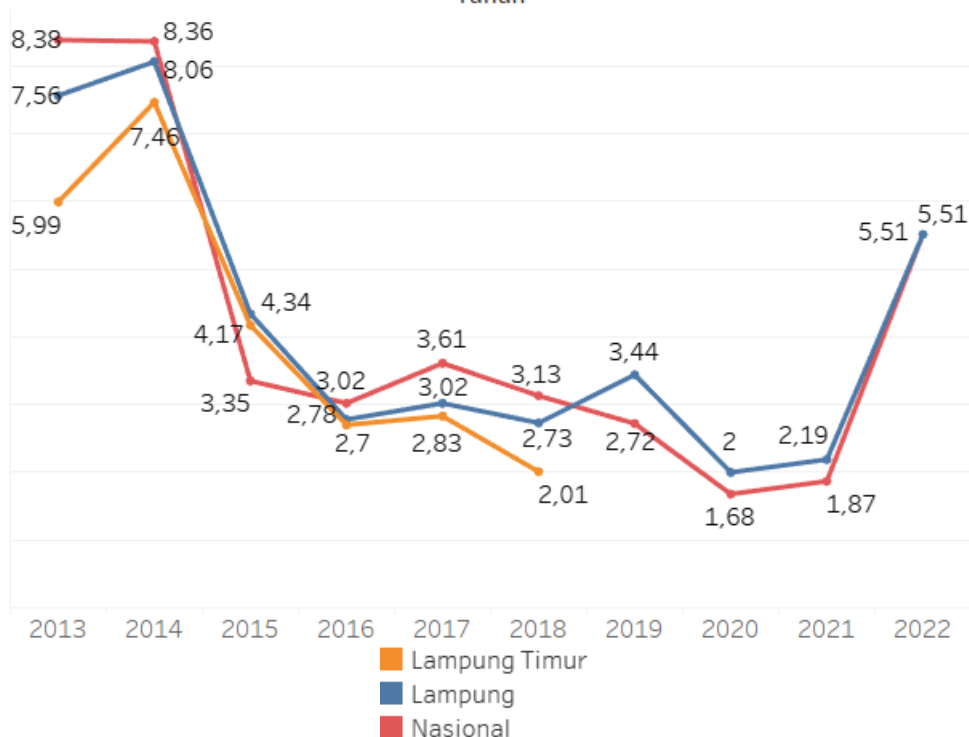
### 2.2.1.2 Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Di samping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Sampai dengan tahun 2018, data inflasi Kabupaten Lampung Timur tersedia, akan tetapi mulai tahun 2019 sampai 2023, inflasi di Provinsi Lampung hanya tersedia data inflasi gabungan antara Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai acuan inflasi Kabupaten/Kota. Namun mulai tahun 2024, terdapat penambahan 2 (dua) kabupaten sebagai wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Lampung yaitu Lampung Timur dan Mesuji.

Grafik 2.13  
Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional  
Tahun



Sumber: BPS, 2023

Data Awal: 2013

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2018, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur terus dapat dikendalikan. Pada Tahun 2013, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 5,99 persen, yang kemudian naik menjadi 7,46 persen di tahun 2014, sebelum terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 2,01 persen pada tahun 2018. Inflasi Kabupaten Lampung Timur pada tahun tersebut berada di bawah inflasi nasional dan Provinsi Lampung.

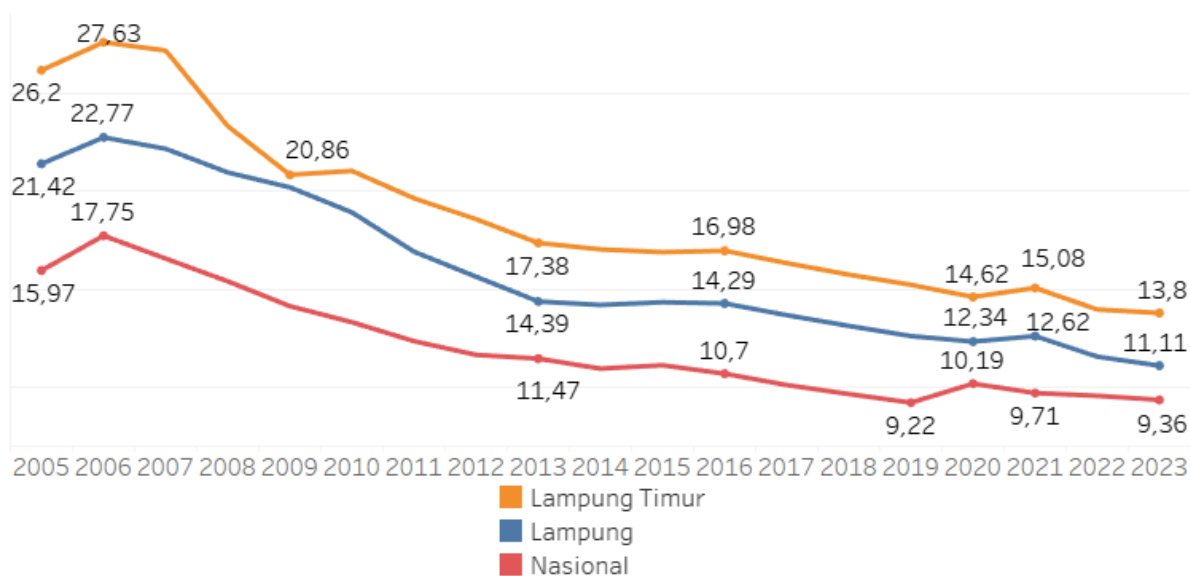
Selanjutnya bila ditinjau dari data inflasi Provinsi Lampung tahun 2013 hingga tahun 2021, inflasi cenderung meningkat dari 2,73 persen pada tahun 2018 menjadi 5,51 persen di tahun 2022 di mana inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,00 persen dan kemudian meningkat sampai dengan nilai inflasi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,51 persen.

Inflasi Provinsi Lampung Desember 2022 mencapai 5,51 persen yang didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,151%, 0,121%, 0,083%, 0,040%, dan 0,020%.

### 2.2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Grafik 2.14  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

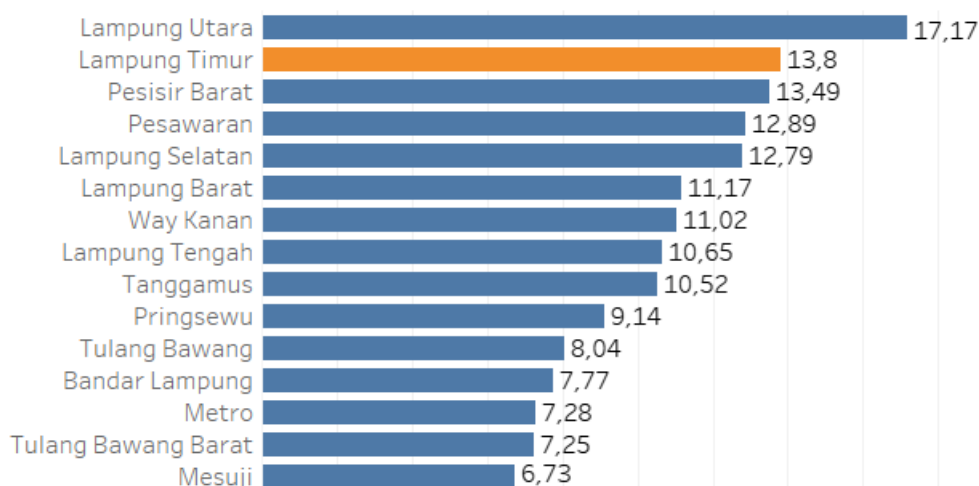
Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2006 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Lampung Timur meningkat mencapai 15,08 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 14,62 persen. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung.

Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada 2021 diduga terjadi karena pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.

Seiring dengan kecenderungan penurunan Pandemi COVID-19 yang disertai dengan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi, persentase kemiskinan di Provinsi Lampung menurun hingga mencapai 11,11 persen pada Maret 2023, demikian pula kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur yang mengalami penurunan hingga mencapai

13,8 persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan posisi yang pada tahun 2021 berada pada posisi tiga terbesar setelah Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran, tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi kabupaten dengan kemiskinan terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.15  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila ditinjau dari Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

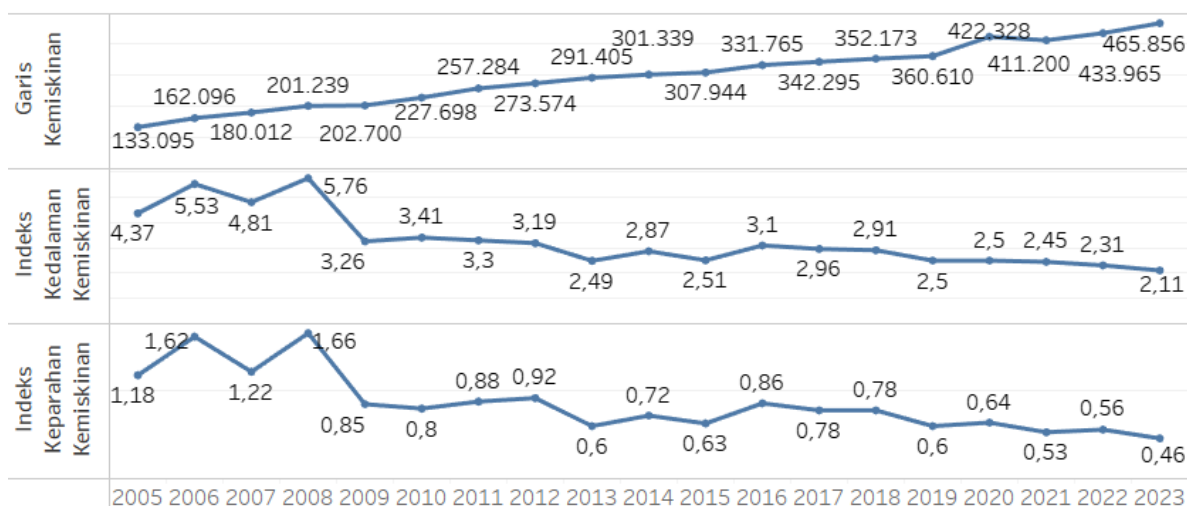
Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2022, indeks P1 tercatat sebesar 2,31 turun menjadi 2,11 pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin dekat dari garis kemiskinan. Dengan semakin

berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penurunan, pada tahun 2022, indeks P2 di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 0,56, turun menjadi 0,46 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk miskin semakin berkurang.

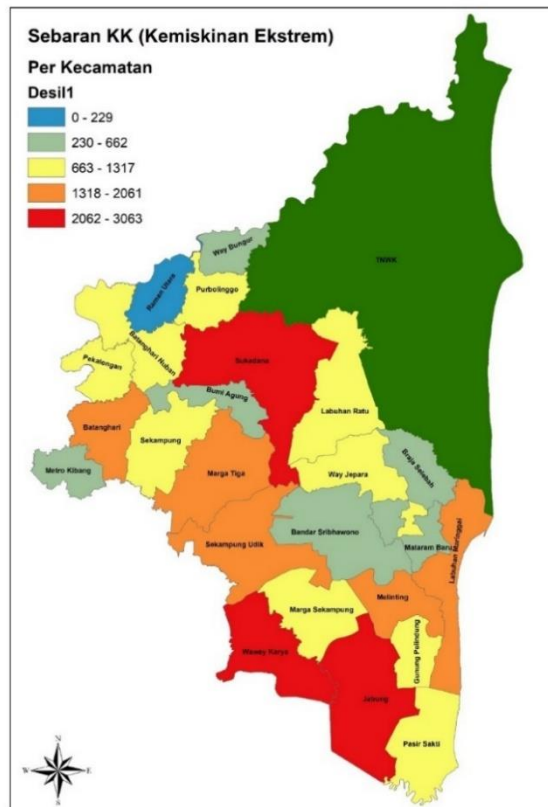
Grafik 2.16  
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan  
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Terkait dengan data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023 jumlah keluarga miskin ekstrim mencapai 29.766 KK atau ekuivalen dengan 119.064 jiwa. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kantong wilayah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Kecamatan dengan jumlah keluarga miskin ekstrim terendah adalah Kecamatan Bumi Agung.

Gambar 2.24  
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrim per Kecamatan 2023



*Sumber: Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023*

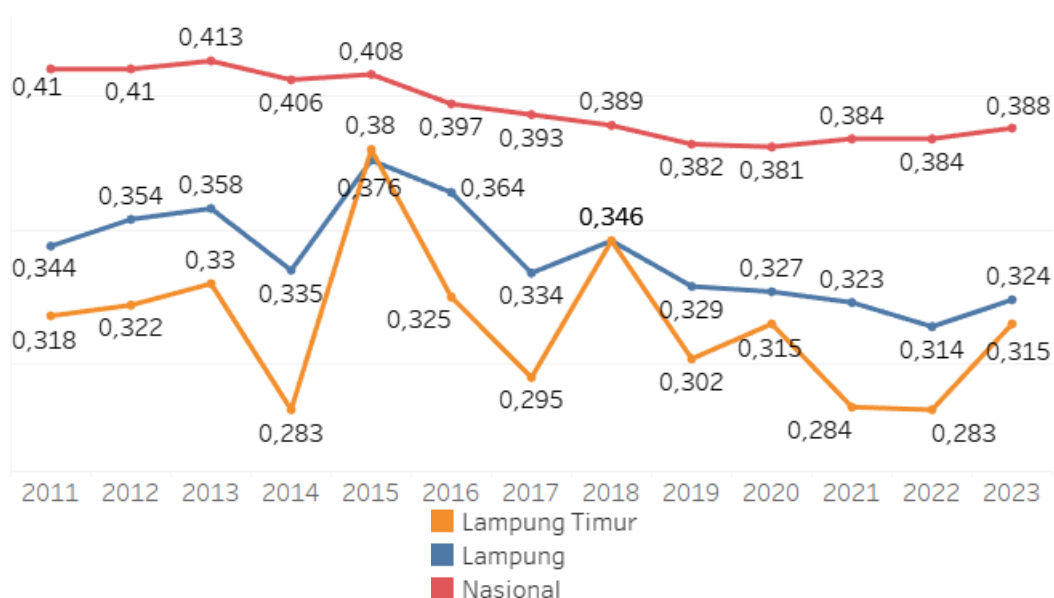
#### 2.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,315 pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang meningkat meskipun capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional.

Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kedua dengan indeks gini tertinggi di Provinsi Lampung.

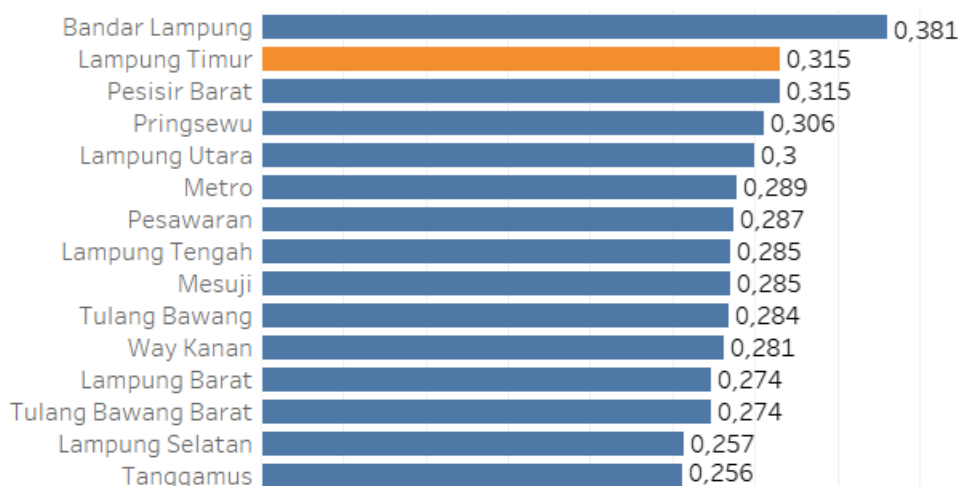
Grafik 2.17  
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2011

Grafik 2.18  
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

### 2.2.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu pada perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Peningkatan nilai tukar petani bisa menjadi indikasi kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

Berdasarkan hasil analisis nilai tukar petani di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, NTP Kabupaten Lampung Timur tahun 2022 mencapai 103,61, sedangkan NTP hingga semester pertama 2023 mencapai 103,98. Subsektor dengan NTP tertinggi pada tahun 2022 dan Juni 2023 yaitu perkebunan rakyat dan perikanan tangkap. Komoditas dengan NTP tertinggi pada perkebunan rakyat yaitu kelapa yang mencapai 113,56.

Tabel 2.30  
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018, 2022, dan Juni 2023

Subsektor	Nilai Tukar Petani		
	2018	2022	Juni 2023
Tanaman Pangan	111,06	102,12	100,82
Hortikultura	96,1	103,23	101,81
Perkebunan Rakyat	89,93	106,04	107,23
Peternakan	108,3	102,85	103,28
Perikanan Tangkap	112,03	105,66	108,70
Perikanan Budidaya	95,04	101,86	102,44

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur, 2023

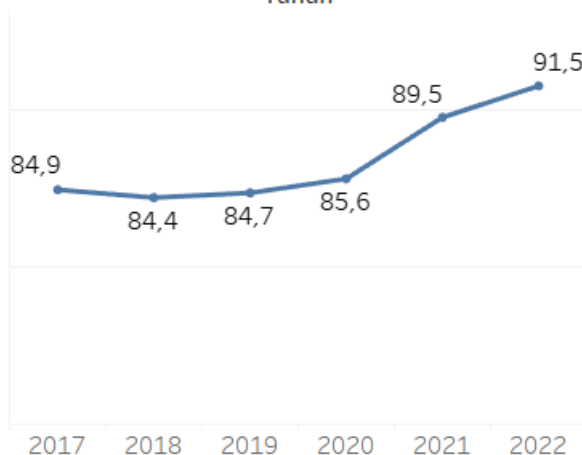
Data Awal: 2018

#### 2.2.1.6 Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur di atas menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki akses yang baik terhadap makanan yang cukup dan beragam, serta dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka.

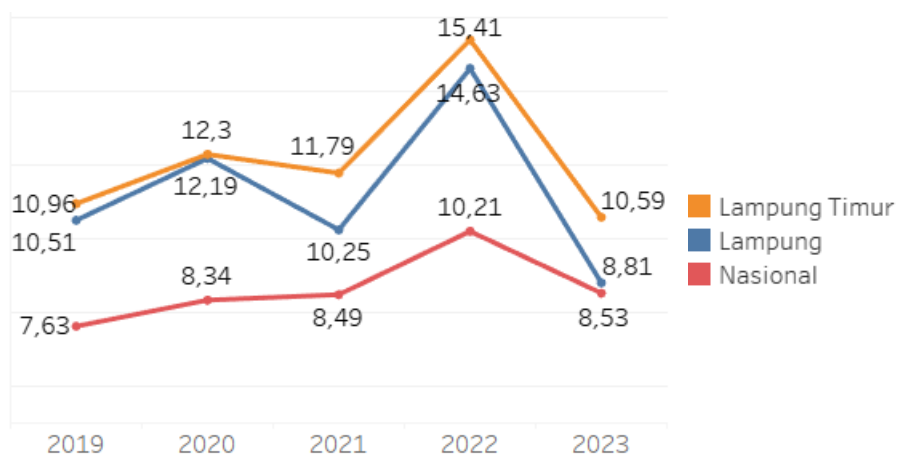
Grafik 2.19  
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur  
Tahun



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2023  
Data Awal: 2017

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Capaian PoU Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 10,59 persen, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,41 persen. Capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di atas capaian Provinsi Lampung dan Nasional.

Grafik 2.20  
Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

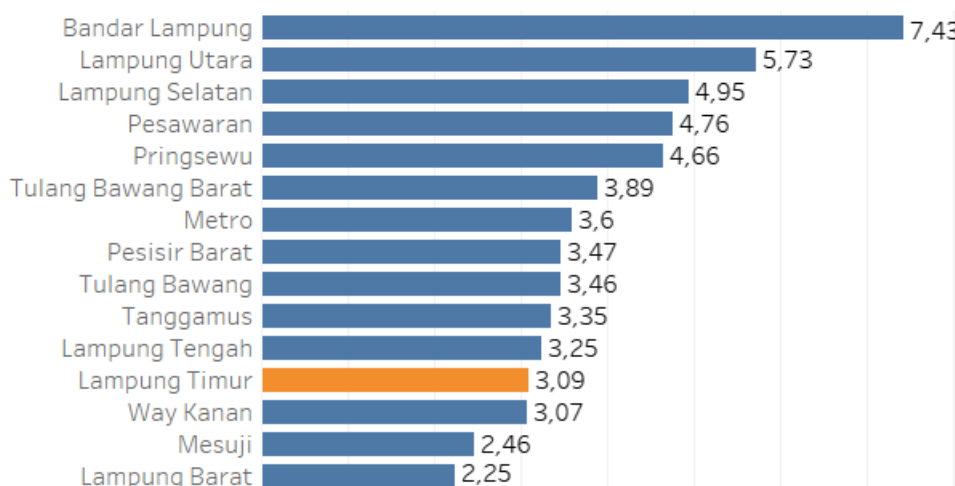


Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2019

### 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

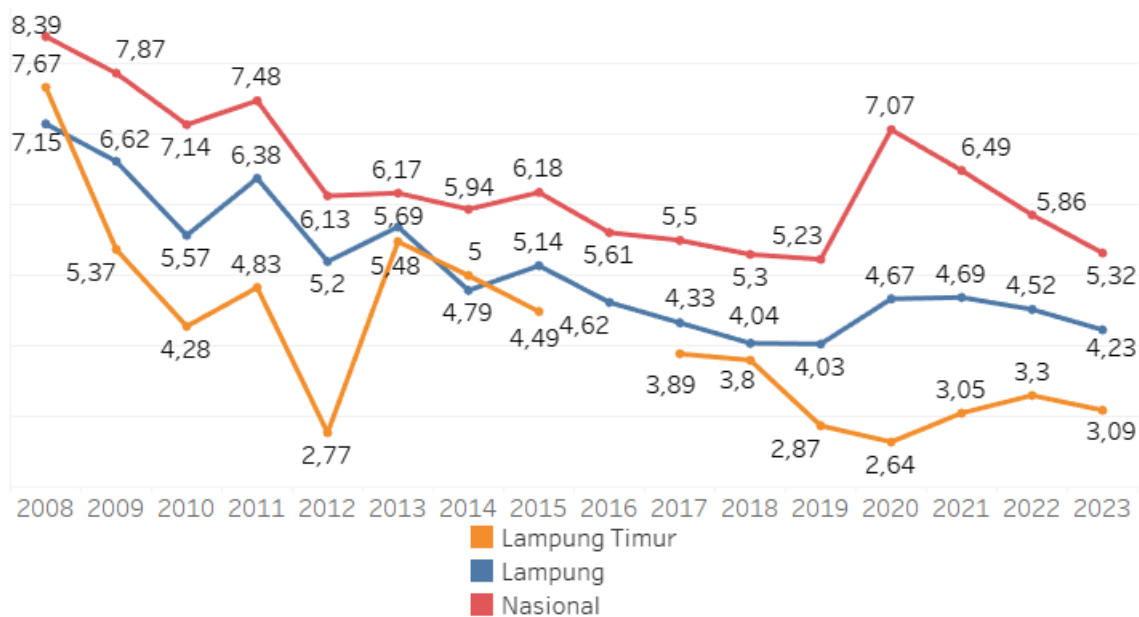
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2008-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022, TPT Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami penurunan menjadi 3,09 persen, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-4 dengan TPT terendah.

Grafik 2.21  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Grafik 2.22  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

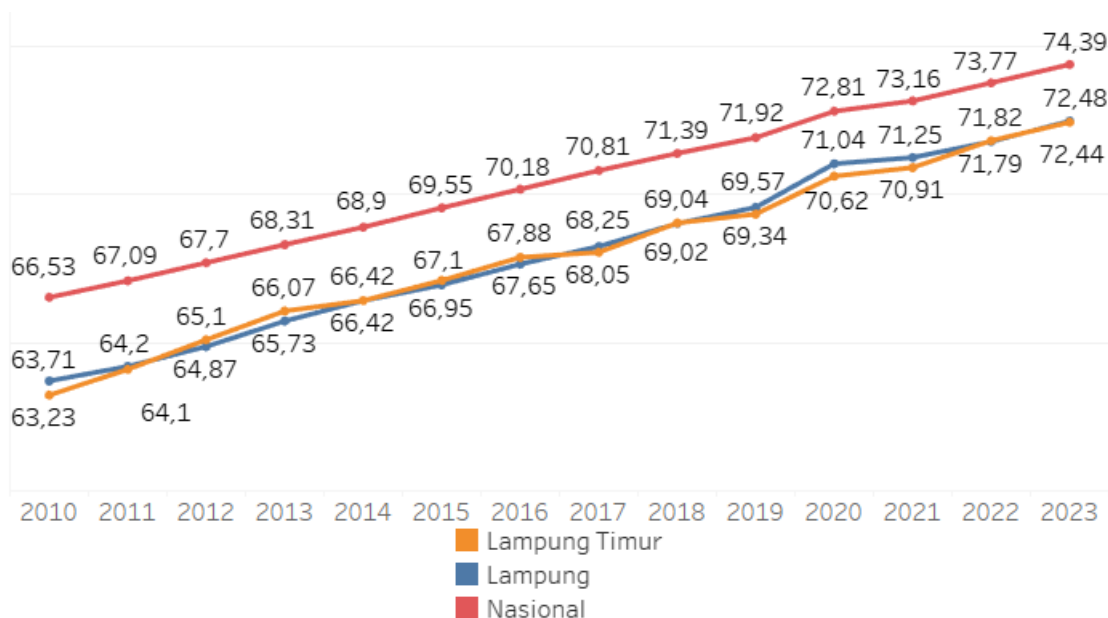
Data Awal: 2008

Keterangan: Data TPT Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 tidak tersedia

### 2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2010-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 72,44.

Grafik 2.23  
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

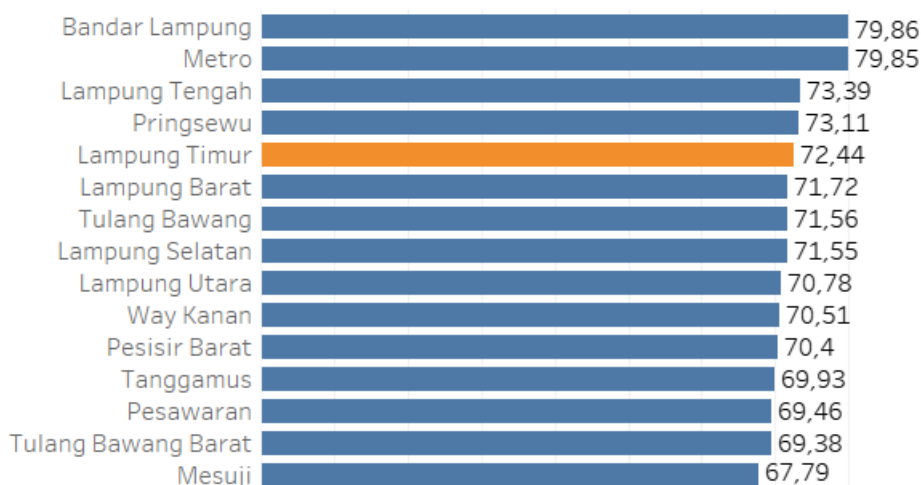


Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2010

Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada status “sedang” ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ). Sedangkan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung sudah berada pada status “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ).

Grafik 2.24  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

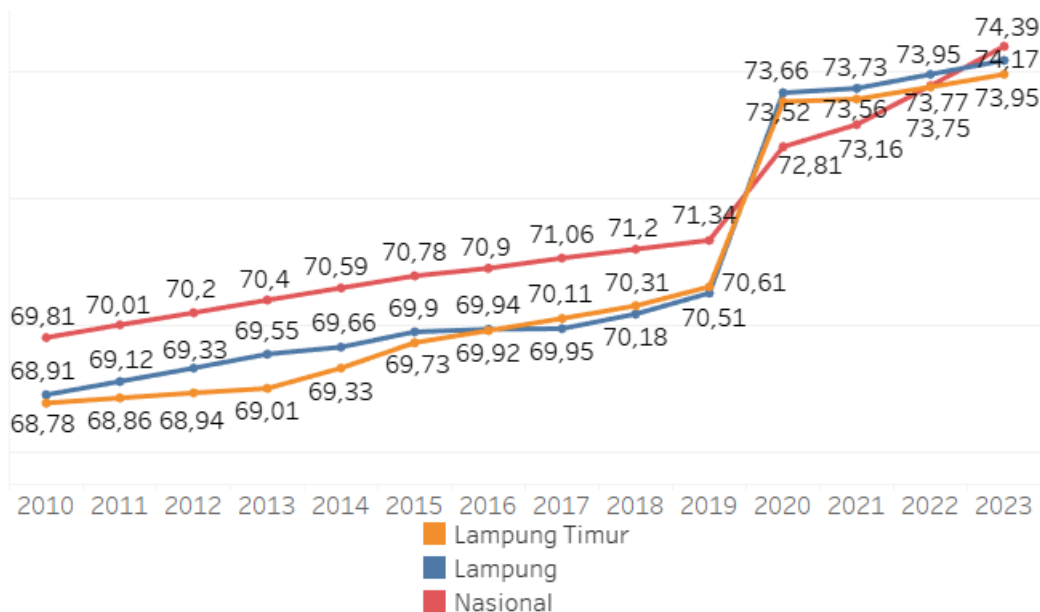


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

#### 2.2.1.8.1 Angka Harapan Hidup

Perkembangan AHH Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode 2010-2022. Pada tahun 2023, AHH Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,95 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.

Grafik 2.25  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

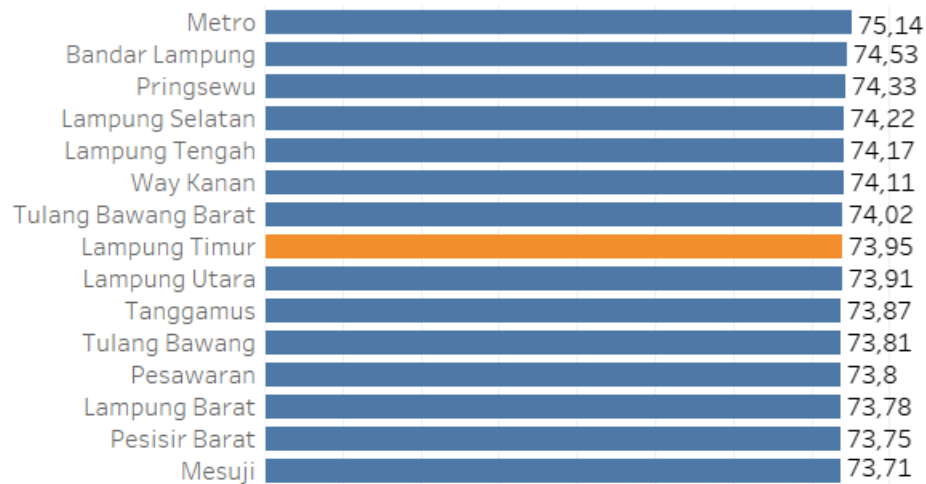


Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2010

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 dengan AHH tertinggi di Provinsi Lampung.

Grafik 2.26  
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

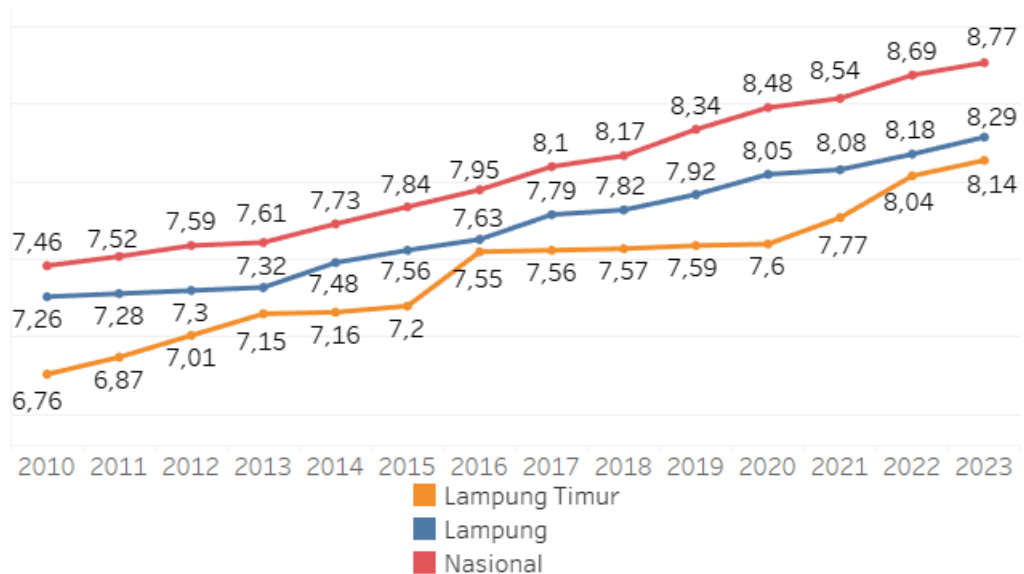


Sumber: BPS, 2024

#### 2.2.1.8.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan RLS Kabupaten Lampung Timur pada periode 2010-2022 menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 8,14 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas 8 (SMP kelas II) sampai kelas 9 (SMP kelas III).

Grafik 2.27  
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

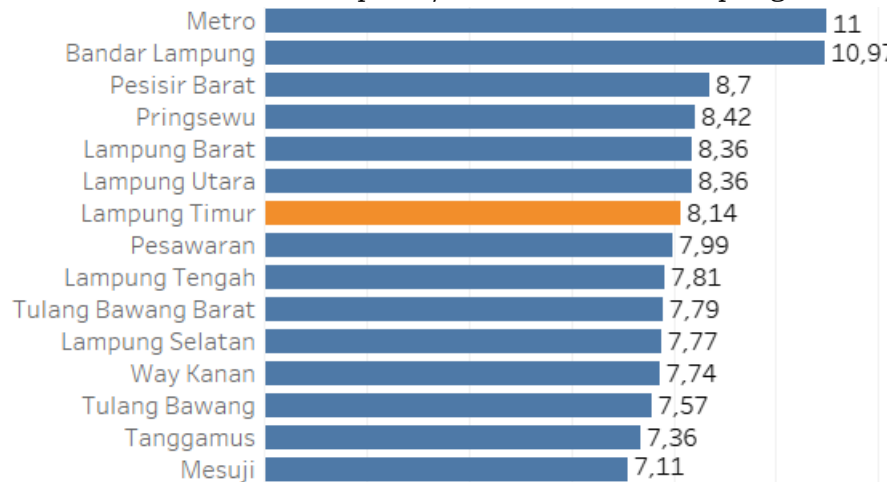


Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2010

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7 untuk rata-rata lama sekolah tertinggi.

Grafik 2.28  
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

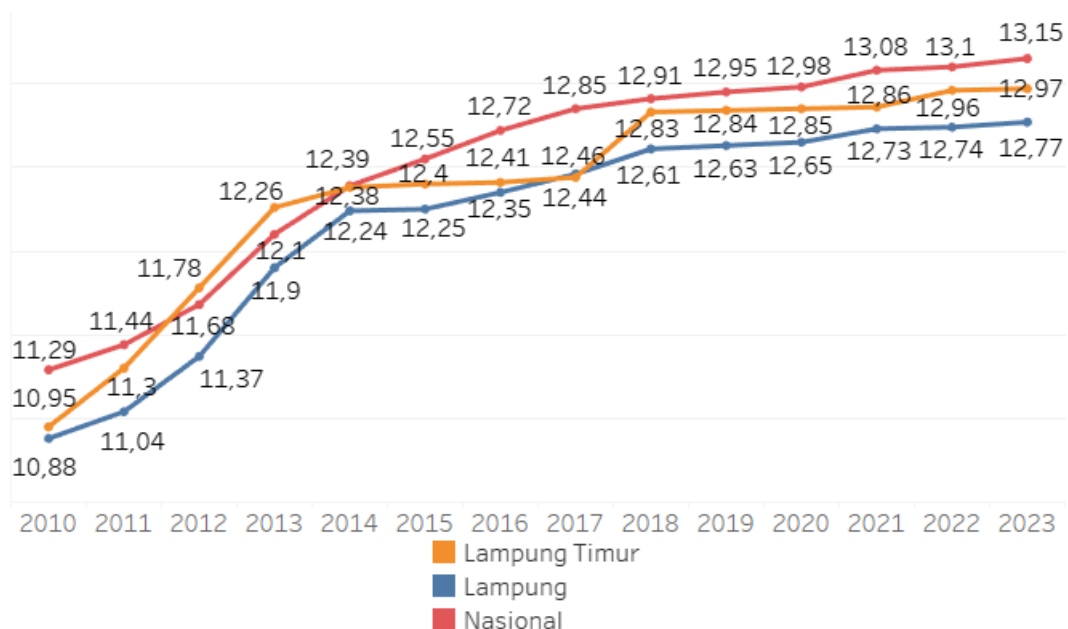


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

### 2.2.1.8.3 Harapan Lama Sekolah

Perkembangan HLS Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode 2010-2023. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,97 tahun, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

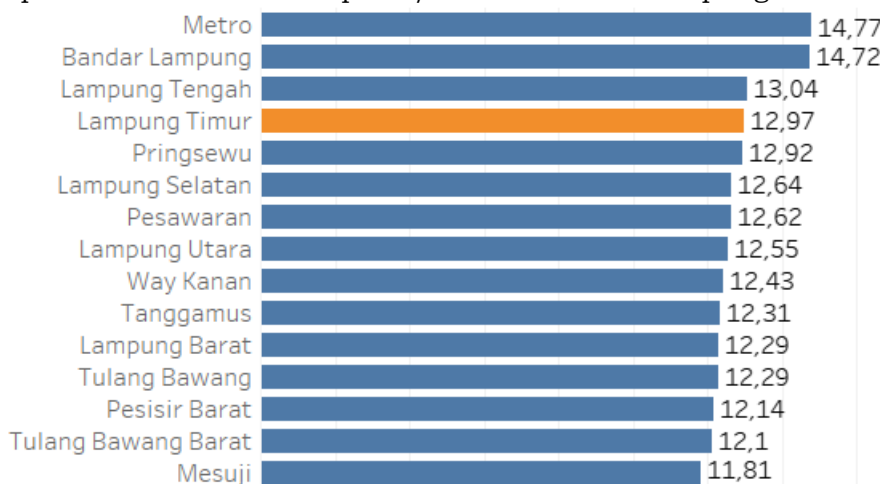
Grafik 2.29  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2010

Grafik 2.30  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



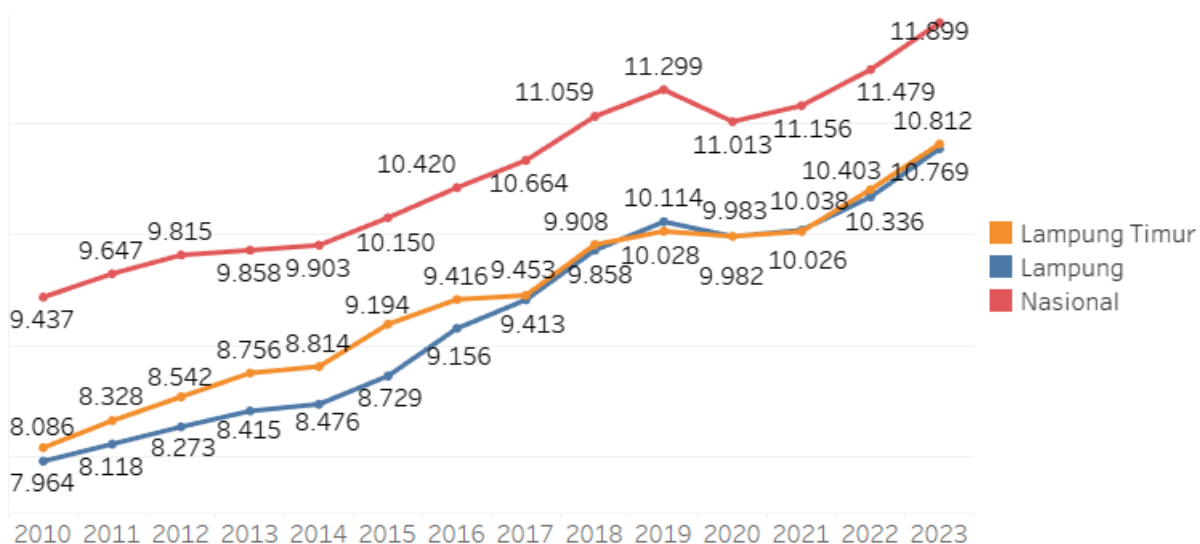
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-4 untuk harapan lama sekolah tertinggi setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah.

#### 2.2.1.8.4 Pengeluaran per Kapita

Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan pada periode 2010-2023. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh, dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Grafik 2.31  
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

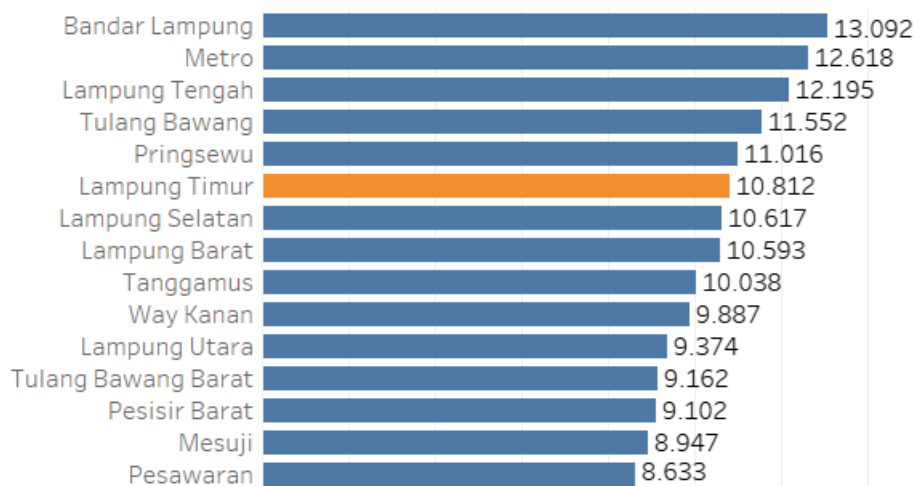


Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2010

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-6 untuk pengeluaran per kapita tertinggi dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung.

Grafik 2.32  
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

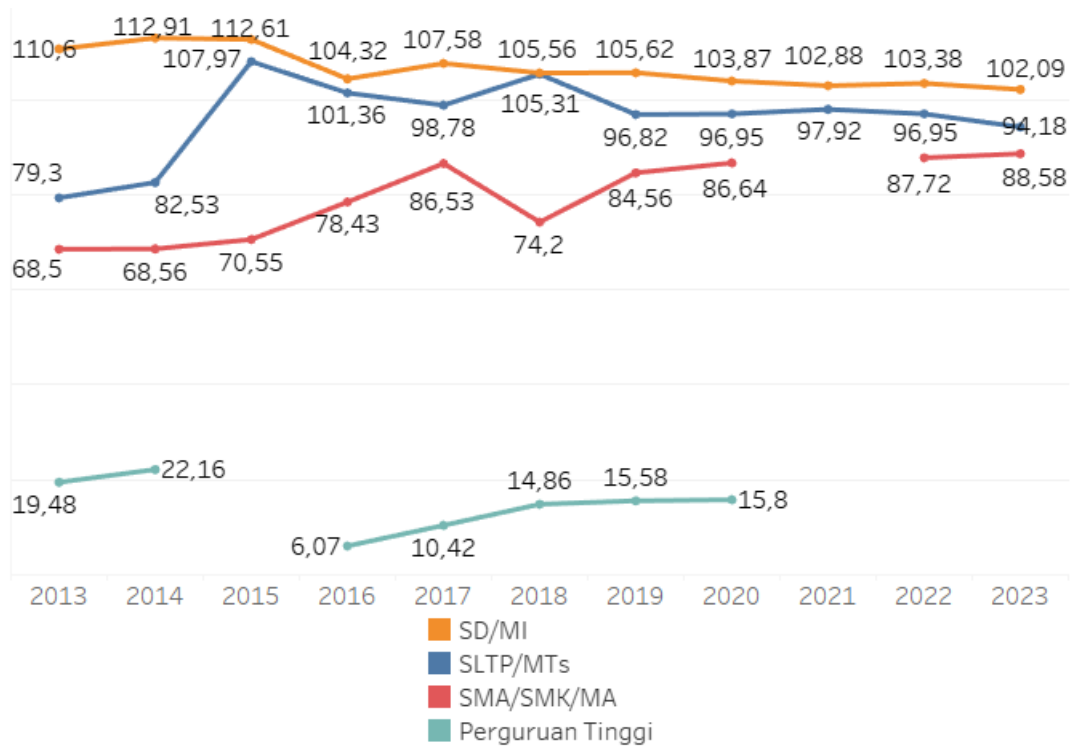
## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

### 2.2.2.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

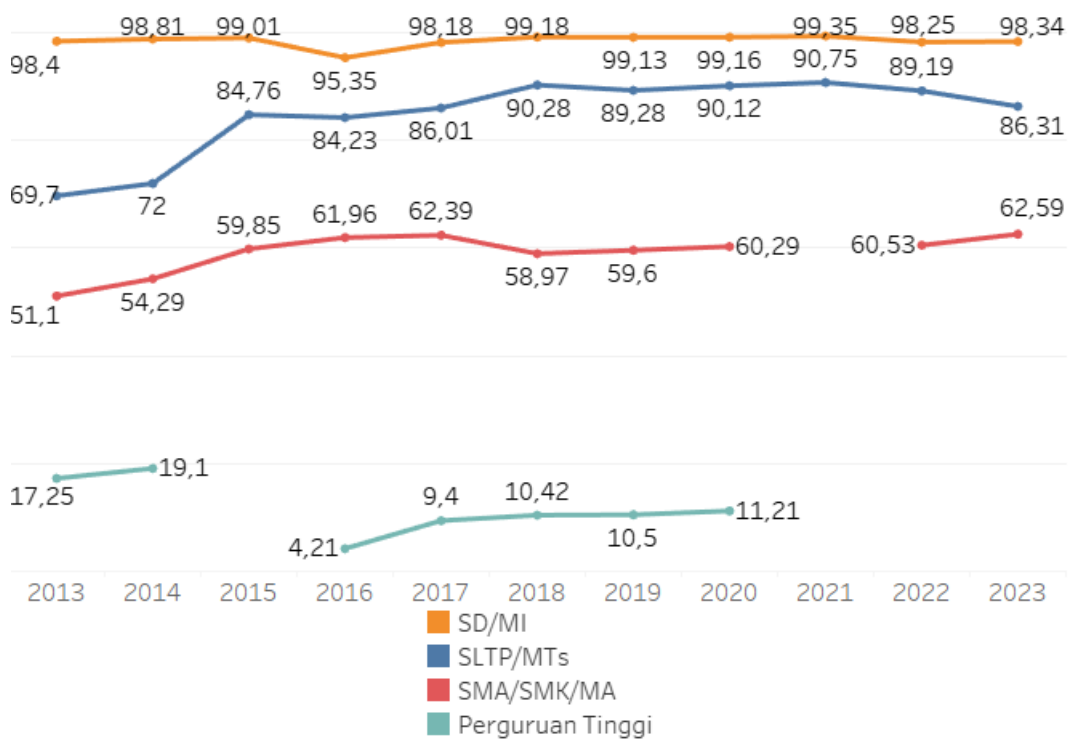
Grafik 2.33  
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Grafik 2.34  
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

APK dan APM SD/MI Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami penurunan pada periode 2013-2023, sedangkan APK dan APM SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA cenderung mengalami peningkatan. APK dan APM Perguruan Tinggi mengalami peningkatan pada periode tahun 2013-2014, lalu mengalami penurunan pada tahun 2016, sebelum kembali meningkat pada tahun 2016-2020.

Mulai tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menetapkan bahwa Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi). Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang SD mencapai 53,5 persen dan jenjang SMP mencapai 59,2 persen. Untuk persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, pada jenjang SD sebesar 38,4 persen dan jenjang SMP sebesar 38,9 persen.

Tabel 2.31  
Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur

No	Jenjang	Capaian Kemampuan Literasi		Capaian Kemampuan Numerasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SD	50,9%	53,5%	28,5%	38,4%
2	SMP	45,5%	59,2%	36,2%	38,9%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2024

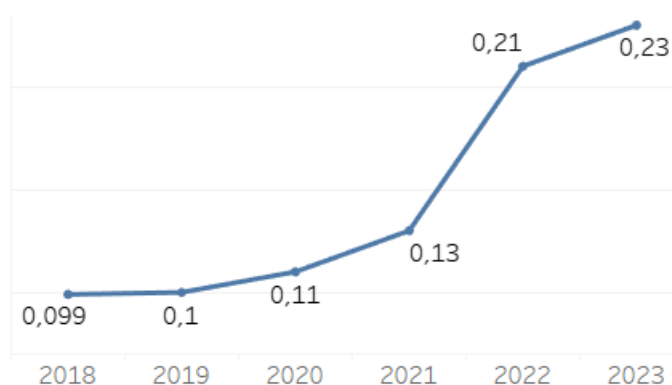
## 2.2.2.2 Kesehatan

### 2.2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah serangkaian parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan keluarga dari segi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Lampung Timur menargetkan capaian IKS tahun 2023 sebesar 0,38 persen, sedangkan capaian IKS tahun 2023 baru mencapai 0,23 persen atau 60,53 persen dari target, belum mencapai target namun meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2022 (0,21 persen). Perkembangan capaian IKS dalam enam tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut.

Grafik 2.35  
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2018

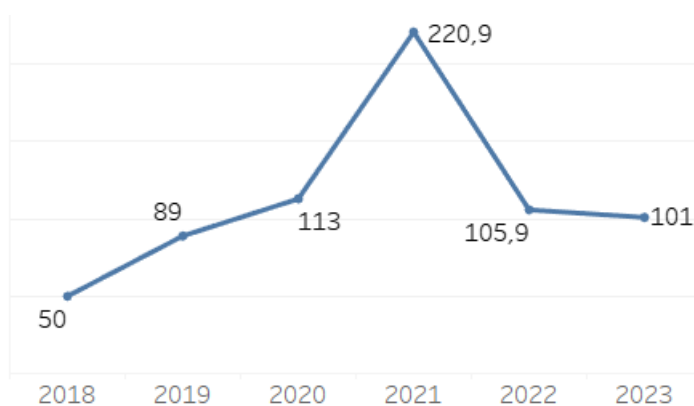
#### 2.2.2.2.2 Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian ibu dalam setiap kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKI merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan aksesibilitas sistem perawatan kesehatan bagi perempuan. AKI dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. Semakin rendah AKI, semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan semakin tinggi harapan hidup ibu. *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengamanatkan pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak untuk mencapai target kesehatan yang lebih baik secara global, yaitu menurunkan angka kematian ibu menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2023, jumlah kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur yang dilaporkan berjumlah 15 kasus atau 101 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan jumlah kasus kematian ibu di tahun 2022 yaitu 16 kasus atau 105,93 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2023, sebagian besar kasus kematian ibu (66,7 persen) terjadi pada periode nifas (66,7 persen) dengan penyebab kematian tertinggi adalah perdarahan (40 persen) dan lain-lain (33 persen). Faktor-faktor yang memengaruhi AKI meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan, pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara harus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan ibu guna mengurangi angka kematian ibu secara signifikan.

Grafik 2.36  
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2018

#### 2.2.2.2.3 Kematian Bayi

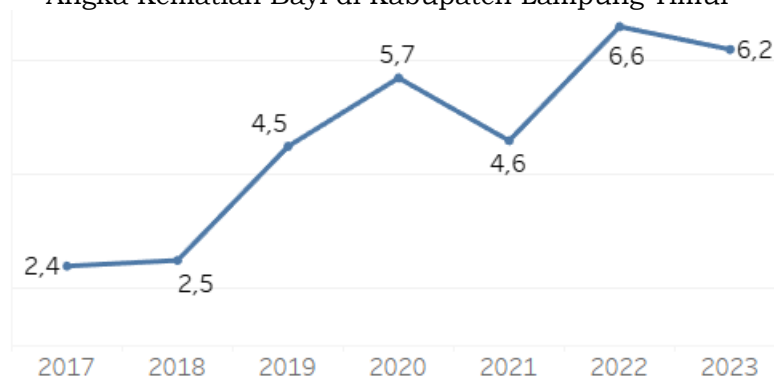
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKB umumnya dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. AKB merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena mencerminkan tingkat kesehatan bayi dan kualitas sistem perawatan kesehatan maternal dan neonatal. Semakin rendah AKB, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi, serta meningkatnya harapan hidup bayi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengamanatkan pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak untuk mencapai target kesehatan yang lebih baik secara global, yaitu menurunkan angka kematian bayi menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup hingga tahun 2030.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKB meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap imunisasi, pendidikan ibu, status sosial-ekonomi, sanitasi yang baik, gizi yang memadai, dan faktor lingkungan. Upaya untuk mengurangi AKB melibatkan perbaikan akses terhadap perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran ibu tentang perawatan bayi, pencegahan penyakit menular, imunisasi, peningkatan gizi, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan.

Pemantauan AKB secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan tertentu yang mempengaruhi bayi dan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan. Pada tahun 2023, kematian bayi di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data laporan berjumlah 92 kasus atau 6,2 per 1000 kelahiran hidup, turun bila dibanding kasus kematian bayi tahun 2022 (110 kasus atau 6,6 per 1000 kelahiran hidup).

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif, kondisi tersebut memerlukan peningkatan upaya penurunan AKB dan konsistensi program penurunan AKB yang melibatkan berbagai program dan sektor.

Grafik 2.37  
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur

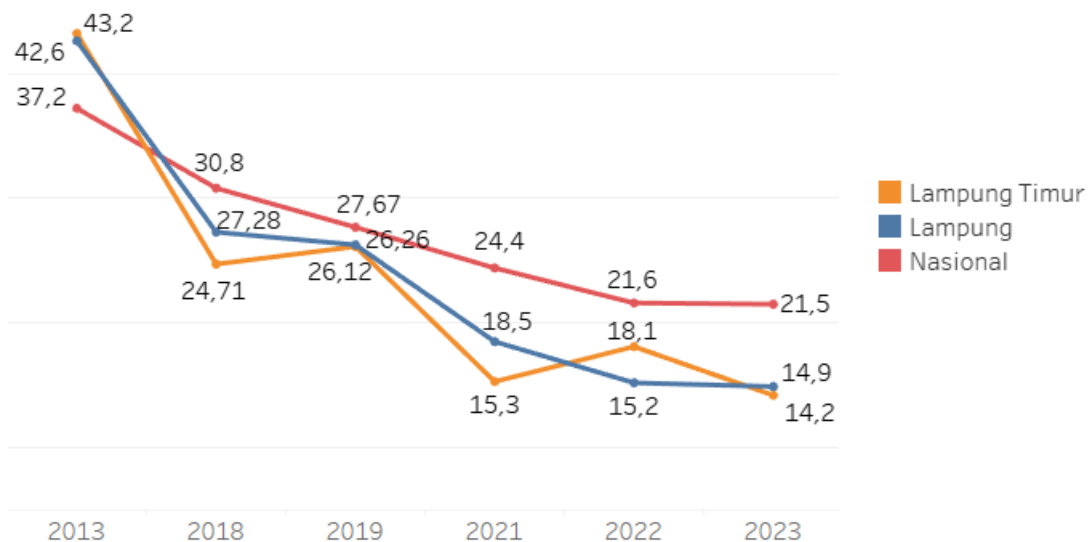


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2017

#### 2.2.2.2.4 Prevalensi Stunting

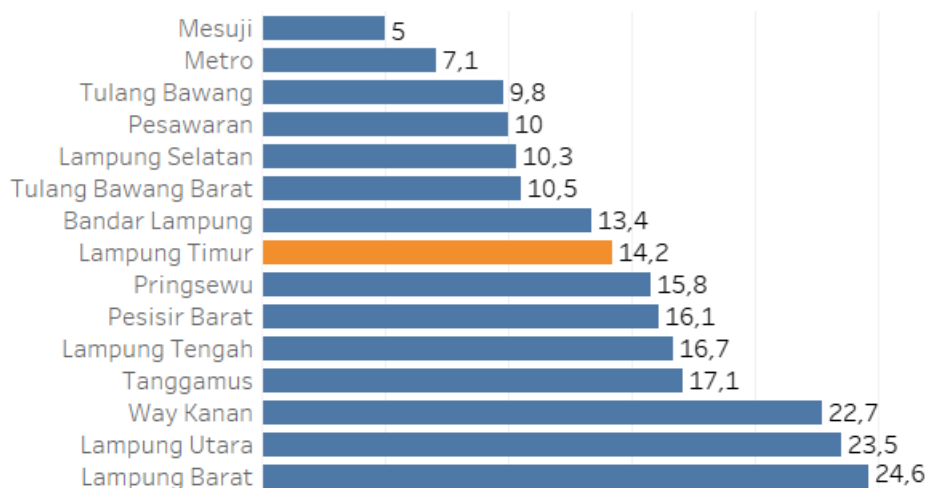
*Stunting* pada balita adalah kondisi anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, *stunting* di Kabupaten Lampung Timur mencapai 24,71 persen. Sedangkan berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, *stunting* di Kabupaten Lampung Timur mencapai 18,1 persen, namun angka tersebut menurun pada tahun 2023, di mana berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia, *stunting* balita di Kabupaten Lampung Timur sebesar 14,2 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 prevalensi *stunting* terendah di Provinsi Lampung. Gambaran perkembangan *stunting* di Kabupaten Lampung Timur dibandingkan dengan angka *stunting* di Provinsi Lampung dan Nasional adalah sebagai berikut.

Grafik 2.38  
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: Riskesdas dan SSGI, 2024  
Data Awal: 2013

Grafik 2.39  
Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

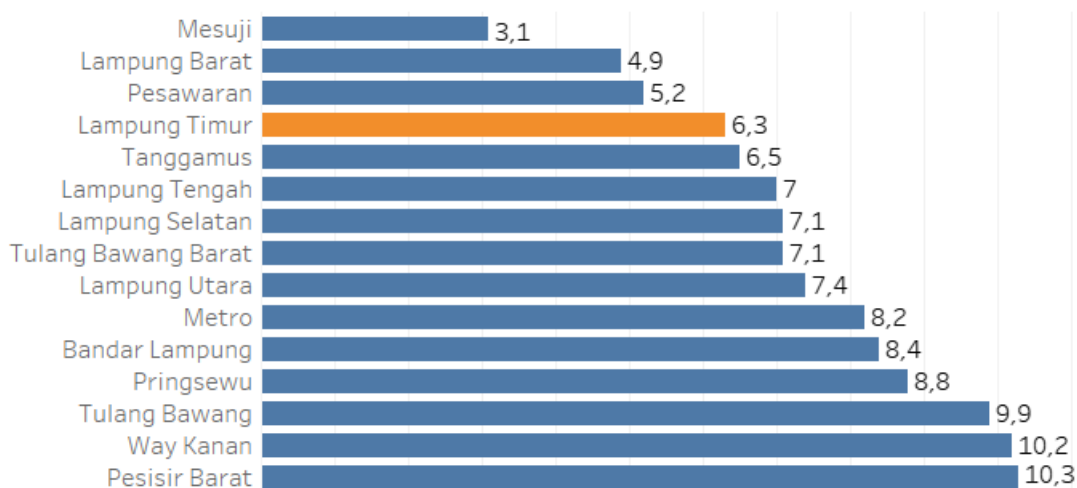


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

#### 2.2.2.2.5 Prevalensi Wasting

Gizi kurang merupakan salah satu indikator masalah gizi. Indikator gizi kurang diukur menurut tinggi badan (BB/TB)/ *wasting*. *Wasting* memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, misalnya terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang menyebabkan anak menjadi kurus.

Grafik 2.40  
Prevalensi *Wasting* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

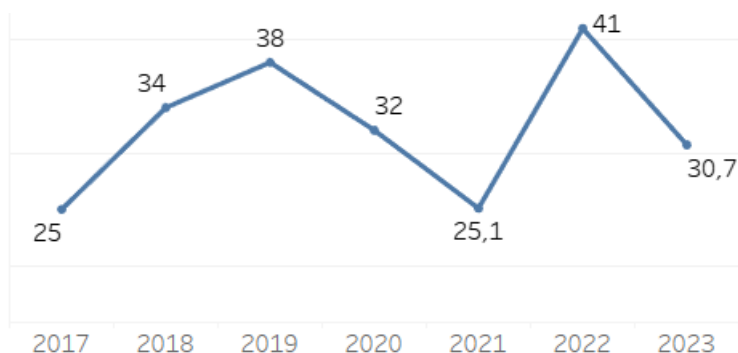
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan bahwa persentase gizi kurang di Indonesia sebesar 17,7%. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, *wasting* Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 6,3 persen, menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 8,9 persen. Capaian prevalensi *wasting* Kabupaten Lampung Timur telah berada di bawah prevalensi *wasting* Provinsi Lampung yang sebesar 7,3 persen. Jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan prevalensi *wasting* terendah di Provinsi Lampung.

#### 2.2.2.2.6 Kasus Tuberkulosis

Saat ini, tuberkulosis masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Berdasarkan Global TB Report, Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus TB tertinggi kedua setelah India, dengan estimasi 1.060.000 kasus dan angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Persentase penemuan dan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 hanya sebesar 30,7 persen dari target 92 persen, turun bila dibandingkan capaian tahun 2022 yakni 41 persen. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) semua kasus tuberkulosis pada tahun 2023 sebesar 98 persen, turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 98,4 persen. Perkembangan penemuan dan pengobatan TB di Kabupaten Lampung Timur relatif masih rendah bila dibandingkan target yang ditetapkan.

Grafik 2.41  
Persentase Penemuan dan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023  
Data Awal: 2016

Grafik 2.42  
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2011

### 2.2.2.2.7 Kasus Penyakit HIV/AIDS

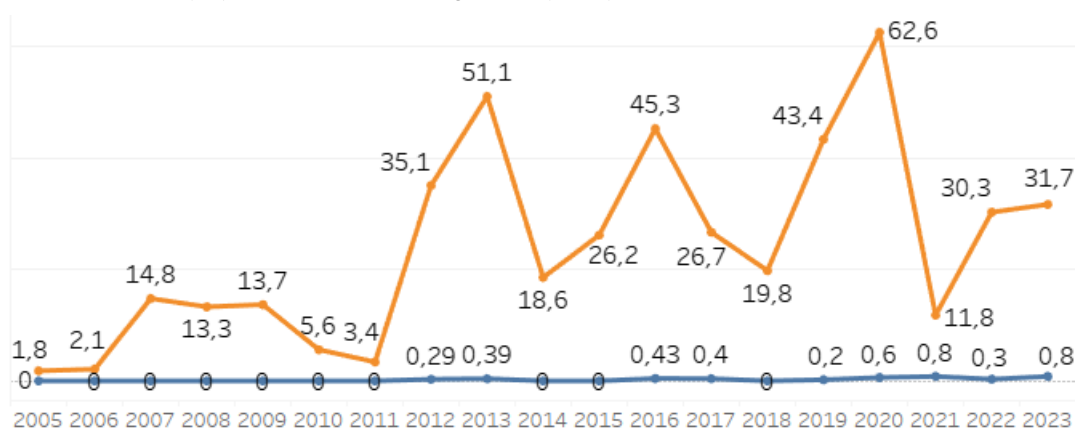
Epidemi HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, dimana keadaan yang sebenarnya jauh lebih besar dari pada yang tercatat dalam pelaporan. Salah satu strategi penanganan HIV adalah penemuan kasus sedini mungkin sehingga dapat ditatalaksana dengan baik. Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 menargetkan insiden HIV per 1.000 penduduk sebesar 0,19 per 1.000 penduduk. Insidens HIV per 1.000 penduduk yang terinfeksi HIV adalah jumlah kasus TB baru yang ditemukan selama periode waktu tertentu per 1.000 penduduk. Pada tahun 2023, berdasarkan laporan ditemukan 60 kasus HIV sehingga capaian kinerja pada indikator di atas adalah 0.02 per 1.000 penduduk.

### 2.2.2.2.8 Kasus Penyakit DBD

Penyakit DBD termasuk di antara *emerging diseases* yang sampai saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini dapat muncul di sepanjang tahun dan dapat menyerang semua umur dan sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang spesifik.

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 berjumlah 361 kasus (*Incidence Rate/IR* 31,7 per 100.000 penduduk), meningkat bila dibanding tahun 2022 dengan jumlah kasus 324 kasus (*Incidence Rate/IR* 30,3 per 100.000 penduduk). *IR* DBD tersebut melampaui *IR* DBD yang diharapkan yakni <10 per 100.000 penduduk. Dari jumlah kasus DBD di atas, dilaporkan 2 kasus kematian akibat DBD sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0,6 persen. Perkembangan *IR* dan *CFR* DBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.43  
*Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR) DBD di Kabupaten Lampung Timur*



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

---

#### **2.2.2.2.9 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap**

Program imunisasi pada bayi bertujuan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak rubela.

Capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) tahun 2023 sebesar 88,8 persen, menurun bila dibanding capaian tahun 2022 (94,1 persen), belum mencapai target 100 persen namun berada di atas angka IDL Provinsi hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 (23,8 persen). Rendahnya capaian IDL salah satunya disebabkan karena keterlambatan *dropping* vaksin dan logistik dari pusat dan kendala teknis di sistem pencatatan dan pelaporan *online*.

#### **2.2.2.2.10 Penyakit Tidak Menular**

Dilihat dari beban penyakit (*diseases burden*) yang diukur dengan *Disability Adjusted Life Years* (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3 persen pada tahun 1990 menjadi 23,6 persen pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8 persen pada tahun 1990 menjadi 69,9 persen pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9 persen pada tahun 1990 menjadi 6,5 persen pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas (Kementerian Kesehatan, 2020).

Hasil Survey Kesehatan Indonesia Tahun 2023 melaporkan bahwa di Provinsi Lampung prevalensi kanker berdasarkan diagnosa Dokter sebesar 1,2 persen, prevalensi diabetes mellitus penduduk >15 tahun berdasarkan diagnosa Dokter 1,6 persen, penyakit jantung berdasarkan diagnosa dokter 0,58 persen, dan prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosa dokter 7,4 persen. Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*.

#### **2.2.2.2.11 Situasi Kesehatan Lingkungan**

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di samping faktor kualitas pelayanan kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, dan meningkatnya jumlah kejadian penyakit berbasis lingkungan. Berdasarkan data yang dilaporkan Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur, keluarga yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada tahun 2023 mencapai 96,8 persen, meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 (94,59 persen),

sedangkan persentase KK dengan SBS mencapai 98,6 persen. Masih terdapat 5,1 persen penduduk yang tidak menggunakan jamban yang sehat, sehingga faktor resiko penularan penyakit terutama penyakit infeksi saluran cerna masih tinggi.

Sedangkan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang berpedoman pada lima pilar yaitu: (1) stop buang air besar sembarangan (BABS); (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) Pengamanan sampah rumah tangga; (5) pengamanan limbah cair rumah tangga, sampai dengan tahun 2023 dari 264 desa belum ada desa dengan 5 pilar STBM.

#### **2.2.2.2.12 Situasi Sumber Daya Kesehatan**

##### **a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama**

Pada tahun 2023, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 36 Puskesmas, terdiri dari 15 Puskesmas Rawat Inap, 19 Puskesmas Non Rawat Inap dan 2 (dua) Puskesmas baru dalam proses registrasi ke Kementerian Kesehatan yaitu Puskesmas Mekar Karya di Kecamatan Waway Karya dan Puskesmas Tulung Balak di Kecamatan Batanghari Nuban. Berdasarkan kewilayahan, jenis Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 31 Puskesmas Pedesaan, 3 (tiga) Puskesmas terpencil. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur telah terakreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas mengamanatkan bahwa Puskesmas harus memenuhi standar ketenagaan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Jenis ketenagaan dimaksud meliputi Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer, Dokter gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ATML. Pada tahun 2023, di Kabupaten Lampung Timur terdapat 12 Puskesmas (35,29 persen) yang telah memenuhi standar 9 jenis tenaga. Walaupun belum memenuhi target 100 persen standar minimal pemenuhan tenaga di Puskesmas, namun persentase tersebut meningkat bila dibanding tahun 2022 (23,53 persen) dan tahun 2021 (14,7 persen).

Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah 3 (tiga) Puskesmas per 100.000 atau 1:284.359 penduduk, sedangkan rasio Puskesmas terhadap Kecamatan adalah 1:1,4 Puskesmas yang berarti bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur terdapat Puskesmas minimal satu Puskesmas bahkan ada yang dua Puskesmas. Selain Puskesmas, sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 87 Puskesmas Pembantu dari 264 desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan 1.308 Posyandu aktif.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus

hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu. Integrasi Pelayanan kesehatan primer dilaksanakan di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer dengan menerapkan konsep *Primary Health Care* dan memerlukan peran serta aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut melibatkan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas Pembantu dan Posyandu yang selanjutnya akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer.

b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

Di Kabupaten Lampung Timur terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah Rumah Sakit tipe C milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 521/Menkes/SK/XIV/2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan resmi menjadi RSUD PPK-BLUD Penuh tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor B.351/28/SK/2012. Serta terakreditasi untuk ketiga kali dengan predikat Paripurna berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 024/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/X/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022.

Peran RSUD Sukadana sangat strategis dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. Peran tersebut utamanya dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Berdasarkan angka kunjungan pada tahun 2023, rawat jalan yang tercatat yaitu 37.145 dan kunjungan rawat inap tercatat yaitu 5.765. Angka kunjungan tersebut terdapat peningkatan pemanfaatan RSUD Sukadana oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Sebagai indikator cakupan pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32  
Capaian Kinerja RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

No.	Indikator	Standar	Capaian 2023
1.	AVLOS (hari)	6 – 9	2,73
2.	BOR (%)	60 – 85	44
3.	TOI (hari)	1 – 3	4,02
4.	BTO (kali)	40 – 50	57,08
5.	NDR (%)	<25	11,98
6.	GDR (%)	<45	41,3
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	>62,51	81,47

Sumber: RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 2023

Adapun jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yaitu, Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Jantung dan Pembuluh

Darah, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Paru, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Psikologi, Radiologi, Hemodialisa dan Laboratorium.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit tipe C harus memberikan pelayanan paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik dan pelayanan rawat inap. Untuk sumber daya manusia terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga non kesehatan sedangkan untuk peralatan paling sedikit terdiri peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

Kementerian Kesehatan mencanangkan 6 (enam) pilar transformasi sistem kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Salah satu pilar yang dicanangkan adalah transformasi layanan rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit. Transformasi layanan rujukan ini, merupakan momentum bagi rumah sakit untuk melakukan tinjauan ulang dalam menyusun strategi pengembangan layanan sehingga dapat menjadi jembatan bagi keberhasilan transformasi layanan rujukan dalam transformasi sistem kesehatan.

Fokus Kementerian Kesehatan dalam transformasi layanan rujukan menitikberatkan kepada pengembangan layanan dalam menangani 9 penyakit prioritas. Transformasi layanan rujukan dilakukan melalui program jejaring rujukan dan pengelompokkan rumah sakit menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Rumah Sakit Madya, Rumah Sakit Utama, dan Rumah Sakit Paripurna. Masing-masing kategori memiliki kapasitas yang berbeda.

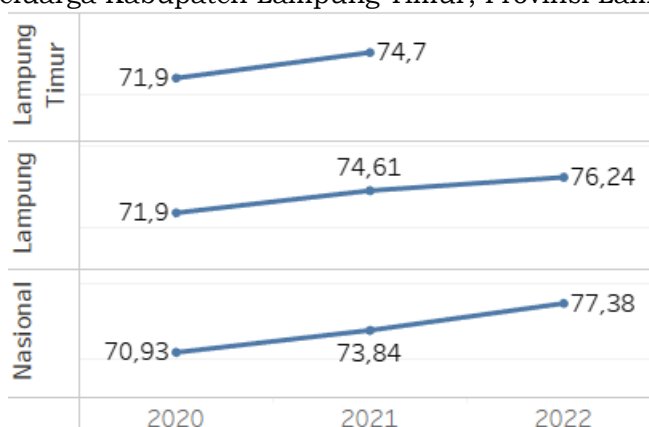
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1277/2024 telah mengamanahkan RSUD Sukadana sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

### 2.2.2.3 Indeks Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas keluarga sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.

IKK Kabupaten Lampung Timur mencapai 74,7 persen pada tahun 2021, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 71,9 persen. Capaian IKK Kabupaten Lampung Timur sudah melampaui capaian Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2021.

Grafik 2.44  
Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

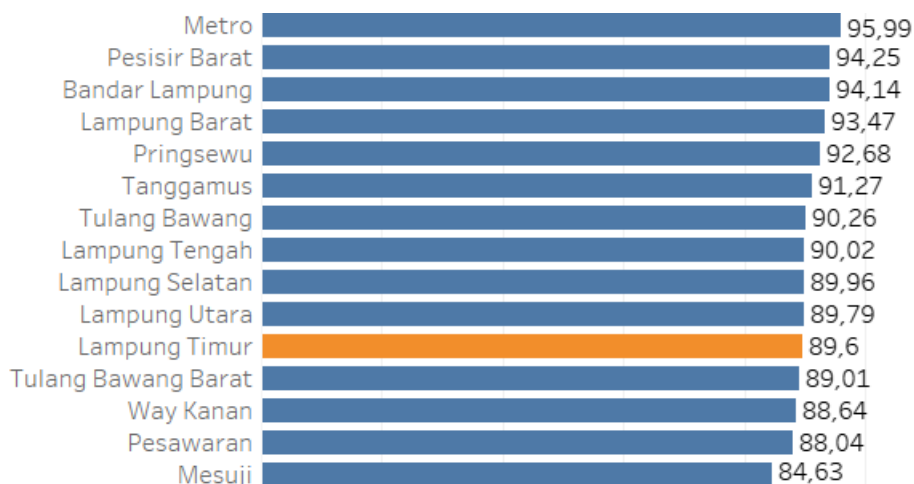
Data Awal: 2020

Keterangan: Data IKK Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 tidak tersedia

### 2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

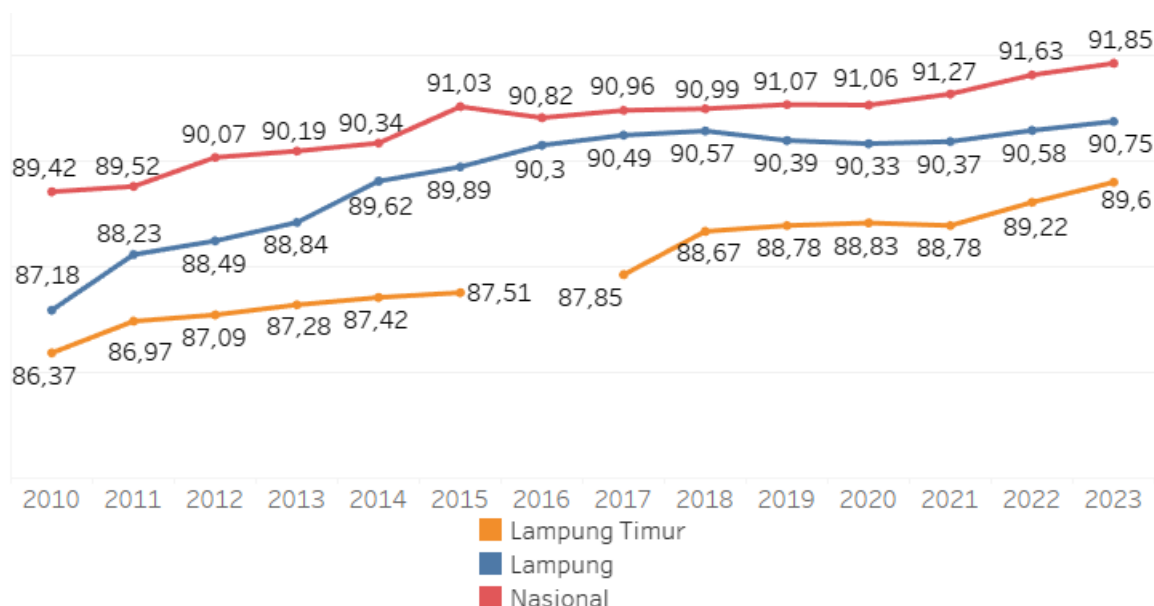
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Perkembangan IPG Kabupaten Lampung Timur pada periode 2010-2023 cenderung meningkat. IPG Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 mencapai 89,6, masih berada di bawah IPG Provinsi dan Nasional yang masing-masing sebesar 90,75 dan 91,85. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-5 dengan IPG terendah.

Grafik 2.45  
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2.46  
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2010

Keterangan: Data IPG Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 tidak tersedia

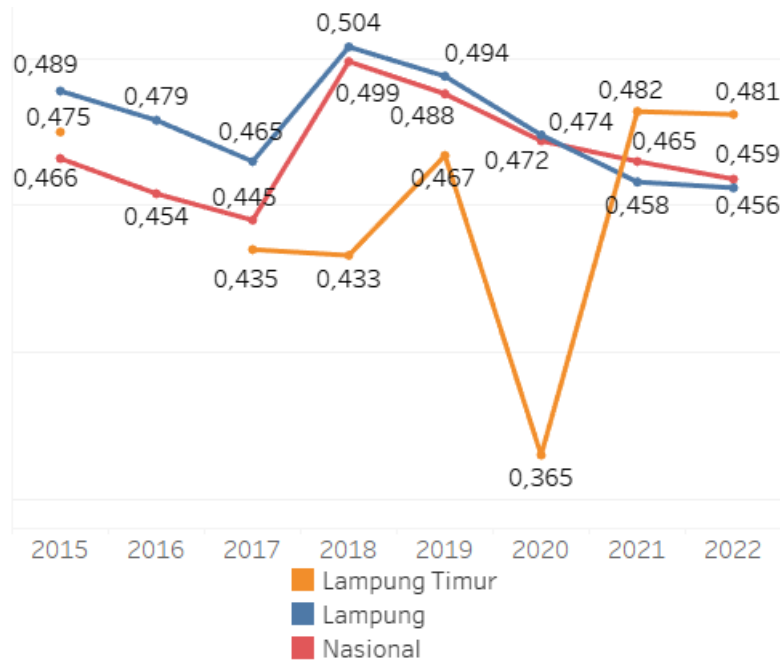
Terkait dengan perlindungan anak, Indikator yang dapat menggambarkan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terkait data ini, Kabupaten Lampung Timur merujuk pada skor IPA Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 IPA Provinsi Lampung adalah 61,61 persen. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 65,07 persen, maka terjadi penurunan sebesar 3,46 poin. Secara periodik, IPA Provinsi Lampung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah rata-rata IPA nasional.

### 2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur kurun waktu delapan tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif.

Grafik 2.47

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

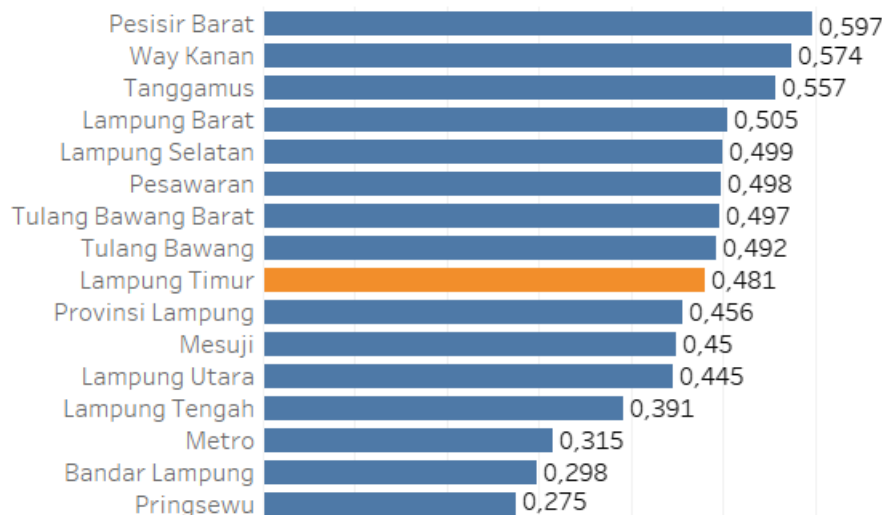


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Data Awal: 2015

Grafik 2.48

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Pada tahun 2022 indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,481, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,482 meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 dengan Indeks Ketimpangan Gender terendah.

#### 2.2.2.6 Kepemudaan

Fasilitasi bagi generasi muda untuk mengembangkan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penduduk Lampung Timur yang sebagian berusia produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun.

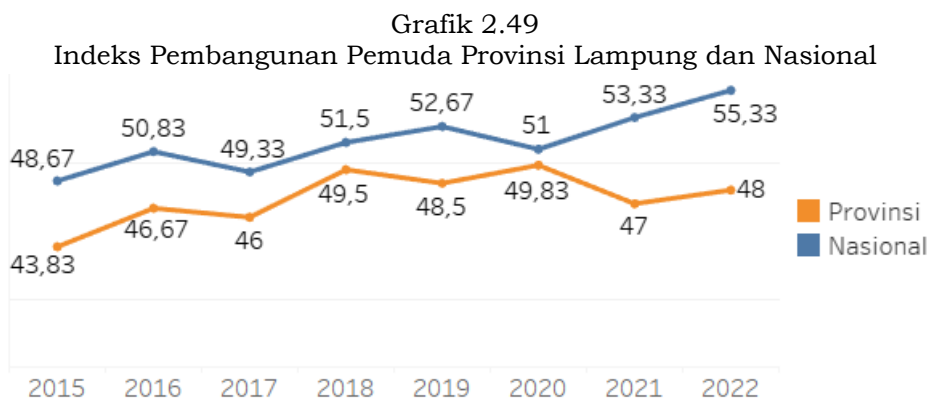
Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk yang masuk kategori pemuda pada tahun 2023 sebanyak 255.469 jiwa atau 22,93 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.33  
Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Kategori Pemuda	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	42.202	41.131	83.333
20-24	45.657	43.937	89.594
25-29	42.721	39.821	82.542
<b>Total</b>	<b>130.580</b>	<b>124.889</b>	<b>255.469</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. IPP Provinsi Lampung mencapai 48 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 47 persen. Capaian IPP Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian IPP Nasional dalam delapan tahun terakhir.



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2023

Data Awal: 2015

### 2.2.2.7 Seni Budaya

Pemeliharaan kebudayaan merupakan upaya mempertahankan objek kebudayaan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat, sedangkan pengembangan kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Penguatan objek kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebaran; penelitian; pengayaan keberagaman; revitalisasi; adaptasi; reaktualisasi; rekayasa; pembudayaan; dan/atau internalisasi. Pemanfaatan melalui pendayagunaan dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: agama; sosial; ekonomi; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; kebudayaan; dan pariwisata.

Tabel 2.34  
Potensi Budaya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

No.	Jenis Potensi Budaya	Jumlah
1	Bangunan Cagar Budaya	53
2	Benda Cagar Budaya	217
3	Situs Cagar Budaya	24
4	Organisasi Seni Rupa	-
5	Organisasi Seni Pertunjukan	41
6	Galeri Seni Rupa	-
7	Upacara Adat	Begawi dan Aqiqah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2023

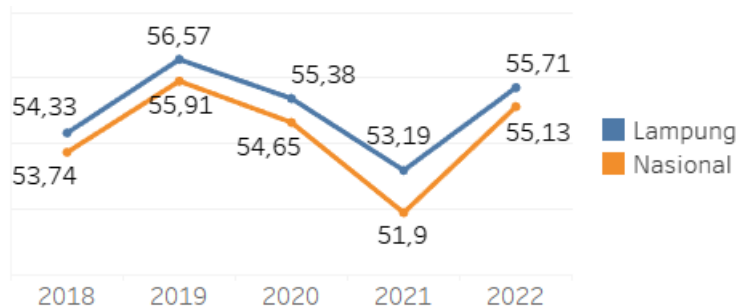
Masyarakat Lampung Timur yang multi-etnis memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Lampung Timur secara berkala menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo;
- b. Museum Budaya di Kecamatan Sukadana;
- c. Bangunan Adat Sesat Agung dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi di Kecamatan Sukadana;
- d. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Melinting;
- e. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga;
- f. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting; dan
- g. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai instrumen yang signifikan dalam menggambarkan perkembangan kemajuan pada ranah kebudayaan. IPK digunakan sebagai fondasi bagi perumusan kebijakan sektor kebudayaan serta panduan dalam harmonisasi lintas sektor untuk memajukan kebudayaan. Pada tahun 2022, IPK Provinsi Lampung mencapai 55,71 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 51,19 persen. Capaian IPK Provinsi Lampung selalu melebihi capaian IPK Nasional dalam waktu lima tahun terakhir.

Grafik 2.50  
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023  
Data Awal: 2018

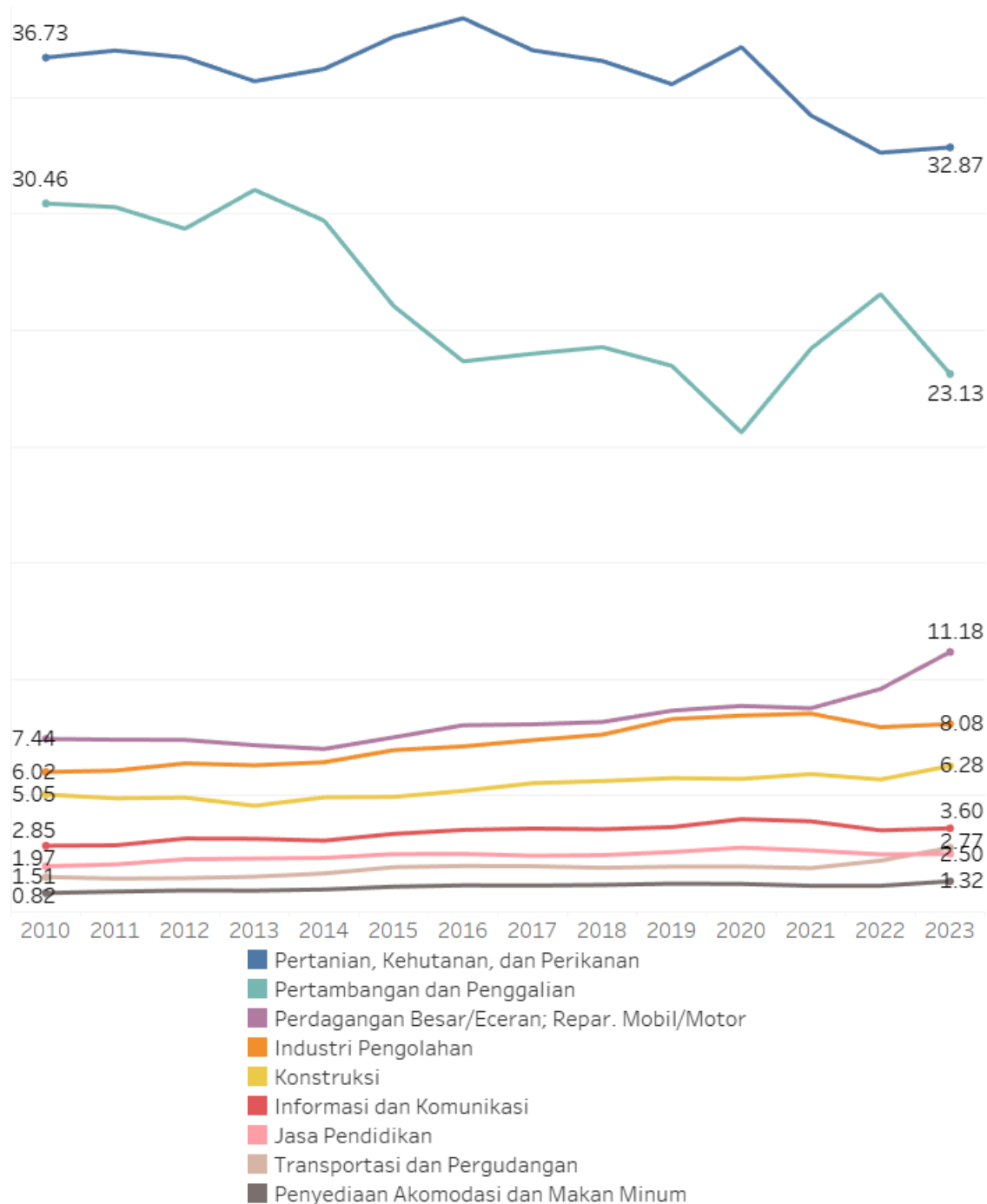
## 2.3 Aspek Daya Saing

### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar Rp 52,8 triliun, sedangkan PDRB atas harga konstan (ADHK) sebesar Rp 30,6 triliun. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah Kabupaten Pesisir Barat, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di mana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur terendah se-Provinsi Lampung.

Grafik 2.51  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur



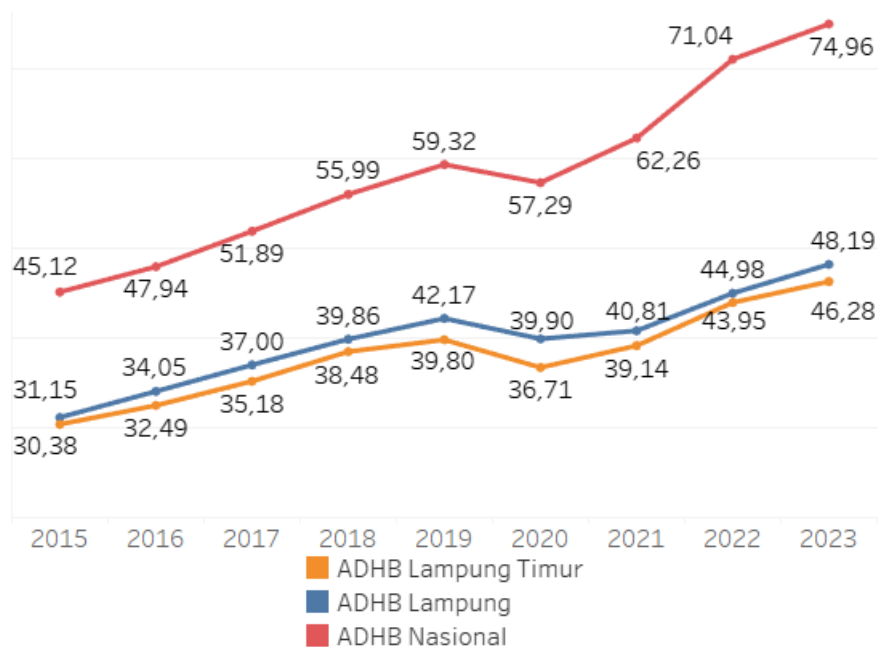
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2010

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur pada periode 2010-2023 menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan distribusi tertinggi perlahan menurun dari tahun ke tahun. Seiring dengan hal tersebut, distribusi lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan.

### 2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Grafik 2.52  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)

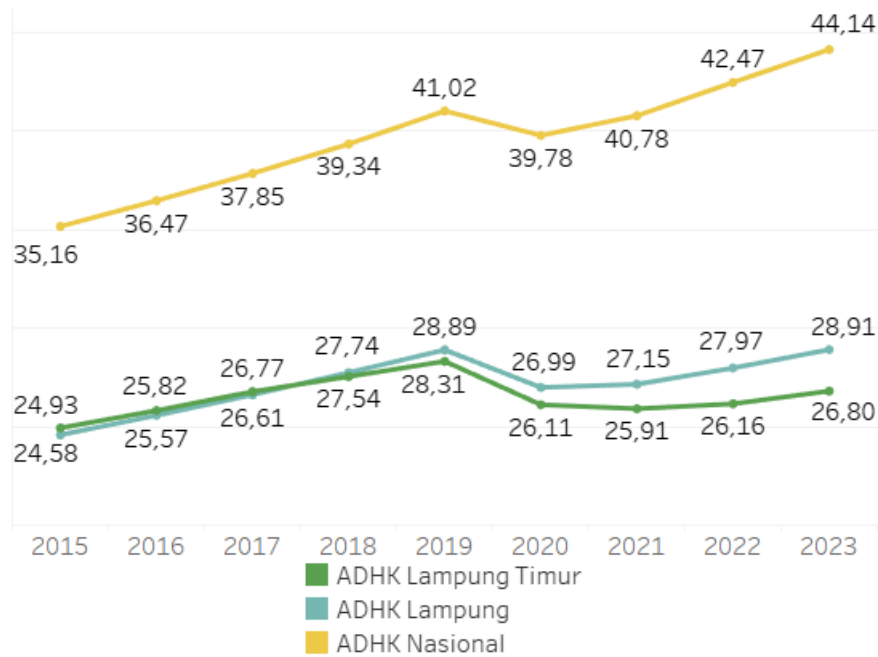


Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2015

Selama periode 2015-2019, nilai PDRB per kapita selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Lampung Timur, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021-2023. PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, sebelum kembali meningkat pada tahun 2022-2023.

Grafik 2.53  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)

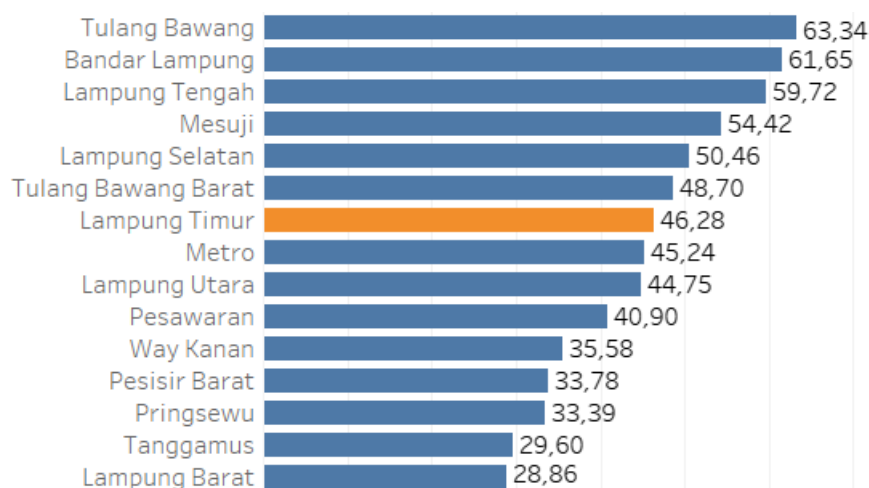


Sumber: BPS, 2024

Data Awal: 2015

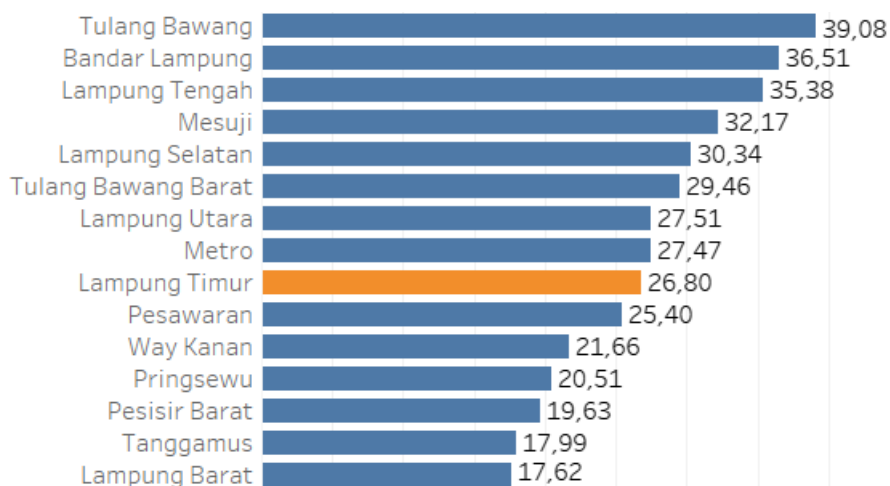
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7, sedangkan PDRB per kapita ADHK berada pada posisi ke-9.

Grafik 2.54  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2.55  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 (Juta Rupiah)



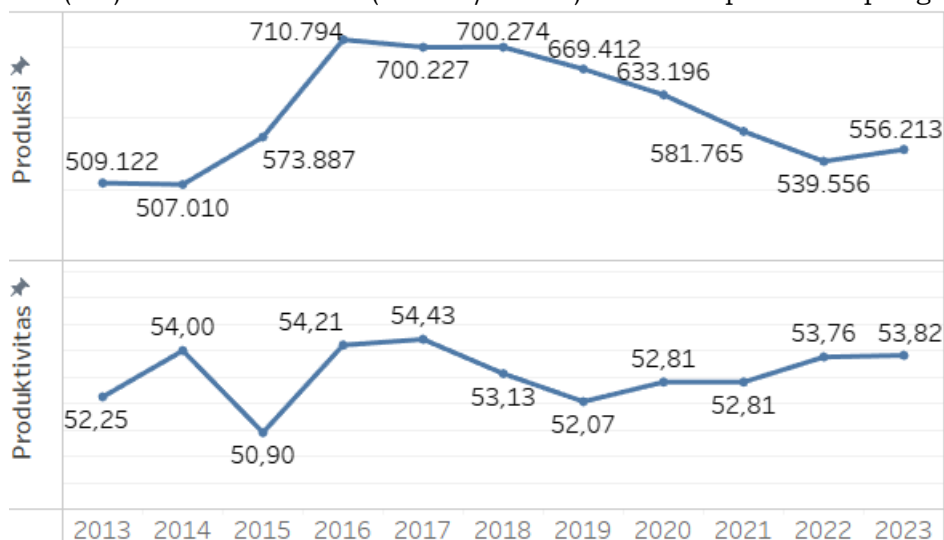
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

### 2.3.1.3 Pertanian

#### 2.3.1.3.1 Tanaman Pangan

Potensi lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat mendukung untuk budidaya pertanian. Tidak heran jika pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, merupakan sektor utama dan strategis Kabupaten Lampung Timur meskipun saat ini terjadi pergeseran bertahap dari sektor pertanian menuju industri pengolahan. Berdasarkan data, masyarakat Lampung Timur sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Selain itu, sektor pertanian tanaman pangan juga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kategori pertanian.

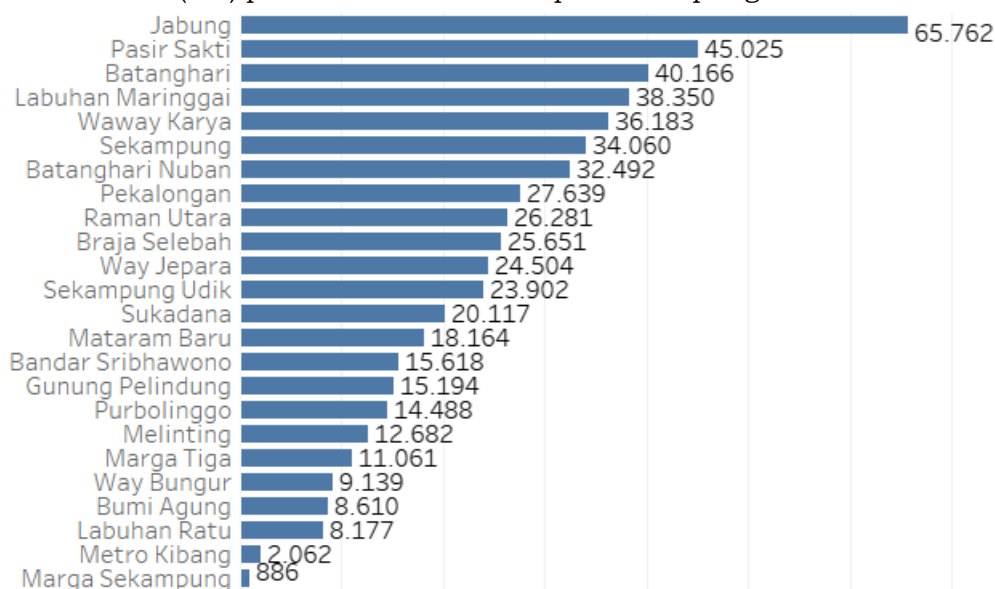
Grafik 2.56  
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Padi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

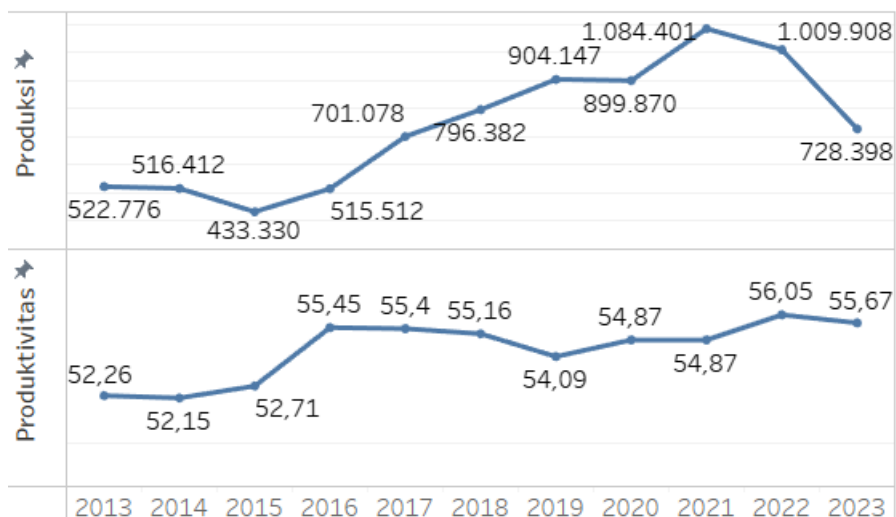
Grafik 2.57  
Produksi Padi (ton) per Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2024

Pada tahun 2023, jumlah total produksi padi (lahan sawah dan lahan kering) mencapai 556.213 ton, meningkat bila dibandingkan produksi tahun 2022 yang mencapai 539.556 ton. Perkembangan produksi padi pada periode 2016-2022 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan sehingga luas panen padi yang berkurang menyebabkan jumlah produksi yang menurun. Produktivitas padi Kabupaten Lampung Timur mencapai 58,32 kuintal per hektar pada tahun 2023, lebih tinggi bila dibandingkan produktivitas pada tahun 2022 yang mencapai 53,76 kuintal per hektar. Kecamatan Jabung memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen padi terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 65.762 ton.

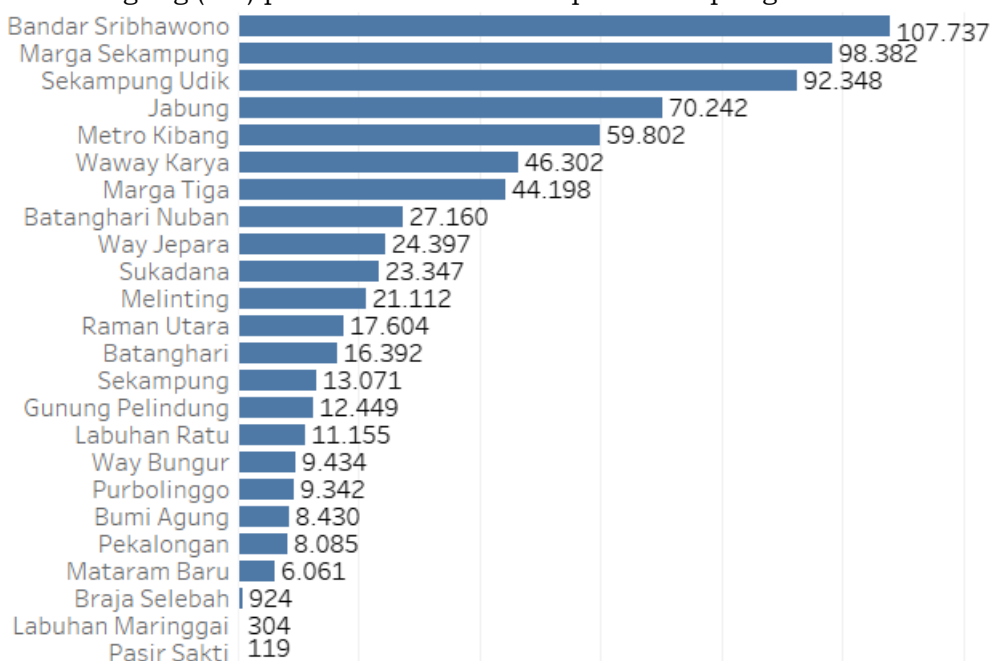
Grafik 2.58  
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Jagung Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

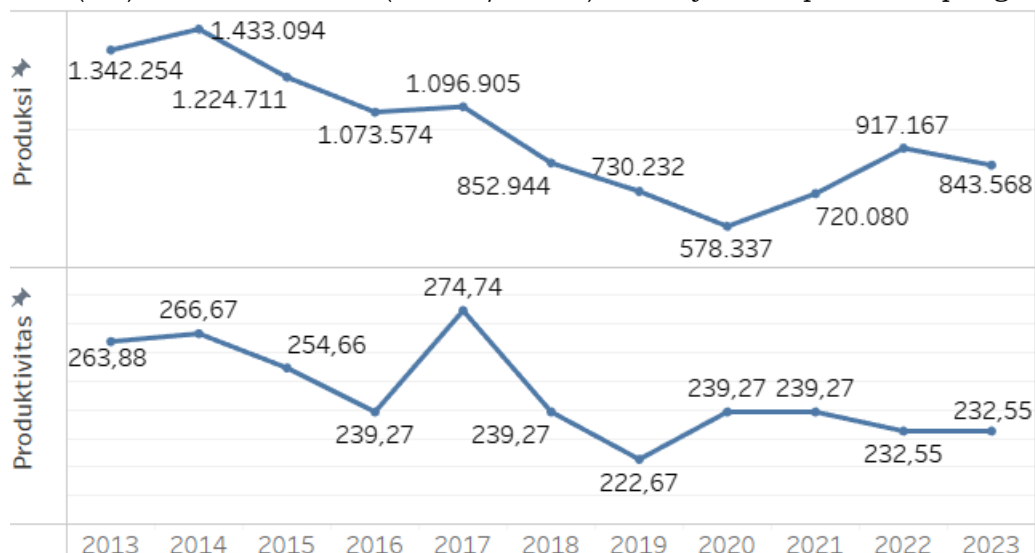
Grafik 2.59  
Produksi Jagung (ton) per Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2024

Selanjutnya, terkait dengan produksi tanaman pangan lainnya, yaitu produksi jagung, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023, produksi jagung di Kabupaten Lampung Timur mencapai 728.398 ton atau mengalami penurunan jika dibandingkan produksi tahun 2022 yang mencapai 1.009.908 ton. Kecamatan Bandar Sribhawono memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen jagung terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 107.737 ton.

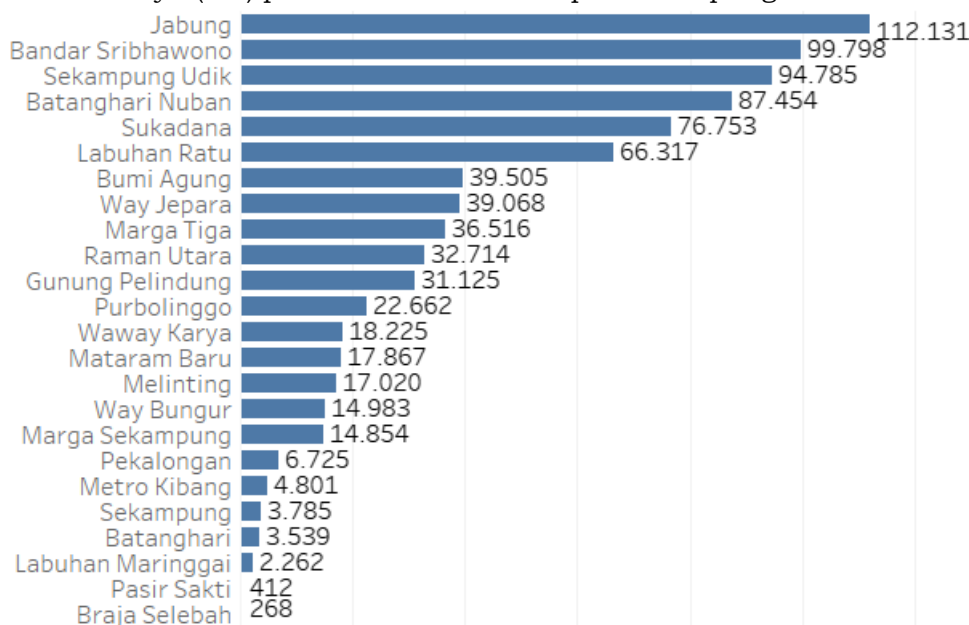
Grafik 2.60  
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Ubi Kayu Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2013

Grafik 2.61

Produksi Ubi Kayu (ton) per Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2024

Selanjutnya, terkait dengan komoditas pertanian tanaman pangan lainnya yaitu ubi kayu. Total produksi ubi kayu mencapai 843.568 ton, mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2022 yang mencapai 917.167 ton. Perkembangan produksi ubi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan sehingga luas panen ubi yang berkurang menyebabkan jumlah produksi yang menurun. Kecamatan Jabung memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen ubi kayu terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 112.131 ton.

#### 2.3.1.3.2 Hortikultura

Selain tanaman pangan, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki potensi di sektor hortikultura, khususnya buah-buahan. Komoditas pisang merupakan salah satu produk yang paling besar produksinya dan memiliki daya saing yang cukup baik. Pada Tahun 2023, produksi pisang Kabupaten Lampung Timur berhasil mencapai 4.978.207 kuintal, dengan produksi terbesar di Kecamatan Labuhan Ratu. Selanjutnya, komoditas pepaya saat ini menjadi salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 2.35  
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur (kuintal)

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alpukat	8.455	4.607	8.047	10.756	40.891	57.883	291.186
Anggur	-	-	-	-	14	453	2.140
Belimbing	1.787	2.160	3.506	4.261	4.962	2.807	11.550
Buah Naga	-	-	-	-	21.612	19.309	20.485
Duku	1.415	7.377	4.911	8.315	9.062	30.588	52.391
Durian	35.394	33.770	16.955	15.184	66.376	140.808	265.637
Jambu Air	3.096	2.827	4.502	14.153	20.513	103.837	284.838
Jambu Biji	2.228	2.500	3.748	10.362	54.851	53.917	82.913
Jeruk Besar	177	203	702	11.944	9	13	17
Jeruk Lemon	-	-	-	-	42	576	3.855
Jeruk Siam	30.874	39.204	49.627	67.518	242.533	220.379	346.849
Lengkeng	-	-	-	-	16.062	31.629	60.974
Mangga	7.094	17.036	18.033	41.305	72.176	28.961	131.657
Manggis	56	368	925	960	3.135	388	4.022
Nanas	2.837	3.767	23.578	14.409	5.710	12.166	29.256
Nangka	18.417	23.165	35.134	31.614	542.286	255.217	107.525
Pepaya	436.200	397.523	699.049	419.114	198.233	115.720	668.743
Pisang	4.198.057	3.780.414	532.524	745.329	890.414	2.878.857	4.978.207
Rambutan	5.776	12.896	25.202	15.168	42.197	91.858	450.733
Salak	1.243	627	1.799	12.773	7.054	5.001	44.374
Sawo	17.496	20.755	20.639	22.432	28.510	24.482	137.597
Sirsak	988	1.426	1.436	5.161	8.452	5.671	18.437
Sukun	2.890	3.167	4.917	5.210	18.921	16.377	82.913
Jengkol	3.799	8.009	10.303	11.463	33.947	13.216	74.574
Melinjo	3.049	5.482	6.665	10.202	27.374	15.663	25.830
Petai	2.787	5.019	8.879	11.342	15.894	18.093	107.525

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2017

### 2.3.1.3.3 Kehutanan

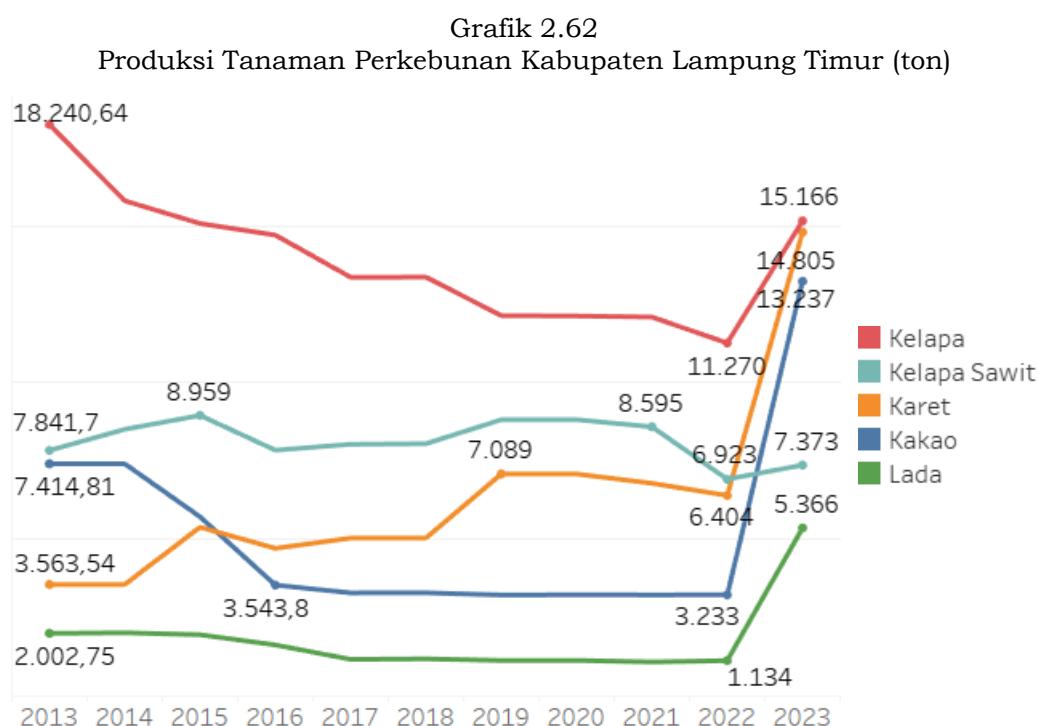
Selanjutnya, terkait dengan sektor kehutanan, komoditas unggulan bidang kehutanan adalah kayu jati, akasia, sengon, gmelina, jabon, dan sungkai. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dilakukan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha.

Terkait dengan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi : Taman Nasional Way Kambas dengan luas 125.621,3 hektar, Hutan Lindung Gunung Balak (Reg 38) dengan luas 22,292,5 hektar, Hutan Lindung Muara Sekampung (Reg 15) dengan luas 1.488,36 hektar, Hutan Produksi Metro Kibang dan Gedung Wani (Reg 37 dan 40) dengan luas 13.175 hektar, Hutan Mangrove di Pantai Timur sepanjang kurang lebih 45 km, dan Hutan Rakyat.

Pengembangan hutan mangrove berada di sepanjang pantai timur di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, merupakan desa pesisir pantai dalam kondisi baik kurang lebih 20 km berada di Desa Margasari, Sriminosari, Karya Tani, Mulyosari, Purworejo, dan Labuhan Ratu.

#### 2.3.1.3.4 Perkebunan

Di sektor perkebunan, komoditas unggulan Lampung Timur meliputi lada, kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Komoditas kakao bersentra di Kecamatan Pasir Sakti, Sekampung Udik, Way Jepara, dan Marga Tiga. Sedangkan untuk komoditas karet berkembang di Kecamatan Labuhan Ratu, Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Sekampung Udik. Produksi tanaman perkebunan pada Tahun 2013-2023 tersaji pada grafik berikut.



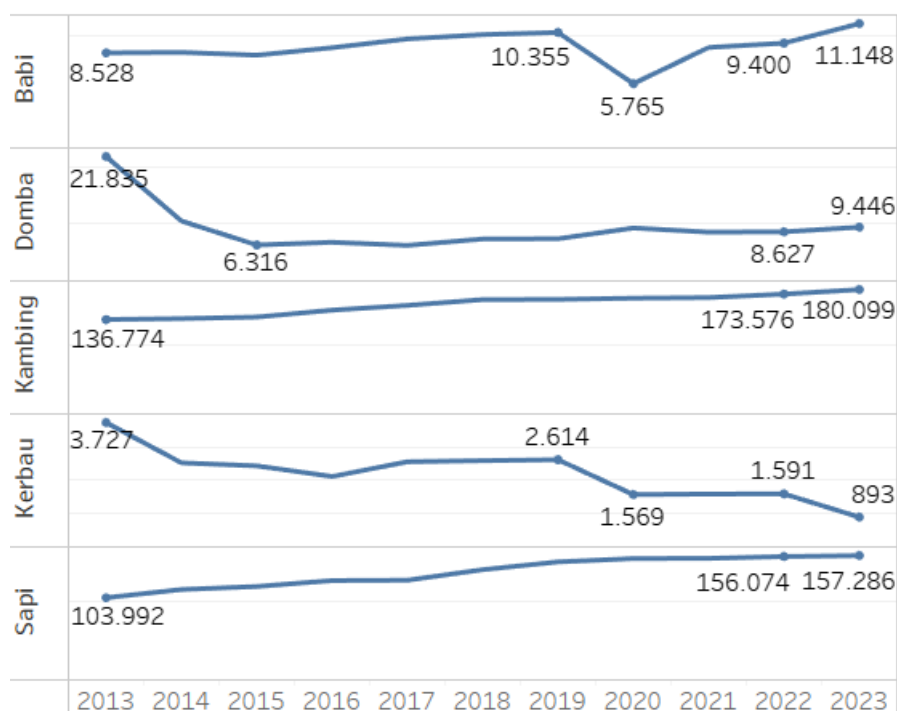
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

#### 2.3.1.3.5 Peternakan

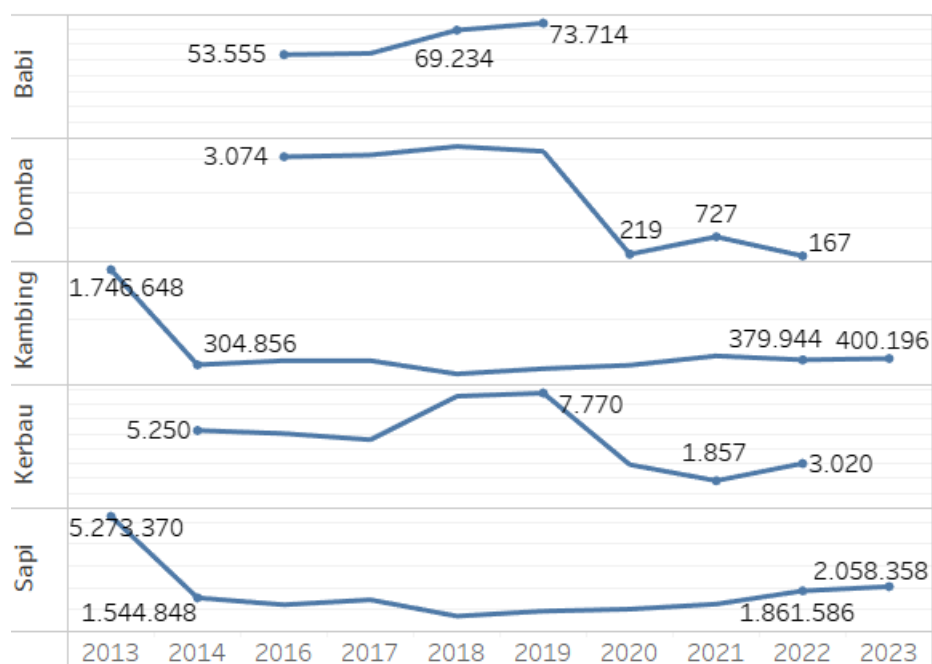
Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan pada sektor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi daerah. Dalam RTRW Nasional menyebutkan bahwa Provinsi Lampung adalah salah satu lumbung ternak nasional. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

Grafik 2.63  
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Timur (ekor)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2013

Grafik 2.64  
Produksi Daging Kabupaten Lampung Timur (kg)



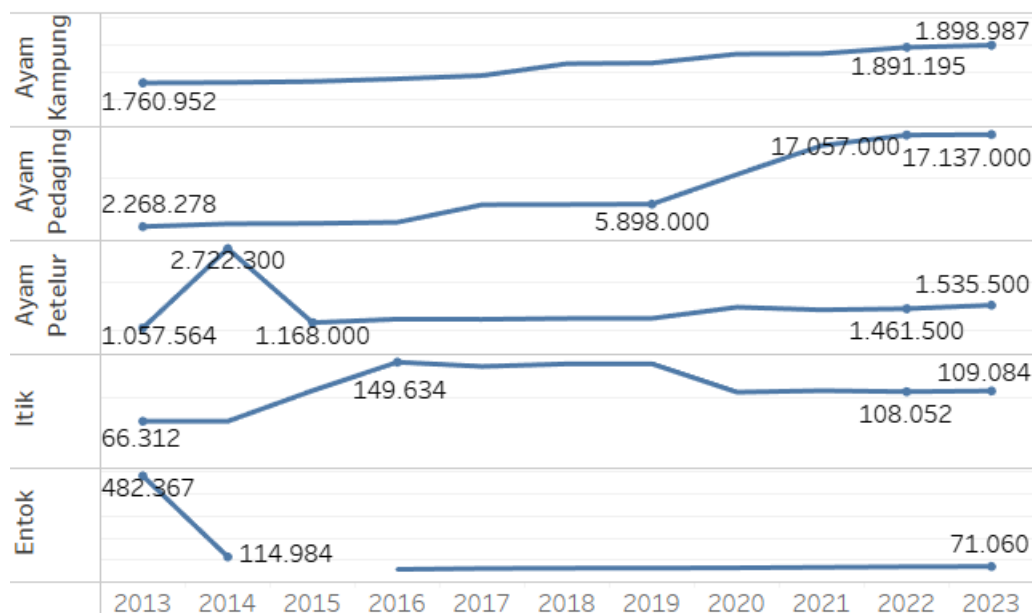
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2013

Keterangan: Data produksi daging tahun 2015 tidak tersedia

Saat ini permintaan pasar untuk sapi, baik pasar nasional maupun internasional sebagian telah mampu dipenuhi oleh peternak dari Kabupaten Lampung Timur. Potensi investasi di bidang peternakan adalah belum adanya industri pengolahan ternak berupa pabrik pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Lampung Timur. Daging sapi merupakan produk unggulan di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023 produksi daging sapi mencapai 5.273.370 kg, dengan produksi terbesar di Kecamatan Sekampung Udik, Labuhan Ratu, dan Raman Utara.

Terkait dengan peternakan unggas di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar dilakukan oleh peternak rakyat skala kecil. Populasi unggas di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2013–2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan permintaan atas jenis unggas tersebut yang meningkat disertai keuntungan yang semakin besar. Populasi itik mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021. Perkembangan populasi unggas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.65  
Populasi Unggas Kabupaten Lampung Timur (ekor)



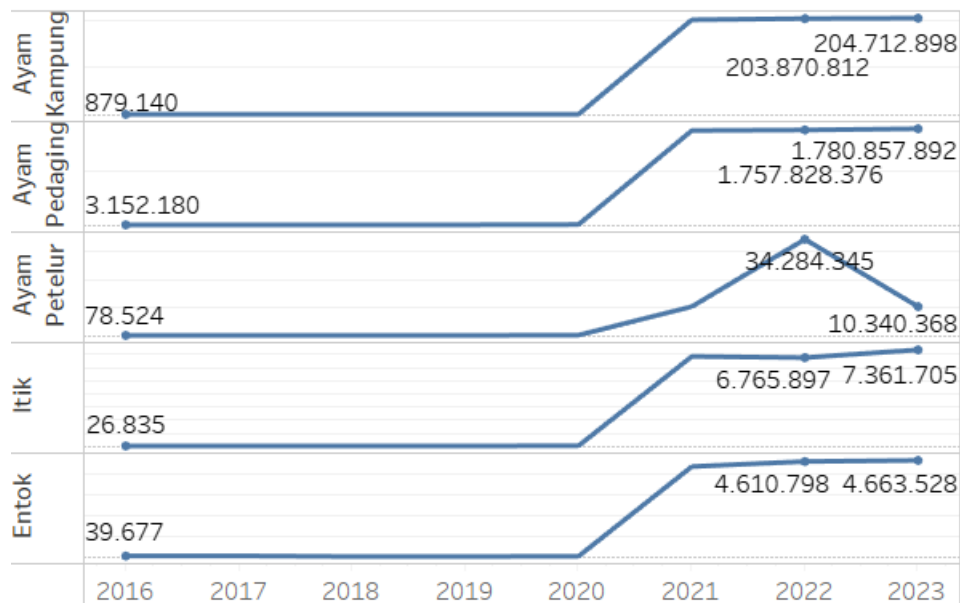
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Keterangan: Data populasi entok tahun 2015 tidak tersedia

Selanjutnya, terkait dengan produksi daging unggas pada tahun 2023, daging ayam ras pedaging merupakan produk unggulan Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 1.780.857.892 kg atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2022, dengan produksi terbesar berada pada Kecamatan Labuhan Ratu dan Sukadana.

Grafik 2.66  
Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Lampung Timur (kg)

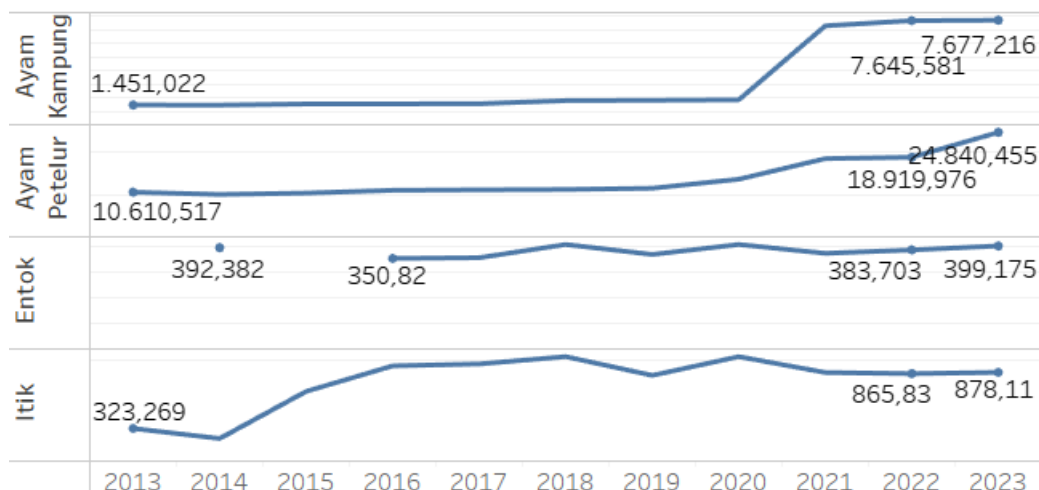


Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2016

Terkait dengan produksi telur, pada tahun 2023 telur ayam ras merupakan produk unggulan di Kabupaten Lampung Timur mencapai 24.840,455 ton, meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022, dengan sentranya di Kecamatan Way Bungur, Pekalongan, Purbolinggo, dan Raman Utara. Lebih jelasnya ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.67  
Produksi Telur Kabupaten Lampung Timur (ton)



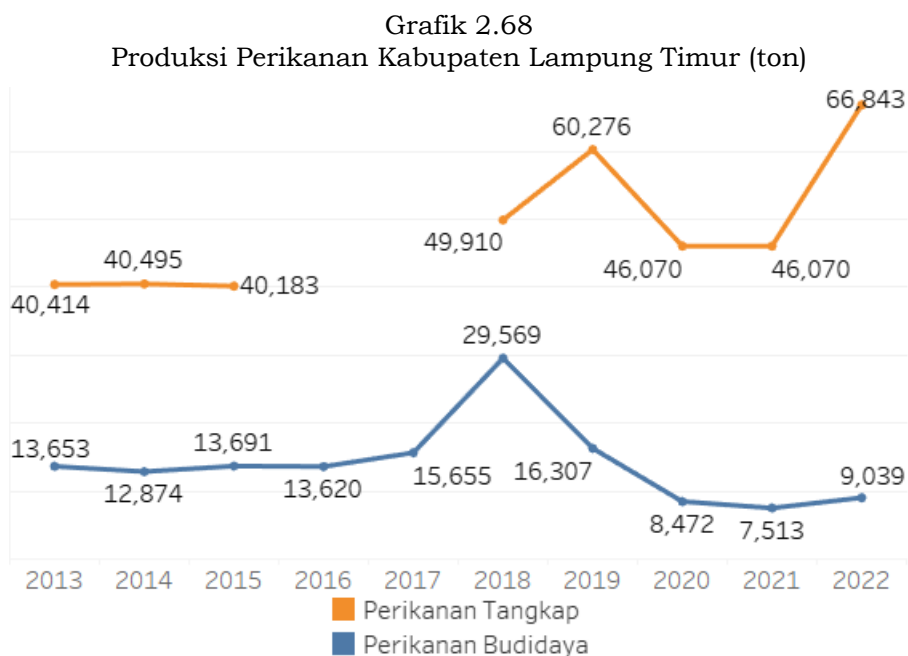
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2023

Data Awal: 2013

Keterangan: Data produksi telur entok tahun 2013 dan 2015 tidak tersedia

#### 2.3.1.4 Perikanan

Potensi bidang perikanan di Kabupaten Lampung Timur meliputi perikanan budidaya dan tangkap. Pengembangan sektor perikanan baik tangkap dan budidaya di Kabupaten Lampung Timur memiliki prospek yang cukup baik bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2023 mengalami peningkatan produksi, produksi perikanan tangkap mencapai 66.843 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 9.039 ton. Sektor perikanan budidaya yang banyak dibudidayakan meliputi ikan mas, nila, gurame, patin, lele dan udang vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap, didominasi oleh produksi kepiting, rajungan, dan kerang.



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Keterangan: Data produksi perikanan tangkap tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia

#### 2.3.1.5 Perdagangan

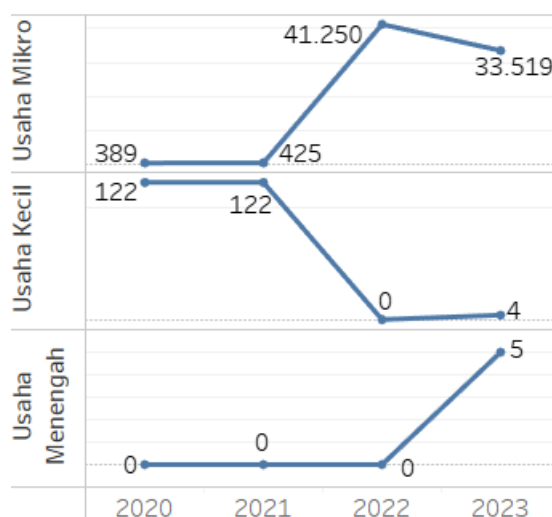
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023, terdapat 9 pasar di Kabupaten Lampung Timur yaitu Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Rajabasa Lama, Sukadana, Raman Utara, Labuhan Maringgai, dan Melinting. Selain itu, terdapat 52 pasar desa sebagai sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.36  
Jumlah Pedagang Menurut Lokasi Pasar dan Jenis Bangunan yang Dikelola oleh Kantor  
Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Pasar	Ruko	Toko/Kios	Los	Jumlah
Pasar Way Jepara	22	182	465	<b>669</b>
Pasar Sekampung	28	596	104	<b>728</b>
Pasar Purbolinggo	48	306	78	<b>432</b>
Pasar Pekalongan		444	113	<b>557</b>
Pasar Rajabasa Lama		324	294	<b>618</b>
Pasar Sukadana		17	192	<b>209</b>
Pasar Raman Utara		167	140	<b>307</b>
Pasar Labuhan Maringgai		40	192	<b>232</b>
Pasar Melinting		21	20	<b>41</b>
<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>2097</b>	<b>1598</b>	<b>3793</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Grafik 2.69  
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Timur

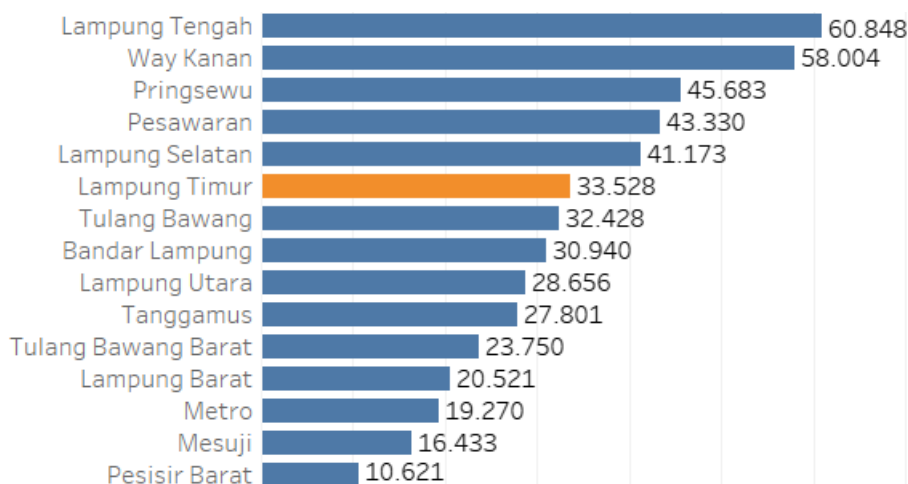


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Data Awal: 2020

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 33.528 unit usaha, atau terbesar ke-6 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 41.250 unit usaha, akibat terdampak pandemi COVID-19. Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar memasarkan produknya untuk konsumen dalam kabupaten, sebagian kecil untuk konsumen luar kabupaten dan luar Provinsi Lampung.

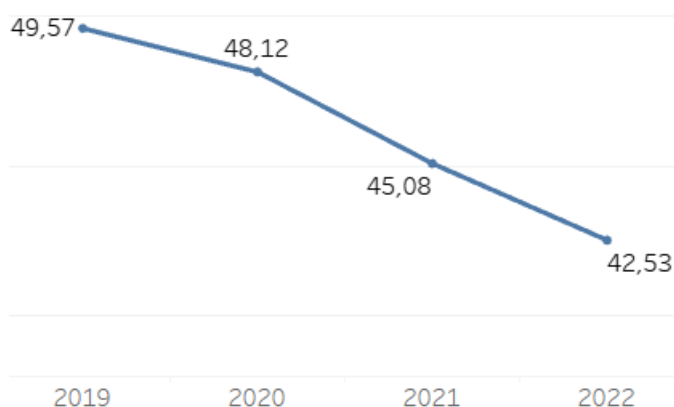
Grafik 2.70  
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Terkait dengan rasio kewirausahaan, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, diperoleh hasil bahwa rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 sebesar 42,53 persen, atau terus turun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya ketika pandemi COVID-19.

Grafik 2.71  
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023 (diolah)  
Data Awal: 2019

#### 2.3.1.6 Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan jika cukup tersedia industri pengolahan. Kabupaten Lampung Timur dengan potensi yang besar dalam memproduksi bahan mentah khususnya di sektor pertanian dan perikanan, memerlukan ketersediaan industri yang berskala kecil hingga besar. Industri yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar adalah industri yang bergerak

pada Industri Hasil Pertanian mencapai 90,19 persen. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan produksi bahan baku hasil pertanian sangat tersedia.

Tabel 2.37  
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Klasifikasi Industri	Perusahaan/ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rupiah)
Industri Hasil Pertanian	846	2116	210.670.377
Industri Logam, Mesin dan Elektronik	82	175	3.501.100
Industri Kimia dan Aneka	10	28	616.000
<b>Jumlah</b>	<b>938</b>	<b>2319</b>	<b>214.787.477</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 total unit usaha di Kabupaten Lampung Timur yang sebanyak 938 dapat menyerap 2319 tenaga kerja. Total nilai investasi usaha di Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp 214 miliar. Kecamatan Way Jepara tercatat sebagai kecamatan dengan nilai investasi terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Timur.

Jumlah industri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 didominasi oleh industri besar yang mencapai 506 industri yang tersebar di 24 kecamatan. Kecamatan yang terbanyak memiliki industri besar adalah Kecamatan Labuhan Maringgai.

Tabel 2.38  
Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Kecamatan	Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Mikro	Industri Besar	Jumlah
Metro Kibang	-	-	1	6	7
Batanghari	15	-	8	40	63
Sekampung	13	-	5	17	35
Marga Tiga	13	-	2	39	54
Sekampung Udik	13	2	9	37	61
Jabung	3	1	1	15	20
Pasir Sakti	2	14	1	13	30
Waway Karya	2	-	2	1	5
Marga Sekampung	1	-	3	3	7
Labuhan Maringgai	8	-	12	63	83
Mataram Baru	18	-	6	16	40
Bandar Sribhawono	12	2	38	9	61
Melinting	1	-	1	27	29
Gunung Pelindung	2	-	3	4	9
Way Jepara	7	1	17	44	69
Braja Selehah	1	-	2	5	8
Labuhan Ratu	2	2	11	13	28
Sukadana	2	1	7	35	45
Bumi Agung	1	-	1	4	6
Batanghari Nuban	4	-	10	23	37

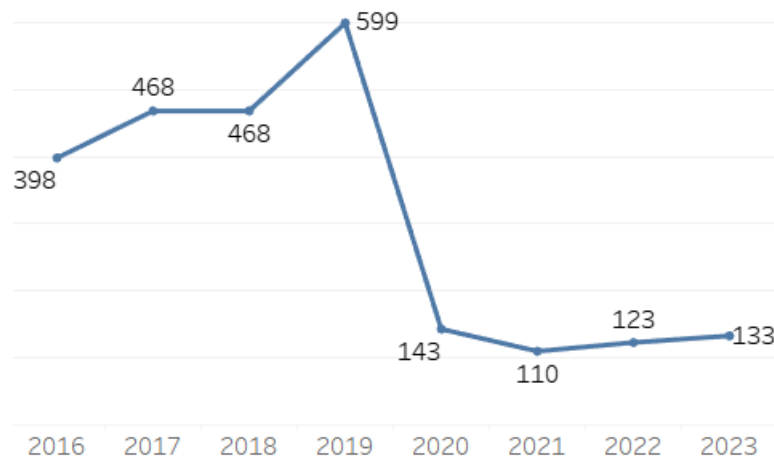
Pekalongan	18	2	19	19	58
Raman Utara	2	-	2	19	23
Purbulinggo	26	-	5	37	68
Way Bungur	-	-	1	17	18
<b>Lampung Timur</b>	<b>166</b>	<b>25</b>	<b>167</b>	<b>506</b>	<b>864</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023

### 2.3.1.7 Koperasi

Koperasi di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu empat tahun terakhir berkecenderungan menurun, setelah mencapai 599 koperasi aktif, pada tahun 2019 turun menjadi 133 unit koperasi aktif pada tahun 2023 yang tersebar di 24 kecamatan.

Grafik 2.72  
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Timur

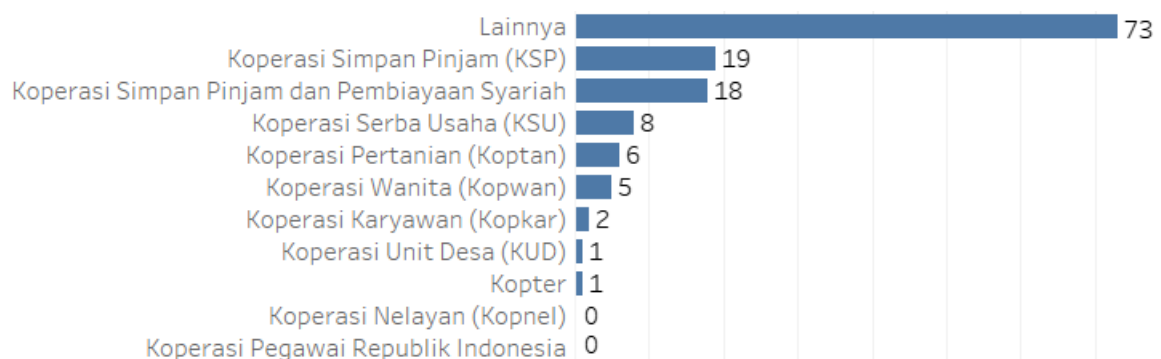


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2016

Pada tahun 2023, unit usaha terbesar koperasi adalah koperasi simpan pinjam yang mencapai 19 unit, yang tersebar di 12 kecamatan, disusul oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang mencapai 18 unit koperasi yang tersebar di 12 kecamatan.

Grafik 2.73  
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Terkait dengan omset usaha koperasi di Kabupaten Lampung Timur, total omset koperasi pada tahun 2021 mencapai 87,6 milyar rupiah, unit usaha koperasi dengan omset terbesar adalah unit usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu mencapai 44,5 milyar rupiah.

Tabel 2.39  
Jumlah Omset Usaha Koperasi Menurut Kelompok Koperasi (Juta Rupiah)

Kelompok Koperasi	2020	2021
Koperasi Unit Desa (KUD)	125,50	125,60
Koperasi Pegawai Republik Indonesia		202,16
Koperasi Serba Usaha (KSU)	12.306,56	9890,29
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	22.935,35	17.613,63
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	70.013,91	44.528,88
Koperasi Pertanian (Koptan)	251,10	239,29
Koperasi Pesantren (Koppontren)		-
Koperasi Wanita (Kopwan)	2.283,18	1.717,27
Koperasi Lainnya	9.247,37	13.319,97
<b>Jumlah</b>		<b>87.637,09</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023

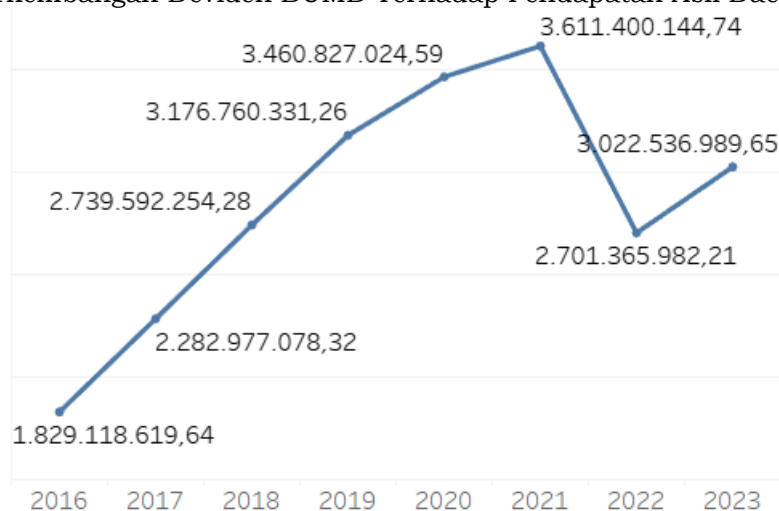
Data Awal: 2020

Data Termutakhir: 2021

#### 2.3.1.8 Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu peraturan daerah (perda). Adapun modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah. Badan usaha milik daerah yang sahamnya sebagian besar dimiliki daerah terdiri dari PDAM Way Guruh dan BPR Syariah Lampung Timur. Sedangkan untuk Bank Lampung sahamnya sebagian juga dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu delapan tahun terakhir, hanya BPR Syariah Lampung Timur dan Bank Lampung yang dapat memberikan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Grafik 2.74  
Perkembangan Deviden BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2016

Perkembangan kontribusi deviden BUMD terhadap pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan menggerakkan ekonomi daerah melalui lembaga pembiayaan. Merujuk data Kementerian Keuangan RI, terkait dengan *Return on Asset* (ROA) BUMD di Indonesia baru mencapai kurang dari 3 persen, sedangkan untuk Provinsi Lampung, dalam rancangan awal RPJPD diperoleh data bahwa ROA BUMD Provinsi Lampung sebesar 1,91 persen.

ROA atau *Return On Assets* secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk BUMD dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan adanya rasio ini, kemampuan dari BUMD dinilai sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dalam periode lampau supaya bisa digunakan pada masa atau periode berikutnya. Rasio ini memang sangat penting bagi siapapun yang akan melakukan evaluasi terhadap BUMD yang menggunakan modal atau dananya.

#### 2.3.1.9 Pariwisata

Kabupaten Lampung Timur memiliki destinasi wisata yang beragam. Destinasi wisata alam di Kabupaten Lampung Timur antara lain Pantai Kerang Mas, Pantai Mutiara Baru, Pantai Mangrove Sekar Bahari, Pantai Mangrove Pandan Alas, Sumber Mata Air Awet Muda, Beringin Indah, Goa Pandan, Danau Kemuning, Sumur 7, Puncak Pawiki, Wisata Padang Savana, Pantai Cemara, Way Guruh Lehan, Danau Way Jepara, dan Way Guruh.

Gambar 2.25  
Pantai Mutiara Baru



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2023

Destinasi wisata budaya di Kabupaten Lampung Timur antara lain Taman Purbakala Pugung Raharjo dan Desa Tradisional Wana. Untuk destinasi agrowisata antara lain Wisata Omahe Jagung, Tanjung Tirta, Taman Wisata Bunga dan Edukasi Lembah Pawiki, dan Taman lebah madu. Sedangkan destinasi wisata lainnya yaitu Taman Nasional Way Kambas, Dam Negara Batin/Wanaba, Jembatan Merah/Kali Medek, Rest Area Labuhan Ratu VI, Water Pam, Jembatan Kembar, dan Dam Swadaya.

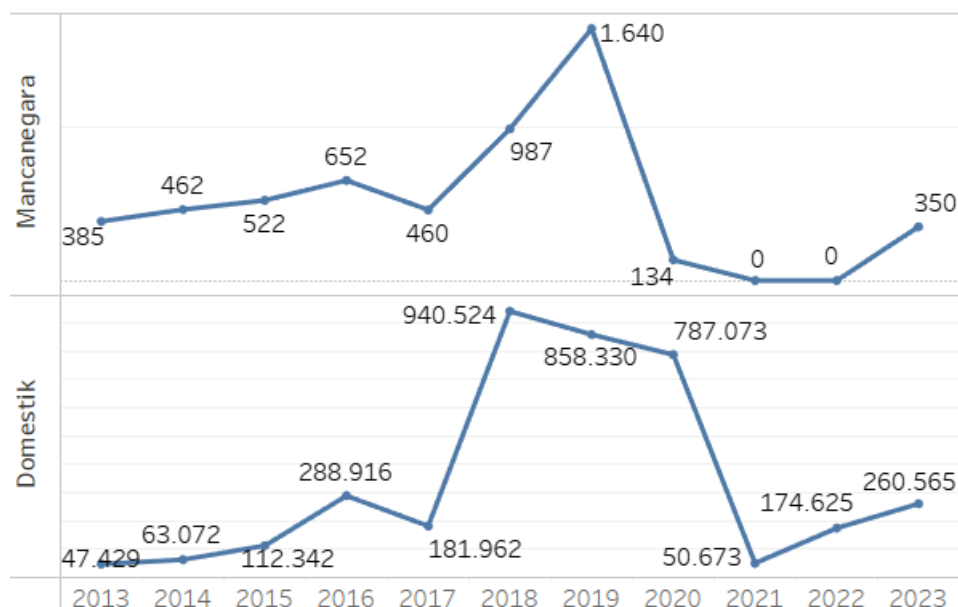
Gambar 2.26  
Taman Nasional Way Kambas



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2023

Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan, yang merupakan salah satu indikator pengembangan pariwisata daerah, Pemerintah Daerah terus fokus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan wisata daerah. Pada tahun 2023, terdapat 215 rumah makan/restoran serta 2 hotel bintang dan 12 hotel non bintang di Kabupaten Lampung Timur. Sepanjang tahun 2023, jumlah wisatawan mencapai 260.915, baik domestik maupun mancanegara, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022.

Grafik 2.75  
Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2013

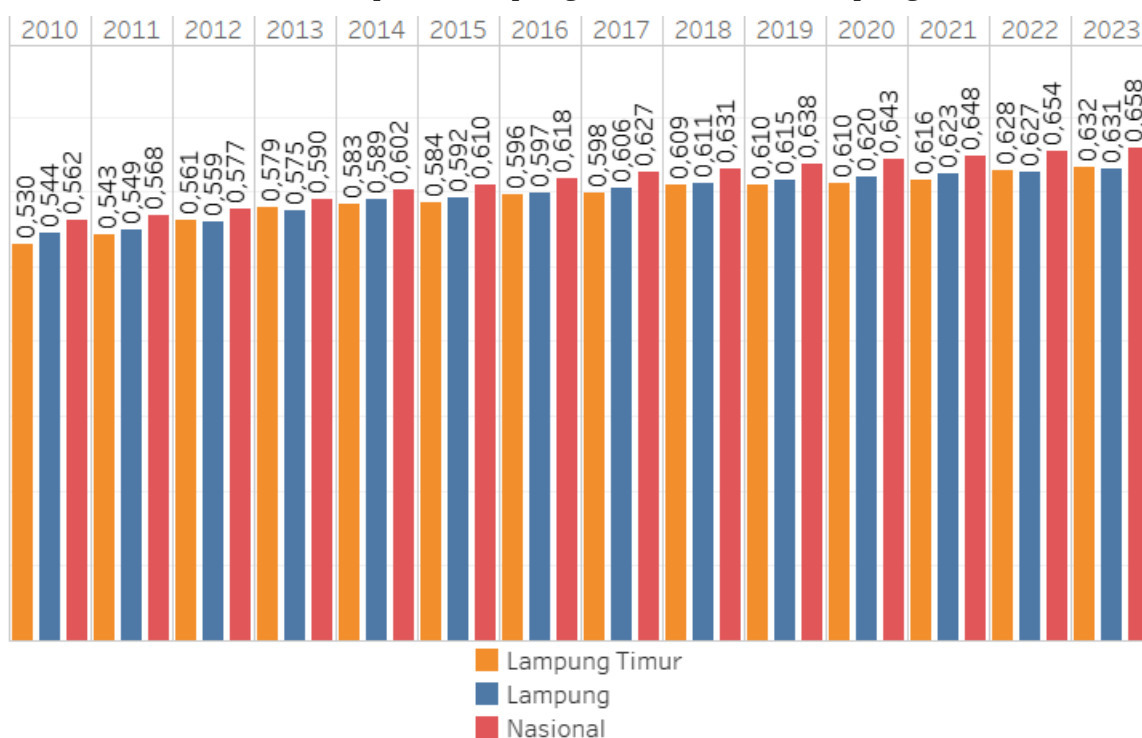
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi Lampung Timur kedepan. *Multiplier effect* dari perkembangan pariwisata sangat strategis dalam mendorong perkembangan sektor lainnya khususnya perkembangan sektor ekonomi kreatif, di mana sektor ekonomi kreatif merupakan hilirnya sektor pariwisata daerah. Berdasarkan literatur, ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, menambah kekayaan intelektual, dan peran sosial lainnya. Disayangkan proporsi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur belum dapat dihitung secara akurat, jika merujuk data Provinsi Lampung, proporsi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah sebesar 1,82 persen.

## 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

### 2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator pembentuk yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2010, indeks pendidikan Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,530, cenderung mengalami peningkatan dalam waktu empat belas tahun terakhir hingga mencapai 0,632 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ketiga dengan indeks pendidikan tertinggi.

Grafik 2.76  
Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

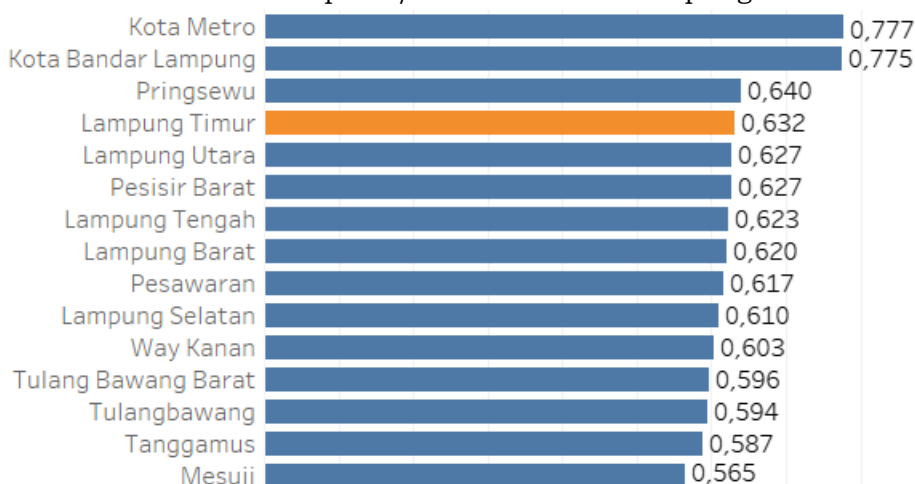


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 (diolah)

Data Awal: 2010

Grafik 2.77

Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 (diolah)

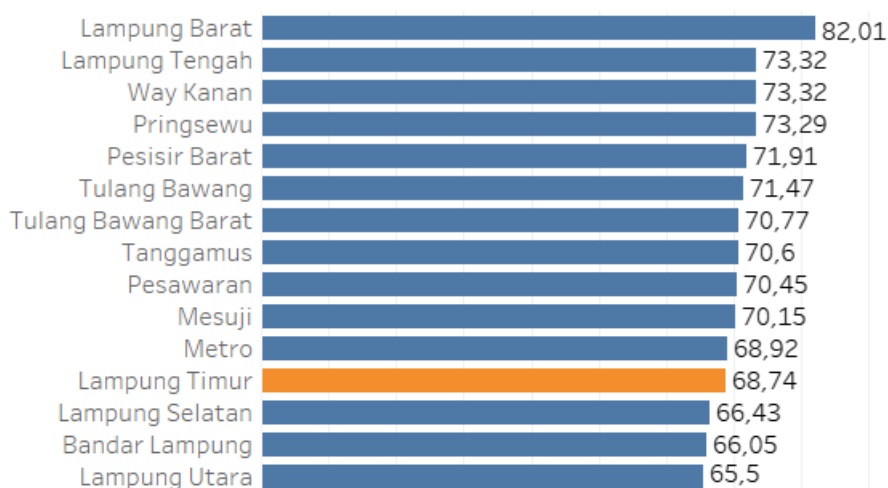
### 2.3.2.2 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lampung timur tahun 2023, jumlah angkatan kerja mencapai 599.649 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja mencapai 272.697 jiwa. Di antara angkatan kerja, yang mempunyai status pekerja (bekerja) mencapai 581.092 jiwa dan pengangguran (tidak bekerja) sebesar 18.557 jiwa. Untuk jumlah bukan angkatan kerja dibagi atas yang beraktivitas sekolah sebesar 66.898 jiwa, mengurus rumah tangga 182.417 jiwa dan lainnya sebesar 23.382 jiwa.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi keempat dengan TPAK terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.78

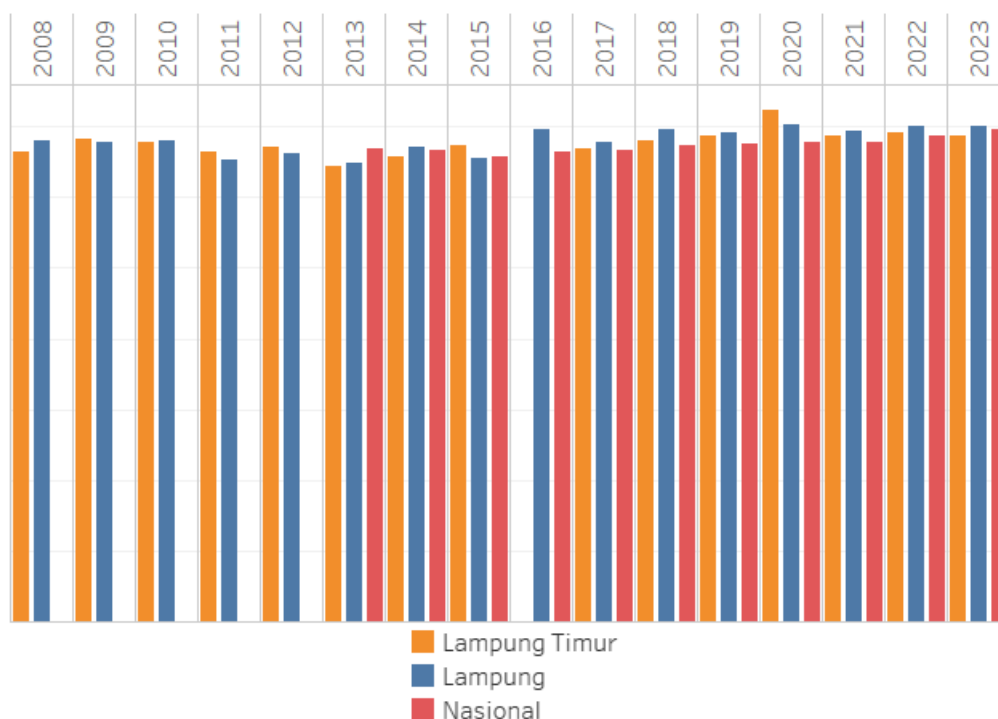
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Lampung, 2024

TPAK Kabupaten Lampung Timur cenderung meningkat pada setiap tahunnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Lampung Timur mencapai 68,74 persen, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 69,04 persen.

Grafik 2.79  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

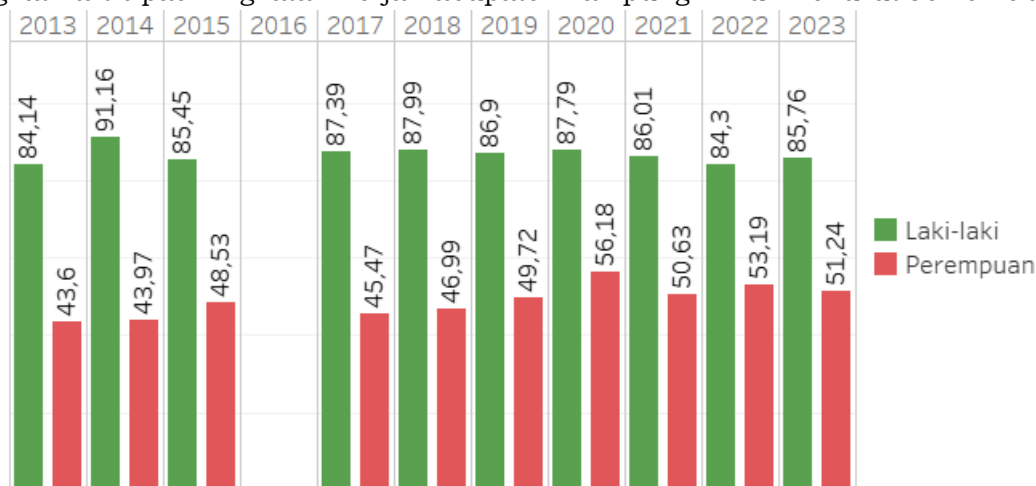


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Keterangan: Data TPAK Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 tidak tersedia

Grafik 2.80  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Keterangan: Data TPAK Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 tidak tersedia

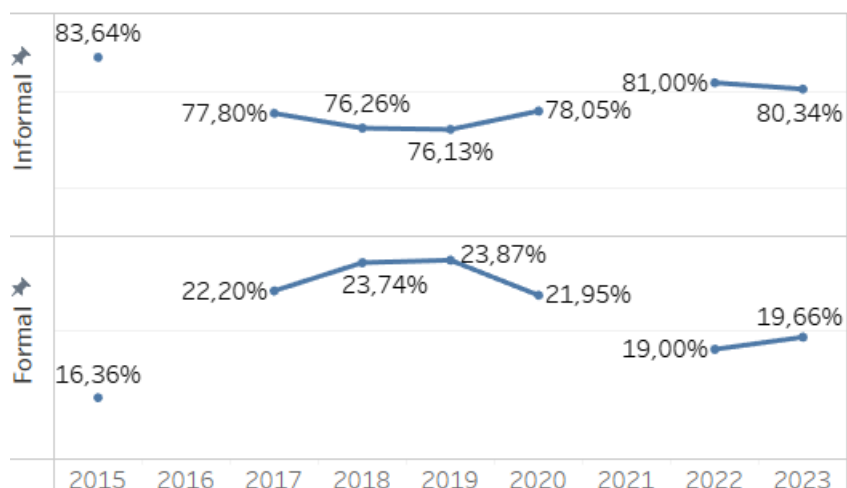
TPAK Perempuan Kabupaten Lampung Timur masih berada jauh di bawah TPAK Laki-Laki. TPAK Perempuan cenderung meningkat di setiap tahunnya, namun pada tahun 2023, capaian TPAK Perempuan sebesar 51,24 persen menurun dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 53,19 persen. TPAK Laki-laki mencapai 85,76 persen pada tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,3 persen.

Angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berpendidikan setara sekolah dasar, mencapai 35,52 persen di tahun 2023. Angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi merupakan angkatan kerja yang paling sedikit, hanya sebesar 5,44 persen.

Struktur lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh kategori pertanian. Persentase penduduk bekerja di pertanian mencapai 50,07 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori jasa sebesar 32,36 persen dan kategori manufaktur sebesar 17,57 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada tahun 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal mencapai 81% persen sebelum terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,34 persen. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja di kegiatan formal meningkat dari tahun 2022 sebesar 19 persen menjadi 19,66 persen pada tahun 2023.

Grafik 2.81  
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 (diolah)

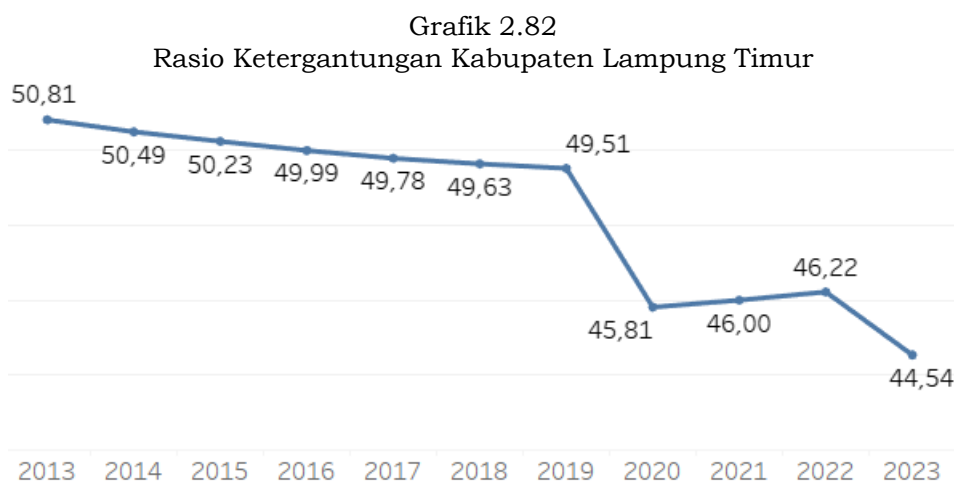
Data Awal: 2015

Keterangan: Data persentase penduduk bekerja menurut kegiatan formal/informal tahun 2016 dan 2021 tidak tersedia

Tingginya angkatan kerja yang bekerja di sektor informal memberikan tantangan terhadap cakupan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Timur. Pekerja di sektor informal sulit untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan, berbeda dengan pekerja formal di perusahaan. Cakupan tenaga kerja di perusahaan yang telah mendapat perlindungan tenaga kerja pada tahun 2023 mencapai 81,46 persen. Relatif terus meningkat seiring dengan kebijakan implementasi regulasi bidang ketenagakerjaan yang terus diawasi oleh perangkat daerah terkait.

### 2.3.2.3 Rasio Ketergantungan

Untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif dapat digunakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Penduduk berusia produktif adalah penduduk angkatan kerja yakni penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun, penduduk ini secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia di atas 65 tahun juga merupakan kelompok penduduk dengan usia tidak produktif, hal ini dikarenakan sudah melewati masa pensiun dan sudah tidak bekerja lagi.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023 (diolah)

Data Awal: 2013

Pada tahun 2013, angka rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur berada pada nilai 50,81 persen, mengalami kecenderungan menurun hingga tahun 2023 menjadi 44,54 persen yang artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak produktif.

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### 2.3.3.1 Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status dan wewenang pembinaan jalan, sistem jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur dikelompokkan sebagai berikut:

- Jalan Negara/Nasional, yang termasuk Jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 430/KPTS/M/2022 adalah 157,01 km.
- Jalan Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/HK/2016 adalah 134,93 km.
- Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.261/15-SK/2023 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, mencapai 1.158,33 km.
- Jalan desa di Kabupaten Lampung Timur yang terdata adalah 2.196,31 km.

Tabel 2.40

Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lampung Timur (km)

Kelas Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Kelas I	157,01	-	-	157,01
Kelas II	-	-	-	-
Kelas III	-	-	-	-
Kelas III A	-	134,93	1.158,33	1.293,26
Kelas III B	-	-	-	-
Kelas III C	-	-	-	-
Tidak Dirinci	-	-	-	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>157,01</b>	<b>134,93</b>	<b>1.158,33</b>	<b>1.450,27</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2024

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Lampung Timur, paling banyak berjenis permukaan jalan aspal, lebih lengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

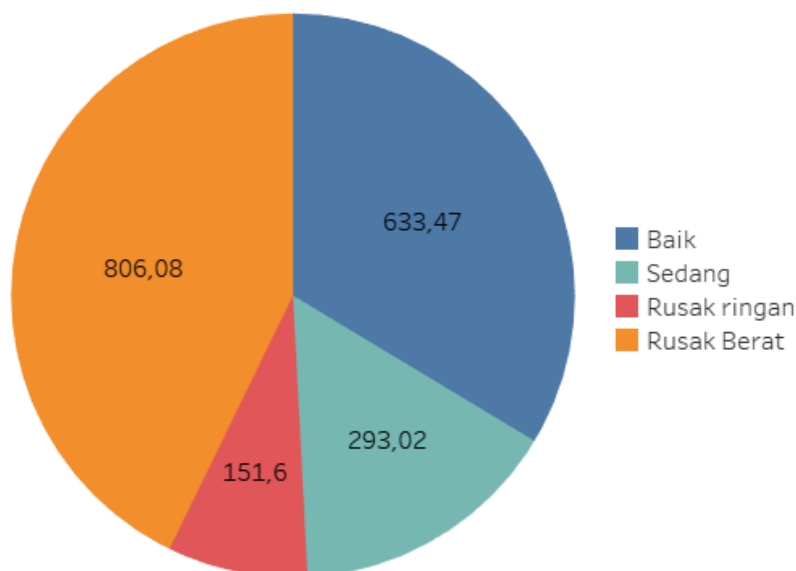
Tabel 2.41  
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2024

Kelas Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Aspal (AC, HRS, ATB)	157,01	134,93	750,41	1.042,35
Perkerasan Beton	-	-	8,63	8,63
Lapis Penetrasi/ Latasir/Macadam	-	-	225,56	225,56
Telford/Kerikil/Urpil	-	-	173,74	173,74
<b>Jumlah/Total</b>	<b>157,01</b>	<b>134,93</b>	<b>1.158,33</b>	<b>1.450,28</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2024

Terkait dengan kondisi jalan kabupaten, sebesar 42,78 persen jalan kabupaten berada pada kondisi rusak berat, 33,62 persen pada kondisi baik, dan sisanya berada pada kondisi sedang dan rusak ringan.

Grafik 2.83  
Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 (km)

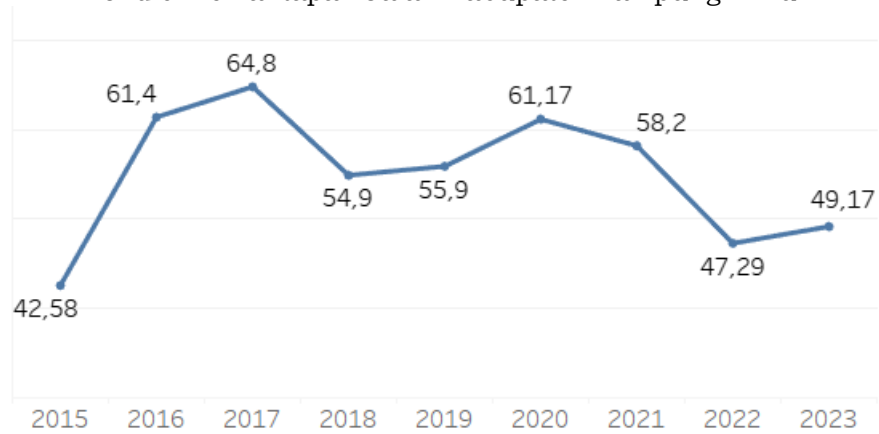


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2023

Perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Lampung Timur berkecenderungan menurun secara signifikan pada periode 2020-2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan akibat *refocussing* dan realokasi anggaran infrastruktur jalan ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang lalu. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran infrastruktur jalan adalah kebijakan sesuai regulasi dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pasca pandemi COVID-19, pada

tahun 2023, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan, tingkat kemantapan jalan kembali meningkat mencapai 49,17%.

Grafik 2.84  
Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Timur

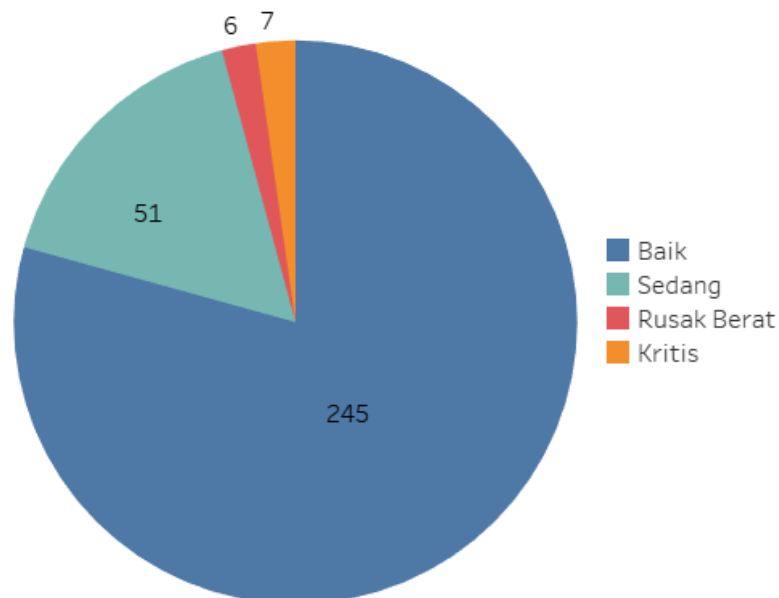


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2015

Untuk jembatan, total jumlah jembatan/penyeberangan adalah sebanyak 309 unit dengan 79,29 persen berada pada kondisi baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.85  
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021



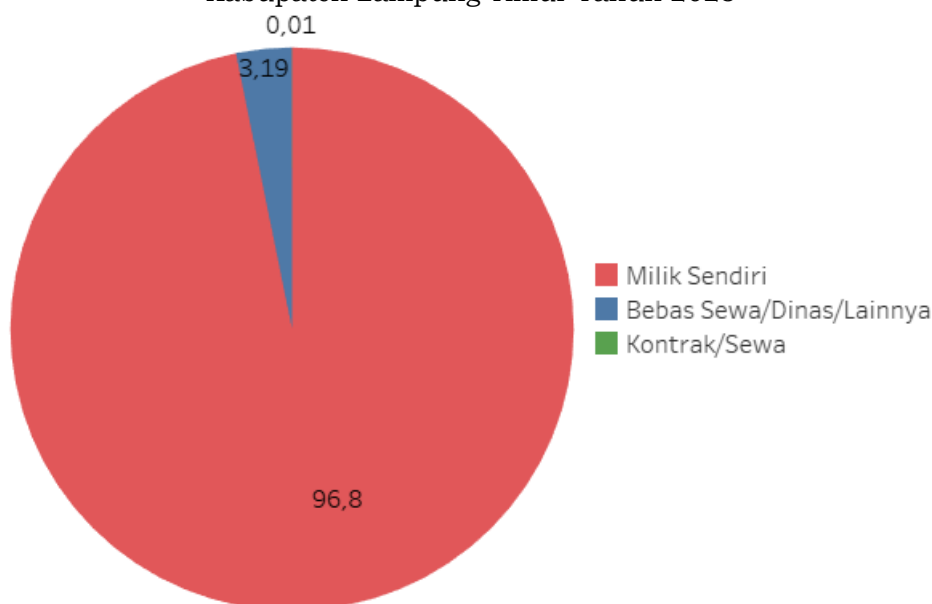
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2022

Data Termutakhir: 2021

### 2.3.3.2 Perumahan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Berdasarkan status kepemilikan bangunan perumahan di Kabupaten Lampung Timur, 96,8 persen bangunan rumah merupakan bangunan milik masyarakat sendiri. Ini mencerminkan bahwa hampir seluruh masyarakat telah terpenuhi kebutuhan pokoknya terkait kebutuhan papan atau perumahan.

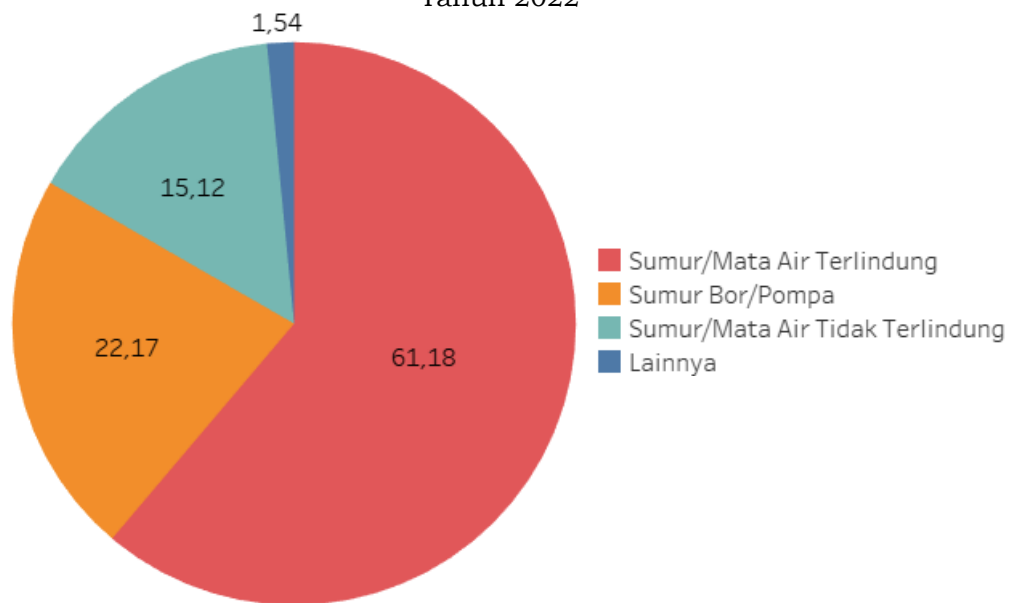
Grafik 2.86  
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, rumah tangga yang berfasilitas tempat buang air besar milik sendiri telah mencapai 96,24 persen, sedangkan 3,76 persen lainnya menggunakan fasilitas MCK umum maupun tidak tersedia fasilitas tempat buang air besar.

Grafik 2.87  
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama di Kabupaten Lampung Timur  
Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023

Terkait dengan rumah tangga menurut sumber air utama, 61,18 persen rumah tangga telah menggunakan sumur atau mata air terlindung, sedangkan 22,17 persen menggunakan sumur bor atau pompa. Sedangkan persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan sumber air minum layak di Kabupaten Lampung Timur mencapai 85,51 pada tahun 2023.

#### 2.3.3.3 Jaringan Listrik

Untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini dipasok oleh pembangkit-pembangkit yang dikelola oleh PT. PLN Sektor Bandar Lampung sebesar 70 persen dan sisanya dipasok oleh pembangkit listrik dari sistem Sumatera Selatan–Lampung sebesar 30 persen dari total kebutuhan melalui sistem interkoneksi Sumatera Selatan–Lampung–Bengkulu. Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung pada bulan Juli Tahun 2021 mencapai sekitar konsumsi 4.213,68 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW.

Terkait distribusi listrik di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat kurun waktu sembilan tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.42  
Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Daya Terpasang	Produksi Listrik	Listrik Terjual	Dipakai Sendiri	Susut/Hilang
2013	106.009,30	208.084.186,00	177.624.030,00	788.702,40	29.671.453,60
2014	112.806,50	222.574.187,00	184.954.865,00	1.070.428,07	36.548.893,93
2015	118.695,90	237.461.709,70	195.849.543,00	2.014.616,03	39.073.370,24
2016	123.648,55	252.621.049,67	212.113.092,00	3.548.124,75	36.959.832,92
2017	132.133,55	258.837.135,81	219.115.820,00	3.797.445,74	35.923.870,07
2018	143.733,45	267.088.426,67	235.248.688,00	3.894.054,11	31.839.738,67
2019	155.333,35	298.437.393,96	271.929.790,00	4.438.956,93	26.487.216,11
2020	164.458,75	322.537.081,71	291.888.639,00	3.197.801,76	31.270.791,47
2021	176.100,60	332.931.576,50	291.195.837,30	1.567.676,76	39.340.656,97
2022	183.895,65	349.645.008,80	303.576.315,50	2.501.191,35	43.199.889,39

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023

Data Awal: 2013

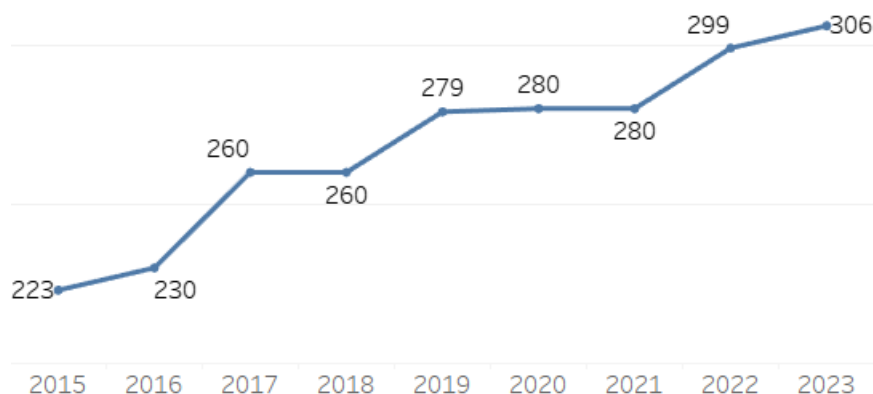
#### 2.3.3.4 Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi guna operasionalisasi e-Gov dan publikasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah tersedia selama ini, yaitu [www.lampungtimurkab.go.id](http://www.lampungtimurkab.go.id) yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Lampung Timur dan dapat secara mudah diakses.

Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).

Untuk prasarana komunikasi, khususnya ketersediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah Kabupaten Lampung Timur, digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.88  
Jumlah *Base Transceiver Station* di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, 2023  
Data Awal: 2015

#### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan, dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi.

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 dinaikkan statusnya menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah diatur standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola BPTSPPM yaitu paling lama 14 hari kerja.

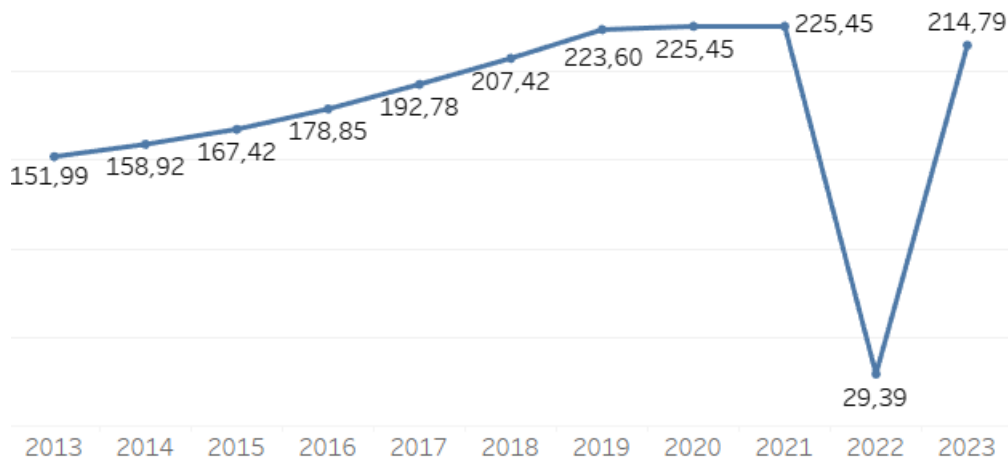
Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek dan menyederhanakan birokrasi perizinan, pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan terjangkau.

Selain dengan menerbitkan peraturan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai dioptimalkan melalui peluncuran perizinan online yang disebut Sicantik CLOUD yang diharapkan bisa semakin mempermudah dan mempercepat proses perizinan.

### 2.3.4.1 Penanaman Modal

Realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai Rp 214,79 miliar atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 29,39 miliar.

Grafik 2.89  
Nilai Investasi di Kabupaten Lampung Timur



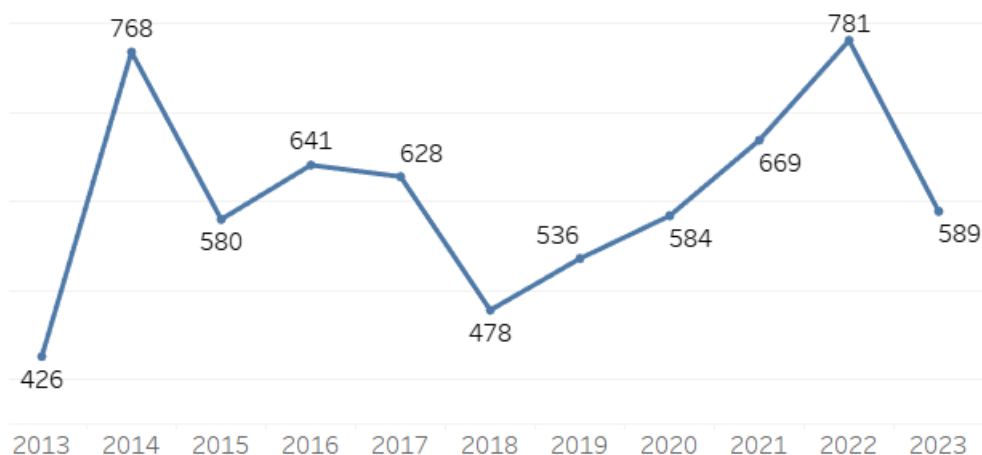
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

### 2.3.4.2 Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan anggota linmas di setiap desa, pembinaan dan pemberdayaan tokoh masyarakat melalui forum kebangsaan, fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama, fasilitasi forum Forkopimcam, dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan setiap tahunnya. Meskipun begitu, jumlah tindak pidana kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus meningkat. Di luar kasus lain-lain, untuk jumlah gangguan yang terbesar berdasarkan data pada tahun 2023 adalah kasus pencurian berat yaitu sebanyak 370 kasus atau mencapai 62,82 persen dari total kasus yang ada.

Grafik 2.90  
Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Lampung Timur

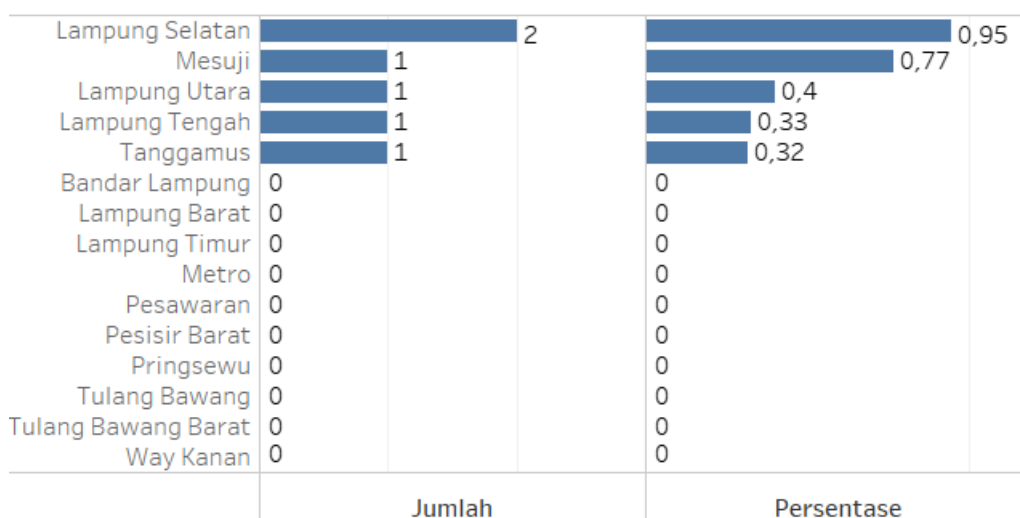


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Lebih lanjut, terkait dengan konflik massal, Kabupaten Lampung Timur termasuk salah satu wilayah yang tidak pernah terjadi konflik massal kurun waktu tiga tahun terakhir di Provinsi Lampung. Potensi konflik massal antara 2 (dua) desa (bentrok antar warga) di kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 berhasil dicegah oleh aparat kepolisian.

Grafik 2.91  
Jumlah dan Persentase Desa yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021



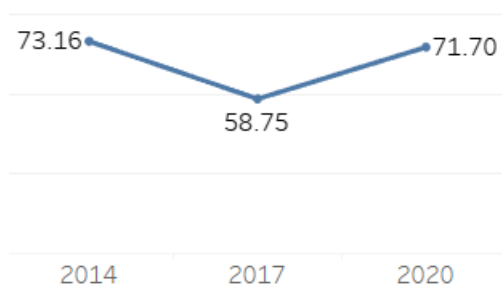
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Data Termutakhir: 2021

Berdasarkan publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung Tahun 2022, tingkat kriminalitas (*crime rate*) Kabupaten Lampung Timur sebesar 28,73. jika ditinjau dari persentase kasus yang dapat diselesaikan, Kabupaten Lampung Timur menduduki peringkat pertama di Provinsi Lampung dengan tingkat penyelesaian kasus mencapai 105,23.

Pada dasarnya situasi yang kondusif di daerah adalah untuk meningkatkan persepsi aman di masyarakat. Terkait dengan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat, berdasarkan data BPS RI, pada tahun 2020 sebesar 71,7 persen penduduk Provinsi Lampung merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Meningkat dibandingkan data tahun 2017, namun turun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 73,16 persen.

Grafik 2.92  
Proporsi Penduduk Provinsi Lampung yang Merasa Aman Berjalan Sendirian  
di Area Tempat Tinggalnya



Sumber: BPS RI, 2023

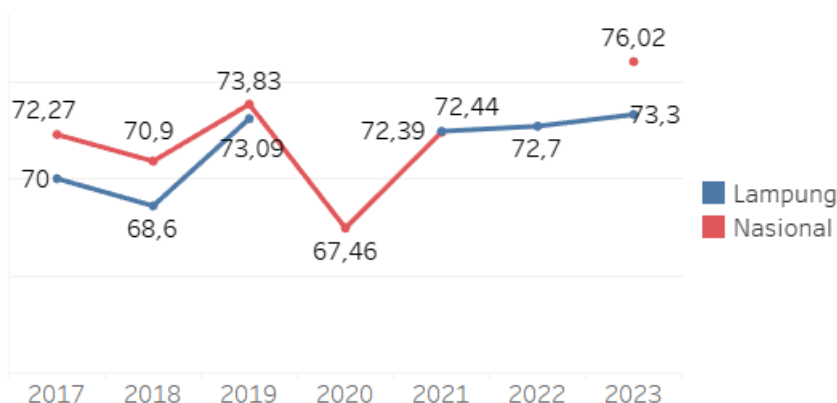
Data Awal: 2014

Data Termutakhir: 2020

#### 2.3.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Kerukunan bagi orang Indonesia adalah keniscayaan. Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu: toleransi (sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai); kesetaraan (pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban); kerjasama (bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk agama). Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Timur merujuk data Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung.

Grafik 2.93  
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, 2024

Data Awal: 2017

Keterangan: Data IKUB Lampung tahun 2020 dan Nasional tahun 2022 tidak tersedia

#### 2.3.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019, yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Skor IDSD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 mencapai 2,62, masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Lampung yaitu 3,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-6 dengan skor IDSD tertinggi.

Tingkat Penguasaan IPTEK Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dari pilar ke-12 IDSD yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi. Pada tahun 2023, Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 1,51, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0,63. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-7 dengan Indeks Kapabilitas Inovasi tertinggi.

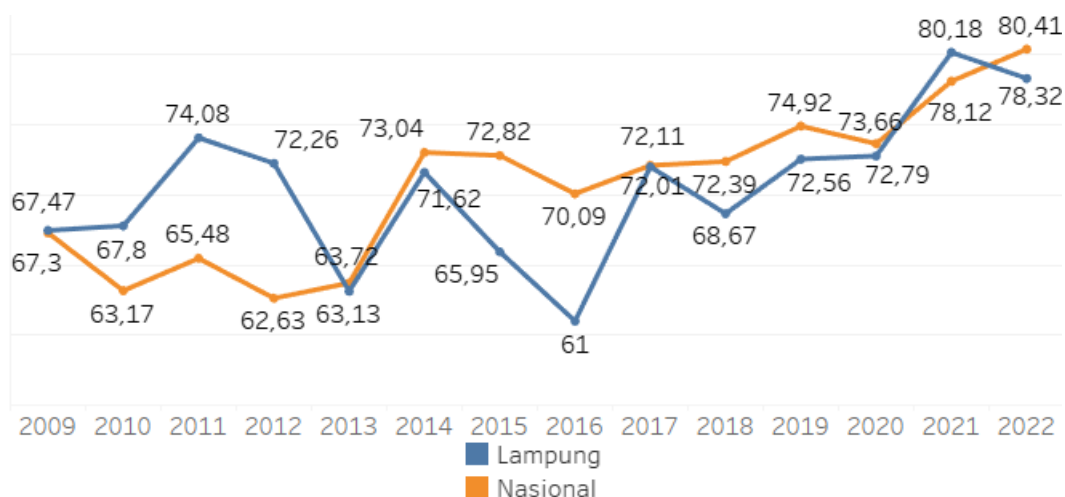
#### 2.3.4.5 Indeks Demokrasi Indonesia

Kehidupan Demokrasi (IDI). Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Saat ini IDI hanya mengukur di level Provinsi.

Merujuk skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung, dilihat dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 78,32, Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi.

Grafik 2.94  
Indeks Demokrasi Indonesia dan Provinsi Lampung



Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, 2024

Data Awal: 2009

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah. Agar terciptanya sebuah bangsa yang mampu berdaya saing, maka harus didukung dengan iklim ilmiah untuk terus menghasilkan produk yang inovatif dan bersedia saling bersinergi untuk mengembangkan kegiatan riset yang mampu menggali semua potensi untuk menjadi lebih baik dan berdaya saing.

Salah satu proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah adalah dengan mengukur indeks inovasi daerah yang dilakukan setiap tahun, adapun hasil indeks inovasi daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.43  
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Inovasi	Nilai	Kategori	Peringkat Tingkat Provinsi	Peringkat Tingkat Nasional
2020	12	1.201	Sangat Inovatif	9	122
2021	23	42,06	Inovatif	14	172
2022	16	53,91	Inovatif	10	103
2023	17	27,62	Kurang Inovatif	15	316

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Data Awal: 2020

#### 2.4.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencapai 2,27 meningkat dari skor 2022 yang sebesar 1,90. Skor tersebut mendapatkan predikat baik.

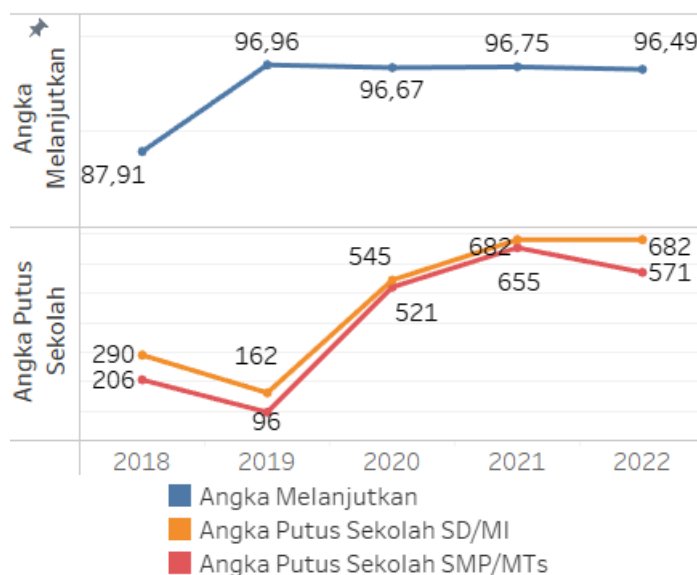
#### 2.4.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.

Angka kelulusan baik pada tingkat SD/MI dan SMP di tahun 2018 hingga 2022 mencapai angka 100%, Angka kelulusan tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang mengikuti ujian. Dari angka kelulusan tersebut, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke jenjang SMP cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan capaian 96,49 persen pada tahun 2022.

Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2018 adalah sebanyak 290 orang, tahun 2019 turun hanya sebanyak 162 orang, kemudian pada tahun 2022 angka putus sekolah naik cukup tinggi menjadi 682 orang. Pada jenjang SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2018 sebanyak 206 orang dan pada tahun 2019 turun menjadi 96 orang, kemudian pada tahun 2021 angka putus sekolah naik cukup tinggi menjadi 655 orang sebelum turun menjadi 571 orang di tahun 2022.

Grafik 2.95  
Angka Melanjutkan dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2023  
Data Awal: 2018

Rasio ketersediaan sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio berarti semakin banyak siswa yang harus dilayani oleh sebuah sekolah. Tahun 2018 pada jenjang SD/MI rasio ketersediaan sekolah adalah 1:215 turun menjadi 1:154,15 pada tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2018 adalah 1:331,8 turun menjadi 1:197,68 pada tahun 2022.

Tabel 2.44  
Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lampung Timur

Rasio Ketersediaan Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	1:215	1:215,5	1:215,5	1:62,45	1:151,84
SMP/MTS	1:331,8	1:338,7	1:338,7	1:48,55	1:209,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2018

Rasio jumlah guru yang merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid (penduduk usia sekolah) pada jenjang pendidikan tertentu, menunjukkan

banyaknya siswa yang harus dilayani oleh seorang guru. Rasio jumlah guru di Kabupaten Lampung Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2018 pada jenjang SD/MI rasio jumlah guru dan muridnya adalah 1:16,26 turun menjadi 1:15,09 pada tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio guru dan murid tahun 2018 adalah 1:16,33 turun menjadi 1:15,97 pada tahun 2022.

Tabel 2.45  
Rasio Jumlah Guru terhadap Murid Kabupaten Lampung Timur

Rasio Jumlah Guru terhadap Murid	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	1:16,26	1:16,07	1:16,07	1:16,15	1:15,09
SMP/MTS	1:16,33	1:15,59	1:15,59	1:15,76	1:15,97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2023  
Data Awal: 2018

#### 2.4.4 Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kehidupan dan usia harapan hidup manusia, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dan status kesehatan penduduk. Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dipercaya menjadi penyebab langsung maupun tak langsung keberhasilan bidang-bidang lain.

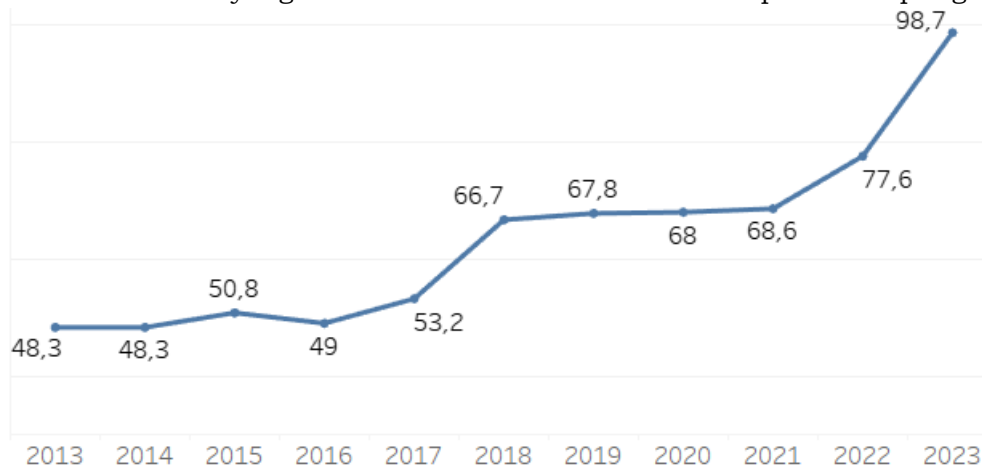
##### 2.4.4.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 mencapai 77,6 persen dan pada akhir Desember tahun 2023 mencapai 1.089.288 peserta atau 98,7 persen. Capaian tersebut diapresiasi oleh BPJS Kesehatan sehingga Kabupaten Lampung Timur meraih predikat *Universal Health Coverage* (UHC).

Sebagian besar peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 merupakan peserta PBI yaitu mencapai 839.327 jiwa atau 73,8 persen, sedangkan peserta non PBI hanya 22,2 persen. Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan jaminan kesehatan penduduk di antaranya adalah kesadaran masyarakat sehat untuk ikut menjadi peserta BPJS masih sangat rendah mengingat peserta mandiri yang mendaftar sebagian besar adalah mereka yang sedang dalam perawatan/sakit, rendahnya kesadaran masyarakat membayar iuran secara tertib dan

tepat waktu, ketidakakuratan data dan tidak maksimalnya *updating* data peserta PBI baik pusat maupun daerah.

Grafik 2.96  
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

#### 2.4.4.2 Pelayanan kesehatan kasus NAPZA

Masalah penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah global yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek bio-psiko-sosial yang mengakibatkan berbagai faktor risiko lainnya yang berdampak kematian. Penyalahgunaan tidak hanya di kota saja bahkan telah merambah di pedesaan dan terjadi pada berbagai strata masyarakat. Kewenangan dalam menjalankan layanan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan fungsi Dinas Kesehatan adalah memberikan pemahaman dan persepsi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba serta menyadarkan masyarakat untuk dapat menjauhkan diri dari narkoba melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik di sekolah-sekolah maupun di masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Timur, pada tahun 2022 terdapat 27 kasus rawat jalan yang menjalankan rehabilitasi di klinik BNNK dari 107 kasus narkoba yang ditemukan (25,23 persen). Sehingga capaian indikator persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani sebesar 25,23 persen dari target 100 persen dan capaian indikator cakupan pelayanan korban NAPZA sebesar 29,68 persen dari target 85 persen. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 20 kasus rawat jalan yang menjalankan rehabilitasi di klinik BNNK dari 22 kasus yang ditargetkan (90,90 persen), sehingga capaian indikator persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani sebesar 90,90 persen dari target 100 persen.

Penanganan korban NAPZA masih rendah yang disebabkan oleh karena Lembaga Rehabilitasi yang masih terbatas. Selain itu, adanya rasa malu dan takut dari pecandu, adanya malu dari pihak keluarga karena masih menganggap aib. Serta adanya stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Agar penanganan pecandu NAPZA berjalan dengan baik,

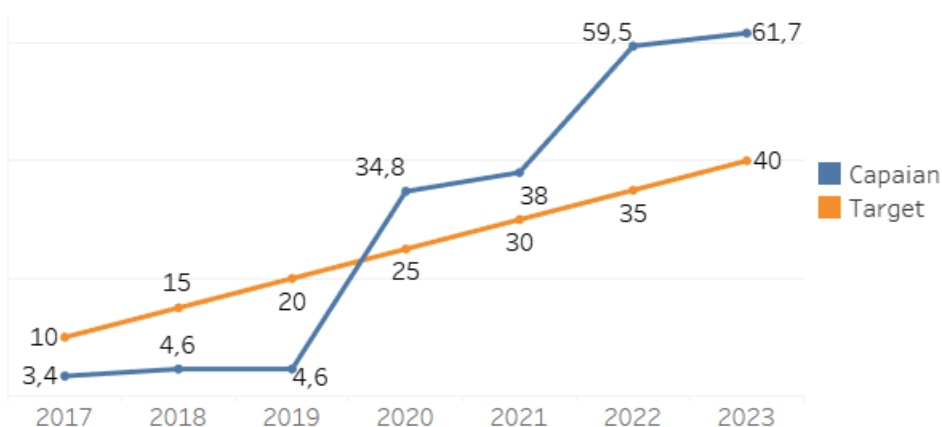
diharapkan tenaga kesehatan dapat memberi pemahaman dan persepsi kepada masyarakat. Serta dapat menyadarkan masyarakat untuk dapat menjauhkan diri dari narkoba.

#### 2.4.5 Persentase Desa Siaga Aktif dengan Strata Purnama Mandiri

Program Desa Siaga Aktif adalah program yang dilaksanakan di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat desa melalui partisipasi aktif masyarakat dan upaya terkoordinasi antara berbagai pihak terkait. Program Desa Siaga Aktif, desa-desa diberikan penilaian berdasarkan sejumlah indikator dan kriteria tertentu untuk menentukan tingkat keaktifan desa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, partisipasi masyarakat, upaya promosi kesehatan, dan pemantauan kesehatan.

Indikator kinerja persentase desa siaga aktif strata purnama mandiri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 61,7 persen dari target 40 persen, meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2022 yakni 59,5 persen. Perkembangan capaian persentase desa siaga purnama mandiri dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah melampaui target Kabupaten. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya aktif tim Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur melakukan pembinaan dan pendampingan ke desa serta meningkatkan advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

Grafik 2.97  
Capaian Desa Siaga Mandiri Dibandingkan Target Kabupaten Lampung Timur



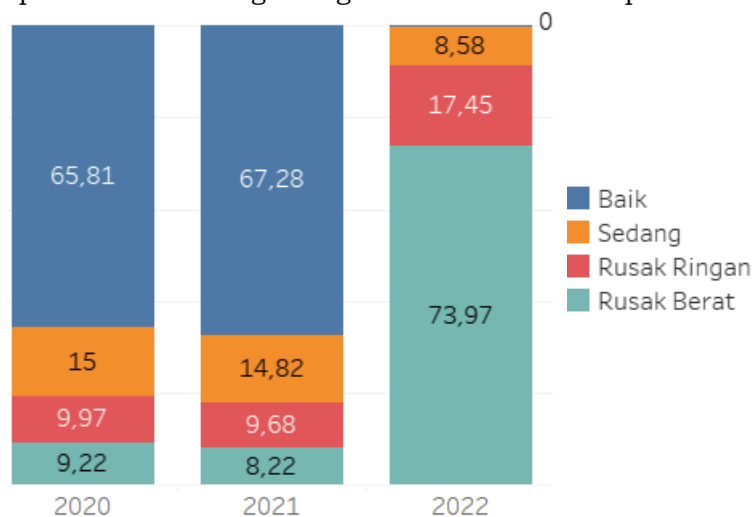
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023

Data Awal: 2018

#### 2.4.6 Sumber daya Air (Irigasi)

Terkait dengan kinerja sistem irigasi dalam daerah irigasi permukaan, jumlah daerah irigasi adalah sebanyak 56 daerah irigasi. Untuk luas daerah irigasi sesuai Permen PUPR adalah seluas 4.902,56 hektar dengan luas sawah/fungsional seluas 4.861,44 hektar.

Grafik 2.98  
Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2023  
Data Awal: 2020

Pada tahun 2022, tidak terdapat daerah irigasi dengan kondisi baik, 8,58 persen atau 420,89 hektar dengan kondisi sedang, 17,45 persen atau 855,56 hektar dengan kondisi rusak ringan, dan 73,97 persen atau 3.626,64 hektar dengan kondisi rusak berat.

#### 2.4.7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Keberadaan fasilitas air minum di Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah relatif baik karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki fasilitas air minum. Jenis air minum yang dianggap higienis atau air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis air kemasan, air leding, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Berdasarkan data dalam Lampung Timur dalam Angka Tahun 2024, jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan adalah sebagaimana berikut.

Tabel 2.46  
Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Air yang Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
Sosial/Social	14	3389	9.118.100,00
Rumah Tangga/Household	2412	391.595	1.453.144 .900,00
Instansi Pemerintah/ Government Institution	5	1642	7.362.500,00
Niaga/Trade	-	-	-
Industri/Industry	-	-	-
Khusus/Exclusive	-	-	-
<b>Lampung Timur</b>	<b>2431</b>	<b>396.626</b>	<b>1.469.625.500,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 kapasitas produksi (potensial) perusahaan air bersih mengalami penurunan 151 liter per detik (7,39 persen), yaitu dari 2043 liter per detik tahun 2021 menjadi 1892 liter per detik pada tahun 2022. Untuk kapasitas produksi efektif pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 1481 liter per detik menjadi 1444 liter per detik, atau turun sebanyak 37 liter per detik (2,5 persen).

Lebih lanjut, untuk memperoleh akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perkotaan, dengan merujuk data di atas, jika disandingkan dengan jumlah penduduk perkotaan yang tinggal di ibukota kecamatan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan PDAM secara rata-rata daerah sebesar 7,98 persen.

Tabel 2.47  
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

No.	Kecamatan	Penduduk Perkotaan Ibukota Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perkotaan Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Air Perpipaan PDAM	Persentase Akses
1	Metro Kibang	4.123	825		
2	Batanghari	4.033	807		
3	Sekampung	8.343	1.669		
4	Marga Tiga	4.512	902		
5	Sekampung Udik	7.655	1.531	128	8,36
6	Jabung	7.451	1.490		
7	Pasir Sakti	7.621	1.524		
8	Waway Karya	5.248	1.050		
9	Marga Sekampung	4.203	841		
10	Labuhan Maringgai	11.793	2.359	381	16,15
11	Mataram baru	9.592	1.918		
12	Bandar Sribhawono	9.936	1.987	1.912	96,22
13	Melinting	9.425	1.885		
14	Gunung Pelindung	5.612	1.122		
15	Way Jepara	7.320	1.464		
16	Braja Selehah	6.412	1.282		
17	Labuhan Ratu	7.579	1.516		
18	Sukadana	5.599	1.120		
19	Bumi Agung	4.957	991		
20	Batanghari Nuban	4.007	801		
21	Pekalongan	4.444	889		
22	Raman Utara	2.334	467		
23	Purbolinggo	4.138	828		
24	Way Bungur	5.444	1.089		
<b>JUMLAH</b>		<b>151.781</b>	<b>30.356</b>	<b>2.421</b>	<b>7,98</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023 (diolah)

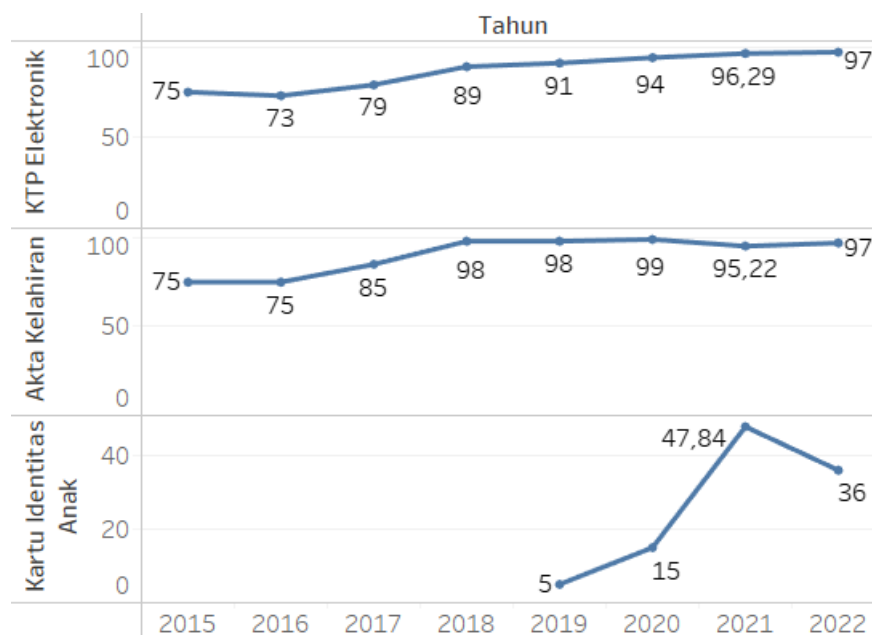
#### 2.4.8 Sistem Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, salah satu arahan untuk pengelolaan sistem jaringan sarana persampahan adalah penyusunan *masterplan* pengelolaan limbah perkotaan khususnya pada lokasi kawasan perkotaan dan kawasan industri. Berdasarkan dokumen RPPLH Tahun 2020, semua limbah yang ada pada akhirnya bermuara di pesisir laut, sehingga perairan di sekitaran muara merupakan penerima beban cemaran yang signifikan, yang akhirnya tersedimentasi dan mengalir ke perairan laut. Kondisi kawasan pesisir, tepatnya di sebelah selatan TNWK, di sepanjang garis pantai mulai dari Tanjung Penet hingga sampai ke muara sungai Way Sekampung telah terjadi degradasi lingkungan yang cukup parah, sehingga bentang alam yang semula berasal dari rawa-rawa dan hutan mangrove menjadi lahan pertanian padi dan sekarang menjadi tambak udang dan ikan, termasuk keberadaan pemukiman masyarakat. Jika tidak segera ditindaklanjuti dikhawatirkan akan terjadi peningkatan potensi bencana alam, terlebih dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini.

#### 2.4.9 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2022 persentase penduduk yang memiliki KTP dan akta kelahiran telah mencapai 97 persen. Sedangkan capaian Kartu Identitas Anak sebesar 36 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47,84 persen.

Grafik 2.99  
Capaian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

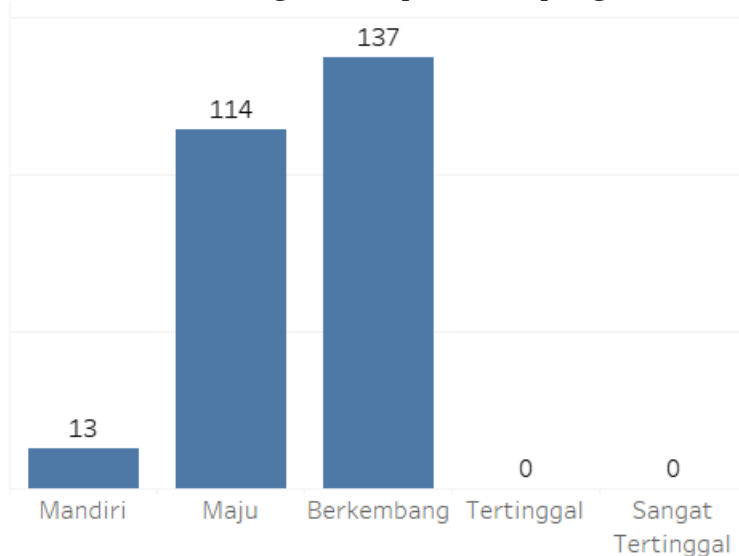
Data Awal: 2015

#### 2.4.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Terkait dengan Indeks Desa Membangun, pada tahun 2023, dapat dikatakan desa di Lampung Timur berada dalam status berkembang. Ini merupakan sebuah peningkatan, setelah sebelumnya pada tahun 2022 terdapat 4 desa yang masih berstatus sebagai desa tertinggal, yaitu di 2 desa di Kecamatan Way Jepara, dan 2 desa di wilayah Kecamatan Marga Sekampung.

Terdapat 13 desa yang telah berstatus desa mandiri, yaitu terdapat di Kecamatan Sukadana 1 desa, Kecamatan Pekalongan 2 desa, Kecamatan Sekampung 2 desa, Kecamatan Sekampung Udik 4 desa, Kecamatan Batanghari Nuban 1 desa, dan Kecamatan Bandar Sribhawono 2 desa. Sebagian besar desa di Kabupaten Lampung Timur berstatus desa berkembang, mencapai 51,89 persen, atau sebanyak 137 desa. Disusul oleh desa yang berstatus desa maju yaitu mencapai 43,18 persen, atau mencapai 114 desa.

Grafik 2.100  
Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

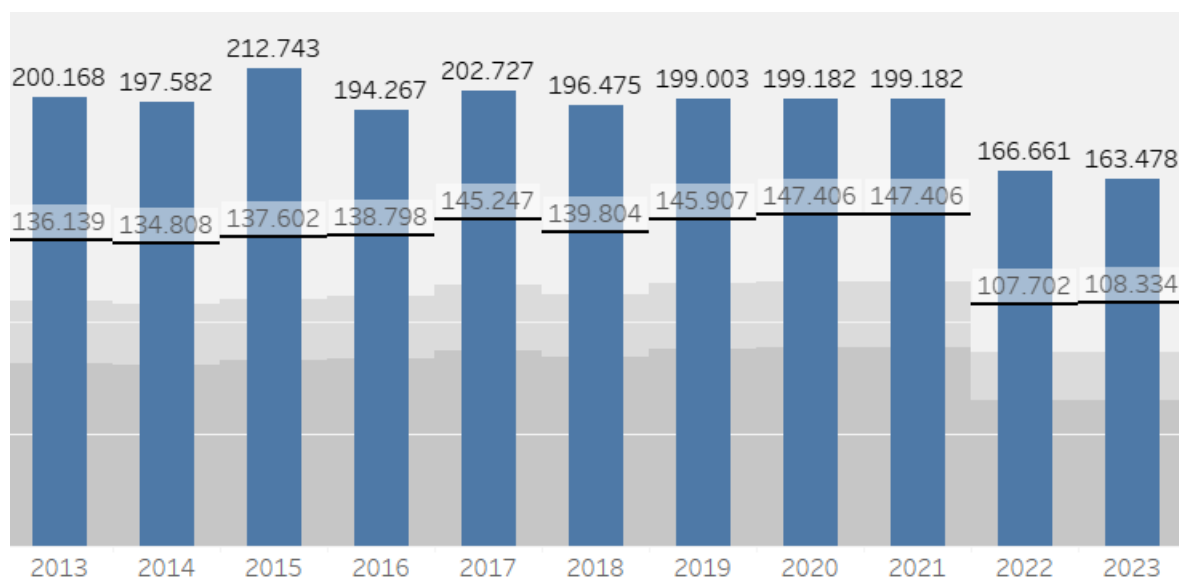


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

#### 2.4.11 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 163.478 pasangan. Dari jumlah pasangan PUS tersebut, jumlah peserta KB aktif baru mencapai 108.334 peserta atau 66,27 persen. Jumlah PUS dan jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.101  
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2013

Untuk rasio petugas lapangan KB/penyuluh (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan baru mencapai 4,71%, di mana jumlah PLKB/PKB hanya berjumlah sebanyak 56 orang untuk melayani 264 desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

#### 2.4.12 Desa Ramah Anak

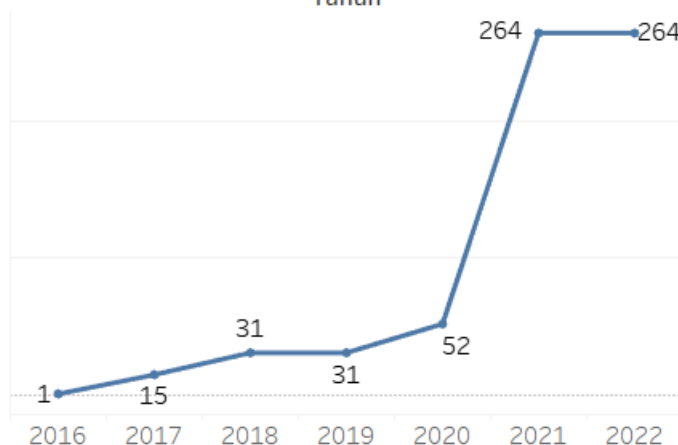
Desa Ramah Anak adalah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak-anak di tingkat desa atau komunitas. Inisiatif Desa Ramah Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikut adalah beberapa karakteristik dan komponen penting dari Desa Ramah Anak:

- 1) **Partisipasi Anak:** Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat dan kebutuhan anak-anak harus didengarkan dan dihormati dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan di tingkat desa.
- 2) **Lingkungan Fisik yang Aman:** Desa Ramah Anak harus menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi anak-anak. Ini meliputi infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang aman, taman bermain, sekolah yang layak, dan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.
- 3) **Pendidikan Berkualitas:** Desa Ramah Anak harus menyediakan akses pendidikan berkualitas yang setara bagi semua anak. Ini meliputi adanya sekolah yang memadai, guru yang terlatih, dan program pendidikan yang inklusif, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka.

- 4) Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan: Desa Ramah Anak harus menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi anak-anak. Ini termasuk akses yang mudah ke fasilitas kesehatan, pemeriksaan rutin, imunisasi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan layanan psikososial yang mendukung kesejahteraan emosional anak-anak.
- 5) Perlindungan dan Keadilan: Desa Ramah Anak harus memiliki sistem perlindungan anak yang efektif. Hal ini mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, perlindungan terhadap eksploitasi, pekerja anak, dan anak jalanan, serta mendukung korban kekerasan dalam pemulihan mereka.
- 6) Pemberdayaan Masyarakat: Desa Ramah Anak mendorong pemberdayaan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Masyarakat harus terlibat dalam mendukung anak-anak, termasuk dalam pengambilan keputusan, memberikan dukungan sosial, dan melibatkan diri dalam kegiatan dan program yang mendukung anak-anak.
- 7) Akses Informasi dan Komunikasi: Desa Ramah Anak harus memastikan akses anak-anak terhadap informasi dan komunikasi yang penting bagi perkembangan mereka. Ini melibatkan akses ke teknologi informasi, media yang bermanfaat, dan program literasi media yang mendukung pemahaman anak-anak tentang dunia yang mereka hadapi.

Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Desa Ramah Anak, dan pada tahun 2021, 264 desa atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur telah masuk dalam kategori sebagai Desa Layak Anak, sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.102  
Perkembangan Desa Layak Anak Kabupaten Lampung Timur  
Tahun



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023

Data Awal: 2016

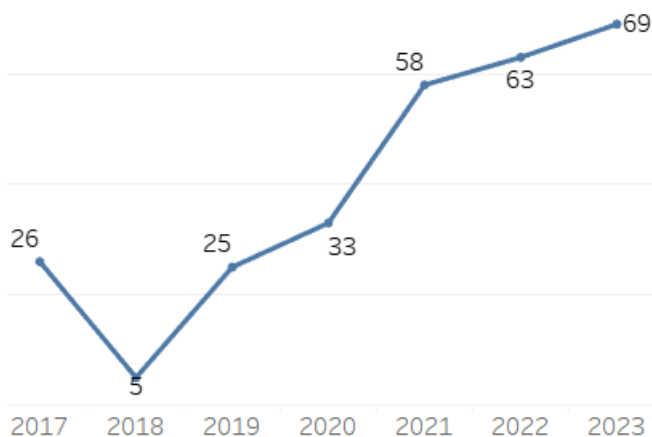
#### 2.4.13 Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Penanganan pada kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat penting untuk melindungi dan mendukung korban serta mencegah kekerasan tersebut terjadi. Penanganan pada korban kekerasan anak dan perempuan mencakup serangkaian langkah dan layanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan

kepada korban. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penanganan korban kekerasan anak dan perempuan:

- 1) Keamanan dan Perlindungan: Prioritas utama adalah memberikan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi pemindahan ke tempat perlindungan sementara atau rumah aman, pengawasan keamanan, atau perlindungan jarak jauh melalui telepon atau teknologi lainnya.
- 2) Pemeriksaan Medis: Korban kekerasan perlu menjalani pemeriksaan medis untuk mengidentifikasi cedera fisik, mengumpulkan bukti forensik, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Pemeriksaan medis ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan.
- 3) Bantuan Psikososial dan Konseling: Korban kekerasan anak dan perempuan sering mengalami dampak psikologis yang serius. Dalam penanganan mereka, penting untuk menyediakan dukungan psikososial dan konseling oleh profesional terlatih yang dapat membantu korban memulihkan diri, mengelola trauma, dan membangun kembali kepercayaan diri.
- 4) Dukungan Hukum: Korban kekerasan perlu mendapatkan akses ke layanan hukum yang tepat. Ini mencakup bantuan hukum dalam melaporkan kekerasan, mendapatkan perintah perlindungan, dan menghadiri proses peradilan jika diperlukan. Korban harus diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan didampingi oleh advokat atau pendamping hukum yang berpengalaman.
- 5) Pendidikan dan Keterampilan: Korban kekerasan anak dan perempuan perlu mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka pulih dan menjadi mandiri. Ini meliputi program pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk pencarian pekerjaan sehingga mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik.
- 6) Pendampingan dan *Follow-up*: Korban kekerasan membutuhkan pendampingan jangka panjang dan *follow-up* untuk memastikan pemulihan mereka yang berkelanjutan. Tim yang terlatih, seperti pekerja sosial atau konselor, dapat memberikan dukungan, memantau perkembangan, dan membantu korban mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pemulihan.
- 7) Pendidikan dan Pencegahan: Selain penanganan korban, penting juga untuk melibatkan pendidikan dan pencegahan agar kekerasan tidak terjadi lagi. Ini meliputi program pendidikan di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan kesetaraan gender, mengajarkan keterampilan pengelolaan konflik, dan mengubah sikap yang mendukung kekerasan.

Grafik 2.103  
Jumlah Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DPPPAPKB Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2017

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini memerlukan kajian yang cukup serius terkait penyebabnya yang kemudian untuk dapat dilakukan intervensi yang tepat.

#### 2.4.14 Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas kerap kali mengalami berbagai risiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya.

Merujuk data Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Untuk Kabupaten Lampung Timur, merujuk data KPU Provinsi Lampung, jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam data jumlah pemilih tetap mencapai 3.766 jiwa, atau terbesar ketiga di Provinsi Lampung. Selanjutnya terkait dengan penyandang disabilitas yang telah bekerja di sektor formal, data yang digunakan adalah data pemerintah Provinsi Lampung yang sebesar 22 persen.

Pemerintah Daerah berkewajiban terus meningkatkan kesetaraan dan kesamaan hak penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai subyek tetapi juga berperan aktif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah, sebagaimana prinsip *no one left behind*, tidak boleh ada penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan,

pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

#### 2.4.15 Olahraga

Pada urusan olahraga, terkait dengan capaian medali pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2022, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-7 dari sebelumnya yang berada di posisi ke-9.

Tabel 2.48  
Hasil Perolehan Medali Porprov Lampung Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Bandar Lampung	195	178	232	605
2	Metro	100	114	170	384
3	Pesawaran	96	78	120	294
4	Tanggamus	74	57	73	204
5	Pringsewu	73	57	123	253
6	Lampung Selatan	66	92	133	291
<b>7</b>	<b>Lampung Timur</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>102</b>	<b>239</b>
8	Lampung Tengah	60	68	98	226
9	Way Kanan	55	51	91	197
10	Lampung Barat	45	32	69	146
11	Lampung Utara	40	58	98	196
12	Pesisir Barat	26	24	44	94
13	Tulang Bawang	15	32	56	103
14	Tulang Bawang Barat	9	7	19	35
15	Mesuji	6	5	21	32
<b>Jumlah</b>		<b>925</b>	<b>925</b>	<b>1449</b>	<b>3299</b>

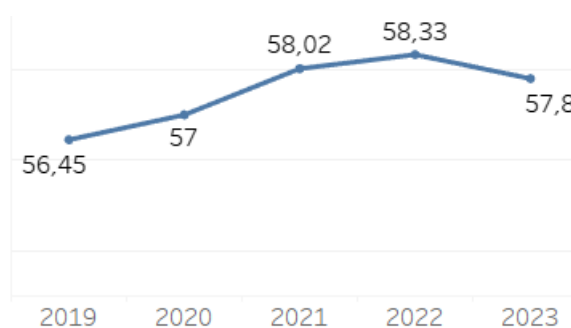
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2023

## 2.4.16 Tata Kelola Pemerintahan

### 2.4.16.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian SAKIP Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 57,8 atau predikat CC yaitu cukup (memadai), capaian ini menurun dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 58,33 dengan predikat yang sama.

Grafik 2.104  
Penilaian SAKIP Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2019

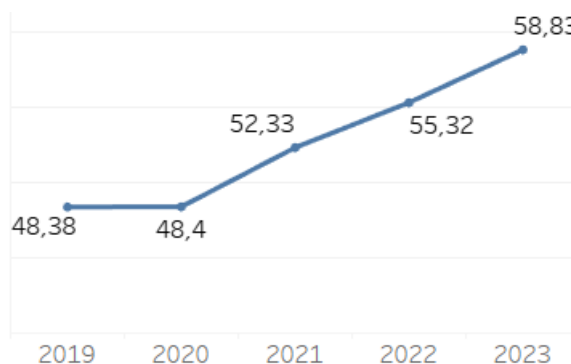
### 2.4.16.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. IRH ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kemudian, peraturan ini menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pengukurannya dilakukan pada empat variabel yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, mendorong regulasi dan deregulasi berbagai Peraturan

Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan, serta meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur meningkat dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 58,83 dengan kategori CC atau cukup pada tahun 2023.

Grafik 2.105  
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur

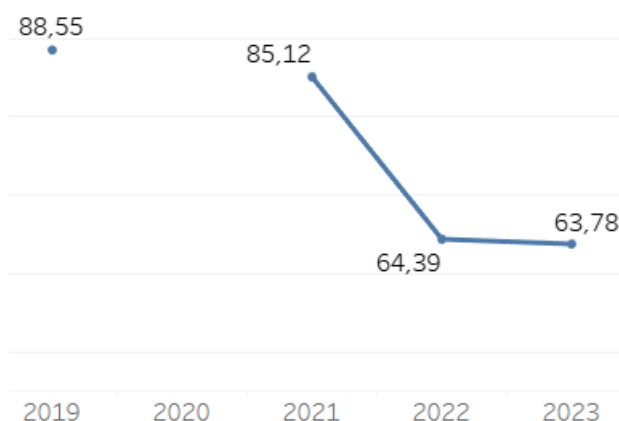


Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, 2024  
Data Awal: 2019

#### 2.4.16.3 Zona Pelayanan Ombudsman

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penilaian Ombudsman Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 63,78 atau termasuk zona kuning (sedang), menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 64,39 dengan zona yang sama.

Grafik 2.106  
Penilaian Ombudsman Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, 2024

Data Awal: 2019

Keterangan: Penilaian Ombudsman Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 tidak tersedia

#### 2.4.16.4 Indeks Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai indeks pelayanan publik pada tahun 2022 sebesar 3,33 dengan huruf mutu B-. Pada tahun 2023 mendapat nilai 2,10 dengan huruf mutu C-. Perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian pada tahun 2023 adalah RSUD Sukadana, Dinas Sosial, dan Kecamatan Metro Kibang. Masing-masing memperoleh nilai indeks sebesar 2,52, 2,29, dan 1,5.

#### 2.4.16.5 Skor Survei Penilaian Integritas

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Survei Penilaian Integritas (SPI) dilaksanakan dalam upaya memetakan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) oleh KPK RI bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. SPI telah dilaksanakan sejak 2016 dengan berbagai K/L/PD di Indonesia. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.

SPI memiliki nilai indeks dimulai dari nol hingga 100% dibagi tiga kategori, yakni sangat rentan, waspada, hingga terjaga. Kategori skor SPI, antara 0-72,9% masuk kategori sangat rentan, 73-77,9% waspada, 78-100% terjaga. Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan sejak tahun 2021. Skor SPI tahun 2023

Kabupaten Lampung Timur sebesar 62,23 masuk dalam kategori sangat rentan dan berada di bawah rata-rata nasional. Untuk penilaian risiko korupsi di instansi mendapat skor 26 persen, dengan rincian risiko suap/gratifikasi sebesar 19 persen, risiko *trading in influence* 24 persen, risiko pengelolaan PBJ 30 persen, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor 51%, risiko nepotisme dalam pengelolaan SDM 26 persen, risiko jual beli jabatan 13 persen, dan risiko penyalahgunaan perjalanan dinas 19%. Sedangkan untuk komponen eksternal mendapat skor 55 persen. Pengguna layanan/penerima manfaat/vendor memberikan skor 36 persen dan 13 persen untuk risiko suap/gratifikasi dan risiko pungutan liar. Sedangkan menurut ahli/pemangku kepentingan skor keberadaan pungutan liar 86 persen, kualitas transparansi layanan 64 persen, dan kualitas pengelolaan PBJ 79 persen.

Grafik 2.107  
Skor Survei Penilaian Integritas Kabupaten Lampung Timur



Sumber: KPK RI, 2023

Data Awal: 2021

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Secara makro, hasil evaluasi RPJPD didapatkan hasil bahwa capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah mengalami perkembangan yang positif. Indikator kinerja makro daerah adalah serangkaian ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja makroekonomi suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, setidaknya ada 6 (enam) indikator Makro Pembangunan yang harus dievaluasi capaiannya.

Tabel 2.49  
Capaian dan Proyeksi Kinerja Makro Pembangunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur  
Tahun 2005-2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Kinerja Periode Perencanaan (2023)	Proyeksi Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026 (2025)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2025)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	63,23	72,44	69,8	72 – 74	14,57	Data awal tahun 2010
2	Angka Kemiskinan	26,2	13,8	14,0 – 13,7	12,5 – 11,5	-47,33	
3	Angka Pengangguran	7,67	3,09	2,6 – 2,5	2,8 – 2,5	-59,71	Data awal tahun 2008
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,14	3,51	4,0 – 4,3	3,5 – 4,5	2607,14	
5	Pengeluaran per kapita (juta rupiah)	6.415	10.812	-	11.108 – 11.600	68,54	
6	Ketimpangan Pendapatan	0,318	0,315	0,34 – 0,33	0,250 – 0,205	-0,94	Data awal tahun 2011

Sumber: Data BPS (diolah), 2023

Secara umum, angka IPM Kabupaten Lampung Timur mengalami perkembangan cukup signifikan selama periode RPJPD 2005-2025. Capaian IPM Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2010 (tahun penyusunan RPJPD) adalah 63,23 yang masih masuk dalam kategori sedang dan terus mengalami kenaikan hingga 72,44 pada tahun 2023. Bila dihitung tingkat capaian IPM dari tahun 2010 hingga 2023, IPM Kabupaten Lampung Timur meningkat sebesar 14,57 persen.

Peningkatan IPM tersebut didorong oleh peningkatan faktor-faktor pendukung utama yaitu tingkat harapan hidup atau angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta tingkat ekonomi masyarakat yang dalam hal ini ditinjau dari tingkat pengeluaran per kapita. Perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Lampung Timur selama periode 2010 hingga 2023 terdapat kenaikan 2,02 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan daerah khususnya pada bidang Pendidikan, seperti penyediaan prasarana dan sarana Pendidikan yang merata, memberikan pengaruh yang cukup baik bagi peningkatan kesempatan mendapatkan Pendidikan bagi masyarakat Lampung Timur.

Rata-rata lama sekolah penduduk Lampung Timur juga mengalami peningkatan di mana rata-rata lama sekolah masyarakat pada tahun 2010 adalah 6,76 tahun dan terus meningkat menjadi 7,20 tahun pada tahun 2015 dan mencapai 8,14 tahun pada tahun 2023. Angka harapan hidup Kabupaten Lampung Timur selama periode tahun 2010 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Angka harapan hidup masyarakat Lampung Timur tahun 2010 adalah 68,78 tahun meningkat hingga 73,95 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini merupakan gambaran peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga mencerminkan peningkatan akses dan kualitas layanan

kesehatan, peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, dan kemajuan dalam infrastruktur kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup juga dapat mencerminkan perbaikan dalam faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang lebih baik, dan perlindungan sosial yang lebih baik. Semua ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran per kapita masyarakat Lampung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, tercatat pengeluaran per kapita masyarakat Lampung Timur sebesar Rp 8.086 Juta kemudian tumbuh menjadi Rp 10.812 Juta pada tahun 2023 atau bila dipersentasekan pendapatan per kapita tumbuh sebesar 33,71 persen selama periode 2010-2023.

Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Lampung Timur sebanyak 248,4 ribu jiwa. Namun, hingga tahun 2023, jumlah tersebut menurun menjadi 148,26 ribu jiwa. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Lampung Timur. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dapat menjadi hasil dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang mungkin berperan adalah adanya program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti program bantuan sosial, pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan peningkatan infrastruktur dapat membantu mengangkat penduduk miskin keluar dari kondisi kemiskinan.

Apabila ditinjau dari garis kemiskinan, penurunan jumlah penduduk miskin di Lampung Timur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah berhasil mengatasi atau melampaui ambang batas kemiskinan yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Peningkatan penghasilan; (2) Penyediaan program bantuan sosial yang efektif; (3) Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan; (4) Pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengurangan kemiskinan; (5) Upaya pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2008 hingga 2020, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 akibat adanya pandemi COVID 19 sebelum kembali menurun di tahun 2023. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran antara lain: (1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran; (3) Pelatihan keterampilan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kualifikasi tenaga kerja; (4) Investasi baik asing maupun dalam negeri yang masuk ke daerah dapat memacu perkembangan perusahaan-perusahaan baru yang menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup dinamis terutama pada periode 2011 hingga 2014 dan periode 2019 hingga 2022. Akan tetapi secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur adalah 3,57 atau 4,67 (PDRB Tanpa MIGAS). Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2010 PDRB Lampung Timur ada pada angka Rp 19,5 triliun dan 13,86 triliun PDRB tanpa MIGAS yang tumbuh sebesar 57,08% menjadi 30,62 triliun dan tumbuh 80,84% menjadi 25,06 triliun (tanpa MIGAS) pada tahun 2023.

Bila ditinjau struktur PDRB Kabupaten Lampung Timur, jenis lapangan usaha yang paling dominan adalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kemudian disusul oleh pertambangan dan penggalan. Kedua jenis lapangan usaha ini tetap mendominasi meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2010 hingga 2023. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Lampung Timur berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini kemudian menyebabkan beberapa implikasi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Timur, di antaranya:

1. Kabupaten Lampung Timur dengan PDRB yang didominasi pertanian sangat bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Ini berarti fluktuasi harga komoditas pertanian atau gangguan dalam produksi pertanian dapat memiliki dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Lampung Timur.
2. Pada sisi lain, kehadiran sektor pertanian yang kuat dalam perekonomian dapat memberikan keuntungan dalam hal ketahanan pangan. Dengan produksi pertanian yang tinggi, wilayah tersebut mungkin memiliki pasokan pangan yang lebih stabil dan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
3. Sektor pertanian cenderung memiliki produktivitas (nilai PDRB) yang lebih rendah dibandingkan sektor industri atau jasa, dan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pertanian mungkin tidak merata di antara populasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antara petani dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
4. PDRB yang didominasi pertanian juga dapat menjadi indikasi bahwa Kabupaten Lampung Timur masih dalam tahap awal transformasi ekonomi. Hal ini juga ditunjukkan dengan rendahnya kontribusi sektor industri dan sektor jasa pada struktur perekonomian.

Untuk PDRB per kapita, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2015 yang sebesar 30,38 juta menjadi 46,28 juta pada 2023. Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah yang menjadi lokus penghitungan inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi Kabupaten Lampung Timur pada bulan Maret 2024 mencapai 4,83 persen, dengan IHK sebesar 109,98.

Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, inflasi bulan Maret 2024 Kabupaten Lampung Timur tertinggi di Provinsi Lampung.

Perkembangan ketimpangan pendapatan atau koefisien gini Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan di Kabupaten Lampung Timur tidak terlalu signifikan, hal ini sangat di pengaruhi oleh dominasi pertanian pada struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, target indikator sasaran pembangunan jangka panjang tidak dicantumkan, sehingga penghitungan capaian kinerja pembangunan daerah secara tepat tidak dapat dilakukan. Merujuk pada misi daerah RPJPD 2005-2025, hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Kurun waktu tahun 2015-2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur terus meningkat, kecuali pada tahun 2020, yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah sempat menurun, pada tahun 2021-2023 kembali meningkat hingga mencapai 46,28 juta/kapita/tahun. PDRB per kapita tersebut kurun waktu satu dekade terakhir selalu berada di bawah besaran Provinsi Lampung dan Nasional. Lebih lanjut jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lampung Timur berada di posisi tengah atau posisi ke-7.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Tata kelola pemerintahan daerah kurun waktu satu dekade terakhir terus meningkat. Dari sisi pengelolaan keuangan, opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian telah diraih selama lima tahun terakhir, setelah sebelumnya opini Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian. Tata kelola keuangan semakin menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat, pada tahun 2021, indeks kepuasan masyarakat mencapai 8,1 dari nilai tertinggi 10. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tinggi. Kondisi yang perlu menjadi perhatian adalah indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP, zona pelayanan ombudsman, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang masih berpredikat C, dan indeks inovasi daerah yang turun menjadi berpredikat kurang inovatif pada tahun 2023.

3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

Infrastruktur yang berkualitas baik diyakini dapat meningkatkan daya saing dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, mulai dari infrastruktur konektivitas hingga infrastruktur pengairan. Terkait dengan tingkat kemantapan jalan, pada tahun 2023 jalan kabupaten mantap mencapai 49,17%. Untuk kondisi jembatan, 95,79% kondisi baik, 1,94% rusak berat, dan 2,27% kondisi kritis. Selanjutnya terkait dengan infrastruktur pengairan, pada tahun 2022 kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten 73,97% rusak berat, 17,45 rusak ringan, dan 8,58 kondisi baik.

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

Pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur terus dilakukan, indikator yang dapat digunakan adalah capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2023, nilai IPM masyarakat Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 72,44 atau berkategori tinggi. Apabila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kelima.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kurun waktu satu dekade terakhir jumlah gangguan keamanan dan ketertiban terus meningkat, mencapai 589 kasus di tahun 2023. Untuk jumlah gangguan yang terbesar berdasarkan data pada tahun 2023 adalah kasus pencurian berat yaitu sebanyak 370 kasus.

6. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Upaya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama di semua lapisan masyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah semakin meningkatnya jumlah pondok pesantren di Kabupaten Lampung Timur, terbanyak di antara kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Tidak adanya konflik horizontal terkait agama dan SARA dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir mengindikasikan bahwa rasa toleransi dan persatuan di masyarakat sangat tinggi.

Terkait dengan upaya pelestarian kebudayaan, pemerintah daerah terus memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga adat, lembaga kesenian dan kebudayaan. Terus tumbuhnya kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan mengindikasikan tingginya rasa kepedulian dan penghargaan terhadap kebudayaan dan adat istiadat daerah.

7. Mengoptimalkan sumber daya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

Upaya optimalisasi sumber daya alam berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup terus dilakukan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2023 IKLH mencapai 65,22. Untuk Indeks Kualitas Udara mencapai 87,74, Indeks Kualitas Air 50,54, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 48,8.

## **2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **2.6.1 Analisis Proyeksi Penduduk**

Perencanaan pembangunan pada tingkat lokal maupun nasional sangat membutuhkan informasi dasar penduduk seperti jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Dengan demikian proyeksi penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, karena selain dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah dan dasar pengambilan keputusan rencana di masa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan.

Proyeksi penduduk (*population projections*) merupakan suatu ramalan (*forecast*) yang didasarkan pada asumsi-asumsi rasional tertentu yang dibuat untuk kecenderungan masa yang akan datang. Berdasarkan teori, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Sumber daya manusia yang produktif tersebut dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Kurun waktu dua dekade terakhir, jumlah penduduk Lampung Timur terus meningkat. Pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Timur adalah daerah dengan jumlah penduduk ke-3 terbesar di Provinsi Lampung, yaitu mencapai 1.127.946 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Sekampung Udik, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bumi Agung. Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 573.986, lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan yang sebesar 553.960 jiwa.

Tabel 2.50  
Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Timur per Kecamatan

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (ribu jiwa)					
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Metro Kibang	24,64	25,44	26,55	27,50	28,32	29,13
2	Batanghari	60,66	62,64	65,35	67,70	69,71	71,71
3	Sekampung	68,14	70,36	73,41	76,04	78,31	80,55
4	Marga Tiga	50,94	52,60	54,88	56,85	58,54	60,22
5	Sekampung Udik	78,06	80,60	84,09	87,11	89,70	92,27
6	Jabung	55,77	57,58	60,08	62,23	64,09	65,92
7	Pasir Sakti	44,42	45,87	47,86	49,58	51,05	52,52
8	Waway Karya	43,35	44,76	46,70	48,37	49,81	51,24
9	Marga Sekampung	29,62	30,58	31,91	33,05	34,04	35,01
10	Labuhan Maringgai	78,08	80,62	84,11	87,13	89,72	92,29
11	Mataram baru	32,09	33,13	34,57	35,81	36,88	37,93
12	Bandar Sribhawono	53,22	54,95	57,33	59,39	61,16	62,91
13	Melinting	30,43	31,43	32,79	33,96	34,97	35,98
14	Gunung Pelindung	24,95	25,77	26,88	27,85	28,68	29,50
15	Way Jepara	58,71	60,63	63,26	65,53	67,48	69,41
16	Braja Selehah	27,39	28,28	29,50	30,56	31,47	32,37
17	Labuhan Ratu	53,15	54,89	57,27	59,33	61,09	62,84
18	Sukadana	76,02	78,49	81,89	84,83	87,35	89,85
19	Bumi Agung	20,87	21,55	22,48	23,29	23,99	24,67
20	Batanghari Nuban	48,46	50,03	52,20	54,07	55,68	57,28
21	Pekalongan	53,88	55,63	58,04	60,13	61,92	63,69
22	Raman Utara	41,93	43,29	45,17	46,79	48,18	49,56
23	Purbolinggo	46,39	47,90	49,98	51,78	53,32	54,84
24	Way Bungur	26,80	27,67	28,87	29,91	30,80	31,68
<b>JUMLAH</b>		<b>1.127,95</b>	<b>1.164,70</b>	<b>1.215,13</b>	<b>1.258,78</b>	<b>1.296,26</b>	<b>1.333,40</b>

Sumber: BPS, data diolah 2023

Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,9 persen, dan dengan tren yang terus melambat, pada tahun 2045 jumlah penduduk Lampung Timur diproyeksikan akan mencapai 1.333,4 ribu jiwa. Berdasarkan tabel di atas, dengan skenario *business as usual* terlihat bahwa Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu mencapai 92,29 ribu jiwa dan 92,27 ribu jiwa. Sedangkan Kecamatan Bumi Agung adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu hanya mencapai 24,67 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kepadatan penduduk per wilayah pada tahun 2045 mencapai 250 jiwa per kilometer persegi, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 211 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan tertinggi diproyeksikan berada di Kecamatan Pekalongan, yaitu mencapai 636 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Way Bungur yang mencapai 84 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.51  
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur per Kecamatan

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )					
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Metro Kibang	325,16	335,76	350,29	362,87	373,68	384,38
2	Batanghari	407,45	420,73	438,94	454,71	468,25	481,67
3	Sekampung	459,35	474,31	494,85	512,62	527,88	543,01
4	Marga Tiga	203,16	209,78	218,87	226,73	233,48	240,17
5	Sekampung Udik	230,18	237,67	247,96	256,86	264,51	272,09
6	Jabung	208,20	214,98	224,29	232,34	239,26	246,12
7	Pasir Sakti	229,06	236,53	246,77	255,64	263,25	270,79
8	Waway Karya	205,36	212,05	221,23	229,18	236,01	242,77
9	Marga Sekampung	167,03	172,47	179,93	186,40	191,95	197,45
10	Labuhan Maringgai	400,42	413,45	431,34	446,82	460,13	473,31
11	Mataram baru	403,28	416,43	434,48	450,10	463,51	476,79
12	Bandar Sribhawono	286,55	295,89	308,71	319,80	329,32	338,76
13	Melinting	218,48	225,60	235,36	243,82	251,08	258,27
14	Gunung Pelindung	317,79	328,14	342,35	354,64	365,20	375,66
15	Way Jepara	256,09	264,44	275,90	285,82	294,33	302,76
16	Braja Selehah	110,60	114,21	119,15	123,43	127,11	130,75
17	Labuhan Ratu	109,48	113,05	117,95	122,19	125,83	129,43
18	Sukadana	100,45	103,72	108,21	112,09	115,43	118,74
19	Bumi Agung	285,21	294,51	307,28	318,33	327,80	337,20
20	Batanghari Nuban	268,17	276,90	288,89	299,26	308,17	317,00
21	Pekalongan	538,07	555,60	579,66	600,47	618,35	636,07
22	Raman Utara	259,83	268,29	279,91	289,96	298,59	307,15
23	Purbolinggo	208,95	215,76	225,10	233,19	240,13	247,01
24	Way Bungur	71,21	73,53	76,71	79,47	81,84	84,18
<b>JUMLAH</b>		<b>211,86</b>	<b>218,76</b>	<b>228,24</b>	<b>236,43</b>	<b>243,47</b>	<b>250,45</b>

Sumber: BPS, data diolah 2023

Jika ditinjau lebih jauh terkait dengan komposisi jenis kelamin penduduk Lampung Timur per kecamatan, pada tahun 2045 komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 50,16 persen dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49,84 persen. Penduduk berjenis kelamin laki-laki diproyeksikan sebanyak 668,87 ribu jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 664,53 ribu jiwa. Ditinjau dari komposisi umur penduduk, penduduk usia produktif pada tahun 2045 mencapai 63,24 persen atau mencapai 843,29 ribu jiwa. Sedangkan penduduk usia belum produktif sebanyak 293,87 ribu jiwa, dan penduduk berusia tua mencapai 196,24 ribu jiwa. Dengan komposisi tersebut, rasio ketergantungan pada tahun 2045 mencapai 36,76 persen, atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 31,48 persen.

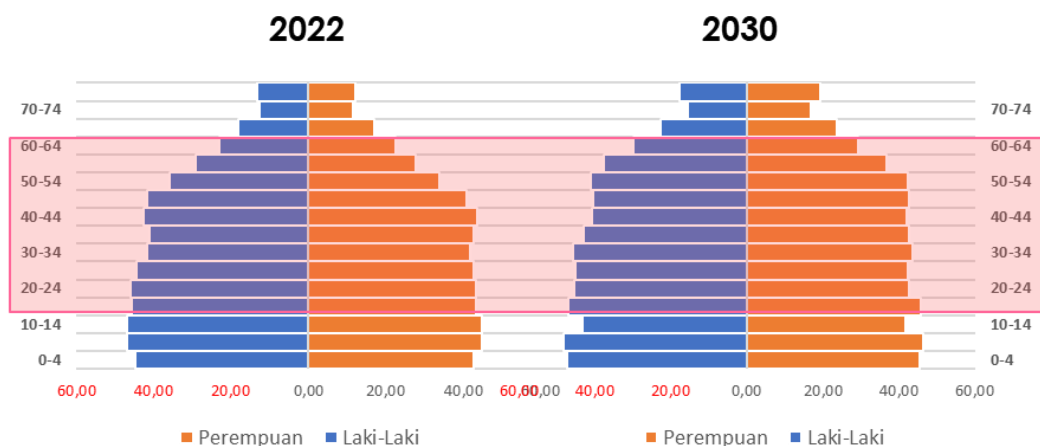
Tabel 2.52  
Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Lampung Timur (Ribu Jiwa)

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 2022 (Ribu)			TAHUN PROYEKSI PENDUDUK 2023-2045 (Ribu)																	
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proyeksi Penduduk 2023			Proyeksi Penduduk 2025			Proyeksi Penduduk 2030			Proyeksi Penduduk 2035			Proyeksi Penduduk 2040			Proyeksi Penduduk 2045		
					Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	42,93	40,95	83,87	45,73	43,76	89,49	48,31	46,35	94,66	47,27	45,37	92,64	46,49	44,61	91,1	50,1	47,51	97,61	52,58	50,54	103,12
2	5-9	47,80	45,70	93,50	45,92	43,9	89,82	43,5	41,48	84,98	48,28	46,31	94,59	47,24	45,34	92,58	46,46	44,57	91,03	50,07	47,48	97,55
3	10-14	47,13	44,92	92,04	47,42	45,48	92,9	47,66	45,89	93,55	43,42	41,6	85,02	48,2	46,45	94,65	47,16	45,46	92,62	46,38	44,71	91,09
4	15-19	45,42	42,80	88,22	45,85	43,29	89,14	46,08	43,71	89,79	47,26	45,56	92,82	43,06	41,28	84,34	47,8	46,12	93,92	46,8	45,14	91,94
5	20-24	45,18	42,25	87,42	45,94	42,96	88,9	45,52	42,54	88,06	45,54	42,73	88,27	46,71	44,54	91,25	42,52	40,3	82,82	47,25	45,1	92,35
6	25-29	42,99	41,74	84,73	45,23	43,03	88,26	46	43,21	89,21	45,29	42,25	87,54	45,32	42,44	87,76	46,48	44,25	90,73	42,3	40,01	82,31
7	30-34	41,28	41,90	83,18	42,18	42,02	84,2	43,22	42,44	85,66	45,93	43,55	89,48	45,23	42,59	87,82	45,25	42,78	88,03	46,42	44,59	91,01
8	35-39	42,28	43,95	86,23	41,18	42,59	83,77	41,21	42,18	83,39	43,04	42,55	85,59	45,74	43,67	89,41	45,05	42,7	87,75	45,06	42,9	87,96
9	40-44	43,95	44,28	88,22	42,21	43,56	85,77	41,43	43,15	84,58	40,9	41,99	82,89	42,72	42,38	85,1	45,43	43,48	88,91	44,73	42,53	87,26
10	45-49	42,10	40,22	82,31	42,19	41,75	83,94	42,36	42,95	85,31	40,68	42,73	83,41	40,18	41,62	81,8	41,97	41,96	83,93	44,71	43,11	87,82
11	50-54	35,22	32,97	68,19	37,34	35,14	72,48	39,43	37,85	77,28	41,25	42,23	83,48	39,64	42,07	81,71	39,07	40,9	79,97	40,93	41,3	82,23
12	55-59	29,20	28,08	57,27	30,16	28,47	58,63	32,13	30,28	62,41	37,72	36,76	74,48	39,51	41,09	80,6	37,93	40,98	78,91	37,33	39,76	77,09
13	60-64	22,99	22,65	45,64	23,84	23,43	47,27	25,61	25,16	50,77	29,83	29,13	58,96	35,1	35,45	70,55	37,21	39,94	77,15	35,31	39,67	74,98
14	65-70	19,03	17,43	36,46	18,39	17,8	36,19	19,09	19,24	38,33	22,79	23,45	46,24	26,66	27,28	53,94	32,28	33,74	66,02	34,04	38,09	72,13
15	70-74	12,77	11,72	24,49	13,34	12,26	25,6	14,43	13,74	28,17	15,75	16,88	32,63	18,93	20,75	39,68	23,32	24,92	48,24	28,42	31,04	59,46
16	+75	13,75	12,42	26,17	13,54	12,69	26,23	14,47	14,08	28,55	17,87	19,24	37,11	20,97	25,52	46,49	22,37	26,25	48,62	26,54	28,56	55,1
JUMLAH		573,99	553,96	1.127,95	580,46	562,13	1142,6	590,45	574,25	1164,7	612,82	602,33	1215,2	631,7	627,08	1258,8	650,4	645,86	1296,3	668,87	664,53	1333,4

Sumber: BPS, data diolah 2023

Bonus demografi sudah dimulai sejak tahun 2016, dimana jumlah penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif. Kabupaten Lampung Timur mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran penduduk produktif terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif atau yang masih mampu bekerja, akan meningkatkan produksi sebagai komponen dari PDRB yang menjadi acuan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk dengan usia produktif bergerak di berbagai sektor, baik sektor menghasilkan barang, maupun sektor penjualan jasa. Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang adil dari bonus demografi ini, maka pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kondisi dan kebijakan pendukung tertentu tersedia dan beroperasi secara efektif.

Grafik 2.108  
Piramida Proyeksi Kelompok Umur Penduduk Tahun 2022-2030

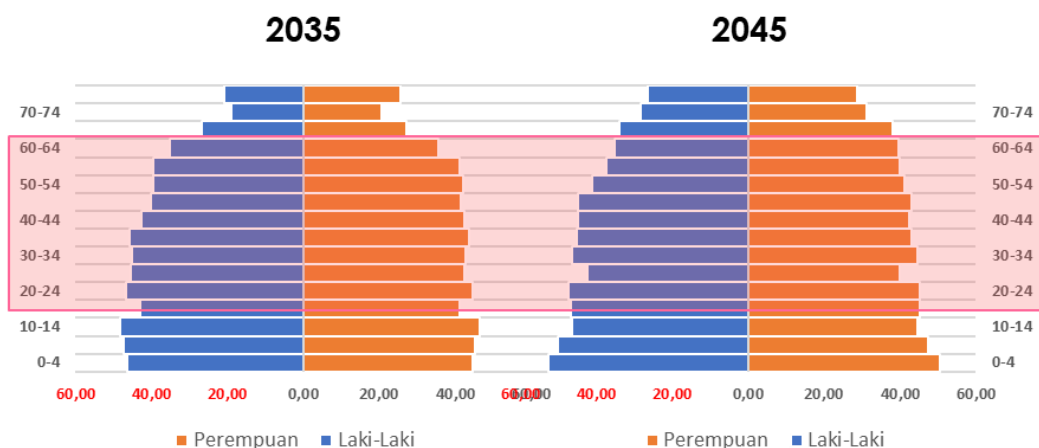


Sumber: BPS, data diolah 2023

Perubahan struktur penduduk menjadikan Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi salah satu daerah dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). *Consuming class* ini mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi, tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi daerah. Struktur usia populasi yang berubah, dalam kondisi tertentu, dapat memberikan rangsangan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kondisi demografis saat ini matang untuk memanfaatkan “bonus demografi”. Kondisi yang menguntungkan akan ada selama beberapa waktu, dan jendela peluang akan mulai menutup setelah sekitar satu dekade berikutnya, di mana penduduk Kabupaten Lampung Timur akan memasuki penuaan (*aging population*).

Pada tahun 2030, komposisi penduduk usia produktif mencapai 68,05 persen. Kelompok usia terbesar adalah kelompok usia 15-19 tahun yang mencapai 7,64 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, persentase kelompok usia produktif mengalami penurunan sebesar 0,47 persen.

Grafik 2.109  
Piramida Proyeksi Kelompok Umur Penduduk Tahun 2035-2045



Sumber: BPS, data diolah 2023

Pada tahun 2035 Kabupaten Lampung Timur akan memasuki fase *aging population*, di mana penduduk usia tua mencapai 11,13 persen dari total populasi, dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2045 yang mencapai 14,72 persen. Meningkatnya penduduk usia tua akan memberikan implikasi besar bagi perekonomian dan kondisi sosial daerah.

## 2.6.2 Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.2.1 Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

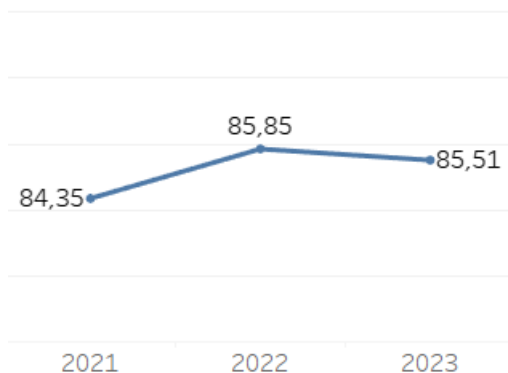
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berkorelasi dengan peningkatan akan kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat selain pakaian dan makanan. Setiap manusia membutuhkan rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga, sekaligus sebagai sarana investasi. Setiap individu manusia akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Analisis proyeksi kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal pada tahun 2045 perlu dianalisis untuk menjadi pedoman dalam pengalokasian sarana dan prasarana permukiman masyarakat. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu tiga tahun terakhir relatif terus meningkat. Pada tahun 2023, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 69,43 persen. Sesuai literatur, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu, dan lantai terluas berupa marmer/granit.kramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah.

Grafik 2.110  
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024  
Data Awal: 2021

Berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan rumah tempat tinggal berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan rumus:

$$K_t = \frac{P_t}{R_t}$$

Keterangan:

$K_t$  : Kebutuhan rumah pada tahun ke-t

$P_t$  : Jumlah penduduk pada tahun ke-t

$R_t$  : Rata-rata jumlah penghuni per rumah pada tahun ke-t

Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal pada tahun 2045 mencapai 266.679 unit. Proyeksi tersebut termasuk ketersediaan rumah eksisting saat ini. Kecamatan tertinggi terhadap kebutuhan rumah atau tempat tinggalnya adalah Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Sekampung Udik.

Tabel 2.53  
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)

No.	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Metro Kibang	4.992	5.089	5.309	5.500	5.663	5.826
2	Batanghari	12.290	12.528	13.070	13.540	13.943	14.342
3	Sekampung	13.805	14.072	14.681	15.208	15.661	16.110
4	Marga Tiga	10.320	10.520	10.975	11.370	11.708	12.044
5	Sekampung Udik	15.814	16.120	16.818	17.421	17.940	18.454
6	Jabung	11.298	11.517	12.015	12.447	12.817	13.184
7	Pasir Sakti	9.000	9.174	9.572	9.916	10.211	10.503
8	Waway Karya	8.782	8.952	9.339	9.675	9.963	10.248
9	Marga Sekampung	6.000	6.116	6.381	6.610	6.807	7.002
10	Labuhan Maringgai	15.818	16.124	16.822	17.425	17.944	18.458
11	Mataram baru	6.500	6.626	6.913	7.162	7.375	7.587
12	Bandar Sribhawono	10.781	10.990	11.466	11.878	12.232	12.582
13	Melinting	6.166	6.285	6.557	6.793	6.995	7.195
14	Gunung Pelindung	5.055	5.153	5.376	5.569	5.735	5.899
15	Way Jepara	11.895	12.126	12.651	13.106	13.496	13.883
16	Braja Selebah	5.548	5.656	5.901	6.113	6.295	6.475
17	Labuhan Ratu	10.769	10.977	11.453	11.865	12.218	12.568
18	Sukadana	15.400	15.698	16.377	16.965	17.470	17.971
19	Bumi Agung	4.228	4.310	4.497	4.658	4.797	4.935
20	Batanghari Nuban	9.817	10.007	10.440	10.815	11.137	11.456
21	Pekalongan	10.915	11.126	11.608	12.025	12.383	12.738
22	Raman Utara	8.495	8.659	9.034	9.358	9.637	9.913
23	Purbolinggo	9.399	9.581	9.996	10.355	10.663	10.969
24	Way Bungur	5.430	5.535	5.775	5.982	6.160	6.337
<b>Jumlah</b>		<b>228.517</b>	<b>232.940</b>	<b>243.027</b>	<b>251.756</b>	<b>259.251</b>	<b>266.679</b>

Sumber: BPS, data diolah 2023

Yang perlu diwaspadai adalah resiko krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah atau bisa disebut sebagai *backlog*. *Backlog* merupakan indikator untuk mengukur kebutuhan rumah yang dihitung dengan angka persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan yang menempati bukan rumah sendiri tetapi memiliki rumah di tempat lain. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, di Kabupaten Lampung Timur persentase rumah tangga menurut status bangunan tempat tinggal yang ditempati 3,58 persen bukan milik sendiri. Jika dikonversi dalam jumlah unit, ekuivalen dengan 8.181 unit rumah. Lebih lanjut, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia pada tahun 2022 mengalami *backlog* kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93% *backlog* kepemilikan sebagian besar berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) serta sebanyak 60% didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diamanatkan bahwa MBR adalah masyarakat yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Solusi dalam mengatasi backlog antara lain adalah peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor perumahan dan perlunya skema-skema pembiayaan yang tepat.

### 2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air adalah kehidupan dan tanpa air tidak akan ada kehidupan. Air termasuk kategori sumber daya karena kemampuannya untuk memenuhi atau menangani kebutuhan manusia dan juga menjadi sumber persediaan, menunjang dan memberi bantuan terhadap kehidupan. Air dapat dikategorikan sebagai sumberdaya tak terbarukan apabila kemampuan memulihkan diri lebih kecil daripada volume pemanfaatannya. Oleh karena itu, sumber air tanah yang terbatas dapat dikategorikan sebagai sumber air tak terbarukan. Sebaliknya, menjadi sumberdaya terbarukan apabila kemampuan memulihkan diri lebih besar dari pada volume pemakaiannya. Air sungai yang melimpah dikategorikan sebagai sumberdaya terbarukan.

Dalam konteks permukiman, air bersih dikategorikan sebagai utilitas yang diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman. Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2045 mencapai 73 juta meter kubik per tahun. Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan dengan kebutuhan air bersih terbesar masing-masing mencapai lebih dari 5 juta meter kubik air bersih per tahun di tahun 2045.

Tabel 2.54  
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (m<sup>3</sup>)

No.	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Metro Kibang	1.366.601	1.393.044	1.453.355	1.505.546	1.550.368	1.594.788
2	Batanghari	3.364.298	3.429.410	3.577.919	3.706.441	3.816.787	3.926.146
3	Sekampung	3.779.075	3.852.198	4.018.974	4.163.297	4.287.244	4.410.080
4	Marga Tiga	2.825.117	2.879.803	3.004.535	3.112.484	3.205.148	3.296.983
5	Sekampung Udik	4.329.066	4.412.818	4.603.830	4.769.123	4.911.105	5.051.813
6	Jabung	3.092.859	3.152.699	3.289.178	3.407.281	3.508.719	3.609.249
7	Pasir Sakti	2.463.789	2.511.478	2.620.253	2.714.390	2.795.202	2.875.291
8	Waway Karya	2.403.946	2.450.478	2.556.610	2.648.460	2.727.310	2.805.453
9	Marga Sekampung	1.642.574	1.674.360	1.746.856	1.809.593	1.863.467	1.916.859
10	Labuhan Maringgai	4.330.154	4.413.900	4.604.890	4.770.153	4.912.162	5.052.898
11	Mataram baru	1.779.476	1.813.943	1.892.566	1.960.617	2.018.990	2.076.841
12	Bandar Sribhawono	2.951.356	3.008.497	3.138.835	3.251.640	3.348.448	3.444.391

13	Melinting	1.687.887	1.720.550	1.795.049	1.859.521	1.914.881	1.969.746
14	Gunung Pelindung	1.383.903	1.410.678	1.471.744	1.524.588	1.569.977	1.614.958
15	Way Jepara	3.256.298	3.319.366	3.463.229	3.587.749	3.694.566	3.800.429
16	Braja Selebah	1.518.847	1.548.244	1.615.295	1.673.322	1.723.139	1.772.511
17	Labuhan Ratu	2.947.890	3.004.999	3.135.278	3.248.044	3.344.748	3.440.590
18	Sukadana	4.215.851	4.297.387	4.483.337	4.644.238	4.782.500	4.919.520
19	Bumi Agung	1.157.422	1.179.839	1.230.975	1.275.235	1.313.202	1.350.830
20	Batanghari Nuban	2.687.335	2.739.331	2.857.922	2.960.548	3.048.686	3.136.036
21	Pekalongan	2.988.046	3.045.867	3.177.745	3.291.870	3.389.873	3.486.999
22	Raman Utara	2.325.396	2.370.385	2.472.992	2.561.782	2.638.049	2.713.632
23	Purbolinggo	2.572.989	2.622.790	2.736.380	2.834.683	2.919.076	3.002.714
24	Way Bungur	1.486.409	1.515.188	1.580.830	1.637.642	1.686.398	1.734.718
<b>Jumlah</b>		<b>62.556.585</b>	<b>63.767.252</b>	<b>66.528.574</b>	<b>68.918.247</b>	<b>70.970.046</b>	<b>73.003.476</b>

Sumber: BPS, data diolah 2023

Perhitungan kebutuhan air bersih menurut SNI 19-6728.1-2002 tentang penyusunan neraca sumber daya adalah dengan mengalikan jumlah penduduk dengan kebutuhan air bersih. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$Q_{md} = P_n \times q$$

Keterangan:

$Q_{md}$ : Kebutuhan air bersih

$P_n$ : Jumlah penduduk

$q$ : Kebutuhan pemakaian air

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan program 100-0-100 yang merupakan target 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak dapat dipenuhi. Pemenuhan kewajiban 100% akses aman air minum tersebut merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan data BPS, persentase rumah tangga menurut sumber air utama, 15,12 persen menggunakan mata air/sumur tak terlindung dan sebesar 1,54 persen menggunakan air permukaan, air hujan, dan lainnya. Ke depan, peningkatan akses air bersih bagi masyarakat perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui peningkatan alokasi anggaran penyediaan air bersih masyarakat, bersinergi dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

### 2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Sebagaimana air bersih, listrik juga merupakan utilitas pelayanan yang diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman. Jaringan listrik merupakan salah satu prasarana dasar untuk mendukung perkembangan wilayah. Ketersediaan dan kapasitas jaringan listrik menjadi salah satu faktor bagi penduduk untuk memilih lokasi tempat tinggal. Pemilihan lokasi ini membentuk pola tertentu, dengan

asumsi bahwa semakin mudah akses terhadap infrastruktur listrik maka semakin banyak pula penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Pada tahun 2045, kebutuhan listrik di Kabupaten Lampung Timur untuk mengaliri 266.679 unit rumah mencapai 549 juta kWh. Kebutuhan listrik tersebut belum memperhitungkan kebutuhan listrik bagi peningkatan sektor industri dan fasilitas lainnya.

Tabel 2.55  
Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah/Tempat Tinggal (kWh)

No.	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Listrik					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Metro Kibang	3.744.113	3.816.560	4.645.425	8.249.565	12.006.499	15.802.237
2	Batanghari	9.217.255	9.395.644	11.436.271	20.309.266	29.558.317	38.902.909
3	Sekampung	10.353.631	10.553.968	12.846.035	22.812.588	33.201.668	43.698.049
4	Marga Tiga	7.740.047	7.889.871	9.603.537	17.054.705	24.821.601	32.668.735
5	Sekampung Udik	11.860.455	12.089.912	14.715.440	26.132.182	38.033.029	50.056.781
6	Jabung	8.473.587	8.637.532	10.513.353	18.670.033	27.172.548	35.762.876
7	Pasir Sakti	6.750.106	6.880.762	8.375.237	14.873.369	21.646.860	28.490.325
8	Waway Karya	6.586.155	6.713.637	8.171.812	14.512.111	21.121.082	27.798.327
9	Marga Sekampung	4.500.204	4.587.287	5.583.558	9.915.579	14.431.234	18.993.531
10	Labuhan Maringgai	11.863.436	12.092.877	14.718.826	26.137.823	38.041.221	50.067.527
11	Mataram baru	4.875.278	4.969.707	6.049.296	10.743.106	15.635.646	20.578.749
12	Bandar Sribhawono	8.085.906	8.242.458	10.032.807	17.817.207	25.931.364	34.129.356
13	Melinting	4.624.347	4.713.836	5.737.601	10.189.154	14.829.399	19.517.573
14	Gunung Pelindung	3.791.514	3.864.870	4.704.204	8.353.907	12.158.357	16.002.099
15	Way Jepara	8.921.364	9.094.152	11.069.683	19.658.898	28.611.795	37.657.214
16	Braja Selehah	4.161.224	4.241.764	5.163.042	9.168.887	13.344.495	17.563.237
17	Labuhan Ratu	8.076.410	8.232.875	10.021.436	17.797.502	25.902.707	34.091.687
18	Sukadana	11.550.277	11.773.663	14.330.300	25.447.881	37.037.074	48.745.931
19	Bumi Agung	3.171.018	3.232.435	3.934.623	6.987.589	10.169.821	13.384.940
20	Batanghari Nuban	7.362.561	7.505.018	9.134.912	16.222.178	23.609.919	31.073.961
21	Pekalongan	8.186.428	8.344.842	10.157.175	18.037.644	26.252.169	34.551.541
22	Raman Utara	6.370.949	6.494.206	7.904.539	14.037.164	20.429.824	26.888.504
23	Purbolinggo	7.049.285	7.185.726	8.746.419	15.532.511	22.606.181	29.752.923
24	Way Bungur	4.072.354	4.151.199	5.052.882	8.973.382	13.059.961	17.188.762
<b>Jumlah</b>		<b>1.156.297</b>	<b>171.387.904</b>	<b>174.704.801</b>	<b>212.648.411</b>	<b>377.634.231</b>	<b>549.612.774</b>

Sumber: BPS, data diolah 2023

Rumus kebutuhan listrik rumah tangga diatur dalam SNI 04-0225-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Penyediaan Listrik untuk Perumahan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$P = \sum (P_i t_i K_f)$$

Keterangan:

P : Total daya listrik yang dibutuhkan

$P_i$  : Daya dari masing-masing perangkat listrik

$T_i$  : Durasi pemakaian masing-masing perangkat

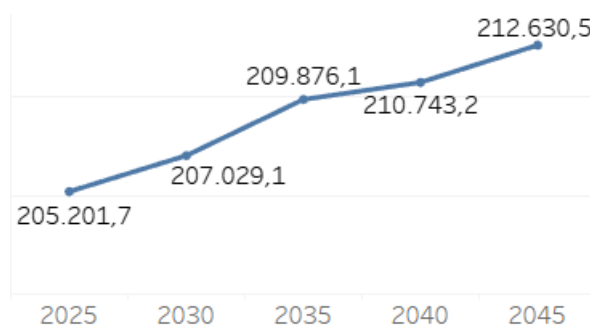
$K_f$  : Faktor beban (biasanya antara 0,5 hingga 1 tergantung pada jenis peralatan)

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 fasilitas perumahan bersumber penerangan listrik non PLN di Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,05 persen, atau ekuivalen dengan sekitar 114 rumah yang saat ini belum teraliri listrik. Meskipun ketenagalistrikan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk mendorong teralirinya listrik untuk seluruh rumah di daerah melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

#### 2.6.2.4 Proyeksi Timbulan Sampah

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan, maka efeknya akan berdampak pada lingkungan permukiman. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat juga akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah, maka hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Timbulan sampah terkait dengan jumlah penduduk, dengan proyeksi jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya tentunya akan berpengaruh terhadap hasil buangan (sampah) baik dari rumah tangga individu maupun perusahaan, aktivitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang dapat berdampak pada semakin meningkatkan jumlah timbulan sampah. Berdasarkan hasil analisis berdasarkan SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, proyeksi timbulan pada tahun 2045 mencapai 212.630,5 ton per tahun.

Grafik 2.111  
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)



Sumber: DLHPKPP Kabupaten Lampung Timur, 2024

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$T_s = P T K K$$

Keterangan:

T<sub>s</sub> : Timbulan sampah

P : Populasi (jumlah penduduk)

TK : Tingkat timbulan sampah per kapita

K : Koefisien pertumbuhan sampah (faktor yang mempertimbangkan peningkatan timbulan sampah karena faktor ekonomi, sosial, dan lainnya)

Persampahan merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sub bidang dari urusan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup. Di mana kewenangan pemerintah daerah meliputi pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Tabel.2.56  
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					Total
		2025	2030	2035	2040	2045	
Proyeksi Timbulan Sampah	203.189	205.201	207.029	209.876	210.743	212.630	212.630
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan							
Dump Truk	0	0	1	1	1	1	4
Arm Roll Truk	8	0	2	2	2	2	16
Truk Engkel	2	0	1	1	1	1	6
Pick up	1	0	1	1	1	1	5

#### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan fasilitas kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan meliputi berbagai jenis, mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga apotek. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil analisis berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur untuk melayani 1,3 juta penduduk di tahun 2045 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					Total
		2025	2030	2035	2040	2045	
Rumah Sakit	6	0	0	0	0	1	7
Puskesmas	36	0	1	1	1	1	40
Balai Pengobatan	457	0	2	3	3	4	469
Klinik Bersalin	38	0	1	1	1	1	42
Tempat Praktek Dokter	229	4	7	9	7	10	268
Apotek	38	6	9	12	9	14	88
Posyandu	914	2	3	3	3	4	929

Sumber: BPS, data diolah 2023

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KF = \frac{P}{R}$$

Keterangan:

KF : Kebutuhan fasilitas kesehatan

P : Jumlah penduduk

R : Rasio standar per kapita (misalnya, jumlah penduduk yang dilayani oleh satu puskesmas atau klinik)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Fasilitas kesehatan harus bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat, melalui pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

#### 2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kualitas suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu parameter di dalam mengukur indeks pembangunan manusia dalam suatu bangsa dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan kawasan. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan ketersediaan fasilitas pendidikan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan hingga tahun 2045 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					Total
		2025	2030	2035	2040	2045	
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah	272.210	273.190	278.090	283.243	288.242	293.132	293.132
PAUD	842	3	15	25	25	27	937
SD	580	0	3	5	8	10	606
SMP	188	0	4	5	12	15	224

Sumber: BPS, data diolah 2023

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KF = \frac{A}{R}$$

Keterangan:

KF : Kebutuhan fasilitas pendidikan

A : Jumlah anak usia sekolah

R : Rasio standar pelayanan (misalnya, jumlah siswa per kelas atau sekolah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyediaan pendidikan meliputi pelayanan pendidikan anak usia dini dan pelayanan pendidikan dasar. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 jumlah sekolah PAUD sederajat mencapai 914 sekolah, SD sebanyak 714 sekolah, dan SMP sebanyak 238 sekolah. Jumlah sekolah tersebut meliputi sekolah negeri dan swasta. Jika dilihat kondisi eksisting yang ada, masih terdapat *gap* antara kondisi eksisting dan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Lampung Timur ke depan.

## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah dalam rencana pembangunan jangka panjang sangat berkaitan dengan aspek lokasi. Pembangunan wilayah bukan hanya menentukan kebijakan pengembangan ekonomi dan sosial serta penentuan sektor-sektor yang harus dikembangkan, akan tetapi berkaitan pula dengan lokasi, yaitu berkaitan dengan suatu aktivitas akan diletakkan. Hal tersebut penting karena suatu daerah tidak homogen. Seperti halnya dengan suatu daerah yang secara topografi tidak datar, maka perkembangan kemajuan suatu daerah pun tidak merata. Ada wilayah-wilayah yang merupakan puncak dari perkembangan kemajuan, ada pula wilayah yang perkembangannya masih tertinggal. Bahwa perkembangan tidak merata sebetulnya adalah hal yang wajar. Sumber daya alam pun tersebar tidak merata. Ada wilayah yang kaya akan sumber daya alam tertentu, ada

yang kaya dengan sumber daya alam lainnya, ada juga yang tidak mempunyai sumber daya alam. Belum lagi perbedaan penyebaran penduduk, topografi, dan lain sebagainya. Karena karakteristik wilayah berbeda, pengaruh pembangunan pun tidak terasa sama oleh semua wilayah. Ada wilayah yang berkembang pesat karena pengaruh pembangunan, ada pula yang berkembang lebih lambat. Dengan demikian, terdapat ketidakseimbangan dalam perkembangan. Karena adanya ketidakseimbangan ini, kebijakan yang diterapkan pada tiap wilayah pun tidaklah harus selalu sama.

### **2.7.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045**

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pembangunan di wilayah Sumatera lebih diintensifkan mengingat besarnya sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya. Hal ini memungkinkan pertumbuhan luar wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa. Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di wilayah Jawa akan berkurang. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, sebagaimana wilayah lainnya, pada wilayah Sumatera diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Transformasi sosial wilayah Sumatera akan diarahkan melalui implementasi kebijakan :

1. Perluasan upaya promosi-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
2. Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan beban tinggi
3. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
4. Peningkatan imunisasi rutin lengkap dengan pendekatan budaya
5. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis perairan di provinsi berkarakter kepulauan
6. Pemenuhan sarana dan prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik dan konektivitas transportasi, serta sarana dan prasarana penanganan limbah medis
7. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
8. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi
9. Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan

10. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK
11. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri)
12. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi S3
13. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
14. Penyediaan afirmasi akses pendidikan terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka
15. Percepatan pembangunan optimalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif pada daerah afirmasi
16. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Transformasi ekonomi wilayah Sumatera diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia, diarahkan melalui kebijakan:

1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri
2. Optimalisasi kawasan strategis
3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
5. Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan
6. Peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif
7. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
8. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional
9. Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
10. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (devisa) dan nusantara melalui integrasi ragam destinasi wisata lintas wilayah di wilayah Sumatera

11. Pengembangan *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera
12. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan
13. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia
14. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Sumatera maupun antar pulau
15. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi listrik di wilayah Sumatera
16. Pengembangan jaringan listrik cerdas (*smart grid*) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik
17. Peningkatan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk memastikan ketersediaan listrik pada saat beban puncak
18. Pemanfaatan teknologi jaringan transmisi antarwilayah dalam rangka transfer energi skala besar untuk meningkatkan kestabilan sistem serta mengurangi efek negatif transfer energi skala besar antar wilayah Sumatera dan Jawa
19. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK antara lain melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G)
20. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
21. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber, serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)

Transformasi tata kelola wilayah Sumatera diarahkan melalui implementasi kebijakan yang meliputi:

1. Optimalisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
2. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat
3. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat
4. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintah digital

6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan landasan transformasi terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia ditingkatkan melalui:

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal
2. Penguatan kerja sama pertahanan keamanan regional
3. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan terutama dengan maraknya TPPO
4. Peningkatan pengawasan keamanan dengan dukungan teknologi *Integrated Maritime Intelligent Platform* pada wilayah perbatasan laut untuk meminimalkan kegiatan ilegal
5. Komitmen penguatan penegakan hukum terhadap pelanggar yang memasuki batas wilayah negara RI melalui Selat Malaka dan Laut Natuna
6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan pada pulau-pulau kecil terluar
7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
8. Penguatan pengendalian inflasi daerah

Selanjutnya, terkait dengan arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi di wilayah Sumatera diarahkan pada:

1. Penguatan pendidikan yang berbasis antar etnis dan agama
2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di wilayah Sumatera
3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung
5. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah stwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi
6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera

7. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan di antara WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan
8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
9. Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai
10. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana
11. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
12. Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di wilayah Sumatera
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
14. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
15. Pemberdayaan perempuan, pemuda penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
16. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah Sumatera.

Untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di wilayah Sumatera arah kebijakan meliputi:

1. Pembangunan irigasi baru terutama pada bendungan yang sudah dibangun serta sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
2. Pembangunan bendungan baru yang terintegrasi pengembangan kawasan untuk menambah luas layanan irigasi premium
3. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian
4. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir
5. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
6. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana
7. Pengembangan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS)

Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan kewilayahan di wilayah Sumatera arah kebijakan meliputi:

1. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di wilayah Sumatera
2. Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut
3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria

4. Pengembangan pelabuhan
5. Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik terutama antar wilayah Sumatera dan Jawa (Merak-Bakauheni) serta provinsi/kabupaten perairan di Sumatera
7. Pengembangan bandara utama dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk *aerocity* serta pengembangan bandara perairan dan *seaplane* termasuk untuk mendukung pariwisata
8. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan, serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah
9. Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan
10. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan dalam melayani mobilitas penumpang
11. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas bernilai tinggi.

Lebih lanjut, arah kebijakan sarana dan prasarana dasar di wilayah Sumatera diarahkan pada implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman yang berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
2. Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
3. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah
4. Peremajaan kota, terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota besar.

Terkait kesinambungan pembangunan di wilayah Sumatera arah kebijakan diimplementasikan melalui:

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW provinsi
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional

5. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
6. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
7. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

### **2.7.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029, bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah Way Kambas dan sekitarnya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan adanya kegiatan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL

Selanjutnya, dalam penataan fungsi kawasan di wilayah kabupaten/kota, ditetapkan Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Lampung di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Sukadana  
Fungsi utama Kawasan Perkotaan Sukadana meliputi pusat pemerintahan kabupaten dan pusat perdagangan dan jasa.
2. Kawasan Perkotaan Way Jepara  
Fungsi utama Kawasan Perkotaan Way Jepara meliputi pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, dan pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura.

### 3. Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai

Fungsi utama Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai meliputi pusat perikanan, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian.

Merujuk dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dalam mewujudkan keberlanjutan sarana dan prasarana pengembangan wilayah di Provinsi Lampung, perlu adanya kebijakan untuk mengendalikannya. Peran kebijakan tersebut seperti mengatur pergerakan yang hanya mengangkut *high value product* dan memperpendek pergerakan bahan mentah. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sarana prasarana dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan di Provinsi Lampung. Di sektor perhubungan, dalam pengembangan angkutan penyebrangan dari Lampung ke Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan di Indonesia, masih dikelola secara terbatas oleh salah satu pihak sehingga masih adanya peluang untuk mengembangkan pintu penyeberangan sebagai alternatif tambahan penyeberangan ke Pulau Jawa.

Arah pembangunan wilayah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, arah pembangunannya meliputi:

1. Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
2. Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
4. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.

5. Pengembangan sistem pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi Air Bawah Tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.

Arah pembangunan Provinsi Lampung dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah meliputi:

1. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasil pembangunan, terutama pembangunan jalur jalan arteri primer tol dan bukan tol serta aksesibilitas jalan yang menghubungkan antara wilayah pantai pesisir selatan dan pantai utara. Penambahan jalan alternatif sebagai stimulasi pembangunan antar kabupaten/kota, terutama di bagian barat dan timur Provinsi Lampung. Di samping itu, dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan juga diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas dan penambahan lintasan kereta api baik untuk barang maupun untuk penumpang yang bersifat massal. Adapun untuk angkutan sungai dan penyeberangan diarahkan untuk optimalisasi pengembangan angkutan penyeberangan yang berada di sekitar kabupaten yang memiliki potensi angkutan sungai yang merupakan sarana transportasi yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang angkutan penumpang dan barang.
2. Pengembangan sistem pembangunan perhubungan laut yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang mampu menjadi pintu gerbang utama Sumatera yaitu Pelabuhan Bakauheni-Lampung Selatan dan Pelabuhan Panjang di bagian Kota Bandar Lampung. Di samping itu diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di beberapa kota di Bandar Lampung yang mampu menjadi pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan utama. Keterbukaan tata kelola terhadap penyeberangan dan Pelabuhan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Lampung.
3. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi bandar udara Radin Intan II yang mampu melayani penerbangan domestik dan internasional (bertaraf internasional) dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pada beberapa bandar udara yang berada di beberapa daerah di Lampung agar mampu melayani penerbangan domestik sehingga mampu menunjang pengembangan wilayah sekitarnya.

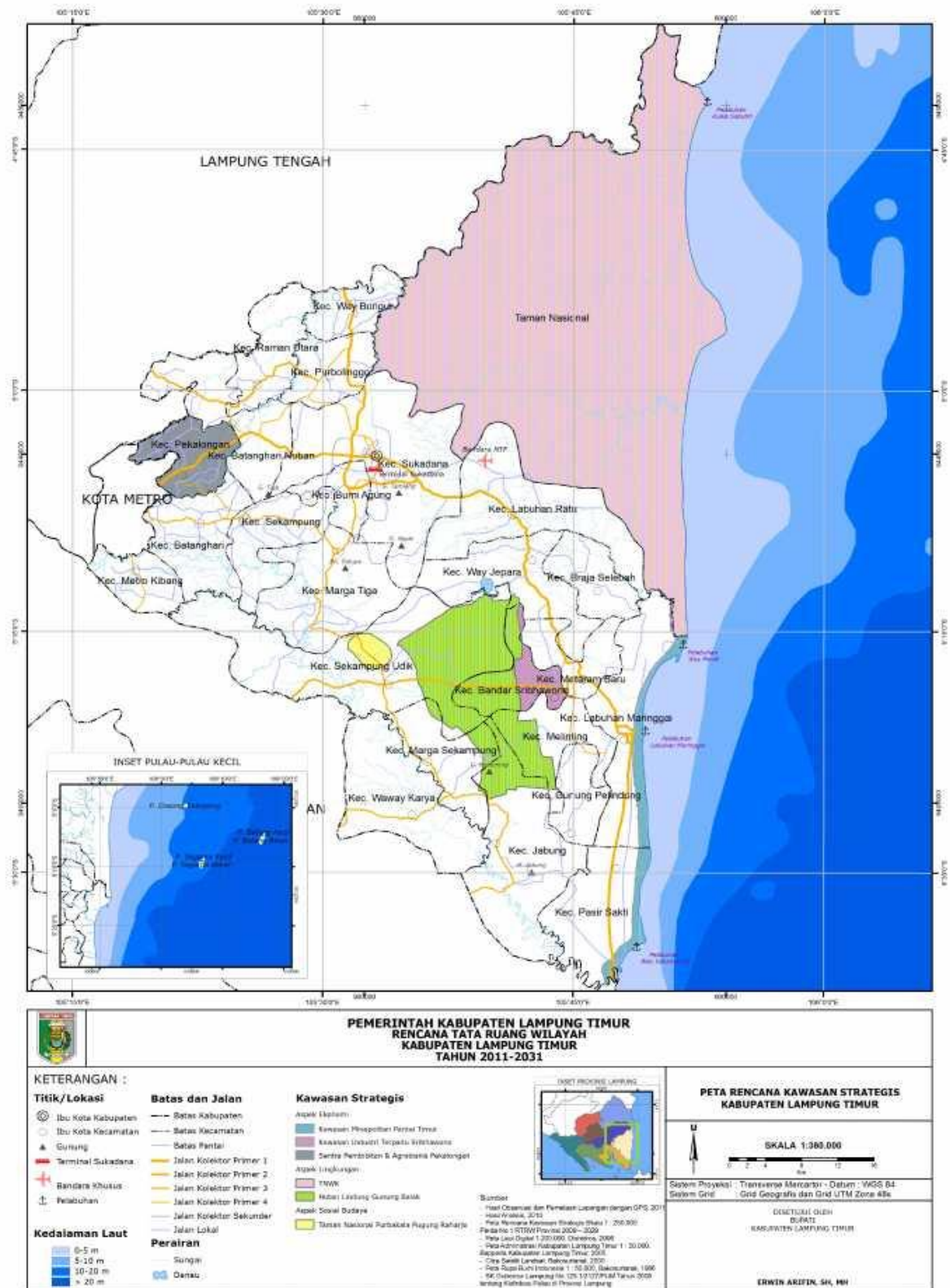
4. Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air yang diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
5. Pengembangan sistem pembangunan air minum yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Lampung terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum, serta peningkatan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis maupun nonteknis hingga mencapai ambang batas normal.
6. Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Di samping itu, pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.
7. Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan. Peningkatan kualitas regulasi dalam mengendalikan pertumbuhan perumahan yang efisien, mandiri dalam penyediaan sarana prasarana dan berkelanjutan.
8. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah non domestik. Selain itu perlunya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.

9. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dan berkelanjutan dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana tata ruang dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana pembangunan yang konsisten, baik secara fungsi, lokasi dan jangka waktu pembangunannya.
10. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri, distribusi dan daya saing produk yang dihasilkan.
11. Pengembangan sistem pembangunan kota besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhannya. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil.
12. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah Pantai Barat dengan wilayah Pantai didaerah Lampung Selatan serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah tengah dan antara wilayah.
13. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### **2.7.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045**

Arah kebijakan kewilayahan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur akan diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, sebagaimana di tampilkan pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.27  
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Kebijakan pengembangan wilayah disinergikan dengan arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sumatera dan arah pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Percepatan pembangunan melalui pembangunan pada wilayah-wilayah strategis diharapkan dapat mendorong dan menghela perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Optimalisasi potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga menjadi kekuatan pendorong utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Tabel 2.58  
Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031

HIRARKI	PERKOTAAN	FUNGSI UTAMA	KETERANGAN
PKWp	Sukadana	Pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan	Perkotaan Sukadana berdasarkan Perda Provinsi Lampung No 14/2023 tentang RTRW Provinsi Lampung 2023-2043, ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal. Ketetapan fungsi tersebut akan ditindaklanjuti dalam raperda perubahan RTRW Lampung Timur Tahun 2011-2031
PKL	Way Jepara	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura	
	Labuhan Maringgai	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan	
PKLp	Pekalongan	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan	Berdasarkan PP 13/2017 tentang Perubahan PP 26/2008 tentang RTRWN, istilah PKLp telah dihapus, sehingga melalui Raperda revisi RTRW Lampung Timur 2011-2031 akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan tersebut
	Sekampung Udik	Pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman	
	Bandar Sribhawono		
PPK	Jabung	Pusat pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung	
	Purbolinggo	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi	
	Marga Tiga	Pusat pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan	
	Pasir Sakti	Pusat pertanian, permukiman dan pertambangan	

HIRARKI	PERKOTAAN	FUNGSI UTAMA	KETERANGAN
	Sekampung	Pusat pertanian lahan basah dan permukiman	
	Raman Utara	Pusat pertanian lahan basah, permukiman dan lindung	
	Melinting	Pusat pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata	
	Gunung Pelindung	Pusat pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung	
	Marga Sekampung	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung	
	Batanghari		
	Metro Kibang	Pusat permukiman, dan perkebunan campur	
	Batanghari Nuban	Pusat pertanian, dan permukiman	
	Bumi Agung		
	Labuhan Ratu	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, dan agrowisata	
	Mataram Baru	Pusat pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata	
<b>PPL</b>	Waway Karya	Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman	
	Braja Selehah	Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman	
	Way Bungur	Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman	

Berdasarkan hirarki fungsi kawasan tersebut, kawasan strategis Kabupaten Lampung Timur meliputi Perkotaan Kecamatan Sukadana, Perkotaan Kecamatan Way Jepara, Perkotaan Kecamatan Labuhan Maringgai, Perkotaan Kecamatan Pekalongan, Perkotaan Kecamatan Sekampung Udik, dan Perkotaan Kecamatan Bandar Sribhawono. Kawasan strategis ekonomi daerah adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah ditetapkan dan telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam pembangunan wilayah. Sebagai pemusatan kegiatan ekonomi, kawasan strategis ekonomi daerah akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Potensi sektoral (unggulan) dan daya tarik geografis dari kawasan akan menjadi penggerak utama dalam pembangunan wilayah, karena adanya keterkaitan dan demand atau permintaan terhadap sektor unggulan tersebut. Selanjutnya kawasan strategis ekonomi daerah akan dapat memberikan efek positif seperti *spread effect* dan *trickledown effect* yang mempengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya.

## 1. Kawasan Perkotaan Sukadana

Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, Kecamatan Sukadana memiliki potensi sebagai penggerak utama pembangunan Lampung Timur kedepan. Berdasarkan proyeksi, kontribusi Kecamatan Sukadana terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus ditingkatkan seiring dengan pemberdayaan potensi yang dimiliki. Potensi kontribusi ekonomi Kecamatan Sukadana bersumber dari posisi strategis di pinggir jalan Lintas Pantai Timur dan sebagai pusat pemerintahan serta sentra layanan jasa keuangan hingga jasa pelayanan kesehatan. Potensi ini dapat menjadikan Perkotaan Sukadana sebagai motor penggerak ekonomi daerah khususnya perdagangan dan jasa.

Pengembangan Kawasan Perkotaan Sukadana secara jangka panjang diarahkan pada perwujudan keserasian dan keseimbangan pembangunan antara desa-kota, antar desa dan antarkota, perwujudan masyarakat kota yang sejahtera secara merata, pengentasan kemiskinan, dan perwujudan perkotaan yang sehat dan lestari. Upaya pengembangan tersebut difokuskan pada upaya mengembangkan Perkotaan Sukadana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi pusat pemerintahan dan sentra layanan jasa skala kabupaten. Keberadaan perkantoran pemda, instansi vertikal, perbankan, dan layanan rumah sakit daerah dapat menjadi faktor utama penarik pergerakan masyarakat berkunjung ke Perkotaan Sukadana. Peningkatan kunjungan akan memberikan *multiplier effect* bagi tumbuhnya sektor-sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan layanan jasa lainnya.

Sektor perdagangan dan jasa yang saat ini mulai berkembang di Perkotaan Sukadana, perlu terus didukung melalui peningkatan citra (*image*) kawasan, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, peningkatan keamanan, dan kemudahan aksesibilitas. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa dilaksanakan melalui upaya peningkatan pemasaran dan nilai tambah produk komoditas unggulan yang diproduksi dari desa-desa dan kecamatan sekitar.

Pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Perkotaan Sukadana tersebut sinergi dengan pengembangan pariwisata lokal. Keberadaan kawasan Kota Tua Sukadana dapat menjadi faktor pendukung daya tarik kawasan. Nilai historis kekayaan adat dan budaya jika dikemas dengan baik dapat menarik minat wisatawan dan generasi muda. Revitalisasi kawasan Kota Tua (*heritage district*) melalui penataan kawasan, peningkatan kualitas bangunan tua, penyediaan sarana-prasarana, optimalisasi jalur pedestrian, penyediaan trotoar, penyediaan penginapan, peningkatan promosi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan *heritage tourism* menjadi arah kebijakan pengembangan pariwisata urban kedepan.

Gambar 2.28  
Kawasan Perkotaan Sukadana



Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata di kawasan Perkotaan Sukadana, sebagai pusat koleksi dan distribusi, menjadi harapan dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Sukadana tersebut, dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, keterpaduan dan integrasi infrastruktur konektivitas menuju wilayah perkotaan mutlak diperlukan. Melalui peningkatan kualitas jalan kolektor primer Gedong Dalam-Batas Kota Sukadana, Jalan Soekarno Hatta, dan Sukadana-Nyampir serta penyediaan fasilitas pendukung jalan raya. Untuk mendorong pengembangan wilayah kedepan, dilaksanakan rencana pembangunan jalan lingkaran luar ruas jalan Bumi Tinggi-Pasar Sukadana-Muara Jaya dan ruas jalan Mataram Marga-Kantor Pemda-Jalan Lintas Pantai Timur.

Sarana perhubungan darat tersebut akan ditunjang oleh pengembangan jaringan kereta api antar kabupaten, dengan jalur Pringsewu-Rejosari-Tegineneng-Metro-Sukadana. Rencana pengembangan jaringan kereta api antar kabupaten tersebut tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Lampung, dan RTRW Kabupaten Lampung Timur. Wilayah kecamatan yang akan terlewati jaringan rel kereta api tersebut diproyeksikan Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari Nuban, dan Kecamatan Purbolinggo.

Selain jaringan kereta api tersebut, sebagaimana tertuang dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam rancangan rencana jangka panjang transportasi di Provinsi Lampung, dibuka peluang pembangunan jalan tol antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Wilayah kecamatan yang terlintasi adalah Kecamatan Batanghari Nuban, Way Bungur, Sukadana, Labuhan Ratu, Way Jepara,, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, dan Pasir Sakti. Semakin beragamnya moda transportasi kedepan yang saling

terintegrasi dengan moda lainnya, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah, termasuk munculnya kawasan-kawasan baru termasuk kawasan permukiman.

Sejalan dengan perkembangan kota, berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk pada bab sebelumnya, pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Kecamatan Sukadana mencapai 89,85 ribu jiwa, dengan kepadatan mencapai 118 jiwa per kilometer persegi. Kebutuhan perumahan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 17.970 unit. Menyikapi kondisi tersebut, kebijakan pengembangan permukiman perkotaan diarahkan pada pengembangan permukiman formal yang teratur dan terencana, yang juga menyediakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang terbuka hijau.

## 2. Kawasan Perkotaan Way Jepara

Sesuai fungsinya, Kawasan Perkotaan Way Jepara diarahkan sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura. Sumber daya alam dan produk pertanian peternakan berkualitas serta berada pada posisi strategis di jalur lintas pantai timur dan berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional TNWK merupakan potensi yang dimiliki Way Jepara menjadi pusat pertumbuhan di wilayah tengah Kabupaten Lampung Timur. Aktivitas perdagangan skala kabupaten yang saat ini telah melayani beberapa kecamatan di sekitarnya dapat dikembangkan melalui peningkatan trayek angkutan barang, pergudangan, penataan perkotaan, pembenahan PKL, pembangunan pasar hewan, sentra kerajinan/souvenir berbasis produk lokal, optimalisasi jalur pedestrian, penyediaan trotoar, peningkatan fungsi dan pelebaran jalan lokal, dan pengadaan RTH.

Keberadaan industri menengah dan kecil yang ada menunjang peningkatan aktivitas perdagangan kawasan melalui upaya pengembangan jalur distribusi dan logistik pemasaran. Pengembangan perdagangan di kawasan tersebut, kedepan akan sejalan dengan berkembangnya pusat layanan jasa. Arah pengembangan jasa di Perkotaan Way Jepara diarahkan pada pembangunan pusat jasa skala sub regional yang meliputi pembangunan perbankan, pendidikan, rumah sakit, dan pusat rekreasi, wisata serta olahraga.

Gambar 2.29  
Kawasan Perkotaan Way Jepara



Sejalan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa sebagai pusat pertumbuhan, potensi pariwisata yang dimiliki dapat mengakselerasi dan menjadi efek pengganda pengembangan wilayah kedepan. Potensi pariwisata Kecamatan Way Jepara berupa Danau Jepara kedepan diarahkan untuk peningkatan pariwisata dan penyediaan energi. Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata yang ada selama ini dapat mengakselerasi pengembangan pariwisata kawasan. Keberadaan hotel dan wisata kuliner di sepanjang jalan pantai timur merupakan daya dukung pengembangan pariwisata dan perdagangan di Kecamatan Way Jepara.

Terkait dengan kebutuhan dasar kawasan, pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk di Kecamatan Way Jepara mencapai 69,41 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kebutuhan perumahan akan mencapai 13.882 unit. Menyikapi kondisi tersebut, kebijakan pengembangan permukiman perkotaan diarahkan pada pengembangan permukiman formal yang teratur dan terencana, yang juga menyediakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang terbuka hijau. Pengembangan permukiman formal yang teratur dan terencana tersebut kedepan guna mengantisipasi munculnya permukiman liar dan kawasan kumuh. Dan kawasan permukiman di Perkotaan Way Jepara diarahkan pada pengembangan kawasan permukiman berkepadatan tinggi.

### 3. Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai

Fungsi kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai adalah sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan. Dengan panjang garis pantai kurang lebih 30 km, menjadikan Perkotaan Labuhan Maringgai layak sebagai kawasan minapolitan dan pusat pertumbuhan

ekonomi kawasan pesisir Lampung Timur. Potensi perikanan di Kecamatan Labuhan Maringgai sangat besar dan bernilai tinggi. Komoditas perikanan khususnya rajungan, udang dan bandeng banyak diekspor untuk memenuhi kebutuhan regional dan nasional.

Pengembangan kawasan minapolitan diarahkan pada pemenuhan sarana pendukung kawasan minapolitan, meliputi pembangunan SPBN, *cold storage*, jaringan listrik, gas, telekomunikasi, air bersih, industri pengolahan ikan, lapangan penjemuran, pabrik es, lembaga keuangan, gudang pengolahan dan pengepakan, penyediaan benih, dan *docking* bengkel, dan kawasan pusat pertokoan.

Pengembangan kawasan minapolitan tersebut disinergikan dengan pengembangan potensi pariwisata pantai, melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata termasuk penyediaan penginapan dan akses jalan. Pengembangan industri pengolahan produk perikanan dan cenderamata yang terdapat di beberapa desa dikembangkan melalui penyediaan energi, penataan sentra kawasan, pembangunan sentra niaga, serta percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan.

Penyediaan energi industri pengolahan produk perikanan diarahkan melalui pengembangan jalur pipa gas bumi bertekanan rendah yang bersumber dari stasiun distribusi gas bumi di Kecamatan Labuhan Maringgai. Melimpahnya ketersediaan energi transisi ini diharapkan mendorong tumbuhnya industri baik skala besar maupun skala rumah tangga di Perkotaan Labuhan Maringgai.

Gambar 2.30  
Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai



Pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai dalam peningkatan kebijakan ekonomi daerah kedepan dapat menggunakan perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dapat dijadikan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi perikanan, yang didukung dengan fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas

prasarana yang berdaya saing tinggi. Terwujudnya KEK dapat menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan ini.

Tumbuhnya industri dalam kawasan minapolitan akan ditopang oleh rencana pembangunan pelabuhan pengumpan Labuhan Maringgai. Pelabuhan pengumpan ini akan menjadi hub yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi laut daerah dan nasional. Alur pelayaran direncanakan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai menuju Pelabuhan Tanjung Priok, dikarenakan jaraknya yang lebih dekat dibandingkan jarak Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Panjang maupun Pelabuhan Bakauheni. Keberadaan pelabuhan pengumpan ini akan mampu mengurangi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak. Selain itu, juga akan mengakselerasi perkembangan pertumbuhan ekonomi baru di pesisir timur Lampung.

Selanjutnya terkait dengan infrastruktur permukiman, berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk, di tahun 2045 jumlah penduduk Kecamatan Labuhan Maringgai akan mencapai 92,29 ribu jiwa, atau 6,9 persen dari jumlah total penduduk Lampung Timur, dan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Lampung Timur. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kebutuhan perumahan akan mencapai 18.458 unit. Menyikapi kondisi tersebut, kebijakan pengembangan permukiman perkotaan diarahkan pada pengembangan permukiman formal yang teratur, dan berkepadatan tinggi. Penataan permukiman diarahkan mampu menyediakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang terbuka hijau dan jalur evakuasi, mengingat lokasi Kecamatan Labuhan Maringgai yang rawan abrasi dan gelombang tinggi laut. Tantangan dalam pengembangan kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai yang berada di bibir pantai kedepan adalah rawan tergenang dan cenderung kumuh. Penataan permukiman formal yang teratur dan terencana diharapkan dapat meminimalisir munculnya permukiman liar dan kawasan kumuh.

#### 4. Kawasan Perkotaan Pekalongan

Kawasan perkotaan Pekalongan berfungsi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan serta permukiman perkotaan. Posisi strategis di jalur padat lalu lintas mendorong tumbuhnya Perkotaan Pekalongan sebagai salah satu pusat agribisnis dan pertumbuhan ekonomi Lampung Timur.

Kecamatan Pekalongan saat ini telah berkembang menjadi sentra bibit tanaman pertanian dan hias berskala nasional. Perkembangan ini memberikan efek pengganda bagi desa dan kecamatan di sekitarnya. Kedepan, pengembangan sentra perdagangan bibit tanaman pertanian dan hias diarahkan pada penataan kawasan perdagangan khusus, penataan ruang kota, pedestrian, RTH, trotoar, pengembangan perkantoran

skala kecamatan, pengembangan pertokoan, pembangunan SPBU, pembangunan sentra kerajinan/cenderamata, pembangunan perbankan, pembangunan hotel dan penginapan, pengembangan rumah sakit, pengembangan pusat rekreasi, olahraga, dan wisata, pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten, dan pengembangan simpul transportasi daerah.

Perkotaan Pekalongan saat ini juga memiliki potensi pengembangan kawasan pendidikan tinggi, permukiman, dan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh luberan pemanfaatan ruang dari kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Metro. Hal ini terindikasi dari adanya Lembaga pendidikan tinggi Kota Metro yang telah berinvestasi dan membangun sarana kampusnya di wilayah Kecamatan Pekalongan. Selain itu juga mengakselerasi pengembangan kawasan permukiman dan perdagangan di sepanjang jalur lalu lintas. Arah kebijakan pengembangan wilayah diarahkan pada penataan pemanfaatan ruang mendukung perkembangan kawasan Perkotaan Pekalongan sesuai dengan fungsinya, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana transportasi, energi, dan telekomunikasi, mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, dan pembangunan *techno park* berbasis pertanian.

Gambar 2.31  
Kawasan Perkotaan Pekalongan



Pengembangan agribisnis di Kawasan Perkotaan Pekalongan sejalan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Ketersediaan destinasi wisata alam dan rohani, serta sentra kuliner dan cenderamata mendorong peningkatan sektor agribisnis beberapa tahun kebelakang. Arah pengembangan pariwisata diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana wisata, dan pengembangan destinasi wisata kreatif dan pendidikan.

Selanjutnya, terkait dengan penyediaan prasarana dasar permukiman, diproyeksikan jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan pada tahun 2045 mencapai 63,69 ribu jiwa,

dengan penduduk sebanyak itu perumahan yang diperlukan mencapai 12,738 unit. Dikarenakan Kecamatan Pekalongan merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi, maka arah pengembangan permukiman diarahkan pada pengembangan permukiman berkepadatan sedang, formal, teratur dan terencana. Penataan permukiman diarahkan mampu menyediakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang terbuka hijau.

#### 5. Kawasan Perkotaan Sekampung Udik

Berdasarkan fungsinya Kawasan Perkotaan Sekampung Udik ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu kawasan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman. Posisi sangat strategis terletak di jalur akses terdekat Kawasan Industri Lampung dan Exit Tol Lematang, memberikan efek positif bagi perkembangan Sekampung Udik kedepan. Arah pengembangan Kawasan Perkotaan Sekampung Udik dalam rangka mewujudkan kawasan agroindustri melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan air bersih penunjang kegiatan industri, pengembangan jaringan pipa gas distribusi, penyediaan perencanaan matang melalui dokumen perencanaan wilayah yang baik, percepatan investasi industri, dan percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan.

Gambar 2.32  
Kawasan Perkotaan Sekampung Udik



Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan kawasan agroindustri akan memberikan efek pengganda bagi sektor lain, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga permukiman. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa seiring dengan peningkatan investasi sektor industri ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisata daerah. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kecamatan Sekampung Udik adalah Taman Purbakala Pugung

Raharjo, merupakan taman purbakala megalitik satu-satunya di Provinsi Lampung. Destinasi wisata tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan melalui penyediaan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata. Arah pengembangan Kawasan Perkotaan Sekampung Udik sebagai destinasi wisata, pusat perdagangan dan jasa serta agroindustri diarahkan pada penataan kawasan, penataan ruang kota, pedestrian, RTH, trotoar, pengembangan perkantoran skala kecamatan, pengembangan pertokoan, pembangunan SPBU, pembangunan sentra kerajinan/cenderamata, pembangunan perbankan, pembangunan hotel dan penginapan, pengembangan rumah sakit, pengembangan pusat rekreasi, olahraga, dan wisata, pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten, dan pengembangan simpul transportasi daerah

Perkembangan Kawasan Sekampung Udik kedepan akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin besar. Saat ini Kecamatan Sekampung Udik adalah kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, jumlah penduduk Kecamatan Sekampung Udik di tahun 2045 akan mencapai 92,27 ribu jiwa dengan kebutuhan rumah mencapai 18.454 unit. Tantangan dalam penyediaan permukiman kedepan, salah satunya adalah semakin meningkatnya harga tanah akibat desakan perkembangan Kota Baru Provinsi Lampung. Arah pengembangan permukiman diarahkan pada pengembangan permukiman berkepadatan sedang, formal, teratur dan terencana. Penataan permukiman diarahkan mampu menyediakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang terbuka hijau.

Pemanfaatan ruang di Kecamatan Sekampung Udik pada sektor agroindustri, pariwisata, permukiman, dan perdagangan jasa diarahkan dengan mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan khususnya Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak. Kawasan hutan lindung tersebut berada di wilayah Kecamatan Sekampung Udik. Berdasarkan ketentuan peraturan zonasi, kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang meliputi pengembangan industri, permukiman, penambangan, dan kegiatan budidaya serta aktivitas lainnya.

#### 6. Kawasan Perkotaan Bandar Sribhawono

Kawasan Perkotaan Bandar Sribhawono dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Kawasan ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agroindustri, dan permukiman. Arah pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Sribhawono dalam rangka mewujudkan kawasan agroindustri melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan air bersih penunjang kegiatan industri, pengembangan jaringan pipa gas distribusi, penyediaan perencanaan matang melalui dokumen perencanaan wilayah yang baik, percepatan investasi industri, dan percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan.

Selain sebagai kawasan agro-industri, di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono juga ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Lampung Timur. Kawasan industri terpadu (*integrated industrial area*) dapat diartikan sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya, dimana satu industri dengan industri lainnya memiliki sifat saling mendukung, mengisi, dan melengkapi sehingga tercipta optimalisasi masing-masing industri pada kawasan tersebut. Kedepan, perwujudan dan pengembangan kawasan industri terpadu diarahkan pada pemenuhan regulasi, penyediaan lahan, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung industri, jaringan listrik, jaringan pipa gas distribusi, air bersih, jaringan telekomunikasi, dan drainase. Perwujudan kawasan industri di Kecamatan Bandar Sribhawono sangat potensial dengan adanya Gardu Induk listrik daerah dengan besar tegangan mencapai 70 – 150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluhkilo volt) dan jaringan pipa gas bumi distribusi Lampung.

Gambar 2.33  
Kawasan Perkotaan Bandar Sribhawono



Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan kawasan agroindustri akan memberikan efek pengganda bagi sektor lain, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga permukiman. Sektor perdagangan dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan di Kecamatan Bandar Sribhawono yang terdiri dari pisang, durian, dan kakao. Pengembangan sektro perdagangan dan jasa diarahkan pada penataan kawasan perdagangan khusus, penataan ruang kota, pedestrian, RTH, trotoar, pengembangan perkantoran skala kecamatan, pengembangan pertokoan, pembangunan SPBU, pembangunan sentra kerajinan/cenderamata, pembangunan perbankan, pembangunan hotel dan penginapan, pengembangan rumah sakit, pengembangan pusat

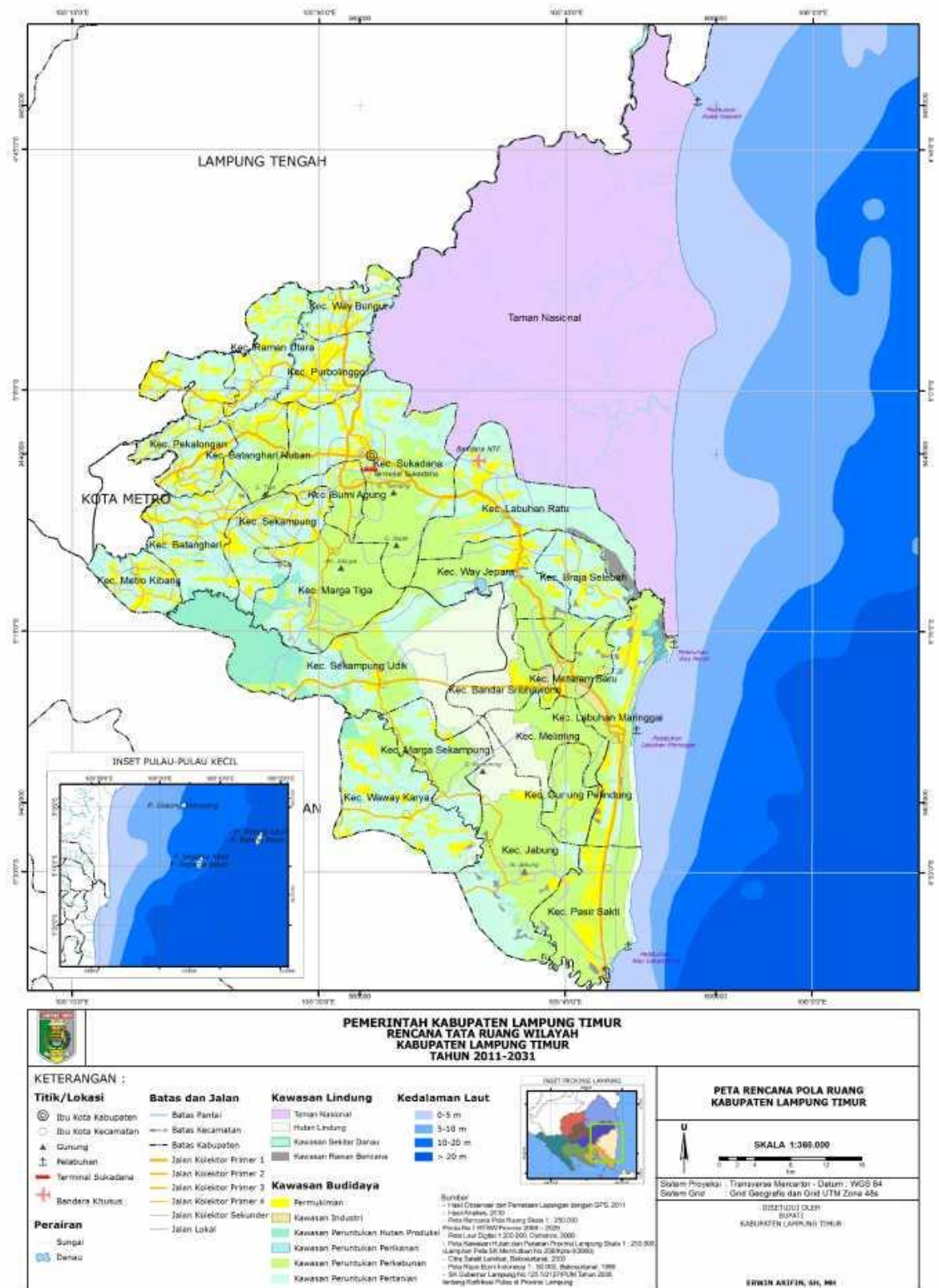
rekreasi, olahraga, dan wisata, pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten, dan pengembangan simpul transportasi daerah.

Sebagaimana Kecamatan Sekampung Udik, pada wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono terdapat kawasan hutan lindung Gunung Balak. Pemanfaatan ruang di Kecamatan Bandar Sribhawono pada sektor agroindustri, pariwisata, permukiman, dan perdagangan jasa diarahkan dengan mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan khususnya Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak. Berdasarkan ketentuan peraturan zonasi, kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang dalam kawasan tersebut meliputi pengembangan industri, permukiman, penambangan, dan kegiatan budidaya serta aktivitas lainnya.

Terkait dengan penyediaan prasarana dasar permukiman kedepan, diproyeksikan jumlah penduduk Kecamatan Bandar Sribhawono pada tahun 2045 mencapai 62,91 ribu jiwa, dengan penduduk sebanyak itu perumahan yang diperlukan mencapai 12.582 unit. Arah pengembangan permukiman diarahkan pada pengembangan permukiman berkepadatan sedang, formal, teratur dan terencana. Penataan permukiman diarahkan mampu menyediakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang terbuka hijau.

Pengembangan kawasan strategis kabupaten di atas dalam rencana distribusi peruntukan tata ruang wilayahnya merujuk pada peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang telah diatur dalam pola ruang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.34  
Peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tabel 2.59  
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur

No.	Pola Ruang	Lokasi
<b>1.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	
<b>1.1</b>	<b>Hutan Lindung</b>	
	Hutan Lindung Gunung Balak (Register 38) dan Muara Sekampung (Register 15)	Kecamatan Marga Sekampung, Sekampung Udik, Bandar Sribhawono, Melinting, Way Jepara, Jabung, Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai
<b>1.2</b>	<b>Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya</b>	
	Kawasan Bergambut	Kecamatan Braja Selehah, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Way Bungur, Way Jepara
	Kawasan Resapan Air	Kecamatan Bandar Sribhawono, Jabung, Marga Sekampung, Melinting, Pasir sakti, Sekampung Udik, Way Jepara Labuhan Maringgai
<b>1.3</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	
	Kawasan Sempadan Pantai	Kecamatan Labuhan Maringgai, Pasir Sakti
	Sempadan sungai	Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara
	Kawasan sekitar danau/situ/waduk	Kecamatan Way Jepara dan Sukadana
	Kawasan sekitar Mata air	Kecamatan Sribhowono, Jabung, Way Jepara
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Semua kecamatan
<b>1.4</b>	<b>Kawasan Suaka Alam</b>	
	Taman Nasional	Taman Nasional Way Kambas dan Pulau Segama
	Kawasan Pantai Berhutan	Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kecamatan Sukadana dan Desa Pugung Raharjo
<b>1.5</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana Alam</b>	
	Kawasan rawan tanah longsor	Kecamatan Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya, Jabung, Pasir Sakti

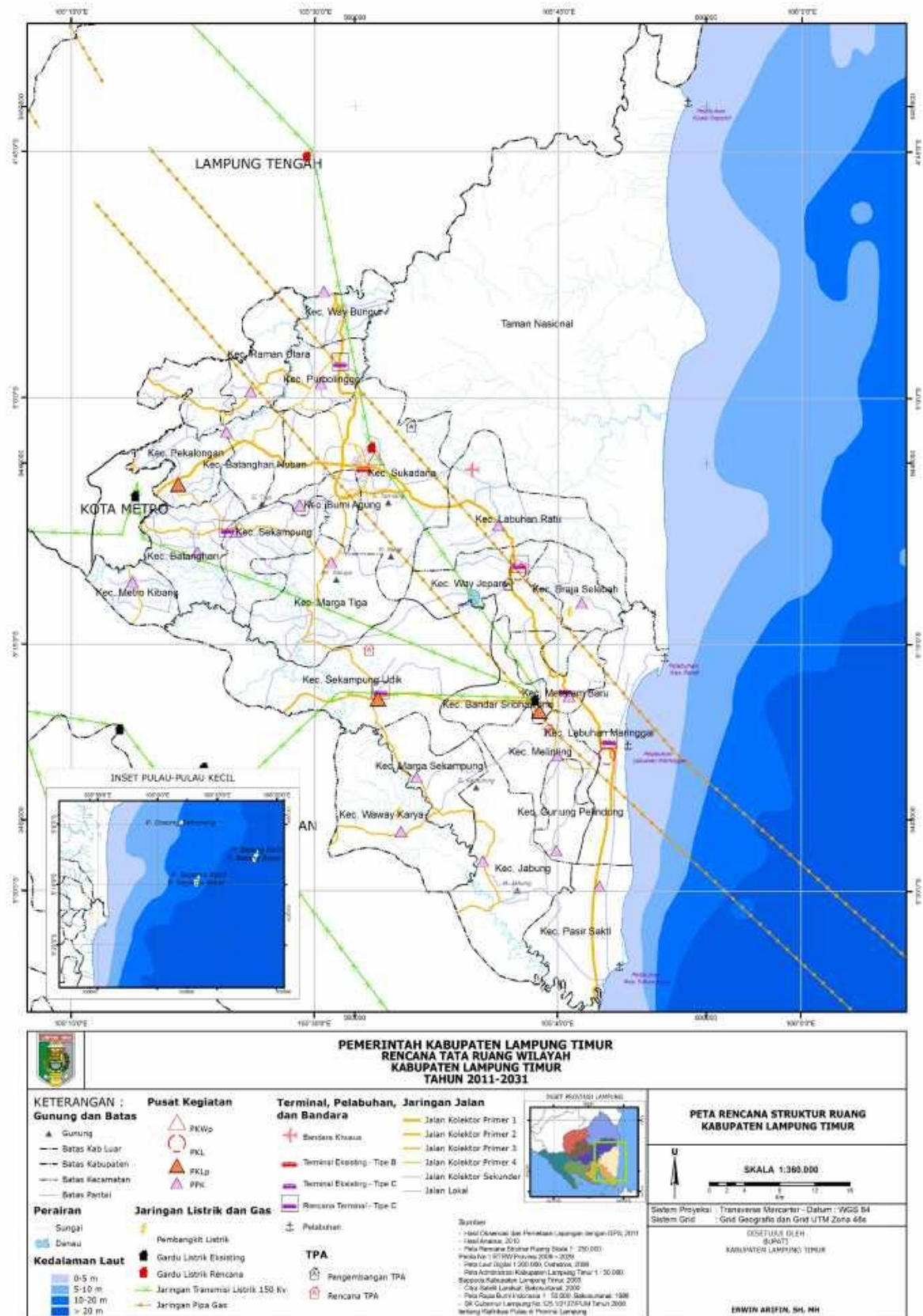
No.	Pola Ruang	Lokasi
	Kawasan rawan abrasi	Labuhan Maringgai
	Kawasan rawan banjir	Kecamatan Bandar Sribhawono, Braja Selehah, Sekampung, Mataram Baru, Melinting, Sekampung Udik, Waway Karya, Labuhan Maringgai, dan Raman Utara
<b>2.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	
<b>2.1</b>	<b>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>	
	Hutan produksi yang berfungsi lindung	Way Kibang, Gedung Wani
	Hutan rakyat	Kecamatan Gunung Pelindung, Marga Sekampung, Way Bungur, Purbolinggo, Braja Selehah, Way Jepara, Pekalongan, Metro Kibang, Waway Karya
<b>2.2</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>	
	Kawasan sentra hortikultura	Pekalongan
	Sentra pembibitan padi	Purbolinggo
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak besar kerbau	Way Jepara
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil kambing	Batanghari Nuban
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil domba	Pekalongan
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil babi	Raman Utara
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil ayam buras	Batanghari
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil ayam ras pedaging	Metro Kibang
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil ayam ras petelor	Purbolinggo
	Peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil itik	Way Jepara
<b>2.3</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>	
	Kawasan pengolahan ikan berupa pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet, Pelabuhan Way Sekampung, Pelabuhan Kuala Seputih
	Kawasan peruntukan Minapolitan yang memiliki potensi udang dan bandeng	Labuhan Maringgai, Kawasan Way Penet dan kawasan Kuala Seputih

No.	Pola Ruang	Lokasi
	Kawasan peruntukan perikanan budidaya Komoditas ikan bandeng	Kecamatan Pasir Sakti
	Kawasan peruntukan perikanan budidaya Komoditas ikan udang	Kecamatan Labuhan Maringgai
	sentra pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Labuhan Maringgai
<b>2.4</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>	Labuhan Maringgai, Pasir Sakti
<b>2.5</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>	
	Kawasan industri besar dan sedang	Sribhawono, Sekampung Udik
	Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan	Pekalongan, Purbolinggo
<b>2.6</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>	Sukadana, Way Jepara, Sekampung Udik, Pekalongan
<b>2.7</b>	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>	
	Kawasan pemukiman berkepadatan tinggi	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai
	Kawasan pemukiman berkepadatan sedang	Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono
	Kawasan pemukiman berkepadatan rendah	Jabung, Purbolinggo, Marga Tiga, Pasir Sakti
<b>2.8</b>	<b>Kawasan Peruntukan Lainnya</b>	
	Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi dan konservasi kawasan HANKAM Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur
	Kawasan titik evakuasi bencana	Kabupaten Lampung Timur

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Lebih lanjut, dalam pengembangan kawasan strategis kabupaten juga berpedoman pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Dalam hal ini, struktur ruang menjadi elemen kunci yang berfungsi sebagai panduan dalam pengembangan kawasan agar sesuai dengan visi jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan keterkaitan yang harmonis antara berbagai elemen tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 2.35  
Peta Struktur Ruang Kabupaten Lampung Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031



**Perda Kab. Lam Tim  
Nomor 08 Tahun 2024  
tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

**BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**



Pantai Kerang Mas

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.1 Permasalahan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

#### **3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Lintas Sektor**

##### **1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan**

Kawasan strategis kabupaten belum didesain dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memberikan efek sebar (*spread effect*) ataupun efek tetesan kebawah (*trickle down effect*) bagi wilayah penopang di sekitarnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan untuk mengurangi kesenjangan, perlu dilakukan pendekatan pembangunan wilayah berdasarkan klaster. Pengklasteran wilayah berbasis kecamatan, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kedekatan jarak, serta fungsi sistem pusat kegiatan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Kecamatan pusat pertumbuhan menjadi penggerak utama pembangunan

daerah yang selanjutnya menyebarkan hasil pembangunan dan dampak pertumbuhannya ke wilayah sekitar.

## **2. Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin Lampung Timur terbesar kedua di Provinsi Lampung, dengan jumlah penduduk miskin terbesar se-Provinsi Lampung.

Kurun waktu satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional. Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan kantong kemiskinan meliputi Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Labuhan Maringgai.

## **3. Kualitas Pembangunan Manusia**

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dibawah rata-rata Provinsi Lampung, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2023 sebesar 72,44, dibawah IPM Provinsi Lampung

## **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur kurun waktu tiga tahun terakhir terendah di antara kab/kota se-provinsi Lampung. Ketergantungan tinggi terhadap sektor primer belum tergantikan kurun waktu dua dekade terakhir.

## **5. Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita masyarakat terus meningkat kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah sempat menurun, pada tahun 2021-2023 kembali meningkat mencapai 46,28 juta per kapita per tahun. Nilai pendapatan per kapita tersebut kurun waktu satu dekade terakhir selalu berada di bawah nilai Provinsi Lampung dan Nasional, dan jika dibandingkan dengan kab/kota berada di posisi tengah atau posisi ke-7

### **3.1.2 Permasalahan Pembangunan pada Urusan Aspek Sosial**

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan daerah yang terkait aspek sosial diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan aspek sosial di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

#### **1. Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur masih rendah, salah satu indikatornya adalah secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas sebagian besar hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 8 hingga kelas 9. Ini tercermin dari angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Timur yang berada di angka 8,04 tahun, atau berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Lampung. Selain itu, di

Kabupaten Lampung Timur masih terdapat masyarakat yang buta huruf sebesar 2,66 persen, yang ekuivalen dengan 30 ribu lebih jiwa. Ini tentu menjadi masalah fundamental dalam pembangunan daerah kedepan. Menurut Wirosardjono, 1988 jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset sekaligus sebagai beban di dalam pembangunan. Sebagai aset, apabila dapat ditingkatkan baik kualitas maupun keahliannya, akan mampu meningkatkan produksi daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan pula pendapatannya. Akan tetapi jumlah yang besar tersebut akan menjadi beban jika jumlah, struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksi yang tidak sepenuhnya bisa ditanggung oleh penduduk yang bekerja secara efektif. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya.

## **2. Kesehatan.**

Permasalahan utama kesehatan saat ini adalah angka prevalensi stunting yang mencapai 18,1 persen, lebih tinggi dibandingkan prevalensi Provinsi Lampung. Dampak tingginya prevalensi stunting terhadap pembangunan adalah stunting berperan penting terhadap penurunan produktivitas sumber daya manusia.

Permasalahan lainnya di sektor kesehatan yaitu tingginya prevalensi wasting atau gizi kurang. Prevalensi wasting Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 6,3 persen, turun dibandingkan prevalensi di tahun sebelumnya. Wasting memberikan dampak peningkatan risiko kesakitan pada anak-anak bahkan meningkatkan risiko kematian anak. Anak-anak yang wasting akan mudah terkena penyakit infeksi hal ini karena sistem kekebalan tubuh anak yang menurun.

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Tjiptoherijanto, 1993 mengatakan bahwa kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja.

## **3. Tenaga Kerja**

Permasalahan terkait ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur adalah 69,04 persen, dibawah angka Provinsi Lampung yang sebesar 70,06 persen. TPAK Kabupaten Lampung Timur berada di peringkat ke-9

angka TPAK kab/kota di Provinsi Lampung. Angka TPAK yang rendah tersebut menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Lampung Timur bagi penduduk usia kerja.

Pada tahun 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 40,09 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas hanya sebesar 6,58 persen. Lebih lanjut, penduduk yang bekerja di kegiatan informal mencapai 80,34 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di lain sisi, persentase penduduk yang bekerja di kegiatan formal meningkat dari tahun 2022 sebesar 19,0 persen menjadi 19,66 persen pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur masih relatif kurang terampil dan berpendidikan rendah. Sektor informal seringkali menjadi alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja.

Di samping permasalahan tingkat partisipasi angkatan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan, Kabupaten Lampung Timur juga menghadapi tantangan serius terkait tingginya jumlah ekspor tenaga kerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKW (Tenaga Kerja Wanita). Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri karena minimnya peluang kerja yang layak dan berpenghasilan memadai di daerah setempat.

Tingginya ekspor tenaga kerja ini berdampak pada berbagai aspek, termasuk *eksodus brain drain* di mana sumber daya manusia yang terdidik dan terampil pergi meninggalkan daerah untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan tenaga kerja terampil di berbagai sektor ekonomi lokal, serta kurangnya investasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu, para TKI dan TKW sering kali menghadapi risiko eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi di tempat kerja mereka di luar negeri. Ini termasuk kurangnya perlindungan hukum, jam kerja yang panjang, upah rendah, serta risiko kekerasan fisik dan seksual. Dampak psikologis dan sosial juga bisa sangat berat bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.

Oleh karena itu, selain meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendidikan serta keterampilan, Kabupaten Lampung Timur juga perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja lokal yang layak dan berkelanjutan, sehingga penduduk tidak terpaksa meninggalkan negara mereka untuk mencari penghidupan. Ini termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, serta perlindungan sosial dan hukum bagi pekerja migran.

---

#### 4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebesar 89,6 masih berada di bawah IPG Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kab/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi 5 terbawah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lampung Timur relatif masih tinggi. Kemanfaatan pelaksanaan pembangunan daerah selama ini yang diterima kaum laki-laki masih lebih besar dibanding perempuan.

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju kearah yang lebih baik. Dalam suatu pembangunan, manusia merupakan unsur penting karena menjadi pelaku sekaligus sasaran dalam pembangunan. Dalam pembangunan manusia, perbedaan gender merupakan hal penting. Gender dalam kasus ini diartikan bukan hanya sekadar perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis maupun fisik, namun lebih mengacu kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan sosial suatu wilayah. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

#### 5. Kepemudaan dan Olah Raga

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan definisi tersebut, jumlah pemuda Kabupaten Lampung Timur mencapai 23,3 persen. Berdasarkan permasalahan di sektor pendidikan dan tenaga kerja terdahulu, yaitu rendahnya rata-rata lama sekolah dan tenaga kerja dominan kerja di sektor informal mengindikasikan bahwa secara umum kualitas pemuda Lampung Timur masih terbatas.

Dari sisi keolahragaan, besarnya jumlah pemuda yang mencapai lebih dari 23,3 persen dari struktur penduduk Lampung Timur dan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap olahraga tidak berkorelasi positif dengan prestasi olahraga di Porprov Lampung. Porprov Lampung Tahun 2022 kontingen Lampung Timur yang hanya berada di posisi 7 dari 15 kab/kota.

#### 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 163,478 pasangan. Dari jumlah pasangan PUS tersebut, jumlah peserta KB aktif baru mencapai 108.334 peserta atau 66,29 persen. Kondisi ini dapat

mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Program KB merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan untuk menekan terjadinya pertambahan penduduk yang tidak stabil.

Menurut Lincoln dalam Arsyad, 2010, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya - upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Sehingga menyebabkan pendapat perkapita daerah yang rendah yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin (Solihin, 2018).

## 7. Kebudayaan

Permasalahan di urusan kebudayaan adalah terbatasnya pembinaan terhadap seni dan kebudayaan. Besarnya kelompok seni dan budaya tidak sebanding dengan fasilitasi yang diberikan. Selain itu, cagar budaya yang ada di beberapa lokasi perlu mendapat intervensi untuk pengembangan wisata cagar budaya kedepan. Besarnya potensi pariwisata *heritage* menjadi tantangan untuk dikembangkan kedepan. Revitalisasi kawasan Kota Tua (*heritage district*) melalui penataan kawasan, peningkatan kualitas bangunan tua, penyediaan sarana-prasarana, optimalisasi jalur pedestrian, penyediaan trotoar, penyediaan penginapan, peningkatan promosi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan *heritage tourism* perlu menjadi arah kebijakan pengembangan pariwisata urban kedepan.

## 8. Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan di bidang ketentraman dan ketertian masyarakat adalah jumlah tindak pidana kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus meningkat. Selain itu kasus penyalahgunaan NAPZA terus meningkat tiga tahun terakhir. Kondisi ini tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat serta untuk peningkatan daya saing investasi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Permasalahan lainnya adalah mitigasi bencana belum terimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh adalah belum tersedianya sarana dan prasarana *early warning system* khususnya di kecamatan-kecamatan yang berisiko terkena tsunami ataupun rob air laut. Selain itu, permasalahan lainnya adalah waktu tanggap bencana

kebakaran masih di atas 15 menit. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan mobil pemadam kebakaran.

### **3.1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Aspek Ekonomi**

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan daerah yang terkait aspek ekonomi diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan aspek ekonomi di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

#### **1. Pertanian**

Produktivitas padi sebagai tanaman pangan utama pada tahun 2023 mencapai 53,82 kuintal per hektar, atau berada di atas rata-rata produktivitas padi Provinsi Lampung. Saat ini sebagian besar petani lebih fokus pada keuntungan dibandingkan produktivitas, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam jangka panjang. Keuntungan ditentukan oleh jumlah input yang digunakan dan output yang diproduksi, serta oleh harga yang dibayar dan diterima. Petani umumnya tidak bisa mengendalikan harga input atau output yang mereka hadapi. Untuk meningkatkan keuntungan secara konsisten dari waktu ke waktu, petani harus menghasilkan kuantitas output yang lebih besar dari setiap unit input yang mereka gunakan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas.

Pada tanaman perkebunan, berdasarkan data produktivitas komoditas unggulan dan strategis Kabupaten Lampung Timur yaitu lada, kakao, karet, dan kelapa mengalami penurunan produktivitas kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Tantangan ke depan, dengan tekanan terhadap perluasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, upaya intensifikasi faktor produksi tentunya akan menjadi pilihan. Perhatian terhadap produktivitas komoditas unggulan dan strategis juga menjadi penting, mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pula stabilitas harga pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, meningkatkan produktivitas komoditas dapat menghasilkan hasil yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

#### **2. Perikanan**

Wilayah Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Berdasarkan data, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Provinsi Lampung. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2022 mengalami peningkatan produksi, produksi perikanan tangkap mencapai 211.979,76 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 8.631,49 ton. Sektor perikanan budidaya yang banyak dibudidayakan meliputi ikan

mas, nila, gurame, patin, lele dan udang vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap, didominasi oleh produksi kepiting, rajungan, dan kerang.

Permasalahan yang ada di sektor perikanan tangkap meliputi perahu dan alat tangkap masih bersifat sederhana dan tergolong tradisional. Ukuran perahu yang digunakan oleh nelayan memancing dan nelayan menjaring sama dan belum bisa digunakan melaut terlalu jauh apalagi dalam waktu melaut yang lama. Selain itu, rendahnya penggunaan teknologi modern penangkapan, ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti SPBN, cold storage, dan pabrik es yang relatif masih terbatas.

### **3. Pariwisata**

Permasalahan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur masih berkuat pada ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, dan belum adanya keterkaitan antar destinasi wisata yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Jarak yang jauh antar destinasi wisata utama, masih belum mantapnya kondisi infrastruktur jalan penghubung, serta minimnya penunjuk arah destinasi telah membatasi kunjungan wisatawan ke Lampung Timur.

### **4. Pangan**

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 sebesar 91,5, jauh dibawah rata-rata nasional yang sebesar 92,9. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lampung Timur masih kurang beragam dan seimbang dibandingkan rata-rata penduduk di Indonesia.

Menurut Widodo, 2017, Skor Pola Pangan Harapan merupakan instrumen sederhana untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor dan tingkat konsumsi gizi yang masih rendah, tidak seimbang, dan tidak beragam berhubungan dengan masih tingginya prevalensi pendek (stunting).

Selain Skor Pola Pangan Harapan, prevalensi ketidakcukupan pangan perlu menjadi perhatian pembangunan daerah kedepan. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, 10,59 persen penduduk Lampung Timur menghadapi ketidakcukupan pangan, atau tertinggi kedua setelah Kabupaten Pringsewu.

### **5. Penanaman Modal**

Realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 mencapai Rp 29,39 miliar atau mengalami penurunan mencapai lebih dari 86% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 225,45 miliar. Pada tahun 2023,

kembali meningkat menjadi 214,79 miliar. Permasalahan terkait dengan kegiatan investasi adalah belum adanya rencana detail tata ruang di perkotaan kecamatan, seluruh layanan perizinan dan non perizinan daerah belum terpusat di Mall Pelayanan Publik, dan citra investasi daerah belum maksimal.

## **6. Perdagangan**

Terkait dengan peningkatan sektor perdagangan daerah, terdapat fenomena kios di pasar daerah menutup usahanya. Kesulitan bersaing dalam hal harga dan kenyamanan dengan pusat perbelanjaan modern (minimarket) dan perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lesunya aktivitas jual beli di pasar daerah. Di sisi lain, peranan sektor tersier yang melebihi kontribusi sektor sekunder (deindustrialisasi dini) dan meningkatnya nett impor saat ini mengindikasikan bahwa masyarakat Lampung Timur banyak menjadi *buyer* dibandingkan sebagai *seller* pada *platform e-marketplace*.

## **7. Perindustrian**

Besarnya jumlah industri rumah tangga yang berinvestasi di tahun 2022, khususnya unit usaha pengolah hasil pertanian, masih menghadapi masalah terbatasnya akses pasar, baik pasar konvensional maupun pasar digital, serta daya saing yang relatif rendah.

## **8. Koperasi dan Usaha Mikro**

Permasalahan di sektor pengembangan koperasi adalah bahwa koperasi yang aktif hanya mencapai 32,57 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara internal diakibatkan dari rendahnya sumber daya pengelola koperasi dan secara eksternal akibat tidak mampu bersaing dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya.

### **3.1.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan daerah yang terkait aspek infrastruktur dan lingkungan hidup diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan aspek infrastruktur dan lingkungan hidup di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

#### **1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan infrastruktur yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah ketidakmantapan jalan kabupaten. Jalan kewenangan kabupaten pada tahun 2023 secara umum berada dalam kondisi tidak mantap. Kondisi ketidakmantapan ini berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir. Terbatasnya anggaran merupakan salah satu permasalahan dalam peningkatan infrastruktur jalan kewenangan kabupaten. Selain itu, tonase yang tidak sesuai dengan kelas jalan semakin memperparah kondisi kemandapan jalan. Pada bidang infrastruktur pengairan, 73,97 persen jaringan irigasi

kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini berpengaruh terhadap kelancaran ketersediaan air sektor pertanian.

Kompleksnya permasalahan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur tersebut melibatkan beberapa aspek yang saling terkait. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah penataan ruang wilayah yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan daerah.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang terbatas hingga akhir tahun 2031 menjadi kendala dalam merencanakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengantisipasi perkembangan wilayah hingga tahun 2045. Dengan keterbatasan rencana tersebut, rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 2025-2045 menjadi kurang terarah dan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Dampak dari keterbatasan RTRW ini juga dapat mempengaruhi pengembangan infrastruktur jalan dan irigasi di kabupaten tersebut. Tanpa rencana yang jelas dan komprehensif, penataan ruang wilayah yang tidak terkoordinasi dapat menghambat upaya peningkatan infrastruktur, termasuk pemeliharaan dan perbaikan jalan serta sistem pengairan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara rencana pengembangan wilayah, RTRW, dan program pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, dapat diciptakan strategi yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dan penataan ruang wilayah secara holistik dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

## **2. Perhubungan**

Permasalahan pada urusan perhubungan adalah sangat terbatasnya angkutan umum penghubung antar wilayah kecamatan dan antar daerah. Keterbatasan tersebut mengakibatkan masyarakat sangat tergantung pada kendaraan pribadi untuk sarana mobilitasnya. Selain itu, alat uji kendaraan umum atau KIR saat ini dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik kendaraan angkutan umum dan angkutan barang di Kabupaten Lampung Timur harus menguji kendaraannya di daerah lain.

Menurut Lyod, 2022, infrastruktur transportasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah akan sejalan dengan tingkat pergerakan masyarakat yang juga rendah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin tersedianya fasilitas transportasi yang memadai.

### **3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pada tahun 2023, masih terdapat rumah tangga yang belum berfasilitas tempat buang air besar yaitu mencapai 3,76%, atau lebih dari 8 ribu rumah tangga belum berfasilitas tempat buang air besar. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, dan dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Selain itu, pada tahun 2022 sebanyak 1,54 persen rumah tangga belum memiliki sumber air minum bersih, atau ekuivalen dengan lebih dari 3 ribu rumah tangga belum memiliki sumber air minum bersih. Kondisi ini juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, dan dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Permasalahan lainnya yang terkait dengan kawasan permukiman adalah masih terdapat lingkungan kumuh di 5 kecamatan, Labuhan Maringgai, Bandar Sribhawono, Way Jepara, Sukadana, dan Pekalongan yang perlu ditangani.

### **4. Komunikasi dan Informatika**

Jangkauan jaringan seluler di wilayah desa belum merata, masih terdapat wilayah *blank spot* di beberapa wilayah kecamatan, khususnya Kecamatan Marga Sekampung. Permasalahan lainnya adalah belum terimplementasinya SPBE secara optimal. Tata kelola pemerintahan daerah masih belum memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

### **5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup yang sering mengemuka adalah sistem pengelolaan sampah belum merata di seluruh kecamatan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa di tahun 2023, diperkirakan sampah yang ditimbulkan mencapai lebih dari 333 ribu ton per tahun. Sebuah sumber masalah yang dapat menimbulkan sejumlah persoalan namun disisi lain dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan asli daerah maupun usaha masyarakat.

Permasalahan lingkungan hidup lainnya adalah kerusakan lahan akibat pertambangan dan aktivitas masyarakat di beberapa lokasi, khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.

#### **3.1.5 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Tata Kelola Pemerintahan**

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan daerah yang terkait aspek tata kelola pemerintahan daerah diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan aspek tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

**1. Digitalisasi layanan publik belum menyeluruh dan terpadu**

Pelayanan publik secara umum masih berbasis manual dan tidak terdokumentasikan dengan baik, yang dapat mengakibatkan pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang transparan.

**2. Pelayanan publik masih terkonsentrasi di Ibukota kabupaten**

Jauhnya rentang kendali pelayanan publik dikeluhkan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten.

**3. Ketergantungan fiskal masih tinggi**

Kontribusi pendapatan asli daerah kurang dari 10 persen terhadap total pendapatan daerah selama dua dekade terakhir.

**4. Kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal**

Dokumen perencanaan dan penganggaran belum dapat disusun secara optimal, hal ini tercermin dari rendahnya penilaian Pemerintah Provinsi terhadap kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Keterbatasan data dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama rendahnya kualitas dokumen.

**5. ASN profesional dan berintegritas belum terpenuhi**

Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Timur sebesar 52,73 dengan kategori sangat rendah.

**6. Manajemen tata kelola aset pemerintah daerah belum optimal**

Terkait dengan tata kelola aset pemerintah daerah, khususnya lahan milik pemerintah daerah belum seluruh lahan milik pemerintah daerah bersertifikat.

**7. Reformasi Hukum**

Permasalahan tumpang tindihnya regulasi pemerintah daerah yang dialami di banyak daerah juga terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Disharmonisasi antar regulasi maupun regulasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum menyebabkan terhambatnya layanan publik dan layanan perizinan penanaman modal. Terdapat beberapa peraturan daerah khususnya yang terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan belum direvisi atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini. Kedepan deregulasi dan harmonisasi regulasi kewenangan daerah sangat diperlukan khususnya dalam menghadapi perkembangan digital yang sangat cepat berubah.

**3.2 Isu Strategis**

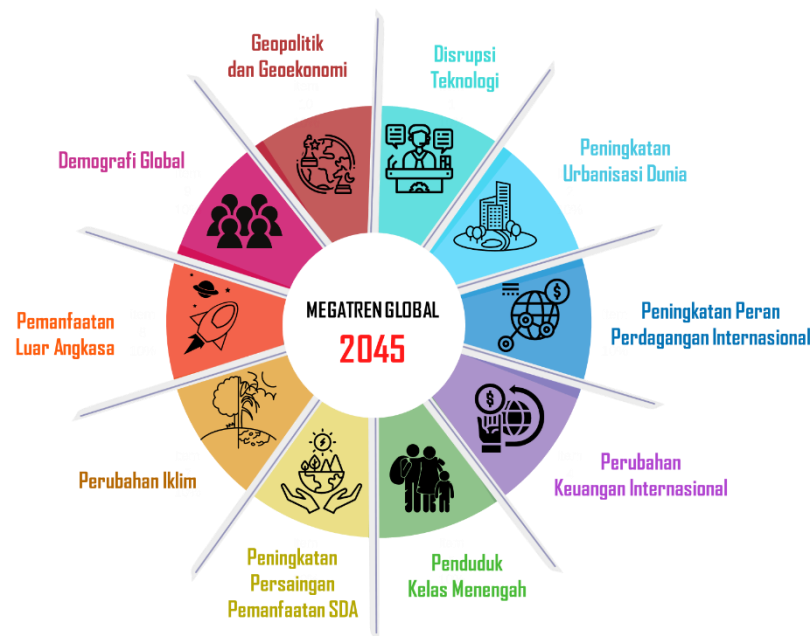
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota

sekitar yang berbatasan secara langsung, evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai isu-isu nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur.

### 3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Merujuk dokumen RPJPN, dari sisi eksternal, isu pembangunan jangka panjang nasional adalah isu megatren di dunia. Megatren adalah perubahan transformatif berskala global, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sementara ini, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*). Megatren ini bersifat global dan akan mempengaruhi seluruh aktivitas manusia di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Lampung Timur. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disruptsi.

Gambar 3.1  
Megatren Global



Merujuk dokumen RPJPN, terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045, yaitu :

1. Perkembangan demografi global

Menurut data *World Population Prospect* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa

pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Di sisi lain, menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir mengakibatkan perubahan proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Kedepan, diprediksi kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

## 2. Geopolitik dan geoekonomi

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global serta adanya krisis energi dan pangan.

Selanjutnya dari sisi geoekonomi, pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama, mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap

nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050.

Pertumbuhan nilai output negara berkembang seiring dengan perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Rerformasi dan perbauran iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju, dimana negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Kebijakan perdagangan yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

### 3. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Thing (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi tersebut memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian,

tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Peningkatan urbanisasi dunia

Menurut The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade kedepan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota.

Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan permukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

5. Konstelasi perdagangan global

Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika,

Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan, negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

6. Tata kelola keuangan global

Pendapatan negara kedepan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren kedepan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

7. Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*)

Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global kedepan akan bergantung pada ketatnya permintaan dan

penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global – *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business as usual* (BaU) menuju ke praktik yang berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terjadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah kedepannya.

10. Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*)

Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*). Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

Dari sisi internal, isu strategis pembangunan jangka panjang nasional terkait dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi

hukum, stabilitas pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan nasional yang akan berpengaruh dan terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur ke depan, yaitu:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,6. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat.

2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibanding Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31), dan Malaysia (1,40) pada tahun 2020

3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai

Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya keserasan ilmiah (*scientific temper*)

4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah  
Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menerus menurun diantaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch disease*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.  
Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lemahnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp.41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp.22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata  
Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta bencana. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut  
Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.  
Optimalisasi ekonomi biru masih dihapadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya *Sea lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60 persen. Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging*

sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik, masih tingginya kegiatan *illegal unreported, and unregulated fishing (IUUF)* serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Meskipun demikian, peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi  
UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal  
Kondisi ini tercermin dari produktivitas sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*missmatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelegen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan  
Untuk menajga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtC)2eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

10. Tantangan pembangunan energi utama peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.  
Posisi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Disamping itu, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir tahun 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Akan tetapi, secara umum kualitas akses listrik tersebut masih harus ditingkatkan. Selanjutnya, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau  
Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Timbulan limbah B3 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2022. Pada limbah domestik, hanya satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.
12. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas  
Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi, dan keamanan siber

belum memadai. Dalam hal produk digital, Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.

13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas

Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022). Infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi

Kondisi ini ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4 (1 persen pertumbuhan penduduk menaikkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 1,4 persen) sedangkan di Tiongkok, elastisitasnya mencapai 3,00. Sementara itu, tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara Tiongkok 1,21). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

15. Kualitas pendidikan yang masih rendah

Sebagaimana terlihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) 382,00 yang jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara OECD 488,33.

Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi yang tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, serta pendidikan non formal yang berkualitas belum memadai di mana 42 persen lembaga pendidikan non formal terakreditasi C atau belum terakreditasi.

16. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan  
Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merepons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.
17. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun di daerah  
Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas, dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.
18. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif  
Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah.
19. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif  
Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.
20. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D  
Hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakkannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan

disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

21. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik

Di dalam birokrasi khususnya di pemerintah daerah, ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik. Hal ini disebabkan posisi kepala daerah sebagai pajabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian ASN. Selama periode 2020-2022 terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN. Selain itu terkait kasus korupsi, ASN, dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi sepanjang tahun 2003-2022.

22. Belum meratanya kualitas pelayanan publik

Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitallisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan.

23. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat

Hal ini ditandai dengan terlihat dari masih adanya persoalan-persoaln tata kelola, seperti di antaranya isu kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai bidang strategis.

24. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar

Tantangan mendasar transformasi digital di tingkat pemerintahan antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan jug amenghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

25. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal

Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil.

26. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
- Ketiadaan mekanisme ko-kreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya untuk melakukan perubahan secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah diperlukan landasan kokok meliputi penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu. Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan landasan yang kokoh tersebut.
27. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
- Selain itu, pemulihan aset tindakan pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.
28. Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
- Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, serta kurangnya kebebasan sipil, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.
29. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat
- Kondisi ini tercermin Indeks Pembangunan Kebudayaan 51,90 pada tahun 2021. Budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang baru mencapai 58,49 di tahun 2022, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal. Berikutnya, terkait keagamaan, kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman

agama dan kebudayaan masih lemah, terlihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama baru sebesar 73,09 (2022) selain itu, ketimpangan gender masih tinggi, dengan Indeks Ketimpangan Gender mencapai 0,458 pada tahun 2022.

30. Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat bencana hidrometeorologi yang mencapai 95 persen dari 3.207 kejadian bencana pada tahun 2022, serta kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Di sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan.

31. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi

Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa (*Java centris*), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama KTI.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.

32. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya

Pembangunan infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi nasional. Beberapa

proyek besar infrastruktur yang sedang atau telah diselesaikan di berbagai wilayah meliputi antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, irigasi pertanian, serta infrastruktur dasar dan perumahan. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga berkelanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Selanjutnya, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

33. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal

Konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kotam masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia.

34. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang

Instrumern pengaman (*safe guarding*) untuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan juga belum efektif, peneraan manajemen risiko pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik.

35. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas. Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya *cost of fund*, dangkalnya sektor keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank, utamanya dana pensiun, asuransi, dan pasar modal), serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan, dimana inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen (2022).

### 3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung

Pada tingkat kabupaten/kota, isu megatren dan isu pembangunan jangka panjang nasional tersebut akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyusunan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota. Dari sisi keterkaitan wilayah, isu strategis yang akan mempengaruhi secara langsung adalah isu strategis pembangunan jangka panjang provinsi. Isu strategis rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Provinsi Lampung, meliputi:

1. Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa  
Publikasi BPS dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 9,52 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030, dan berjumlah 10,42 juta orang pada akhir periode proyeksi tahun 2035, serta bertambah menjadi 11,076 juta jiwa di tahun 2045.  
Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.
2. Letak geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan  
Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan perlintasan utama dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk pengembangan wilayah dan kehandalan

konektivitas antarpulau pada lintas darat, laut maupun udara, transfer teknologi, serta kegiatan ekonomi regional, nasional maupun internasional; sekaligus membawa tantangan dan potensi berbagai kerawanan sosial yang kompleks.

3. Ekonomi biru dan pengembangan potensi sumber daya laut dan pesisir  
Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan sumberdaya pesisir (termasuk pulau-pulau kecil) yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, dimana kondisi umumnya masih belum optimal. Padahal, wilayah pesisir Provinsi Lampung mencakup 8 (delapan) kabupaten/kota yang juga memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka pembangunan pesisir dan laut terpadu dan berkelanjutan. Provinsi Lampung yang memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km merupakan jalur terpanjang kedua di Pulau Sumatera (setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), juga mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa, antara lain: perikanan, ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan rumput laut), pulau-pulau kecil dan pariwisata, serta potensi kelautan lainnya. Sebuah Jurnal Ekonomika tahun 2021 mempublikasikan studi tentang potensi sub sektor perikanan pada provinsi se-Indonesia dengan data PDRB Sub Sektor Perikanan tahun 2015-2019 dengan menggunakan metode analisis SLQ dan DLQ yang digabungkan dalam Tipologi Klassen; menyimpulkan bahwa sub sektor perikanan di Provinsi Lampung masuk pada kategori “Sektor Potensial”.
4. Potensi sumber daya alam untuk mendukung kemandirian energi  
Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi, potensi sumber energi panas bumi (*geothermal*) di Lampung cukup tinggi sekitar 13 titik yang tersebar di beberapa wilayah daerah setempat. Potensi energi *geothermal* Lampung terletak di daerah Ulubelu, *geothermal* Ulubelu terletak di desa Pagar alam dan Muaradua, sekitar 45 km dari distrik Talangpadang atau sekitar 125 km dari kota Bandar Lampung. Pembangkit listrik mulai beroperasi pada tahun 2012, dan dioperasikan oleh dua perusahaan PLN dan PGE. Saat ini total listrik yang dihasilkan adalah 165 MW oleh PLN sementara uap diproduksi oleh PGE. Suhu uap yang dihasilkan rata-rata 265° C dengan entalpi rata-rata 1160 kJ / kg Pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulubelu terdiri dari tiga unit, Ulubelu unit 1, unit 2 dan unit 3. Pada 2017, unit 4 Ulubelu beroperasi dengan 55 MW.
5. Lampung wilayah rawan gempa, tsunami dan gunung berapi  
Letak geografis Provinsi Lampung yang diapit dua lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia, menjadi salah satu penyebab wilayah Lampung rawan terjadinya gempa bumi. Sesar/patahan Sumatera membentang sepanjang 1.900 km (dari Banda Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung), membentang paralel dengan palung/zona subduksi sebagai pengaruh dari konvergensi Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia.

Provinsi Lampung semakin memiliki potensi resiko terjadinya gempa bumi yang tinggi, karena selain diapit dua lempeng dunia, letak geografis Provinsi Lampung juga dilalui patahan Sumatera, dan tiga segmen aktif. Segmen Sunda (6.75 LS – 5.9 LS), merupakan segmen sesar Sumatera yang berada paling selatan. Keberadaannya ditandai dengan adanya graben bawah laut di bawah perairan Selat Sunda. Kedalaman graben mencapai 1.800 meter dibawah lantai dasar laut sepanjang sekitar 150 km. Segmen Semangko (5.9 LS – 5.25 LS), memanjang dari Teluk Semangko sepanjang 6 km ke arah barat laut yang mengakibatkan terbentuknya Lembah Suoh di Lampung Barat. Histori kegempaan yang terjadi pada segmen itu diantaranya terjadi pada 26 Maret 1908. Terakhir, Segmen Kumering (5.3 LS - 4.35 LS) memiliki panjang 150 km. Segmen itu melewati Danau Ranau yang berada di perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Histori kegempaan yang terjadi adalah gempa Liwa pada 24 Maret 1933 berkekuatan 7,5 Ms. Selain itu gempa Liwa pada 16 Februari 1994 berkekuatan 6,8. Selain tiga sesar tersebut, di daerah Lampung juga masih terdapat Sesar Tarahan, yang berada di sepanjang pantai bagian timur Teluk Lampung. Sesar ini menerus ke daratan Sumatra melalui daerah Tarahan, Panjang dan lereng timur Gunung Rajabasa. Bahkan diperkirakan menerus ke perairan Selat Sunda. Struktur sesar diduga sebagai jenis sesar mendatar yang bergerak relatif dipengaruhi adanya gerak vertikal.

6. Produktivitas komoditas unggulan relatif belum berkembang

Telah lama diketahui bahwa Lampung merupakan kawasan penghasil dan pemasok pangan strategis nasional, dan menyandang status “lumbung pangan nasional”. Pada tahun 2022 tingkat produksi beberapa komoditas unggulan Lampung yang mendominasi, antara lain : padi, ubi kayu, tebu, nanas, pisang, kopi, dan beberapa komoditas lainnya.

Meski demikian, pengamatan data produktivitas komoditas unggulan daerah pada satu dekade terakhir memberi gambaran bahwa : tanaman pangan jenis kacang hijau belum banyak berubah; produktivitas tanaman padi, kedelai dan kacang tanah telah meningkat namun kurang signifikan; sementara itu produktivitas tanaman jagung, ubi jalar, dan ubi kayu cukup melonjak. Disisi hasil perkebunan, produktivitas tanaman lada, kakao dan kopi robusta cenderung menurun; produktivitas tanaman kelapa dalam dan kelapa sawit relatif stagnan; produktivitas tanaman tebu cukup dinamis pada level simpangan yang relatif stabil; sementara produktivitas tanaman karet meningkat secara signifikan.

7. Peran industri dalam perekonomian daerah masih stagnan

Perkembangan struktur Industri Pengolahan dalam PDRB tahun 2010-2022 telah menunjukkan adanya perubahan dari porsi 17,18 persen di tahun 2010 menjadi 18,55 di tahun 2022. Meskipun terdapat kecenderungan yang meningkat, namun

tingkat perubahan tersebut masih dipandang berjalan lambat dan belum mencirikan kemajuan ekonomi daerah secara modern. Hingga tahun 2022, porsi sektor industri dalam PDRB Provinsi Lampung masih lebih rendah bila dibanding dengan Provinsi Banten (30,47 persen) ataupun Jawa Barat (42,24 persen) yang merupakan wilayah tetangga dari Provinsi Lampung.

Data statistik tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa kontribusi Lapangan Usaha Industri pada lima tahun terakhir berada pada kisaran 18-20 persen dan merupakan kontributor terbesar ke-2 dalam perekonomian Lampung. Selanjutnya, pada periode pengamatan yang sama juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah usaha industri besarsedang (IBS) tahun 2016 sebanyak 346 perusahaan meningkat menjadi 381 perusahaan, atau bertambah 35 industri sepanjang 5 tahun terakhir. Jumlah IBS di Lampung tersebut masih jauh tertinggal bila dibanding dengan Provinsi Banten yang tercatat 3.316 perusahaan (tahun 2020), ataupun Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.185 perusahaan (tahun 2020).

Ke depan, Provinsi Lampung perlu menangkap peluang dan berpotensi menjadi magnet untuk berkembangnya sektor industri, mengingat bahwa posisi geografis Lampung yang strategis berdekatan dengan Pulau Jawa dan memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup berlimpah, didukung pula dengan sarana pelabuhan penyeberangan barang dan orang (Pelabuhan Bakauheni) maupun pelabuhan ekspor di kawasan Teluk Lampung (Pelabuhan Internasional- Panjang), jalan lintas Sumatera maupun Jalan Tol Trans Sumatera yang berada di Provinsi Lampung serta Stasiun Kereta Api yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan seperti kopi robusta, kelapa sawit, karet, dan cokelat memiliki peran sentral dalam perekonomian provinsi ini. Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi ini adalah melalui hilirisasi produk unggulan. Hilirisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks Provinsi Lampung, hilirisasi komoditas unggulan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

#### 8. Produktivitas sektor industri (Nilai TFP)

Hasil publikasi penelitian Agustien Wahyuningsih dan Budyanra (Variabel-variabel yang Mempengaruhi *Total Factor Productivity* Industri Pengolahan di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2011-2019); memberi gambaran bahwa Provinsi-provinsi yang memiliki nilai TFP “tinggi” adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Riau ditandai dengan warna hijau tua hingga hijau muda. Sementara itu, provinsi dengan nilai TFP “sedang” dimiliki oleh provinsi Banten,

Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dilihat dari pengelompokan warna, nilai TFP didominasi dengan nilai TFP yang “rendah”. Dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa warna merah lebih mendominasi daripada warna hijau. Provinsi dengan nilai TFP “rendah” berada pada wilayah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Lampung, dan Bengkulu.

9. Ekonomi digital, ekonomi syariah dan pariwisata sebagai pendorong ekonomi daerah Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Era baru globalisasi telah mendorong semakin meningkatnya kontribusi aspek digital terhadap ekonomi. Dengan didukung teknologi dan infrastruktur yang semakin canggih, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam ekonomi berbasis digital telah mempermudah, mempercepat dan merubah pola *supply* dan *demand* para pelaku ekonomi dari berbagai sisi, seperti pemasaran, pembelian, pendistribusian produk, sistem pembayaran, dan sebagainya.

Indonesia merupakan negara Muslim dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sebanyak hampir 230 juta jiwa dan tergolong negara berpendapatan menengah ke bawah pada tahun 2021 dengan GNI per kapita di bawah \$4000 pada tahun 2020. Sebaliknya, pusat kajian strategis Badan Nasional Zakat (2022) menyatakan potensi pembayar zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun atau sekitar USD. 25 miliar. Secara hipotetis, informasi mengenai kemiskinan dan potensi zakat akan sama-sama cocok dan menjadi solusi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dengan mengalokasikan seluruh potensi zakat jika dapat diperoleh sepenuhnya dan mampu menjadi penambah keterbatasan anggaran pemerintah.

Pengelolaan keuangan syariah sebagai salah satu instrumen perekonomian, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat melalui akses keuangan inklusif. Peran perekonomian syariah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat serta-merta mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat karena mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, dan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang dalam mengurangi kemiskinan. Dilain pihak pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh sektor keuangan konvensional.

Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. Berdasarkan rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang Provinsi Lampung diketahui bahwa pada tahun 2011-2022 rata-rata lama tamu asing menginap pada hotel berbintang adalah 2-3 hari dan mengalami penurunan dibanding dengan rata-rata lama tamu asing menginap pada periode 2005-2010 yang sebesar 2-4 hari. Penurunan tersebut diduga sangat berkaitan dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur konektivitas dan perbaikan kualitas kemudahan akses moda transportasi darat, laut maupun udara yang berpengaruh terhadap efisiensi waktu tempuh menuju destinasi. Lebih lanjut, rata-rata lama tamu domestik yang menginap pada hotel berbintang sepanjang tahun 2005-2022 belum berubah signifikan, yaitu berada pada kisaran 1-2 hari.

10. Ekonomi sirkular

Keterbatasan sumber daya sudah menjadi keniscayaan, sedangkan keinginan manusia sifatnya tidak terbatas. Untuk itu pemanfaatan sumber daya sudah seharusnya lebih efisien sehingga residu dari proses produksi dapat diminimalisir bahkan dikatakan nihil. Proses pengolahan sumber daya atau input untuk memiliki utilitas tinggi di Provinsi Lampung tentunya akan tergambar dari produk-produk unggulan yang menjadi ikon perekonomian daerah, yaitu dari sektor agrikultur. Konsep ekonomi sirkular bukan hanya mendesain model industri dengan prinsip *zero waste*, tetapi fokus terhadap faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan. Penerapan konsep ekonomi sirkular dinilai berpotensi dalam mendorong substitusi terhadap impor di sektor industri. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing Provinsi Lampung pada tataran manufaktur nasional dan global. Konsep ekonomi sirkular dalam sektor industri dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair*).

11. Peran IPTEK dan inovasi

Hal utama yang membuat sebuah negara berhenti bertransformasi pada level middle-income salah satunya adalah terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak terkelola. Karenanya, penting sekali untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM. Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kondisi meningkatnya produktivitas SDM yang terlatih dibanding dengan yang memiliki pendidikan yang rendah.

12. Kualitas sumber daya manusia

Secara regional, IPM Provinsi Lampung tahun 2005 s.d. 2022 menempati peringkat terendah di wilayah Sumatera dan berada pada posisi ke-24 secara nasional. Secara umum, kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung sudah meningkat namun belum optimal. Sekalipun telah berada pada kategori TINGGI di tahun 2022,

namun peningkatan nilai IPM tersebut masih belum menyamai peningkatan IPM provinsi lain, khususnya di Pulau Sumatera.

13. Kemiskinan

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung masih menjadi persoalan utama pembangunan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau penduduk tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga terkait dengan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu wilayah. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah dilakukan dengan berbagai kebijakan, baik dari sisi kebijakan anggaran, perbaikan data dan sasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi. Dengan pendekatan konvergensi ini, pemerintah berharap rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, tetapi dari beberapa program sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan. Strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan kedataan.

14. Keluarga dan gender

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan lansia. Berbagai isu gender perlu menjadi perhatian, termasuk didalamnya meningkatkan upaya pengarusutamaan gender. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup keluarga. Selain itu, keluarga mempunyai peran strategis dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Hal tersebut sangat menentukan kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga keluarga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

15. Stabilitas transibmas dalam kemajemukan

Kondisi sosial dan kultural masyarakat yang majemuk berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Selama bertahun-tahun penduduk Lampung hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis pada bingkai NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai catatan peristiwa konflik sosial yang pernah memberi kejutan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat Lampung tidak melunturkan komitmen untuk saling menghargai dan memelihara semangat “Bhinneka Tunggal Ika”.

16. Pelestarian nilai religi, budaya dan nasionalisme sebagai modal sosial pembangunan  
Nilai religius yang dipedomani pada seluruh lingkup kehidupan masyarakat akan tercermin dari budaya dan kehidupan bermasyarakat, hal ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena itu merupakan modal sosial yang sangat mendasar dan berharga bagi pembangunan. Untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
17. Kepemudaan  
Pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Hanya 6,7 persen pemuda yang pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 6,4 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi (Susenas BPS, 2018) Rendahnya partisipasi aktif pemuda pada kegiatan sosial kemasyarakatan membuat pemuda lebih rentan melakukan kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. Selain itu terdapat juga bahaya lain yang mengancam masa depan pemuda yaitu paham radikalisme.
18. Perubahan iklim dan perdagangan karbon  
Perubahan iklim merupakan isu yang sedang gencar untuk diperjuangkan bersama di seluruh negara. Efek dari perubahan iklim mempengaruhi semua lapisan kehidupan di bumi. Segala hal yang menyebabkan perubahan iklim datang dari berbagai lini dan sektor kehidupan makhluk hidup di bumi. Perubahan iklim bersifat dinamis, terjadi bahkan sebelum ada manusia dan berjuta-juta tahun lamanya sampai detik ini masih berlangsung. Namun belakangan ini perubahan iklim yang terjadi menjadi sangat ekstrim akibat aktivitas makhluk hidup di bumi. Manusia menjadi makhluk yang paling bertanggung jawab atas kejadian perubahan iklim yang semakin ekstrem. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi. Emisi GRK menyebabkan *global warming* dan mendorong terjadinya perubahan-perubahan iklimik sehingga membawa banyak

dampak negatif yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistemnya.

19. Tata kelola pemerintahan - ASN berintegritas

Pemerintah perlu memperkuat strategi dalam menghadapi tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama pada pemerintah daerah. Sebagai upaya melakukan percepatan reformasi birokrasi, tentunya hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diantisipasi dan ditekan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

20. Tata kelola satu data dan satu peta

Data merupakan “komoditas” yang saat ini dianggap penting dan sangat berharga sama seperti sumber energi seperti minyak atau gas bumi. Dimanapun, siapapun atau instansi apapun yang menguasai data akan menjadi pihak yang memiliki keunggulan kompetitif. Diperkirakan di tahun 2030 data akan menjadi komoditas utama bagi pemberi layanan jasa. Data yang terintegrasi bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintah yang partisipatif, dan meningkatkan efisiensi biaya. (kutipan Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2019).

### 3.2.3 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur

Memperhatikan megtren global, isu pembangunan nasional dan isu pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung, isu strategis dari internal pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur, yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam pembangunan daerah, karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dan masyarakat kedepan, terdiri dari :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 1,33 juta jiwa

Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Provinsi Lampung, yaitu mencapai 1,12 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan sekitar 0,9 persen dan dengan tren yang terus melambat, pada tahun 2045 jumlah penduduk Lampung Timur diproyeksikan akan mencapai 1,33 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Lampung Timur memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk unggulan daerah. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dalam pasar regional dan dapat meningkatkan investasi. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Sebaliknya apabila Kabupaten Lampung Timur gagal mengembangkan jumlah penduduk besar menjadi sumber daya manusia produktif, maka penduduk tersebut akan menjadi beban pembangunan yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Kedepan Kabupaten Lampung Timur mengalami dinamika penduduk yang berdampak luas terhadap pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif bersamaan dengan jumlah penduduk lanjut usia, urbanisasi yang menyebabkan peningkatan proporsi penduduk perkotaan, migrasi yang belum seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah tertentu. Perubahan komposisi yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan distribusi yang tidak merata antar kecamatan memerlukan penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan daerah.

Lebih lanjut, dengan struktur penduduk yang menguntungkan di mana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun kedepan, Kabupaten Lampung Timur mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan daerah. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila perannya terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya. Kabupaten Lampung Timur harus menerapkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang produktif dan inovatif diharapkan menjadi bonus demografi yang cukup signifikan. Selanjutnya, sengan terus meningkatkan produktivitas serta menjaga pola konsumsi yang berkelanjutan, Kabupaten Lampung Timur dapat kembali meraih bonus demografi berikutnya, baik karena peningkatan investasi yang terus menerus maupun menjaga keberlanjutan produktivitas penduduk lanjut usia.

---

## 2. Kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 8,04 tahun, atau masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional. Secara komparasi, dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7 untuk rata-rata lama sekolah tertinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*).

Dalam upaya menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas pendidikan perlu diselaraskan dengan sektor kesehatan. Sebagaimana pendidikan, pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, dan para stake holder lainnya. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan, khususnya penurunan kasus kematian ibu, penanggulangan penyakit menular, dan permasalahan kesehatan lainnya. Terkait dengan perkuatan sistem kesehatan, perlu disinergikan dengan peningkatan upaya perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif sangat diperlukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

## 3. Kualitas angkatan kerja

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021, penduduk Lampung Timur yang bekerja di kegiatan informal mencapai 77,57 persen. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 81,00 persen, dan selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 80,34 persen. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal sebagian besar adalah yang berpendidikan dan berketerampilan rendah. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, dimana sektor informal yang besar cenderung mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Selain studi makro, beberapa studi mikro menunjukkan bahwa sektor informal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena biasanya sektor perekonomian informal mempunyai

skala kecil yang menyebabkannya beroperasi pada skala yang tidak efisien yang akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Dalam proses pembangunan, penduduk berada pada dua posisi, yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai sasaran dari pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan, yang berarti makin banyak modal SDM yang dimiliki, dengan catatan bahwa kualitas SDM yang ada dapat diberdayakan serta memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, jika SDM yang ada tidak dapat diberdayakan dan kualitasnya tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, jumlah penduduk yang banyak justru menjadi beban pembangunan dan akan membawa dampak negatif pada bidang kehidupan penduduk itu sendiri. Begitu juga dengan penduduk usia produktif atau usia kerja (15 tahun ke atas). Kelompok ini dapat menjadi aset bagi bangsa sebagai agen pembangunan, tetapi juga bisa menjadi beban pada saat yang sama.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan daerah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

#### 4. Penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin terbesar ke-2 di Provinsi Lampung, mencapai 13,80 persen di tahun 2023. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkannya. Dari sisi dampak kemiskinan akan menimbulkan masalah yang sangat besar jika tidak segera ditanggulangi, misalnya menurunnya kualitas SDM, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial dan meningkatnya angka kriminalitas. Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda kebijakan penting bukan hanya karena secara moral negara dan pemerintah daerah mengemban tanggung jawab tersebut, akan tetapi juga karena merupakan amanat konstitusi.

Kompleksnya penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah kemiskinan, maka upaya untuk penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembangunan daerah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor policy*), kebijakan yang berpihak kepada orang miskin tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro-*

*poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor growth*). Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

5. Penurunan Prevalensi stunting

Pada tahun 2023, stunting di Kabupaten Lampung Timur sebesar 14,2 persen, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 18,1 persen, atau lebih rendah dari prevalensi Provinsi Lampung yang sebesar 14,9 persen. Dalam pembangunan jangka panjang yang membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, penurunan prevalensi stunting menjadi isu penting yang harus diselesaikan. Percepatan penurunan stunting secara ideal dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan para pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah daerah diamanatkan untuk dapat menjalankan strategi terkait penurunan stunting yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan, kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

6. Keragaman sosial dan budaya sebagai modal pembangunan

Kabupaten Lampung Timur sebagai Indonesia mini karena dihuni oleh berbagai macam suku yang telah menetap turun menurun, mendorong kelekatan dan kekerabatan keluarga karena kesamaan nilai, situasi, dan lokasi tempat tinggal memunculkan budaya tolong menolong dan saling mendukung. Dalam konteks yang lebih berbagai falsafah baik dari adat masing-masing semakin memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan antarkeluarga dalam suatu kelompok sosial. Hal tersebut merupakan modal sosial budaya yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial, keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, kegyuban, pencapaian pendidikan, khazanah, pengetahuan, keterampilan, dan

kemahiran, keragaman bahasa, kesenian, dan kesusateraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Lampung Timur yang beragam, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah, yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Aneka perkumpulan sosial di masyarakat Lampung Timur yang berbasis keagamaan, adat, suku, sukarelawan, lembaga swadaya, keluarga, serta para pegiat sosial di berbagai bidang, merupakan aktor-aktor penting non formal yang dapat memainkan peran strategis dan berkontribusi signifikan dalam memajukan daerah. Masyarakat paguyuban merupakan bentuk modal sosial yang kuat di Kabupaten Lampung Timur karena mampu mempererat hubungan antar anggota, menjaga nilai-nilai tradisional serta menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial dan pembangunan daerah. Berbagai aktivitas paguyuban masyarakat berfungsi mempererat silaturahmi sesama kerabat serta mengukuhkan kohesi sosial.

Di tataran yang lebih mikro, kekhasan keluarga di Kabupaten Lampung Timur tercermin dari keteguhan keluarga dalam menanamkan nilai agama dan sosial, serta memberikan penghargaan terhadap adat istiadat dan tradisi. Hal ini ditunjukkan oleh pembentukan keluarga yang dilandasi oleh ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai positif, adat istiadat, dan tradisi yang disosialisasikan secara lintas generasi seperti falsafah adat Lampung yang terdiri dari : **Pesenggiri** yang mengandung arti tidak mudah menyerah, tidak mengenal takut dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan yang datang didalam kehidupan. Keberanian adalah merupakan bagian dari harga diri. **Bejuluk-Adek** yang mengandung arti untuk selalu menggunakan nama-nama panggilan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Panggilan yang baik bukan saja membuat orang lain terhormat, tetapi juga menunjukkan diri yang bermartabat. **Nemui-Nyimah** yang mengandung arti senang berkunjung dan dikunjungi dengan sikap yang ramah dan pemurah. Berkunjung dan dikunjungi bagian dari sikap saling menghormati. Selanjutnya **Nengah-Nyappur** yang mengandung arti selalu bergaul ditengah masyarakat dan memperluas hubungan persahabatan dan kekeluargaan dengan semua orang. Dan **Sakai-Sambayan** yang mengandung arti senang tolong-menolong dan bergotong-royong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga persoalan bersama dapat diselesaikan pula secara bersama-sama.

Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan. Masyarakat Lampung Timur adalah masyarakat yang sangat dekat

dengan implementasi ajaran agama, khususnya ajaran Agama Islam. Interaksi erat masyarakat Lampung Timur dengan ajaran dan agama tercermin dari banyaknya jumlah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan merupakan yang terbanyak di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Timur yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Modal sosial dan budaya yang diuraikan di atas merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila dikelola secara efektif, maka modal sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat akan berkontribusi signifikan dalam proses pembangunan daerah.

7. Stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan data, jumlah kasus kriminalitas kurun waktu lima tahun di Kabupaten Lampung Timur terakhir terus meningkat. Tingginya tingkat kriminalitas akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Sehingga, hal ini akan mengganggu kualitas hidup dan membatasi terhadap aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Secara makro, peningkatan jumlah kriminalitas berdampak negatif terhadap investasi. Tingginya kriminalitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan sangat penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah.

Pemerintah baik pada level pusat maupun daerah, memiliki kewajiban dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa tiap Kepala Daerah memiliki tugas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Salah satu kewajiban pemerintah daerah yaitu melakukan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

8. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perwujudan keluarga berkualitas, pemerintah daerah berkewajiban mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sebab laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti angka kelahirannya masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan

Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan lansia perlu menjadi perhatian kedepan. Berbagai isu gender perlu menjadi perhatian, termasuk didalamnya meningkatkan upaya pengarusutamaan gender. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan.

#### 9. Kepemudaan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Secara bahasa definisi pemuda adalah orang yang masih muda baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai tahap dewasa. Pemuda adalah harapan bangsa yang memiliki tanggung jawab yang berat yang harus diemban. Seluruh stakeholder menaruh harapan kepada pemuda.

Pemerintah telah menetapkan tiga fokus pembangunan pemuda. Ketiga hal itu meliputi penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah, peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi dan pencegahan perilaku berisiko pemuda termasuk pencegahan perilaku negatif (kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual). Selain itu terdapat juga bahaya lain yang mengancam masa depan pemuda yaitu paham radikalisme. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan daerah.

#### 10. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptekin) menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak lagi hanya bertumpu pada faktor produksi konvensional seperti penambahan modal dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Faktor tersebut akan mendorong suatu daerah untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perhatian harus diberikan pada strategi kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk penempatan anggaran untuk dialokasikan pada pos iptek, riset, dan inovasi. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk

daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, indeks inovasi Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 27,62 atau berkategori kurang inovatif. Kedepan pemerintah daerah diarahkan dapat meningkatkan indeks inovasi dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kreatif, solutif, dan inovatif. Sehingga dapat mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan dengan basis inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

#### 11. Hilirisasi dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi daerah

Perekonomian Lampung Timur kurun waktu sepuluh tahun terakhir didominasi oleh sektor primer. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian mencapai lebih dari 50 persen terhadap perekonomian daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam dan kurangnya diversifikasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Basis ekonomi yang bergantung pada komoditas bernilai tambah rendah, akan menghambat pembangunan ekonomi berkualitas. Disamping itu, kontribusi sektor industri pengolahan kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung stagnan di bawah 10 persen.

Tantangan kedepan adalah melaksanakan transformasi ekonomi secara bertahap untuk mengubah struktur ekonomi daerah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Industri pengolahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. Perekonomian akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dan dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*).

#### 12. Produktivitas komoditas unggulan dan strategis

Berdasarkan data, produktivitas komoditas unggulan dan strategis Kabupaten Lampung Timur yaitu lada, kakao, karet, dan kelapa mengalami penurunan produktivitas kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Sedangkan untuk komoditas padi, jagung, dan kelapa sawit mengalami peningkatan produktivitas.

Tantangan ke depan, dengan tekanan terhadap perluasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, upaya intensifikasi faktor produksi tentunya akan menjadi pilihan. Perhatian terhadap produktivitas komoditas unggulan dan strategis juga menjadi penting, mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pula stabilitas harga pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, meningkatkan produktivitas komoditas dapat menghasilkan hasil yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

13. Ekonomi biru dan pengembangan potensi sumber daya laut dan pesisir

Konsep biru ekonomi merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Secara geografis, wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berada di pesisir dengan panjang garis pantai lebih dari 150 km menjadikan daerah ini kaya akan sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan tangkap dan budidaya berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah antara lain sebagai penghasil produk untuk memenuhi kebutuhan protein, sumber pendapatan masyarakat pesisir, dan bahan baku industri pengolahan perikanan.

Karakteristik Lampung Timur di pesisir timur Provinsi Lampung dapat menjadikan laut sebagai penghubung ke seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut ditopang dengan berada di Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang dapat menjadi aset perhubungan penting ke depan. Pelabuhan Labuhan Maringgai diproyeksikan sebagai pelabuhan pengumpan regional, dalam rangka meningkatkan peran pelabuhan Labuhan Maringgai sebagai pusat pertumbuhan baru kawasan dan *backbone* logistik daerah yang terintegrasi dengan jaringan transportasi wilayah lainnya. Jarak yang lebih dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan merupakan jalur ALKI-I memberikan keuntungan dalam pengembangan Pelabuhan Maringgai kedepan. Pengembangan Pelabuhan Labuhan Maringgai disertai dengan pengembangan kawasan minapolitan di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti yang terkoneksi dengan wilayah di sekitarnya akan mendukung perwujudan Lampung Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru Pesisir Timur.

14. Ekonomi digital, ekonomi syariah, dan pariwisata sebagai pendorong ekonomi daerah

Saat ini dapat kita lihat bahwa kecepatan perubahan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Teknologi yang berkembang masa depan juga diyakini akan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor ekonomi. Digitalisasi telah menjadi tren global yang sangat signifikan dalam dekade terakhir dan diproyeksikan akan tetap menjadi salah satu kekuatan utama yang akan membentuk masa depan dunia. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20

persen dari tahun 2021 menjadi USD 146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, ekonomi digital di Indonesia tumbuh sangat kuat dan terbesar di antara negara-negara tetangga. Peluang pengembangan ekonomi digital tersebut tentu menjadi modal bagi daerah untuk mengakeselerasi ekonomi daerah. Ekonomi digital memiliki kompleksitas tersendiri dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kolaboratif. Di Kabupaten Lampung Timur, secara keseluruhan lanskap kebijakan dan regulasi ekonomi digital masih tergolong pada tahap awal pengembangan. Dengan memanfaatkan struktur demografi yang produktif, digitalisasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam semua sektor pembangunan, mulai dari sektor-sektor prioritas hingga pelayanan publik. Hal ini juga membuka peluang untuk memanfaatkan tenaga kerja digital yang berkualitas guna menciptakan industri-industri vertikal yang modern, produktif, dan terkini.

Selain pengembangan ekonomi digital dalam mendorong ekonomi daerah, pengembangan ekonomi syariah sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur. Dengan jumlah penduduk beragama Islam lebih dari 94 persen (1.063 juta jiwa), dapat dijadikan sumber pertumbuhan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kedepan. Peningkatan keuangan sosial syariah (Zakat, Wakaf, Infak, Sedekah), yang merupakan ekosistem ekonomi syariah dapat menjadi alternatif solusi permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan data pusat kajian strategis Badan Nasional Zakat (2022), potensi pembayar zakat di Indonesia mencapai Rp.327 triliun per tahun atau sekitar USD.25 miliar. Secara hipotetis, informasi mengenai kemiskinan dan potensi zakat akan sama-sama cocok dan menjadi solusi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dengan mengalokasikan seluruh potensi zakat jika dapat diperoleh sepenuhnya dan mampu menjadi penambah keterbatasan anggaran pemerintah.

Zakat memiliki banyak manfaat bagi perekonomian baik makro maupun mikro, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk melakukan hal tersebut, dana tersebut perlu dikelola dengan baik, yang penting adalah pengelolaan dana yang terpercaya dan bekerjasama dengan pengawasan pemerintah. Faktor pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan citra institusi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan dana zakat kepada Badan yang mengelola zakat, infaq maupun sodaqoh.

Sektor berikutnya yang diyakini dapat dijadikan pendorong ekonomi daerah kedepan adalah sektor pariwisata. Keberadaan Taman Nasional Way Kambas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sekaligus ASEAN Heritage Park dan Taman Purbakala Pugung Raharjo dapat menjadi salah satu daya tarik pengembangan pariwisata

daerah. Keunikan dan kekhasan destinasi pariwisata tersebut tidak dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga memiliki daya saing yang tinggi untuk pengembangan kedepan. Selain pengembangan pariwisata konvensional tersebut, peluang pengembangan pariwisata syariah (*halal tourism*) di Kabupaten Lampung Timur juga sangat besar. Banyaknya pondok pesantren, tempat-tempat suci (termasuk Islamic Center Sukadana) dan besarnya jumlah penduduk muslim akan menjadi pendorong pengembangan segmen wisata tersebut. Segmen wisata yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan muslim yang ingin melakukan perjalanan wisata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga wisatawan muslim menjadi merasa lebih nyaman dan aman dalam menikmati perjalanan wisata, serta dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim sesuai dengan ajaran Islam seperti wajib mengkonsumsi makanan dan minuman halal, melaksanakan solat fardu di tempat yang representatif, dan tempat tinggal yang terhindar dari maksiat dengan adanya hotel syariah.

Sinergitas pengembangan ekonomi digital, ekonomi syariah dan pariwisata sebagai sektor ekonomi yang multidimensi memiliki jaringan industri ke hulu dan hilir dengan mata rantai yang sangat panjang yang dapat menjadi pendorong ekonomi daerah kedepan. Pengembangan ekonomi digital, ekonomi syariah dan pariwisata akan menimbulkan peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan daerah, percepatan proses pemerataan pendapatan, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan, memperluas pasar produk dalam negeri dan memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri.

15. Pengembangan pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi kawasan

Potensi sektoral (unggulan) dan daya tarik geografis dari kawasan akan menjadi penggerak utama dalam pembangunan wilayah, karena adanya keterkaitan dan demand atau permintaan terhadap sektor unggulan tersebut. Selanjutnya kawasan strategis ekonomi daerah akan dapat memberikan efek positif seperti *spread effect* dan *trickledown effect* yang mempengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya.

- a. Kecamatan Sukadana memiliki potensi sebagai penggerak utama pembangunan Lampung Timur kedepan. Berdasarkan proyeksi, kontribusi Kecamatan Sukadana terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus ditingkatkan seiring dengan pemberdayaan potensi yang dimiliki. Potensi kontribusi ekonomi Kecamatan Sukadana bersumber dari posisi strategis di pinggir jalan Lintas Pantai Timur dan sebagai pusat pemerintahan serta sentra layanan jasa keuangan hingga jasa pelayanan kesehatan. Potensi ini dapat menjadikan Perkotaan Sukadana sebagai

- motor penggerak ekonomi daerah khususnya perdagangan, jasa dan wisata daerah.
- b. Kawasan Perkotaan Way Jepara sesuai fungsinya diarahkan sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura. Sumber daya alam dan produk pertanian peternakan berkualitas serta berada pada posisi strategis di jalur lintas pantai timur dan berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional TNWK merupakan potensi yang dimiliki Way Jepara menjadi pusat pertumbuhan di wilayah tengah Kabupaten Lampung Timur. Aktivitas perdagangan skala kabupaten yang saat ini telah melayani beberapa kecamatan di sekitarnya dapat dikembangkan lebih kedepan.
  - c. Dengan panjang garis pantai kurang lebih 30 km, menjadikan Perkotaan Labuhan Maringgai layak sebagai kawasan minapolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir Lampung Timur. Potensi perikanan di Kecamatan Labuhan Maringgai sangat besar dan bernilai tinggi. Komoditas perikanan khususnya rajungan, udang dan bandeng banyak diekspor untuk memenuhi kebutuhan regional dan nasional. Pengembangan kawasan minapolitan tersebut disinergikan dengan pengembangan potensi pariwisata pantai, melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata termasuk penyediaan penginapan dan akses jalan. Pengembangan industri pengolahan produk perikanan dan cenderamata yang terdapat di beberapa desa dikembangkan melalui penyediaan energi, penataan sentra kawasan, pembangunan sentra niaga, serta percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan.
  - d. Kawasan Perkotaan Pekalongan saat ini telah berkembang menjadi sentra bibit tanaman pertanian dan hias berskala nasional. Perkembangan ini memberikan efek pengganda bagi desa dan kecamatan di sekitarnya. Selain itu, Kecamatan Pekalongan saat ini juga memiliki potensi sebagai pengembangan kawasan pendidikan tinggi, permukiman, dan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh luberan pemanfaatan ruang dari kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Metro. Hal ini terindikasi dari adanya Lembaga pendidikan tinggi Kota Metro yang telah berinvestasi dan membangun sarana kampusnya di wilayah Kecamatan Pekalongan. Selain itu juga mengakselerasi pengembangan kawasan permukiman dan perdagangan di sepanjang jalur lalu lintas.
  - e. Kawasan Perkotaan Sekampung Udik berdasarkan fungsinya yaitu kawasan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman. Posisi sangat strategis terletak di jalur akses terdekat Kawasan Industri Lampung dan Exit Tol Lematang, memberikan efek positif bagi perkembangan Sekampung Udik kedepan. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan kawasan

agroindustri akan memberikan efek pengganda bagi sektor lain, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga permukiman. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa seiring dengan peningkatan investasi sektor industri ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisata daerah. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kecamatan Sekampung Udik adalah Taman Purbakala Pugung Raharjo, merupakan taman purbakala megalitik satu-satunya di Provinsi Lampung.

- f. Kawasan Perkotaan Bandar Sribhawono dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agroindustri, dan permukiman. Selain sebagai kawasan agro-industri, di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono juga ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan kawasan agroindustri akan memberikan efek pengganda bagi sektor lain, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga permukiman. Sektor perdagangan dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan di Kecamatan Bandar Sribhawono yang terdiri dari pisang, durian, dan kakao.

16. Pengembangan kewilayahan berdasarkan klaster wilayah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan untuk mengurangi kesenjangan, dilakukan pendekatan pembangunan wilayah berdasarkan klaster. Pengklasteran wilayah berbasis kecamatan, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kedekatan jarak, serta fungsi sistem pusat kegiatan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Pendekatan klaster wilayah dengan salah satu wilayah kecamatan menjadi pusat pertumbuhan yang akan memberikan efek sebar (*spread effect*) ataupun efek tetesan kebawah (*trickle down effect*) bagi wilayah penopang di sekitarnya. Kecamatan pusat pertumbuhan menjadi penggerak utama pembangunan daerah yang selanjutnya menyebarkan hasil pembangunan dan dampak pertumbuhannya ke wilayah sekitar.

- a. Klaster I (Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Penggerak Ekonomi Daerah yang Inklusif, Terintegrasi, Merata, dan Berkelanjutan”**. Peluang pengembangan wilayah Klaster I ini didukung dari letak geografis yang sebagian besar dilalui jalan lintas pantai timur sebagai ruas jalan kolektor primer K1 yang merupakan ruas jalan utama yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Timur dari ujung barat ke wilayah timur. Ruas jalan ini juga menghubungkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah. Dengan posisi tersebut, ruas jalan nasional ini dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan baik logistik maupun perorangan dan merupakan *backbone infrastructure* di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Posisi strategis di ruas jalan tersebut memberikan

dampak positif bagi perkembangan kawasan ini kedepan. Posisi strategis di pinggir jalan nasional tersebut, dan status sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Timur serta pusat dari perkantoran pemda maupun pusat layanan jasa memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah di kecamatan ini kedepan. Adanya gedung perkantoran pemda, layanan perbankan, rumah sakit daerah, dan kantor instansi vertikal memunculkan aktivitas kegiatan pemerintahan (*government-induced activities*) yang dapat mendorong pertumbuhan Perkotaan Sukadana lebih maju dibandingkan kecamatan lain disekitarnya. Pertumbuhan tersebut terbukti memberikan efek pengganda bagi sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut akan membutuhkan pasokan bahan baku dan tenaga kerja secara kontinu. Dalam teori pengembangan wilayah, kebutuhan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pusat pertumbuhan, akan ditopang oleh kawasan atau kecamatan di sekitarnya. Kebutuhan akan bahan baku dan tenaga kerja disediakan oleh kecamatan yang menjadi penopang di sekitarnya. Bahan baku yang dibutuhkan oleh Perkotaan Sukadana sebagai pusat pertumbuhan sebagian besar berupa produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Marga Tiga dapat menopang kebutuhan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa keempat kecamatan tersebut merupakan kecamatan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

- b. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang), Klaster ini akan diarahkan menjadi **“Pusat Pertumbuhan Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Pusat pertumbuhan kawasan ini adalah Perkotaan Pekalongan. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Pekalongan sebagai sentra perdagangan pembibitan tanaman di Provinsi Lampung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi klaster kedepan. Kecamatan di sekitarnya menjadi penopang pusat pertumbuhan dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh pusat pertumbuhan seperti bahan baku dan tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan Kecamatan Pekalongan, potensi kecamatan disekitarnya pun sangat besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya sentra perdagangan perikanan, peternakan, dan tanaman pangan. Komoditas unggulan tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kecamatan tersebut.

Daya dorong dan potensi pertumbuhan kawasan ini lainnya adalah letaknya yang berbatasan langsung dengan Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro. Perkembangan Kota Metro saat ini memberikan dampak terhadap kemajuan beberapa wilayah desa yang berbatasan langsung, khususnya Kecamatan

Pekalongan, Kecamatan Batanghari, dan Kecamatan Metro Kibang, mulai dari pembangunan sarana pendidikan hingga sarana perdagangan dan jasa. Keterbatasan ruang yang dimiliki Kota Metro menjadi peluang bagi perkembangan wilayah ini yang relatif masih tersedia. Selain itu, kebutuhan terhadap komoditas pangan dan sumber daya tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Metro menjadi peluang pertumbuhan ekonomi kawasan ini kedepan, khususnya di sektor agribisnis dan industri pangan lokal. Besarnya potensi dan sumber daya alam yang dimiliki sebagai sentra komoditas pangan berkualitas menjadi pendorong tumbuhnya kegiatan industri berorientasi ekspor, yang menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pusat pertumbuhan Kota Metro.

- c. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selehah, Mataram Baru), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Mata Rantai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”**. Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Mataram Baru yang tergabung dalam klaster III ini adalah kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, TNWK menjadi daya tarik kunjungan wisatawan. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan pariwisata akan menimbulkan peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan daerah, percepatan proses pemerataan pendapatan, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan, memperluas pasar produk dalam negeri dan memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri. Pariwisata sebagai industri jasa yang multidimensi memiliki jaringan industri ke hulu dan hilir dengan mata rantai yang sangat panjang ke wilayah klaster III ini. Posisi strategis yang dilintasi oleh jalan lintas pantai timur sebagai jalan kolektor primer K1 mengakselerasi potensi pertumbuhan kawasan ini kedepan. Rencana pengembangan kawasan industri di sepanjang koridor jalinpantim, didukung oleh potensi pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya di Danau Jepara. Pengembangan PLTS di Danau Jepara akan menjadi pasokan listrik bagi pengembangan sektor industri dan pariwisata di kawasan ini.
- d. Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Klaster ini terdiri dari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Gunung Pelindung. Pusat pertumbuhan klaster ini ditetapkan yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai, yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal dalam RTRW Provinsi Lampung.

Penetapan Kecamatan Labuhan Maringgai menjadi pusat pertumbuhan didukung oleh potensi perikanan yang sangat besar. Pengembangan ekonomi biru Kabupaten Lampung Timur terletak di kawasan ini. Dengan panjang pantai yang mencapai lebih dari 100 km, potensi perikanan tangkap dan budidaya (tambak) akan mendorong pertumbuhan kawasan ini. Saat ini, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti merupakan sentra produksi rajungan, udang, dan bandeng yang telah diekspor ke luar daerah.

Selain potensi sebagai kawasan minapolitan, saat ini perkembangan sektor pariwisata di kawasan ini semakin baik, khususnya pariwisata pantai dan kuliner laut. Meningkatnya pariwisata di kawasan ini juga akan menggerakkan unit ekonomi di wilayah kecamatan sekitar. Kebutuhan pasokan pangan dan cenderamata bagi para wisatawan akan semakin menumbuhkan industri-industri di sekitarnya dan menjadi motor penggerak keterkaitan dan tumbuhnya sektor lainnya. Kecamatan di sekitar Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, yang tidak berada di pinggir pantai memiliki potensi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Di kawasan ini terkenal akan bibit buah-buahan unggul yang telah terkenal di seluruh Indonesia. Selain itu, kawasan ini juga merupakan sentra komoditas lada yang merupakan salah satu komoditas strategis di Provinsi Lampung. Pengembangan komoditas unggulan di kawasan yang sinergi dengan sektor strategis yang telah ada akan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah kedepan.

- e. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Mata Rantai Utama Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan”**. Pada klaster kawasan ini, pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang saat ini tumbuh lebih cepat dibandingkan kecamatan di sekitarnya. Masifnya pertumbuhan di kecamatan tersebut dan lengkapnya ketersediaan sarana prasarana perkotaan menjadikan kecamatan tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan ini. Perkotaan Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang berada di ruas jalan kolektor primer K1, saat ini menjadi pusat perdagangan dan jasa pada kawasan ini. Berbagai barang dan jasa memasok berbagai keperluan yang diperlukan masyarakat di kedua kecamatan tersebut termasuk masyarakat di kecamatan sekitarnya. Kecamatan yang menjadi penopang pertumbuhan adalah Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Marga Sekampung. Ketiga kecamatan ini memiliki wilayah yang sangat luas dan merupakan kecamatan sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, biofarmaka, peternakan, dan hortikultura. Berbagai produk pertanian berkualitas

tinggi berasal dari ketiga kecamatan tersebut, termasuk Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang juga merupakan sentra tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Lampung Timur.

17. Pembangunan infrastruktur daerah

Infrastruktur daerah yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah infrastruktur konektivitas jalan kabupaten dan desa. Pada tahun 2023, tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 49,17%. Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.884,17 km, 957,72 km diantaranya berada dalam kondisi tidak mantap. Begitupun dengan kondisi jalan desa, dari total panjang 4.088,47 km sebagian besar dalam kondisi tidak mantap. Meskipun Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setiap tahun dalam kebijakan anggarannya terus mendorong peningkatan kemantapan jalan kabupaten, namun belum dapat meningkatkan kemantapan jalan di atas 70% selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Selain meningkatkan kualitas jalan kewenangan kabupaten, kedepan Kabupaten Lampung Timur perlu memproyeksikan pengembangan infrastruktur jalan dan wilayah sebagai bagian dari rangkaian konektivitas baru jalan tol dan jaringan jalan Provinsi Lampung (jalan lingkar luar Kawasan Metropolitan Lampung Raya). Pengembangan jalan kabupaten dan desa sebagai penghubung konektivitas jalan tol, jalan nasional, dan provinsi perlu dipersiapkan untuk menunjang konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan unit-unit ekonomi baru.

Selanjutnya sejalan dengan pertambahan penduduk Lampung Timur ke depan yang mencapai 1,33 juta jiwa, proyeksi kebutuhan infrastruktur perumahan atau tempat tinggal pada tahun 2045 mencapai 266.680 unit. Proyeksi tersebut termasuk ketersediaan rumah eksisting saat ini. Yang perlu diwaspadai adalah resiko krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah atau bisa disebut sebagai *backlog*. Backlog merupakan indikator untuk mengukur kebutuhan rumah yang dihitung dengan angka persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan yang menempati bukan rumah sendiri tetapi memiliki rumah di tempat lain. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, di Kabupaten Lampung Timur persentase rumah tangga menurut status bangunan tempat tinggal yang ditempati 3,58 persen bukan milik sendiri. Jika dikonversi dalam jumlah unit, ekuivalen dengan 8.181 unit rumah.

Isu strategis infrastuktur selanjutnya adalah jangkauan jaringan seluler di wilayah desa belum merata, masih terdapat wilayah blank spot di beberapa wilayah kecamatan, khususnya Kecamatan Marga Sekampung.

Infrastruktur lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah kebutuhan air bersih. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2045 mencapai 73 juta kubik pertahun. Berdasarkan data BPS, persentase rumah tangga menurut sumber air utama, 15,12 persen menggunakan

mata air/sumur tak terlindung dan sebesar 1,54 persen menggunakan air permukaan, air hujan, dan lainnya. Kedepan, peningkatan akses air bersih bagi masyarakat perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui peningkatan alokasi anggaran penyediaan air bersih masyarakat, bersinergi dengan pemerintah pusat dan stake holder lainnya.

Selanjutnya, kebutuhan akan listrik juga menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada tahun 2045, kebutuhan listrik di Kabupaten Lampung Timur untuk mengalir 266.680 unit rumah mencapai 1,3 juta MWh. Kebutuhan listrik tersebut belum memperhitungkan kebutuhan listrik bagi peningkatan sektor industri dan fasilitas lainnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 fasilitas perumahan bersumber penerangan listrik non PLN di Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,05 persen, atau ekuivalen dengan sekitar 114 rumah yang saat ini belum teraliri listrik. Meskipun ketenagalistrikan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk mendorong teralirinya listrik untuk seluruh rumah di daerah melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

18. Potensi sumber daya alam untuk mendukung kemandirian energi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi kedepan, Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi sumber energi transisi yaitu gas bumi. Jaringan infrastruktur gas bumi melintasi Kecamatan Raman Utara, Batanghari Nuban, Sukadana, Labuhan Ratu, Braja Selehah, dan Labuhan Maringgai. Melalui pipa *South Sumatera West Java* (SSWJ) gas bumi dialirkan dari Stasiun Gas Bumi Pagardewa di Sumatera Selatan menuju Lampung Timur, dan menjadi penopang kebutuhan gas bumi untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Jawa Bagian Barat. Berdasarkan data Perusahaan Gas Negara sebagai pengelola jaringan gas bumi tersebut, saat ini pemanfaatan gas bumi wilayah Lampung hanya sekitar 40 persen dari kapasitas pipa yang ada. Kapasitas pipa jaringan distribusi yang ada saat ini mampu mengalirkan 80 Mmscfd. Dengan kondisi tersebut, pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat terbuka khususnya dalam penyediaan energi bagi kawasan industri maupun proyek strategis lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Potensi berikutnya adalah potensi pengembangan EBT yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), khususnya di wilayah Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Way Jepara. Pemanfaatan Bendungan Marga Tiga dan Bendungan Way Jepara sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Apung sangat potensial. Dengan luas wilayah genangan yang masing-masing mencapai 2.218 hektar dan 3.345 hektar, potensinya sangat luar biasa untuk menjadi lokasi pengembangan PLTS apung daerah. Tersedianya listrik yang bersumber dari PLTS Apung di kedua

bendungan tersebut dapat mendukung suplai kebutuhan listrik di rencana pengembangan kawasan industri terpadu Lampung Timur dan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Lampung Raya kedepan. Selain itu ketergantungan suplai listrik dari Provinsi Sumatera Selatan akan dapat dikurangi dengan adanya proyek PLTS Apung ini. Dapat dikatakan, proyek PLTS Apung ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kemandirian daerah. Berdasarkan hasil kalkulasi investasi, diperkirakan dari kedua kawasan bendungan tersebut, dapat diperoleh total listrik sekitar 1.132 MW.

19. Perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan secara langsung akan menyisakan efek negatif bagi lingkungan akibat adanya residu-residu dalam proses ekonomi dan pembangunan yang berdampak pada degradasi dan kerusakan lingkungan. Saat ini isu degradasi dan pencemaran lingkungan telah menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai masalah dengan dampak negatif yang sangat besar. Degradasi tersebut disinyalir menjadi penyebab utama dibalik terjadinya berbagai bencana alam dan akibat dari adanya perubahan iklim serta pemanasan global.

Perubahan iklim yang mempengaruhi pemanasan global telah dibuktikan secara ilmiah berdasarkan tren data peningkatan suhu di bumi. Data *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2007) menjelaskan bahwa tahun 1995-2006 merupakan dekade dimana bumi berada dalam kondisi paling hangat berdasarkan rekaman data sejak tahun 1850. Peningkatan suhu berdasarkan tren data per seratus tahun sejak 1906-2005 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan suhu mendekati dua kali lipat pada tahun 1956-2005. Peningkatan suhu tersebut mempengaruhi seluruh permukaan bumi terutama di kutub utara. Analisis ini juga menggambarkan pemanasan yang terjadi di seluruh bumi bahwa daratan lebih cepat panas dibanding lautan. Kenyataan tersebut menjadikan perubahan iklim sebagai keniscayaan sekaligus isu yang menjadi perhatian masyarakat global termasuk Indonesia.

Perubahan iklim global dan degradasi lingkungan mempunyai dampak yang buruk terhadap keberlangsungan kehidupan manusia khususnya sektor pertanian dan perikanan. Perubahan iklim tersebut dipengaruhi tiga unsur iklim dan komponen alam yang erat kaitannya dengan pertanian dan perikanan, yaitu naiknya suhu udara yang berdampak pada unsur iklim lainnya, terutama kelembapan dan dinamika atmosfer. Selain itu, berubahnya pola curah hujan dan semakin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim (anomali iklim) seperti *El-Nino* dan *La-Nina*. Pengaruh iklim terhadap sektor pertanian dan perikanan yang menjadikan banyak dampak bagi perubahan iklim menjadi isu strategis dikarenakan persoalan ini dapat mengancam kepentingan nasional suatu bangsa. Perubahan temperatur secara global

memicu terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, hujan badai ekstrem yang dapat mengganggu keberlangsungan ritme sektor pertanian maupun perikanan. Sebagai daerah yang berbasis pertanian dan perikanan, Kabupaten Lampung tentu harus mempersiapkan diri dan mengantisipasi dampak perubahan iklim bagi kehidupan masyarakatnya. Termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui berbagai instrumen, kebijakan dan penguatan keterlibatan dalam upaya mewujudkan pembangunan berketahanan iklim guna menekan potensi kerugian ekonomi.

20. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Merujuk dokumen KLHS RPJPD, 52,73 persen dari total keseluruhan TPB yang telah dilaksanakan, atau 116 indikator telah mencapai target. Sedangkan 73 indikator belum mencapai target. Untuk mencapai target TPB kedepan, pemerintah daerah direkomendasikan untuk fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar (jalan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), rehabilitas kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin, optimalisasi pengendalian dan pengelolaan kawasan pesisir, optimalisasi mitigasi bencana, dan peningkatan kualitas konsumsi pangan.

21. Lampung Timur rawan bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2022), Lampung Timur berada di posisi 32 daerah yang berisiko tinggi untuk multi ancaman dengan skor sebesar 183,20. Kabupaten Lampung Timur berisiko tinggi terhadap ancaman bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, bencana gelombang tinggi dan abrasi, bencana kekeringan, dan cuaca ekstrim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diamanatkan bahwa pemerintah daerah beserta Pemerintah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

22. Transformasi tata kelola pemerintahan daerah

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat

10 (sepuluh) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola pemerintahan daerah, yaitu (i) regulasi, (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, dan (x) relasi pemerintah daerah dan masyarakat

#### 23. Tata Kelola Satu Data

Data yang mudah diakses dan terintegrasi sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Data yang berperan sebagai informasi dapat dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik. Untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang baik, diperlukan data yang akurat sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kesalahan terhadap penggunaan data justru dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah yang dibuat tidak berguna atau tidak tepat sasaran. Bahkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya menekankan bahwa siapapun atau instansi apapun yang menguasai data akan menjadi pihak yang memiliki keunggulan kompetitif. Data merupakan “komoditas” yang saat ini dianggap penting dan sangat berharga sama seperti sumber energi seperti minyak atau gas bumi. Diperkirakan di tahun 2030 data akan menjadi komoditas utama bagi pemberi layanan jasa. Data yang terintegrasi bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintah yang partisipatif, dan meningkatkan efisiensi biaya.

Isu strategis terkait data di Kabupaten Lampung Timur meliputi data yang ada belum terintegrasi, sulit diakses, belum terpadu dan tidak memiliki metadata yang baik, serta seringkali tidak berbasis desa/kecamatan. Kebijakan terkait pengelolaan satu data dan satu peta di Kabupaten Lampung Timur perlu diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

#### 24. Tata Kelola Hukum

Tata kelola hukum yang baik adalah landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di Kabupaten Lampung Timur, tata kelola hukum perlu diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola hukum yang efektif akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, memperkuat supremasi hukum, dan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan reformasi regulasi,

peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum, serta pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan hukum di tingkat daerah.

25. Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang dan Tata Kelola Satu Peta

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang perlu ketersediaan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang eksisting. Saat ini dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur sudah tidak relevan dengan perkembangan wilayah di dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur maupun pada tingkat regional. Selain itu rencana detail tata ruang perkotaan kecamatan sama sekali belum tersedia. Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan dalam peningkatan kemudahan dan kepastian hukum berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang. Kedepan untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian hukum berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang, perda rtrw dan rencana detail tata ruang perkotaan kecamatan perlu segera diwujudkan. Selain itu juga diperlukan penyatuan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta untuk ditetapkan sebagai *one reference, one standard, dan one database*. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa sesuai regulasi yang berlaku. Saat ini, digitalisasi batas desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat rendah. Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting guna menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa di Kabupaten Lampung Timur. Kepastian batas wilayah menjadi penting dalam pembangunan daerah kedepan, terlebih lagi wilayah Kabupaten Lampung Timur selain berupa daratan yang menyatu dengan Pulau Sumatera juga memiliki wilayah berupa pulau-pulau yang terletak di Laut Jawa. Keberadaan pulau-pulau tersebut ditetapkan berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022. Pulau yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi Pulau Batang Besar dengan kode 18.07.40001 dan Pulau Batang Kecil dengan kode 18.07.40002. Kedua pulau tersebut memiliki koordinat 05° 05' 13" LS ; 106° 16' 35" BT untuk Pulau Batang Besar dan koordinat 05° 04' 38" LS ; 106° 16' 42" BT untuk Pulau Batang Kecil. Keberadaan kedua pulau ini sangat strategis bagi Kabupaten Lampung Timur, yaitu memperkuat status sebagai daerah penghasil

migas. Peningkatan pengelolaan dan pencegahan terhadap ancaman abrasi dan tenggelamnya pulau-pulau strategis tersebut merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1  
Keselarasan Isu Strategis Jangka Panjang Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Lampung	Isu Strategis Kabupaten Lampung Timur
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas pendidikan yang masih rendah</li> <li>- Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan</li> <li>- Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa</li> <li>- Kualitas sumber daya manusia</li> <li>- Kemiskinan</li> <li>- Keluarga dan gender</li> <li>- Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 1,33 juta jiwa</li> <li>- Kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial</li> <li>- Kualitas angkatan kerja</li> <li>- Penanggulangan kemiskinan</li> <li>- Penurunan Prevalensi stunting</li> <li>- Keragaman sosial dan budaya sebagai modal pembangunan</li> <li>- Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender</li> <li>- Kepemudaan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat</li> <li>- Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut</li> <li>- Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</li> <li>- Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi biru dan pengembangan potensi sumber daya laut dan pesisir</li> <li>- Produktivitas komoditas unggulan relatif belum berkembang</li> <li>- Peran industri dalam perekonomian daerah masih stagnan</li> <li>- Produktivitas sektor industri (Nilai TFP)</li> <li>- Ekonomi digital, ekonomi syariah dan pariwisata sebagai pendorong ekonomi daerah</li> <li>- Ekonomi sirkular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilirisasi dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi daerah</li> <li>- Produktivitas komoditas unggulan dan strategis</li> <li>- Ekonomi biru dan pengembangan potensi sumber daya laut dan pesisir</li> <li>- Ekonomi digital, ekonomi syariah, dan pariwisata sebagai pendorong ekonomi daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi</li> <li>- Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai</li> <li>- Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran IPTEK dan inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi</li> </ul>

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Lampung	Isu Strategis Kabupaten Lampung Timur
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan</li> <li>- Tantangan pembangunan energi utama</li> <li>- Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</li> <li>- Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi sumber daya alam untuk mendukung kemandirian energi</li> <li>- Lampung wilayah rawan gempa, tsunami dan gunung berapi</li> <li>- Perubahan iklim dan perdagangan karbon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi sumber daya alam untuk mendukung kemandirian energi</li> <li>- Perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</li> <li>- Lampung Timur rawan bencana</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letak geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi kawasan</li> <li>- Pengembangan kewilayahan berdasarkan klaster wilayah</li> <li>- Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang dan Tata Kelola Satu Peta</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah</li> <li>- Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif</li> <li>- Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D</li> <li>- Belum meratanya kualitas pelayanan publik</li> <li>- Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat</li> <li>- Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</li> <li>- Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilitas trantibmas dalam kemajemukan</li> <li>- Pelestarian nilai religi, budaya dan nasionalisme sebagai modal sosial pembangunan</li> <li>- Tata kelola pemerintahan - ASN berintegritas</li> <li>- Tata kelola satu data dan satu peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat</li> <li>- Transformasi tata kelola pemerintahan daerah</li> <li>- Tata Kelola Satu Data</li> </ul>

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Lampung	Isu Strategis Kabupaten Lampung Timur
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya</li> <li>- Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan infrastruktur daerah</li> </ul>

### 3.2.4 Isu Strategis terkait Wilayah Kabupaten/Kota Sekitar

Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kota Metro di sebelah barat. Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah, maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen rancangan RPJPD masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 3.2  
Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota Sekitar

Kota Metro	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Tengah	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Selatan	Keterkaitan
Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas/ aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan perekonomian berbasis agribisnis	Peningkatan hilirisasi sektor pertanian daerah bersinergi dengan keberadaan agroindustri di wilayah Lampung Tengah	Dampak Jalan Tol Trans Sumatera, <i>Bakauheni Harbour City</i> dan Terminal Agribisnis	Kerjasama dan pengembangan wilayah/ kawasan/ kecamatan yang berdekatan dengan pembangunan kawasan strategis nasional dan daerah
Pengembangan literasi pangan (keamanan dan keragaman pangan).	Kota Metro menjadi pangsa pasar potensial bagi produk pertanian dan perikanan Lampung Timur				



**Perda Kab. Lam Tim  
Nomor 08 Tahun 2024  
tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

**BAB IV  
VISI DAN MISI DAERAH**



## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi dengan jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Lampung Timur, yang telah dirangkum dalam tahapan penyusunan, mulai dari Focus Group Discussion, Forum Gabungan Perangkat Daerah, dan Forum Konsultasi Publik pada bulan November dan Desember 2023 yang lalu. Rancangan awal visi dan misi disusun berdasarkan masukan perwakilan masyarakat dan dibahas bersama dalam Forum Konsultasi Publik. Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan 20 tahun kedepan.

#### **4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045**

Visi secara filosofis dapat diartikan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu seluruh stake holder untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan jangka panjang daerah menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai serta memberikan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen stake holder mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi juga merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan atau keinginan yang telah disepakati untuk diwujudkan oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* agar dapat turut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan sebagai bagian dari NKRI, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada visi rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung, yang saat ini dalam penyusunan rancangan akhir.

---

#### **4.1.1 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-20245**

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai :

##### **VISI INDONESIA EMAS 2045**

##### **NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN.**

Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang mengggma di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

Digerakkan oleh kepemimpinan nasional yang transformatif dan inovatif serta masyarakat sipil yang dinamis dan kolaboratif, bangsa Indonesia mencapai kejayaan bersama di masa depan. Di dalam kondisi ideal ini, pemimpin bangsa tampil sebagai panutan, memotivasi warga bangsa untuk menjaga komitmen terhadap visi bersama, serta memprakarsai inovasi dan kreativitas bersama masyarakat. Para pemimpin menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Demikian pula masyarakat tampil mengisi kekosongan pelayanan yang belum tersedia atau melengkapi pelayanan yang sudah disediakan oleh negara, serta melaksanakan kontrol dan advokasi bagi kemajuan bersama secara spesifik, kondisi idela ini meliputi transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan, penerapan *circular, green, dan blue economy*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan ketimpangan, tata kelola yang baik, peningkatan kohesi dan kepercayaan sosial, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai Indonesia yang maju.

Secara umum, visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan

maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

Aspek kualitas manusia juga meningkat pesat. Manusia Indonesia pada 2045 bukan hanya terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, tetapi juga telah memperoleh kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan prima dan inklusif, serta pendidikan yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing global.

Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. Sistem politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif terwujud melalui kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Dua hal di atas menjadi modal penciptaan ekonomi Indonesia yang maju, berketahanan, dan berdaya saing tinggi. Ekonomi Indonesia telah bertansformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam perekonomian global dan motor pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

Kemajuan tersebut ditunjang dengan riset dan pengembangan serta inovasi yang unggul. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi yang disegani dan penghasil kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhirnya, kemajuan dan stabilitas nasional Indonesia akan ditularkan ke tingkat global. Indonesia menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan global. Berbekal politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjelma menjadi agen perdamaian dan stabilitas dunia yang sangat berpengaruh. Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas :

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan

Delapan misi (agenda) pembangunan jangka panjang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpatidipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Keresinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Penyusunan RPJPD Lampung Tahun 2020-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa visi yang dicanangkan harus memiliki kekuatan, menjadi spirit, mencerminkan sikap dan merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional,

nasional hingga global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sejarah telah membuktikan bahwa Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Lampung tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika selama mengisi kemerdekaan tersebut telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Membangun Lampung 2045 juga dikonstruksikan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Lampung sebagai bagian dari NKRI memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Memperhatikan faktor internal : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; daya dukung dan daya tampung lingkungan, capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan lingkup daerah memperhatikan faktor eksternal : tantangan dan isu strategis pembangunan pada lingkup global, arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **VISI LAMPUNG 2025-2045**

#### **“SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN”**

**SEJAHTERA.** Di tahun 2045, Lampung yang SEJAHTERA diarahkan pada kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi ditandai dengan terpenuhinya ketersediaan bahan PANGAN dan SANDANG masyarakat serta akses terhadap perumahan aman dan layak dengan biaya terjangkau. Penduduk terkendali kuantitasnya dan meningkat kualitasnya. Derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan tertib, religius dan bermoral, rukun, harmonis, mengembangkan ekspresi budaya, kesenian, dan olahraga

menjadi prestasi. Kehidupan masyarakat yang kondusif, ditandai dengan tindak kriminal, penyalahgunaan NAPZA, dan kejahatan perdagangan anak dalam kondisi minim. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap, kuat, dan mandiri. Kehidupan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, berlandaskan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

**MAJU (mandiri, dan berdaya saing).** Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan. Pada tahun 2045, tingkat pendapatan penduduk Lampung telah masuk dalam level “High Income” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah pada kisaran 6-7 persen yang didorong dengan peran industri yang semakin meningkat menjadi 28 persen dan kualitas SDM yang unggul dan produktif.

**Maju pada Aspek Sosial dan Budaya;** Kualitas SDM yang kompetitif; Kemiskinan rendah; Pengangguran sedikit; Keluarga memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang cukup; ketimpangan antar kelompok tidak menonjol (tidak begitu tampak). **Maju pada Aspek Ekonomi;** Tingkat kesejahteraan penduduk berada pada level pendapatan menengah atas hingga pendapatan tinggi; Pertanian modern terintegrasi dengan industri; Industri hulu-hilir yang meningkat; Lampung menjadi magnet investasi yang humanis dan ; Masyarakat menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif; Karakter masyarakat yang produktif dan bermental wirausaha; Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah; Produktivitas penduduk (pekerja) yang semakin meningkat; Pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan. **Maju pada Aspek Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kehidupan Demokrasi;** Pemerintahan yang kolaboratif, transparan, modern, efektif dan efisien; Pelayanan publik yang merata dan berkualitas; ASN berintegritas; Penegakan hukum secara adil; Kehidupan masyarakat yang demokratis (kebebasan bertanggungjawab). **Maju pada Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan;** Ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin berkurang; Infrastruktur dasar penduduk yang merata dan berkualitas; Infrastruktur dasar kewilayahan yang handal dan ramah lingkungan; Konektivitas antar wilayah yang handal dan terintegrasi. **Aspek Lingkungan;** Lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman; Sampah/Limbah bernilai ekonomis dan humanis.

**Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan.** Individu dan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia; Keluarga yang sehat, bahagia, tidak terintimidasi; Masyarakat yang Plural menjadi modal sosial yang kuat; Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan positif; Lingkungan yang aman, Tindak Kriminal yang minim; Nasionalisme tidak luntur, patriotic; Keragaman Budaya menjadi kekuatan dan kekayaan

daerah; Pemerintah yang melindungi rakyat; Masyarakat taat hukum, paham tugas dan kewajiban sebagai warganegara.

**MERATA.** Pembangunan yang merata ditujukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang.

Perekonomian daerah diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi dan mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat. Sumber daya yang merupakan hajat hidup rakyat banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan antar penduduk, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah diarahkan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan pengarusutamaan kesetaraan gender serta menyentuh layanan publik bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).

**BERKELANJUTAN (menjamin ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi dan keselarasan pusat-daerah).** Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus di masa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antar pihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran.

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap membutuhkan estafet kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antar jenjang pemerintahan dan antargenerasi. Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga tercermin pada 5 (lima) Sasaran Visi, yaitu :

- 1) Pendapatan per Kapita penduduk Provinsi Lampung masuk pada level High Income, pada kisaran Rp. 328-384 juta (21.867 – 25.600 US Dollar), dengan kontribusi sektor

Industri dalam PDRB sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 65,16.

- 2) Pengentasan Kemiskinan akan terus ditekan pada kisaran 0,5-1,0 persen; dan tingkat Ketimpangan yang rendah pada angka Indeks Gini di level 0,256-0,266 dan kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,50 persen; serta persentase Desa Mandiri 13,0-15,3 persen
- 3) Daya Saing Daerah di level nasional mencapai 4,0
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat, tercermin dari nilai Indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68–0,70 dan IPM berkisar 79-80.
- 5) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 93,17 persen.

#### **4.1.3 Tinjauan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025**

Visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lampung Timur termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menggambarkan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh seluruh stake holder hingga tahun 2025, ditetapkan visi jangka panjang sebagai berikut:

#### **“LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA BERDAYA SAING, RELIGIUS, DAN BERKELANJUTAN”**

Visi pembangunan jangka panjang tersebut memiliki penjelasan arti yang meliputi beberapa kata kunci, yaitu

##### **1. Sejahtera**

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dilihat dari perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan civilization (politik dan hukum) yang maju dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat umumnya ditandai dengan : jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan sosial baik.

Masyarakat sejahtera terjamin haknya dan memiliki kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang lain. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari

luar negeri. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya dengan memanfaatkan keunggulan secara optimal. Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Selain swasembada, kemakmuran akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Perekonomian di Lampung Timur didukung oleh sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis ekonomi yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Lampung Timur adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan terendah, dan jumlah tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Tingkat kesehatan tinggi dan merata dilihat dari derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi. Masyarakat Lampung Timur yang sejahtera adalah masyarakat yang civilized, yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, bebas berpendapat, beretika, disiplin, tertib, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

## 2. Berdaya Saing

Unsur kedua dalam Visi Lampung Timur adalah Berdaya Saing. Daya artinya “kemampuan, dan atau kekuatan”. Jadi berdaya saing adalah suatu kemampuan yang dimiliki berdasarkan kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Daya saing ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya operasional usaha sehingga usaha menjadi lebih efisien dan kompetitif. Sedangkan pemanfaatan teknologi akan mempermudah proses produksi, sehingga akan mampu dihasilkan produk berkualitas baik dengan harga kompetitif, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh pasar. Sementara itu SDM akan sangat menentukan daya saing daerah melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dengan skill tinggi. Sedangkan kualitas birokrasi visioner akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Religius

Unsur ketiga yang terkandung dalam Visi Lampung Timur adalah Religius. Religius memiliki kata dasar religi, religi berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Dasar atau landasan kehidupan religius adalah iman dan takwa. Negara kesatuan yang berbentuk republik ini telah cukup dikenal sebagai masyarakat religius walaupun seiring itu moralnya masih perlu dibangun dalam kesadaran tinggi kaitannya sebagai makhluk beragama (Human religious). Sebab masih dijumpai kemerosotan moral dalam beberapa aspek kehidupan yang berakibat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam segala aspek kehidupan di Lampung Timur secara tegas berazaskan Pancasila terutama sila pertama yang merupakan soal terpenting dalam kehidupan manusia; yakni rasa Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai dari sila ini begitu jelas menggambarkan adanya hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan. Artinya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur seyogyanya selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Inilah maksud dan kandungan dari sila pertama Pancasila yang secara verbal menerangkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur itu pasti beragama dalam arti Berketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya segala tindakan-tindakan masyarakat Lampung Timur seyogyanya mengindahkan nilai etika religiusitas yang terkandung dalam agama masing-masing yang telah dijembatani oleh sila pertama itu, apakah masyarakat itu beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Aliran kepercayaan dan lain-lain karena semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan.

### 4. Berkelanjutan

Unsur keempat dari Visi Lampung Timur adalah Berkelanjutan. Berkelanjutan di sini dimaksudkan bahwa pembangunan Lampung Timur bersifat pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada KTT Dunia tahun 2005 menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari

jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Tetapi perlu diingat bahwa konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya alam itu sendiri terbatas yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan (2005-2025), sesuai dengan potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta didukung oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen, maka misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, sasaran pembangunan, dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan sosial antarmasyarakat. Pengurangan kesenjangan sosial diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata serta kesempatan kerja yang sama sehingga dapat mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian akses yang adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan upaya membangun, mengembangkan dan memperkuat perekonomian Lampung Timur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.

Ekonomi berbasis agro terus dipertahankan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi yang berdaya saing.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Misi ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang melalui transparansi pemerintahan yang didukung oleh akuntabilitas dan profesionalitas personil serta efisiensi dan efektifitas kelembagaan. Melalui dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang sinergis, terpadu, dan harmonis sehingga berdampak pada peningkatan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara otonom.

3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan prasarana dan sarana daerah melingkupi transportasi, pengairan, energi listrik, dan telekomunikasi. Perwujudan misi ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi upaya perwujudan daya saing Kabupaten Lampung Timur khususnya dan serta daya saing Provinsi Lampung dan nasional pada umumnya melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pendidikan berkualitas disemua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang adil, bersih dan berwibawa serta didukung oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dan sebagai bagian dari perwujudan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

6. Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Misi ini merupakan upaya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama disemua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya.

7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasis pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam (lahan, air, hutan, dan mineral) secara keberlanjutan sehingga seluruh aktivitas pembangunan tidak berdampak negatif pada kelestarian dan keasrian lingkungan hidup. Salah satu bentuk perwujudan menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu Pengembangan hutan mangrove di sepanjang pantai timur di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, merupakan desa pesisir pantai dalam kondisi baik kurang lebih 20 km yang sebelumnya Lampung Timur telah memiliki Hutan Mangrove di

Pantai Timur sepanjang kurang lebih 45 km. Destruktivitas lingkungan pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas lingkungan yang tidak sehat dan dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan misi ini akan sangat tergantung dari komitmen politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat serta peran serta seluruh masyarakat yang ada sehingga keterpaduan seluruh sektor merupakan prasyarat bagi lingkungan yang asri dan lestari.

#### **4.1.4 Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045**

Terwujudnya masyarakat Lampung Timur yang sejahtera, berdaya saing, religius, dan berkelanjutan adalah visi RPJPD 2005-2025. Upaya pencapaian visi tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dipimpin oleh para kepala daerah terdahulu. Secara tersurat dokumen RPJPD terdahulu tidak mencantumkan target indikator kinerja akhir periode, sehingga sulit dilakukan penilaian terhadap pencapaian visi. Meskipun begitu, capaian visi RPJPD tersebut dapat dilihat dari perkembangan realisasi indikator yang terkait dengan narasi visi RPJPD pada saat ini. Masyarakat Lampung Timur yang sejahtera dapat dilihat salah satunya dari perkembangan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita pada tahun penyusunan RPJPD tahun 2005 sebesar Rp.3,1 juta per kapita per tahun, dan saat ini di tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur telah mencapai Rp.46,28 juta per kapita per tahun. Kenaikan signifikan indikator tersebut, mengindikasikan bahwa masyarakat Lampung Timur lebih sejahtera dibandingkan dua dekade yang lalu.

Selanjutnya, terkait dengan indikator berikutnya yaitu daya saing daerah yang salah satunya tercermin dari capaian indikator tingkat kemantapan jalan. Pada tahun 2005, tingkat kemantapan jalan kewenangan kabupaten mencapai 53,8%. Pada tahun 2023 tingkat kemantapan jalan kewenangan kabupaten sebesar 49,17%, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yang lalu. Perkembangan tingkat kemantapan jalan tersebut mengindikasikan bahwa daya saing daerah khususnya bidang infrastruktur belum terwujud secara optimal.

Terkait dengan indikator religius, yang salah satunya secara kualitatif dapat tercermin dari implementasi ajaran agama dan kerukunan antar pemeluk agama, diperoleh data bahwa kurun waktu dua dekade ini implementasi ajaran agama dan kerukunan antar pemeluk agama senantiasa meningkat dan terjaga. Tidak adanya konflik antar agama dan suku di wilayah Kabupaten Lampung Timur mengindikasikan bahwa toleransi dan kerukunan antar pemeluk agama dua dekade ini semakin baik.

Lebih lanjut, terkait dengan indikator berikutnya yaitu berkelanjutan, yang dapat tercermin dari indikator tingkat kelestarian alam dan lingkungan hidup. Secara kualitatif

dapat dilihat dari terjaganya kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Terus meningkatnya produktivitas dan produksi komoditas pertanian dan perikanan mengindikasikan bahwa pembangunan daerah dua dekade ini telah berhasil mewujudkan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam visi RPJPD 2005-2025. Lampung Timur secara produktivitas ekonomi memperoleh nilai positif namun jumlah penduduk yang terus meningkat serta produktivitas yang semakin besar kerap menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yaitu timbunan sampah, berdasarkan data timbunan sampah di tahun 2022 mencapai 195.770,31 ton dengan keberhasilan sampah yang ditangani sebanyak 27.292,44 ton atau 13,94% dan pada tahun 2045 berdasarkan proyeksi timbunan sampah mencapai 212.630,5 ton/tahun. Berdasarkan data tersebut Lampung Timur perlu membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan karena sampah merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi.

Pencapaian visi tersebut, menjadi salah satu refleksi dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2045. Secara regulasi perumusan visi RPJPD 2025-2045 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut, selain mengacu RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung, perumusan visi pembangunan jangka panjang daerah juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 yang mengamanatkan untuk mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata. Merujuk tujuan penataan ruang tersebut, dalam pengembangan wilayah kedepan diarahkan untuk terwujudnya :



Arah pengembangan wilayah ***“Lampung Timur Bumi Agribisnis”*** mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah kedepan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang merupakan sektor basis perekonomian dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Penciptaan nilai tambah (*value added*) dari komoditas pertanian dan perikanan diyakini akan memberikan *multiplier*

effect bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah, baik kedepan maupun kedepan (*forward and backward linkage*). Nilai tambah sektor pertanian dan perikanan akan memberikan pengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja dan sekaligus perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk berbagai substansi dokumen perencanaan dan tata ruang wilayah tersebut di atas, kerangka pikir perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 ditampilkan pada gambar di bawah ini:



Sasaran pembangunan daerah yang terdiri dari 5 sasaran utama secara utuh mencerminkan masyarakat Lampung Timur yang senantiasa menjunjung dan mengamalkan Pancasila. Selain itu sasaran utama juga merujuk pada tujuan otonomi daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, misi terdiri dari 8 (delapan) agenda pembangunan daerah, 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan daerah mengadopsi

tanggal, bulan, dan tahun Indonesia Merdeka. Pada tahun 2045, Indonesia akan tepat 100 tahun dan Kabupaten Lampung Timur akan menginjak usia 46 tahun, sebuah usia yang sangat matang bagi pencapaian kemajuan suatu daerah.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Disamping itu, visi yang dicanangkan harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai, dapat mendorong tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai berikut:



Visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut merupakan cita-cita dan inspirasi bagi seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat Lampung Timur yang sangat beragam merupakan salah satu modal dasar pembangunan daerah jangka panjang kedepan. Pembangunan daerah akan dapat mencapai tujuan apabila dilaksanakan dengan semangat kolaborasi dan sinergi seluruh insan masyarakat tanpa terkecuali. Kolaborasi dan sinergi seluruh insan masyarakat akan mampu mendorong terwujudnya visi Lampung Timur Sejahtera 2025-2045, sebagaimana seloka ***Bumei Tuwah Bepadan***, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang akan selalu memberikan kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah dan mufakat. Melalui sinergitas akan dapat diwujudkan cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi semangat kolaborasi, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Membangun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan adalah cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Visi Lampung

*Perda RPJPD Kab. Lam Tim 2025-2045*

Timur Sejahtera 2045 merupakan cita-cita yang selalu berada di sanubari dan relung hati seluruh masyarakat Lampung Timur. Secara spesifik, kondisi sejahtera yang dicita-citakan masyarakat secara ideal meliputi pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan ketimpangan dan tingkat kemiskinan, desa semakin mandiri, daya saing sumber daya manusia dan daerah semakin unggul, transformasi ekonomi daerah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis inovasi, tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang semakin profesional, serta lingkungan hidup yang senantiasa lestari dan berkelanjutan untuk menopang kehidupan anak cucu mendatang.

Secara umum, Visi Lampung Timur Sejahtera 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, tata kelola, dan ketahanan sosial budaya serta ketahanan ekologi. Dalam aspek sosial, masyarakat Lampung Timur yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang religius, sehat, cerdas, dan terlindungi. Masyarakat yang religius tercermin dari semakin meningkatnya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan antar umat beragama semakin baik, toleransi tinggi dan senantiasa mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan dengan Sang Khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Masyarakat yang sehat tercermin dari angka harapan hidup semakin tinggi, turunnya angka kematian ibu dan bayi, dan prevalensi stunting semakin menurun, dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat semakin paripurna. Masyarakat yang cerdas tercermin dari tingginya literasi membaca dan numerasi, terpenuhinya wajib belajar 13 tahun, dan semakin tingginya proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Masyarakat yang terlindungi tercermin dari rendahnya tingkat kemiskinan, meningkatnya persentase penyandang disabilitas bekerja, serta terwujudnya jaminan kesejahteraan ketenagakerjaan kabupaten.

Pada aspek ekonomi, potensi dan kekayaan sumber daya alam dimiliki dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui penerapan iptek dan teknologi, penerapan ekonomi hijau, serta terciptanya integrasi ekonomi ditunjang perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah tercermin dari semakin meningkatnya peranan sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian daerah, meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditunjang produktivitas UMKM, koperasi dan BUMD. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi skala lokal yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kawasan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Lebih lanjut, pada aspek tata kelola, dengan seluruh sumber daya dan instrumen yang dimiliki, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan standar pelayanan yang tinggi kepada masyarakat. Masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengakses seluruh kebutuhan layanan publik dan pembangunan daerah, ditopang oleh manajemen

ASN yang profesional dan regulasi daerah berkualitas. Iklim demokrasi semakin baik dan partisipasi politik masyarakat semakin tinggi dalam bingkai Pancasila dan semangat gotong royong dan toleransi.

Pada aspek ketahanan sosial budaya dan ekologi, kekayaan sosial budaya masyarakat menjadi modal dasar dalam perwujudan masyarakat yang senantiasa merasa hidup tenteram dan tertib ditengah stabilitas daerah yang kondusif dan berkelanjutan. Masyarakat senantiasa terlindungi dari ancaman tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba semakin menurun, dan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Kondisi ini menciptakan wilayah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang sangat baik yang merupakan faktor penting peningkatan daya saing daerah. Daya saing daerah yang tinggi akan semakin baik dengan penciptaan lingkungan hidup yang berkualitas, ditunjang ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

**RELIGIUS (Masyarakat yang agamis, harmonis, dan aman).** Pada tahun 2045, masyarakat Lampung Timur semakin religius, masyarakat memiliki sikap yang semakin kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, setia dan komitmen terhadap perintah dan larangan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, aktif dalam kegiatan agama, mempergunakan pendekatan agama dalam penentuan pilihan dan pengembangan ide. Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur. Kehidupan masyarakat bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi. Seluruh kemajuan di masyarakat tahun 2045 dipastikan tetap dalam bingkai nilai-nilai mulia ajaran agama.

**Agamis :** Sebagai daerah dengan jumlah pondok pesantren terbesar di Provinsi Lampung, 201 Pondok Pesantren (data Kemenag RI, 2023), Kabupaten Lampung Timur memiliki modal yang sangat besar dalam pembinaan keagamaan khususnya nilai-nilai ke-Islam-an, sebagai *rahmatan lil alamin*. Rahmat bagi semesta alam. Aktualisasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, diyakini akan mampu mengarahkan kehidupan Gen Y dan Z di masa depan yang cenderung menuju pola hidup konsumtif dan sikap individualistik. Gen Y dan Z kedepan akan memasuki kehidupan modern yang seringkali kurang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut saat ini, nilai-nilai agama akan menjadi pegangan *the way of life* kehidupan masyarakat kedepan.

**Harmonis :** Kehidupan masyarakat di Lampung Timur yang memegang teguh ajaran agama dan menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal, mampu meningkatkan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Keselarasan tata hubungan

masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

**Aman** : Implementasi ajaran agama dan norma adat istiadat diharapkan akan mendorong rasa toleransi, guyub dan rukun di masyarakat, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman. Masyarakat Lampung Timur yang religius selalu berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, adil, aman, dan damai. Dalam konteks ini, kehidupan masyarakat Lampung Timur yang religius, yang memegang teguh nilai spiritual keagamaan sangat kuat mendorong umat untuk mewujudkan daerah Lampung Timur yang aman dan damai. Kabupaten Lampung Timur mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat di segala aspek kehidupan, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

**MAJU (Masyarakat yang Sejahtera, Modern, Produktif, Inovatif)**. Pada tahun 2045, Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah maju di Provinsi Lampung, perekonomiannya mencapai posisi dua terbesar. Sinergi dengan daerah lainnya, Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah yang sejahtera, modern, produktif, dan inovatif sehingga tidak hanya memiliki keunggulan komparatif namun juga memiliki keunggulan kompetitif di wilayah Sumatera dan Nasional, ditunjang dengan ketahanan ekonomi dan pangan daerah.

**Sejahtera** : Masyarakat Lampung Timur adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, senantiasa merasa tenteram, selamat sentosa, dan senang, Masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan.

**Modern** : Masyarakat Lampung Timur mampu bertransformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Masyarakat Lampung Timur yang selama ini menguasai sumber daya alam menjadi mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi melalui inovasi dan kreativitas.

**Produktif** : Jumlah penduduk yang besar, terbesar ketiga di Provinsi Lampung, memberikan peluang dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Meningkatnya sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur akan menjadi potensi pembangunan yang besar. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar.

**Inovatif :** Kabupaten Lampung Timur memiliki sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi.

**MANDIRI (Ketahanan, Unggul, dan Berdaya Saing).** Pada tahun 2045 Kabupaten Lampung Timur adalah daerah yang memiliki kemandirian, untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dengan mengoptimalkan berbagai potensi, termasuk peningkatan kemandirian fiskal. Pendapatan asli daerah meningkat seiring dengan transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola pelayanan publik. Kemandirian daerah menjadi faktor kunci tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah serta cerminan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

**Ketahanan :** Kabupaten Lampung Timur semakin kuat dalam berbagai aspek, khususnya ekonomi, sosial, politik, ketentraman dan ketertiban daerah. Ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

**Unggul :** Tahun 2045 Kabupaten Lampung Timur adalah daerah yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif. Keunggulan tersebut akan diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan diarahkan melalui pengembangan kawasan dan komoditas unggulan daerah.

**Berdaya Saing :** Kabupaten Lampung Timur di tahun 2045 memiliki daya saing yang tinggi. Kabupaten Lampung Timur mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian daya saing yang tinggi tersebut didukung oleh kemampuan penguasaan iptekin, infrastruktur yang mantap dan iklim berinvestasi yang baik.

**BERKELANJUTAN (Merata, Lestari, Berkeadilan).** Pada tahun 2045, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Timur tetap lestari dan tetap mampu menjamin peningkatan produktivitas budidaya pertanian dan perikanan masyarakat. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah seimbang dengan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas udara, air, dan lahan terus terjaga dengan baik, seiring dengan pencegahan dan penanggulangan bencana.

**Merata :** Kemajuan pembangunan daerah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kesenjangan antar wilayah semakin mengecil. Sedangkan sinergi dan keterkaitan ekonomi antar kawasan dapat berjalan dengan baik dan memberikan *multiplier effect* bagi perkembangan ekonomi daerah.

**Lestari :** Komitmen pemerintah daerah melaksanakan pembangunan berkelanjutan menciptakan daerah yang lestari. Lingkungan terbangun dan alami, keunikan budidaya,

intelektual, sumber daya air, dan kekhasan serta budayanya terjaga dengan baik dan menjadi daya tarik. Pembangunan daerah terbukti tidak merusak dan meninggalkan beban pada generasi selanjutnya.

**Berkeadilan :** Masyarakat Lampung Timur menikmati keadilan dan merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama dalam kesempatan bekerja dan pendidikan. Masyarakat Lampung Timur menikmati kehidupan sejahtera dengan lingkungan yang aman.

Untuk mempertegas ukuran keberhasilan dari visi Kabupaten Lampung Timur 2045, lima sasaran visi pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Sasaran Utama Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur  
Tahun 2025-2045

No.	Sasaran/Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
<b>A. PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA</b>							
1	Pendapatan Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)	46,3	47,1	58,7	117,78	187,4	270,1
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,51	4,24	4,11	4,85	5,34	5,5
3	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	N/A	23,43	40	50	60	65,16
4	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB (%)	8,19	8,25	9,18	11,79	15,59	22,46
<b>B. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN</b>							
1	Tingkat Kemiskinan (%)	13,8	12,97	10,10	7,24	4,37	1,50
2	Rasio Gini	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
3	Kontribusi PDRB Lampung Timur terhadap PDRB Provinsi (%)	11,71	11,72	11,81	11,88	11,93	12
4	Persentase Desa Mandiri (%)	4,92	3,03	3,79	10,23	13,64	18,56
<b>C. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH</b>							
1	Indeks Daya Saing Daerah (BRIN)	2,62	3,10	3,17	3,54	3,79	4,00
<b>D. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA</b>							
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,44	73,60	75,00	77,00	78,90	80,00
2	Indeks Modal Manusia	0,52	0,53	0,56	0,6	0,64	0,68
<b>E. PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISSION</b>							
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen)	N/A	128.832,38	181.033,13	282.221,03	443.566,64	762.632,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,73	68,81	69,82	71,08	72,34	73,86

Untuk mewujudkan sasaran pokok visi tersebut, disusun misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, ditetapkan jumlah misi adalah sebanyak 8 (delapan) misi.

#### **4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045**

Proyeksi jumlah penduduk yang akan mencapai 1,3 juta jiwa di Tahun 2045, menggambarkan betapa besarnya potensi dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Lampung Timur dalam mensejahterakan masyarakatnya. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Jumlah penduduk yang besar menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan pekerjaan yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Sebaliknya, apabila Kabupaten Lampung Timur gagal mengembangkan jumlah penduduk besar menjadi sumber daya manusia produktif, maka penduduk tersebut akan menjadi beban pembangunan yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Lampung Timur memiliki modal sosial budaya yang merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat yang unggul dan produktif. Falsafah yang mengedepankan harga diri dalam berperilaku untuk menegakkan nama baik, falsafah untuk mengedepankan kemurahan hati dan ramah tamah, falsafah untuk selalu hidup tolong menolong, bergorong royong, falsafah untuk mengutamakan sikap kekeluargaan dan persahabatan, serta falsafah untuk selalu bekerja keras meraih cita-citanya, akan menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial dan pencapaian tujuan pembangunan daerah kedepan.

Terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 sangat mempengaruhi proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun kedepan. Saat ini ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta ketegangan di Timur Tengah memberikan dampak ancaman krisis pangan dan energi secara global, yang secara tidak langsung akan

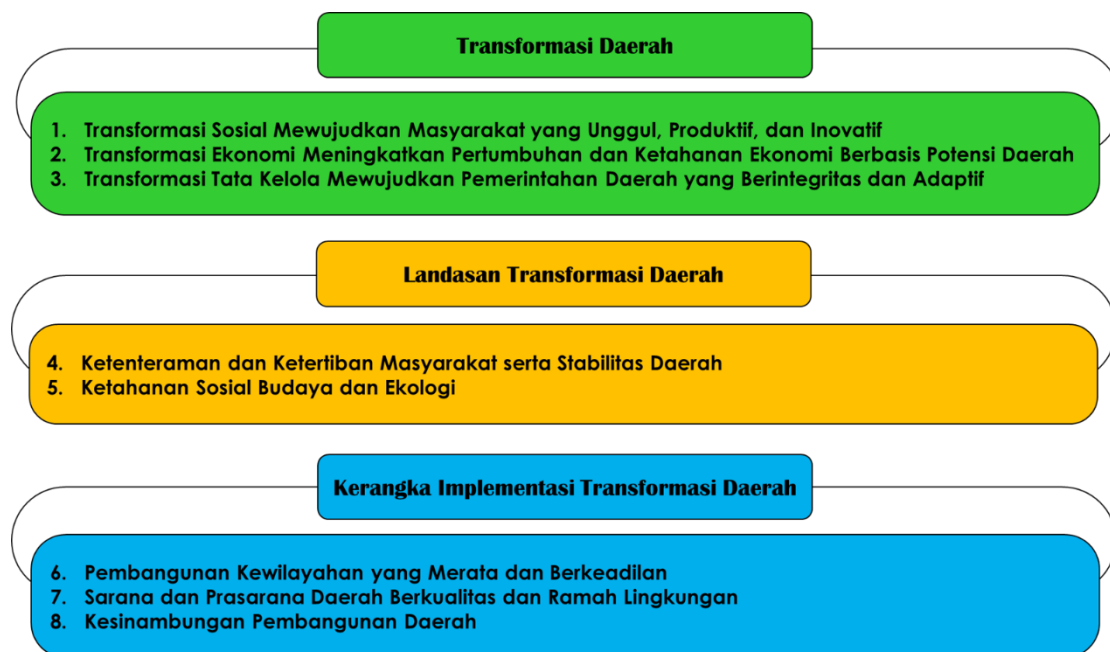
memberikan dampak terhadap pembangunan daerah kedepan. Perekonomian daerah yang saat ini mulai tumbuh, namun masih terendah di Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian daerah berada dalam fase yang kritis. Kondisi tersebut semakin ditekan oleh semakin ekstremnya kondisi iklim dan cuaca yang sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan perikanan masyarakat.

Lampung Timur kedepan masih menghadapi tantangan pembangunan daerah yang senantiasa perlu untuk segera diatasi. Tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang terbatas, serta masih belum optimalnya pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ditengah keinginan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, sebagian masyarakat menghadapi ancaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, perilaku menyimpang, terorisme dan radikalisme, serta tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga perilaku kriminalitas. Semua pekerjaan rumah tersebut perlu tetap menjadi perhatian dan perlu ditangani secara serius melalui kebijakan pembangunan daerah yang berimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan modal sosial akan sangat berpengaruh terhadap cita-cita pembangunan daerah yang diharapkan.

Selain itu, kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori 'kode merah bagi manusia'. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer, yang mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Lampung Timur memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan, pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Untuk mencapai visi Lampung Timur Sejahtera 2045, pembangunan Kabupaten Lampung Timur kedepan harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, dan visi Provinsi Lampung, langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan berlandaskan kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan. Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Lampung 2025-2045, dan dalam rangka mewujudkan Lampung Timur Sejahtera 2045, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang daerah atau disebut dengan **WALEU MISEI** yang terdiri dari:

Gambar 4.2  
Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045



Delapan misi (agenda) pembangunan daerah tersebut terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi pembangunan jangka panjang daerah. Transformasi penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana transformasi nasional, transformasi Kabupaten Lampung Timur adalah transformasi menyeluruh yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

Ketiga transformasi tersebut adalah kunci penting pembangunan jangka panjang, dimana ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Landasan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah menciptakan lingkungan aman dan daya saing daerah sedangkan stabilitas ekonomi daerah mendukung kesejahteraan masyarakat. Jika ketiga aspek ini terwujud, daerah akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Selanjutnya, ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi diperlukan, dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersumber dari kekayaan alam dan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, penjabaran masing-masing misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

### **1. Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif**

Visi pembangunan jangka panjang daerah dapat diwujudkan oleh adanya sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan inovatif. Sumber daya manusia yang dibangun selama dua dekade di Kabupaten Lampung Timur telah mencatat kemajuan, namun pembangunan daerah sektor sumber daya manusia dua puluh tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar khususnya di sektor sosial yang menuntut adanya transformasi mendasar. Beberapa perubahan besar sektor sosial tersebut adalah adanya potensi perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan kemajuan budaya. Perubahan besar tersebut tidak dapat dihadapi dengan pendekatan pembangunan daerah yang digunakan di masa lalu (*business as usual*), diperlukan upaya transformasi menyeluruh di sektor sosial masyarakat. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan besar kedepan sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Misi ini bertujuan di tengah tantangan global pada tahun 2045 sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur mampu bertransformasi menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa, masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan jiwa dan raga yang tinggi, serta terlindungi dari risiko kerentanan di sepanjang siklus hidupnya.

Misi membangun masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif tersebut dilaksanakan secara bersamaan dan holistik agar masyarakat mampu menjadi pendorong utama pembangunan daerah dan *survive* menghadapi tantangan global kedepan yang semakin kompleks dan bergerak sangat cepat. Kedepan Kabupaten Lampung Timur mempunyai kesempatan yang sangat terbuka untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai pendorong utama pembangunan daerah, jika transformasi sosial berhasil dilaksanakan

Sasaran pokok dalam pencapaian misi ini meliputi peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, layanan pendidikan berkualitas dan merata, serta layanan sosial masyarakat yang adaptif.

Membangun masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif tidak dapat dipisahkan dari peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat, yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk Lampung Timur dapat hidup panjang dan sehat. Mencakup semua lapisan penduduk pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Peningkatan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan di daerah, salah satunya dilaksanakan

dengan pengembangan rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Jumlah penduduk yang mencapai 1,3 juta jiwa di tahun 2045 memerlukan rumah sakit daerah yang mampu melayani dengan kualitas terbaik. Rumah sakit unggulan daerah yang mampu melayani seluruh kebutuhan layanan kesehatan dan penyakit masyarakat. Peningkatan ini dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan fasilitas rumah sakit di seluruh kecamatan.

Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas tersebut didukung oleh perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan. Tenaga medis dan kesehatan tersebut akan menjadi ujung tombak penanganan permasalahan di bidang kesehatan yang masih perlu mendapatkan perhatian kedepan, yaitu percepatan penurunan stunting, peningkatan imunisasi dasar lengkap, penurunan AKI dan AKB, serta eliminasi BABS. Untuk mempercepat penanganan permasalahan kesehatan tersebut, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta akurasi data ditingkatkan melalui pemberdayaan kader PKK, posyandu, bidan desa, dan puskesmas, termasuk pengembangan pembiayaan dan *sharing* program lintas sektor.

Pada tahun 2045, diproyeksikan Lampung Timur akan mengalami *aging population* atau bertambahnya penduduk usia tua. Kondisi ini akan mulai terjadi pada tahun 2040. Meningkatnya jumlah penduduk berusia tua akan meningkatkan munculnya resiko penyakit degeneratif, seperti hipertensi, kanker, diabetes, parkinson, dan lain sebagainya yang diderita oleh para lansia. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap para manula, pemerintah daerah terus meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat dan upaya promosi kesehatan preventif bagi masyarakat secara berkala. Upaya promosi kesehatan dan preventif tersebut mencakup deteksi dini, vaksinasi, pemenuhan gizi, dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Masyarakat Lampung Timur yang unggul, produktif, dan inovatif selain memiliki kesehatan yang baik, juga perlu didukung kecerdasan yang tinggi. Upaya peningkatan kecerdasan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Layanan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diarahkan untuk mencapai wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun di PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Pembangunan sektor pendidikan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana sekolah menengah secara merata di seluruh desa atau kecamatan, sehingga akses masyarakat semakin mudah. Akses pendidikan yang semakin mudah dan merata kedepan harus dapat dinikmati oleh keluarga miskin. Melalui pendidikan yang baik, setiap warga masyarakat memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi atau marginalisasi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan formal, sektor pendidikan

non formal juga perlu terus didorong melalui pemberdayaan lembaga-lembaga pelatihan non formal. Tujuan dari pola pembelajaran ini adalah 0 persen buta huruf di Kabupaten Lampung Timur. Penuntasan buta huruf tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan APK dan APM perguruan tinggi yang masih dibawah 20 persen.

Layanan pendidikan formal dan non formal tersebut dapat ditingkatkan melalui implementasi TIK sehingga kualitas dan cakupannya semakin besar. Kedepan, sejalan dengan perkembangan digital yang semakin masif dan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, penguatan sektor pendidikan melalui pembelajaran materi kewirausahaan, digitalisasi, dan vokasi berbasis potensi lokal menjadi salah satu inovasi di sektor pendidikan. Banyaknya angkatan kerja yang bekerja di sektor informal mengindikasikan bahwa masih rendahnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja di Lampung Timur. Kedepan dalam pembelajaran formal dan non formal, para pelajar sejak dini harus dididik muatan vokasi dan kewirausahaan agar mampu mengetahui dan memahami berbagai cara untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang banyak tersedia di sekitar mereka. Sekolah menengah kejuruan saat ini belum tersedia merata di di setiap kecamatan, kedepan setiap kecamatan akan memiliki sekolah menengah kejuruan. Tersedianya sekolah kejuruan di setiap kecamatan akan meningkatkan akses pendidikan keterampilan bagi masyarakat usia angkatan kerja. Ketersediaan pendidikan menengah kejuruan di setiap kecamatan merupakan salah satu opsi peningkatan akses pengetahuan dan keterampilan para siswa melalui jalur formal di daerah.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para siswa melalui jalur formal tersebut, akan didorong dengan pengembangan perguruan tinggi swasta di beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Labuhan Maringgai. Selain itu, juga dibuka kemungkinan pembukaan kelas jauh dari perguruan tinggi negeri. Keberadaan perguruan tinggi tersebut akan meningkatkan akses pendidikan tinggi, yang saat ini baru angka partisipasi murni perguruan tinggi baru mencapai 11,21 persen. Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mendorong upaya mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur, perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), dan vokasi yang berkualitas berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global untuk meningkatkan proporsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi, termasuk juga peningkatan kemampuan berbahasa asing.

Membangun sumber daya manusia yang cerdas dan sehat tersebut tidak berarti di daerah akan bebas dari ancaman atau risiko kerentanan sosial, seperti kemiskinan, bencana alam, bencana sosial, gangguan penghidupan, kehilangan, kematian, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk miskin yang besar di Kabupaten Lampung Timur

menuntut pemerintah daerah hadir melalui upaya penguatan perlindungan sosial, yang akan mempercepat penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Strategi menuntaskan kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala, 1981 terbagi menjadi dua pendekatan, yang pertama adalah strategi jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya; yang kedua, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Kedua pendekatan ini dilaksanakan secara bersamaan, dalam jangka pendek bantuan sosial, peningkatan akses kesehatan, dan layanan dasar permukiman serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Untuk jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan formal maupun non formal bagi anak termasuk pelatihan vokasi. Salah satu problem besar pelaksanaan program penuntasan kemiskinan adalah kurangnya sinergi program lintas sektor. Masalah kemiskinan adalah masalah masyarakat yang multidimensi dan memerlukan penanganan secara sinergi sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Selain itu, program penuntasan kemiskinan memerlukan data yang akurat, untuk menjadi salah satu pertimbangan pengambil kebijakan, sehingga dapat berhasil dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah, membandingkan kemiskinan antarwaktu, serta menentukan target penuntasan dan besarnya perlindungan sosial yang akan diintervensi kepada masyarakat miskin.

Terkait dengan penguatan perlindungan sosial, sesuai kewenangan pemerintah daerah, penguatan perlindungan sosial masyarakat difokuskan pada upaya pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tidak kekerasan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial. Salah satu persoalan dalam perlindungan sosial di Kabupaten Lampung Timur adalah banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal, seringkali perlindungan sosial terbatas hanya pada program asuransi sosial dan hanya tersedia bagi masyarakat yang memiliki kontrak kerja di sektor formal, sehingga bagi sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor informal tidak memiliki akses perlindungan sosial, khususnya para penyandang disabilitas. Sangat penting untuk memastikan kedepan perlindungan sosial dapat melayani pekerja informal dan penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan perlindungan sosial masyarakat secara meluas didukung oleh inovasi pembiayaan layanan sosial, dan peningkatan layanan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

## **2. Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah**

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Lampung Timur yang tinggi terhadap sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian telah berlangsung selama dua dekade lebih. Kontribusi dua sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2023 mencapai lebih dari 50 persen. Struktur ekonomi daerah Kabupaten Lampung Timur masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah yang rendah dimana sebagian besar tenaga kerja juga berada pada sektor primer yang memiliki produktivitas rendah. Apalagi sektor primer sangat rentan terhadap gejolak harga pasar internasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengindikasikan bahwa sektor sekunder perlu didorong untuk lebih berkembang kedepan. Masyarakat perlu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihasilkan agar tercipta produktivitas yang tinggi. Produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mewujudkan Lampung Timur keluar dari jebakan *middle income trap*.

Kedepan sektor primer tetap menjadi pondasi ekonomi daerah, karena mata pencaharian penduduk Lampung Timur sebagian besar di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan jangka panjang adalah melaksanakan transformasi ekonomi secara bertahap untuk mengubah struktur ekonomi daerah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Industri pengolahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global.

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi daerah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Industri yang dikembangkan tidak hanya skala besar namun termasuk industri mikro kecil dan rumah tangga. Pengembangan industri mikro kecil dan rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur dirasa cukup rasional dikembangkan dalam waktu dekat, karena hanya memerlukan teknologi yang sederhana, yang kemungkinan besar dapat dilakukan oleh angkatan kerja di Lampung Timur yang relatif kurang terampil dan banyak bergerak di sektor informal.

Kedepan, secara jangka panjang perekonomian diarahkan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dan dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan dengan keterampilan rendah (*prespiration*) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, modernisasi, dan digitalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Luas lahan pertanian yang mencapai lebih dari 50 ribu hektar merupakan modal bagi peningkatan produktivitas di sektor pertanian

khususnya pertanian tanaman pangan. Peningkatan produktivitas tersebut perlu didorong oleh kualitas SDM yang memadai. Rendahnya minat generasi muda untuk berkecimpung di sektor pertanian merupakan tantangan yang perlu diatasi. Modernisasi dan digitalisasi pertanian serta penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi diyakini akan menarik generasi muda untuk berkecimpung di sektor pertanian. Petani milenial yang kaya akan ide dan energi akan mampu untuk mengimplementasikan pertanian sirkular. Sistem pertanian terintegrasi ternak-tanaman tersebut akan semakin mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Selain sektor pertanian tanaman pangan tersebut, sektor perkebunan yang juga merupakan sektor unggulan daerah sangat potensial untuk dikembangkan. Penurunan produksi komoditas kakao, kelapa, dan lada akibat serangan hama diarahkan untuk direvitalisasi kembali, khususnya komoditas lada yang merupakan komoditas strategis Lampung Timur, melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar. Lokasi Kabupaten Lampung Timur yang relatif strategis sebagai penyangga pangan Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan DKI Jakarta, memberikan peluang besar bagi peningkatan perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor ini adalah sangat strategis dalam upaya pencapaian visi Lampung Timur kedepan. Besarnya jumlah masyarakat yang bergerak di sektor ini menjadi potensi sekaligus tantangan dalam pelaksanaan transformasi ekonomi kedepan. Penciptaan nilai tambah pada sektor ini diarahkan pada hilirisasi aneka produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Pesatnya perkembangan *e-marketplace* dapat mendorong pemasaran produk yang selama ini sulit dilakukan masyarakat. Produk pertanian segar yang tidak tahan lama sulit dipasarkan melalui platform digital, sehingga upaya hilirisasi produk pertanian yang terstandarisasi dan lebih tahan lama akan meningkatkan peluang pemasaran melalui marketplace. Kebijakan pembangunan hilirisasi diarahkan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan pasca panen mengolah produk bagi para petani dan kelompok wanita tani, jaminan kepastian pasar (*off taker*), dan keterkaitan dengan unit ekonomi lainnya dalam klaster kawasan. Kebijakan hilirisasi diarahkan pada hadirnya hilirisasi di pedesaan agar petani, UMKM, industri skala kecil dan industri rumah tangga memperoleh harga jual produk yang meningkat. Dengan hilirisasi desa tidak mengekspor limbah bahan pangan ke kota. Produk samping, limbah dan olahan tersebut dapat diproses kembali menggunakan prinsip *reduce, reuse, recycle* atau pertanian sirkular dan ekonomi hijau dapat tercipta dan akan mengurangi penggunaan input dari luar.

Sejalan dengan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tersebut, sebagai daerah pesisir di Provinsi Lampung, potensi pengembangan ekonomi biru sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi baru di pesisir timur sangat terbuka. Kawasan ini dapat menjadi suplai rantai pasok ikan laut segar ke seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur untuk menyuplai kebutuhan protein penduduk Lampung Timur. Lebih jauh dari itu, pengembangan kawasan minapolitan dengan didukung infrastruktur yang memadai termasuk pengembangan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Labuhan Maringgai akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan dan keterkaitan ekonomi dengan wilayah sekitarnya.

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat (Widjaja, 2013). Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan atau kombinasi ketiga hal tersebut. Tujuan dari program minapolitan adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga memiliki daya saing tinggi, dan untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi kawasan. Kapasitas produksi dan akses pasar bagi industri pengolahan yang saat ini telah ada di beberapa desa dikembangkan melalui inovasi, modernisasi dan digitalisasi pemasaran.

Seiring dengan peningkatan sektor basis perekonomian daerah tersebut, sektor yang sangat mungkin tumbuh adalah sektor pariwisata. Kawasan strategis pariwisata nasional, TNWK akan menjadi motor penggerak sektor pariwisata dan sektor lainnya terutama sub sektor industri kreatif, yang pasti akan tumbuh seiring dengan kebutuhan wisatawan akan cinderamata dan jajanan kuliner. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan *Creative Hub* tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, insentif industri kreatif, pengembangan wisata olah raga dan wisata religi.

Terkait dengan peningkatan sektor perdagangan daerah, fenomena berkurangnya aktivitas perdagangan di pasar daerah dan semakin meningkatnya penjualan online merupakan suatu tantangan kedepan. Kesulitan bersaing dalam hal harga dan kenyamanan dengan pusat perbelanjaan modern (minimarket) dan perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lesunya aktivitas jual beli di pasar daerah. Di sisi lain, peranan sektor tersier yang melebihi kontribusi sektor sekunder (deindustrialisasi dini) dan meningkatnya *nett* impor saat ini mengindikasikan bahwa masyarakat Lampung Timur banyak menjadi *buyer* dibandingkan sebagai *seller*. Fenomena ini perlu disikapi untuk penguatan ekonomi lokal agar mampu tumbuh dan berkembang, khususnya potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*). Selain itu kebijakan pembangunan sektor perdagangan kedepan diarahkan pada pengendalian jumlah pusat perbelanjaan modern (minimarket), kerjasama pemasaran produk lokal melalui minimarket, kolaborasi yang kuat antara

pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pasar daerah, gerakan belanja pasar daerah, peningkatan belanja pemerintah produk lokal, serta mengenalkan inovasi yang dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar, penjualan produk lokal yang unik, keberagaman kuliner, serta pengalaman berbelanja yang lebih personal dan interaktif.

Selain pengembangan ekonomi daerah tersebut, pengembangan ekonomi syariah sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur. Dengan jumlah penduduk beragama Islam lebih dari 94 persen (1.063 juta jiwa) dan telah berkembangnya BUMD sektor syariah yaitu BPR Syariah Lampung Timur, dapat dijadikan sumber pertumbuhan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kedepan. Sistem ekonomi syariah terbilang unik. Sistem tersebut mengajarkan nilai-nilai yang juga sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat. Tak hanya itu, prinsip utama keuangan syariah yang berbasis riil aset serta konsep bagi hasil terbukti dapat menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Sementara tujuan utama ekonomi dan keuangan syariah atau *maqasid syariah* yakni memfokuskan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya sinergi antara aspek komersial dengan aspek sosial untuk meningkatkan dampak sosial. Aspek komersial diwakili oleh sektor jasa keuangan dan industri halal. Sedangkan aspek sosial diwakili oleh zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sektor filantropi Islam tersebut berpotensi terus dikembangkan karena strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi Lampung Timur kedepan diarahkan melalui pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Menurut Muta'ali, 2015 pemusatan pertumbuhan wilayah akan meminimalkan biaya transportasi dan memaksimalkan jumlah usaha dan efisiensi. Potensi sektoral (unggulan) dan daya tarik geografis dari kawasan akan menjadi penggerak utama dalam pembangunan wilayah, karena adanya keterkaitan dan *demand* terhadap sektor unggulan tersebut. Selanjutnya kawasan strategis ekonomi daerah akan dapat memberikan efek positif seperti *spread effect* dan *trickledown effect* yang mempengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya sehingga memunculkan pemerataan. Pengembangan pusat pertumbuhan tersebut diarahkan berbasis klaster kawasan yang diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Klaster I (Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Penggerak Ekonomi Daerah yang Inklusif, Terintegrasi, Merata, dan Berkelanjutan”.
- b. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang), Klaster ini akan diarahkan menjadi “Pusat Pertumbuhan Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

- c. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selehah, Mataram Baru), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Mata Rantai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
- d. Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.
- e. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Mata Rantai Utama Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan”.

Pengembangan pusat pertumbuhan pada klaster tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antar kawasan, rantai pasokan bahan baku dan bahan pangan dapat terjamin, sehingga tercipta kemandirian daerah. Selain itu, klaster kawasan diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan pertumbuhan sektor lainnya. Daya tarik dan sektor unggulan yang dimiliki pusat pertumbuhan kawasan diyakini akan meningkatkan sektor penanaman modal atau investasi daerah. Potensi besar yang dimiliki pusat pertumbuhan kawasan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dalam bingkai transformasi ekonomi Lampung Timur kedepan didukung oleh pembangunan dan penguatan infrastruktur daerah. Pembangunan infrastruktur yang terbangun sejak tahun 1999 hingga saat ini telah dirasakan dan dinikmati oleh warga masyarakat. Pembangunan infrastruktur multi sektor terbukti mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kondisi infrastruktur konektivitas adalah salah satu infrastruktur yang sering menjadi keluhan dari warga masyarakat.

Pada tahun 2045, kondisi infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur diarahkan berada dalam kondisi mantap, baik infrastruktur konektivitas, permukiman, maupun pengairan. Infrastruktur konektivitas yang saat ini berada pada kondisi 47,29% mantap, ditargetkan pada tahun 2045 seluruhnya berada pada kondisi mantap. Keterkaitan antar wilayah menjadi sangat baik. Pergerakan kendaraan, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk sangat lancar dengan adanya layanan publik yang nyaman dan merata, dan menumbuhkan unit-unit ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal baru. Infrastruktur konektivitas mampu menjadi tulang punggung interaksi ekonomi dan sosial antar pusat pertumbuhan dan daerah penopangnya. Lebih jauh dari itu, infrastruktur kabupaten sangat siap untuk dikoneksikan dan diintegrasikan dengan rencana pengembangan jalan lingkar luar Metropolitan Lampung Raya. Kemantapan infrastruktur yang didukung oleh ketersediaan sarana perhubungan darat yang nyaman dan merata, yang mampu menjangkau seluruh wilayah dengan mudah, menciptakan pemerataan kemajuan

pembangunan di seluruh penjuru wilayah. Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur mudah diakses dan dicapai dengan berbagai alternatif moda transportasi antar wilayahnya. Peningkatan kondisi infrastruktur dan perhubungan tersebut, sejalan dengan inovasi perluasan pembiayaan infrastruktur, yang dapat bersumber dari kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan, pinjaman daerah, dana jasa ekosistem, pasar karbon, dan hibah infrastruktur daerah. Terkait dengan infrastruktur perhubungan laut, dalam rangka meningkatkan peran pelabuhan Labuhan Maringgai sebagai pusat pertumbuhan baru kawasan dan *backbone* logistik daerah yang terintegrasi dengan jaringan transportasi wilayah lainnya, pengembangan sistem jaringan transportasi laut dikembangkan di Pelabuhan Labuhan Maringgai. Pelabuhan Labuhan Maringgai diproyeksikan sebagai pelabuhan pengumpan regional, Jarak yang lebih dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan merupakan jalur ALKI-I memberikan keuntungan dalam pengembangan Pelabuhan Labuhan Maringgai pendukung perwujudan Lampung Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru Pesisir Timur.

Pembangunan infrastruktur dapat memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, infrastruktur pun terbukti mampu meningkatkan daya saing dan citra daerah. Untuk meningkatkan daya saing dan citra positif daerah, penataan ruang perkotaan dilaksanakan untuk menciptakan wilayah yang nyaman, menarik dan berkarakter. Pembangunan infrastruktur perkotaan diarahkan pada *City Beautification*, pemenuhan infrastruktur permukiman, energi, sanitasi, dan juga ruang terbuka hijau yang tersebar merata di seluruh wilayah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur permukiman menjamin 100 persen seluruh wilayah memiliki akses aman terhadap ketersediaan air minum dan akses sanitasi layak, serta tidak ada wilayah kumuh di perkotaan menjadi standar dalam pembangunan wilayah kedepan.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung perkantoran kabupaten maupun kecamatan. Gedung kantor dan pelayanan publik diproyeksikan kedepan memiliki standar kenyamanan dan keamanan bagi aparaturnya dan warga masyarakat. Gedung kantor dan pelayanan publik didesain dengan baik dan berciri khas sehingga menjadi kebanggaan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat sekaligus mampu menjadi daya tarik wisata lokal.

Selanjutnya, terkait dengan peningkatan akses digital masyarakat, yang saat ini belum seluruh desa dapat mengakses layanan 4G, khususnya di Kecamatan Jabung, Marga Sekampung, Gunung Pelindung, dan Waway Karya, arah pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah mencakup pengembangan serat optik menghubungkan antar perkotaan di Kabupaten Lampung Timur, serta penuntasan dan penguatan

infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok minimal 4G.

Meratanya akses digital masyarakat tersebut akan mengakselerasi peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kemampuannya. Keterbatasan informasi yang ada saat ini menyulitkan angkatan kerja untuk mengakses layanan peningkatan kompetensi dan peluang kerja sektor formal. Keterbatasan tersebut mengakibatkan besarnya angkatan kerja yang bergerak di sektor informal di sekitar lingkungannya. Meningkatnya akses informasi melalui *gadget* untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan seiring dengan terbukanya informasi peluang kerja akan meningkatkan peluang angkatan kerja lulusan sekolah menengah, atas, dan tinggi yang saat ini cenderung masih rendah. Selain itu, terbukanya informasi terhadap peluang membuka usaha dapat mendorong angkatan kerja untuk terinspirasi membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat berbasis sumber daya dan keunggulan lokal di lingkungannya.

### **3. Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif**

Misi memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif mengandung arti bahwa tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur senantiasa menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, serta senantiasa berfikir jauh kedepan dan mampu mengantisipasi sedari dini potensi munculnya permasalahan atau risiko yang akan terjadi di masyarakat. Antisipasi sedari dini tersebut tercermin dari tingginya kualitas perencanaan dan penganggaran untuk merancang dan melaksanakan pembangunan daerah.

Misi memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif ini adalah tujuan dari transformasi tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur dua puluh tahun kedepan. Meskipun secara kinerja, tata kelola dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan dua dekade ini dalam periodesasi kepala daerah telah mendapat apresiasi dan penghargaan dari banyak kementerian dan lembaga, transformasi tata kelola pemerintahan daerah kedepan difokuskan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, mudah, murah, responsif, dan terpadu.

Kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel tersebut didesain melalui peningkatan kualitas regulasi peraturan daerah dan peraturan lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah. Regulasi di tingkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mengubah atau mentransformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Roscoe Pound dalam Mawardi, 2003 bahwa regulasi atau hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik tersebut diarahkan dalam kerangka pemenuhan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tantangan kedepan dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas di Provinsi Lampung, dengan sarana infrastruktur konektivitas yang relatif belum memadai memerlukan pengembangan pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di segala penjuru wilayah Kabupaten Lampung Timur. Pemanfaatan kemajuan digital melalui pengembangan portal dan/atau *platform* seluruh layanan publik daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat perkotaan dan pusat pertumbuhan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Transformasi digital pemerintahan daerah diarahkan pada transformasi layanan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data daerah dan penerapan satu data daerah, serta peningkatan keamanan siber. Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten dan Mini Mal Pelayanan Publik tingkat Kecamatan berbasis digital diproyeksikan mampu meningkatkan kinerja layanan publik dan mendorong daya saing daerah.

Teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) yang saat ini telah berkembang dan akan semakin maju menjadi solusi potensial dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan layanan publik. Layanan publik yang melayani jumlah penduduk yang besar dan wilayah Lampung Timur yang luas akan memunculkan data yang sangat besar sehingga akan menyulitkan atau membutuhkan waktu dalam pemrosesan data jika dilakukan secara manual. AI akan mampu memproses data yang sangat besar tersebut dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, implementasi teknologi AI dalam tata kelola pemerintahan daerah dan layanan publik dapat meningkatkan akurasi data, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi AI dalam tata kelola pemerintahan daerah dan layanan publik juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Melalui teknologi AI, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik secara mudah melalui aplikasi *online* dan platform digital. Kemudahan tersebut akan membantu pemerintah daerah untuk membuat merancang kebijakan yang lebih berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah dan layanan publik memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka, akurat, responsif, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama,

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan daerah juga dapat diarahkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, transformasi tata kelola pemerintahan daerah dapat diarahkan pada pemenuhan aspirasi masyarakat, terkait penataan kelembagaan desa, pengembangan kecamatan, dan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat. Terobosan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan publik terus perlu dilakukan kedepan.

Pada sisi akuntabilitas pemerintahan daerah, fokus pembangunan daerah kedepan adalah peningkatan APIP berintegritas. Peningkatan peran APIP dibutuhkan guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, efektif, efisien, dan akuntabel. Akuntabilitas pemerintahan daerah juga diarahkan pada pengelolaan aset daerah secara berkualitas dan akuntabel. Semakin membaiknya pengelolaan aset daerah, perlu diarahkan menuju digitalisasi pengelolaan aset daerah berbasis TIK, guna terwujudnya efektivitas, efisiensi dan ketertiban pengelolaan aset daerah.

Guna mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Timur, fungsi dan peranan ASN menjadi sangat penting. Dalam pengembangan ASN yang profesional dan berintegritas, pembangunan daerah jangka panjang diarahkan pada penguatan sistem merit ASN, manajemen talenta ASN, penguatan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi ASN, kebijakan penghargaan ASN, serta optimalisasi peran perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas kinerja aparatur.

#### **4. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan penegakan hukum pemerintahan daerah ada dalam tataran penegakan peraturan daerah. Sehingga penegakan hukum dalam rangka peningkatan kondisi keamanan menjadi ranah aparat penegak hukum terkait di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan data, jumlah tindak pidana di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu satu dekade terakhir berkecenderungan terus meningkat, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku pencurian kendaraan bermotor yang seringkali disertai dengan pencurian dengan kekerasan (membegal) melakukan tindakan kriminalnya tidak saja di wilayah Lampung Timur namun juga di luar daerah. Sering diberitakan dalam TV nasional maupun media massa, penangkapan pelaku curat yang berasal dari Lampung Timur. Kondisi ini membentuk stigma negatif di masyarakat bahwa Lampung Timur adalah daerah rawan kriminalitas dan sarang pelaku curat. Stigma ini sudah terbentuk bertahun-tahun yang lalu. Upaya pemerintah daerah bersinergi dengan seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat selama ini dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat perlu terus ditingkatkan, termasuk menggunakan pendekatan dan inovasi baru. Kriminalitas yang disebabkan oleh berbagai faktor perlu diatasi dengan pendekatan multi sektoral dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat secara kontinyu. Kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan sosial diselesaikan salah satunya melalui pendekatan multidimensi terutama peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Kriminalitas yang disebabkan oleh pengangguran dan kelangkaan lapangan kerja diatasi salah satunya melalui pendekatan peningkatan sumber daya dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Kriminalitas yang disebabkan oleh kecanduan narkoba dan alkohol diatasi salah satunya dengan peningkatan penegakan hukum dan peran serta masyarakat sekitar dalam menekan peredaran narkoba dan alkohol. Kriminalitas yang disebabkan faktor psikologis dan sosial diatasi salah satunya dengan pendampingan dan perlindungan sosial menyeluruh. Peningkatan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan peran kearifan lokal dapat mendukung penciptaan stabilitas ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dalam skala lingkungan, upaya penciptaan kestabilan ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada peningkatan sistem keamanan lingkungan yang efisien dan efektif dengan peran serta seluruh komponen masyarakat. Kondisi ketenteraman dan ketertiban yang baik akan mendorong daya saing daerah dan pertumbuhan wilayah, serta akan menjadi landasan yang kuat dalam transformasi guna perwujudan visi pembangunan jangka panjang kedepan

Selain itu, perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut tidak dapat terwujud jika stabilitas ekonomi makro tidak kokoh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika terjadi fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro daerah. Pembangunan jangka panjang diarahkan pada penciptaan pertumbuhan output ekonomi yang tinggi dan konstan serta inflasi yang rendah dan stabil. Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya peningkatan keterjangkauan, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan masyarakat. Penguatan peran TPID dalam pengendalian bersama instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan

pemantauan harga secara berkala dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan kerjasama antara daerah. Upaya lainnya adalah memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, keberhasilan pembangunan jangka panjang juga memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Kontribusi pendapatan asli daerah yang kurang dari 10 persen terhadap total pendapatan daerah selama dua dekade terakhir menjadi tantangan kedepan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer merupakan salah satu faktor yang menekan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Hasil publikasi penelitian Kurniawan dkk, 2023 (Analisis Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung), sektor lapangan usaha dominan primer tidak memberikan pengaruh signifikan baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maupun nilai ketergantungan fiskal daerah. Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Way Kanan yang memiliki sektor dominan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian tidak mampu meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah dan nilai ketergantungan fiskal secara signifikan. Hal ini dikarenakan sumber pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagian besar tidak terkait dengan sektor primer melainkan banyak terkait dengan kegiatan di sektor sekunder dan tersier. Secara khusus, aktivitas pertanian biasanya sulit untuk dikenakan pajak, terutama di daerah-daerah yang berpenghasilan rendah, dengan sebagian besar aktivitas pertaniannya berbasis skala kecil.

Transformasi ekonomi daerah yang dilaksanakan dengan meningkatkan kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian daerah, secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wajib pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan wajib pajak dan retribusi daerah tersebut akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas fiskal, khususnya dalam rangka peningkatan belanja infrastruktur daerah, transformasi fiskal diarahkan pada peningkatan alternatif pembiayaan diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan, dana jasa ekosistem, pasar karbon, hibah, dan opsi pinjaman daerah pada lembaga resmi dan berwenang guna percepatan dan perluasan pembangunan daerah kedepan. Keterbatasan belanja infrastruktur ditengah banyaknya infrastruktur yang harus ditangani, kurun waktu dua dekade terakhir berakibat pada rendahnya kemandapan kondisi infrastruktur daerah, yang harus dapat diatasi kedepan.

## 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin cepat. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini dan masa depan membuat perubahan besar terhadap hidup manusia. Era digital membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif bagi kualitas hidup manusia. Misi ini bertujuan di tengah tantangan global pada tahun 2045 sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur memiliki sikap yang semakin kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama yang dianut serta menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal, dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan masyarakat inklusif sebagai landasan pelaksanaan transformasi dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah. Sebagaimana misi ketenteram, ketertiban, dan stabilitas daerah, perwujudan misi ini ditetapkan menjadi landasan pelaksanaan transformasi daerah kedepan.

Sasaran pokok dalam pencapaian misi ini meliputi perwujudan masyarakat religius, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, pemuda produktif dan olahraga prestasi, angkatan kerja kompeten dan berdaya saing, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perwujudan masyarakat religius, aman, dan bersih diarahkan pada pembangunan karakter positif masyarakat melalui optimalisasi peran tokoh agama, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Agama memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan karakter atau kepribadian masyarakat. Meskipun secara kewenangan, urusan agama adalah urusan absolut pemerintah pusat, namun implementasi agama di daerah menjadi sumber pijakan utama dalam dimensi kehidupan masyarakat, melalui penanaman nilai spiritual, nilai akidah, praktek ibadah, sehingga melahirkan pribadi yang taat dan tekun menjalankan nilai-nilai keagamaan.

Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah penganut agama Islam yang sangat besar, dan memiliki jumlah pondok pesantren terbesar di Provinsi Lampung. Keberadaan Pondok Pesantren yang banyak tersebar di seluruh kecamatan, dengan asuhan para tokoh agama, diharapkan dapat menjadi *Center of Excellent*, pusat pengembangan keunggulan masyarakat dalam menghadapi globalisasi ke depan. Optimalisasi pondok pesantren sebagai pusat pengembangan keunggulan diharapkan dapat diikuti oleh lembaga keagamaan lainnya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur. Adanya tokoh agama dan lembaga keagamaan yang hadir bersama-sama di sekitar masyarakat menjadi kunci dalam mengarahkan dan mendampingi masyarakat menjalani hidup sehari-hari.

Agama yang telah berakulturasi dengan budaya dan kearifan lokal akan diyakini akan semakin membentuk etos spiritual yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Relasi

yang kuat antara budaya dan agama selama bertahun-tahun membentuk kebudayaan dan kearifan lokal yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama. Hal tersebut merupakan modal sosial budaya yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial, keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, keguyuban, pencapaian pendidikan, khazanah, pengetahuan, keterampilan, dan kemahiran, keragaman bahasa, kesenian, dan kesusasteraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang bersumber dari ajaran agama.

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Lampung Timur yang beragam, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah, yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Aneka perkumpulan sosial di masyarakat Lampung Timur yang berbasis keagamaan, adat, suku, sukarelawan, lembaga swadaya, keluarga, serta para pegiat sosial di berbagai bidang, merupakan aktor-aktor penting non formal yang dapat memainkan peran strategis dan berkontribusi signifikan dalam memajukan daerah. Masyarakat paguyuban merupakan bentuk modal sosial yang kuat di Kabupaten Lampung Timur karena mampu mempererat hubungan antar anggota, menjaga nilai-nilai tradisional serta menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial dan pembangunan daerah. Berbagai aktivitas paguyuban masyarakat berfungsi mempererat silaturahmi sesama kerabat serta mengukuhkan kohesi sosial. Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan.

Lima belas tahun kedepan, sebagaimana diketahui seiring dengan bonus demografi, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur akan terus meningkat, termasuk peningkatan jumlah pemuda. Peningkatan jumlah pemuda akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah, khususnya di era transformasi digital saat ini. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, 79,5 persen pemuda Indonesia adalah pengguna internet. Transformasi digital kedepan harus dipercepat secara merata disertai dengan penguatan talenta digital. Talenta digital yang paling potensial adalah kalangan remaja dan para pemuda. Para pemuda Kabupaten Lampung Timur diarahkan menjadi talenta digital yang mampu menguasai iptek dan inovasi dalam rangka menjaga dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat transformasi ekonomi daerah kedepan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penopang kemajuan daerah kedepan akan diarahkan pada pengembangan Sukadana *Smart City*, *Smart Village* di 264 desa, *digital*

*creative hub* kecamatan dan desa, pengembangan Lampung Timur *Science Techno Park*, pengembangan ekosistem iptek dan inovasi secara berjenjang, penguatan peran dan kapasitas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi dan lembaga iptekin. Talenta-talenta digital desa dan kecamatan diberi ruang dan didorong untuk meningkatkan cakupan pemanfaatan *platform e-marketplace* hingga pengembangan *startup* berbasis keunggulan lokal.

Peningkatan keterampilan angkatan kerja tersebut bertujuan agar angkatan kerja masyarakat Lampung Timur memiliki daya saing dan mampu berwirausaha dan berinovasi menciptakan produk unggulan dan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan berbasis sumber daya lokal. Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja diarahkan melalui upaya *up-skilling* dan *re-skilling* sumber daya manusia berbasis pada potensi ekonomi lokal setempat. Potensi sumber daya unggulan kecamatan yang beraneka ragam memerlukan sumber daya yang terampil dalam bidang tertentu sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan rantai unit ekonomi setempat. Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah, Balai Latihan Kerja Berbasis Komunitas, dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja swasta dapat mengakselerasi alih teknologi dan peningkatan kompetensi keterampilan angkatan kerja, sehingga mampu menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, mampu mengisi pasar kerja lokal dan global serta mampu bersaing menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, pemuda yang unggul dapat tercermin dari prestasi pribadi yang dimiliki, termasuk bidang olahraga yang sangat dekat dengan kehidupan pemuda. Besarnya jumlah penduduk muda dan tingginya minat olahraga masyarakat Lampung Timur kedepan merupakan modal penting bagi pengembangan olahraga, baik olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Pembinaan bidang keolahragaan didorong dalam rangka membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi. Khusus terkait dengan olahraga prestasi, dalam pengembangannya kedepan diarahkan pada penguatan sistem pembinaan keolahragaan yang terencana, sistematis, berbasis sains, dan terpadu. Ketersediaan stadion dan *sport center* juga sangat dibutuhkan bagi pengembangan olahraga prestasi maupun rekreasi.

Membangun masyarakat yang religius dan berbudaya, serta pemuda yang unggul tidak lepas dari keterlibatan keluarga. Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia, sekaligus menjadi awal mula pendidikan itu dikenalkan. Keunggulan sumber daya manusia Lampung Timur kedepan ditentukan oleh kualitas pendidikan pertama bagi anak di keluarga. Kesejahteraan dan kualitas keluarga saat ini akan sangat menentukan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Lampung Timur kedepan. Dengan jumlah keluarga yang diproyeksikan lebih dari 266 ribu kepala keluarga, pembangunan keluarga adalah pondasi utama kemajuan daerah kedepan. Pembangunan keluarga berkualitas kedepan

akan sangat terkait dengan upaya peningkatan perlindungan anak dan perempuan. Keluarga berkualitas akan menjadi penopang perlindungan terhadap anak dan perempuan. Upaya pemberdayaan keluarga melalui sinergi dan kolaborasi program seluruh stake holder diarahkan demi peningkatan upaya perlindungan anak dan perempuan. Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, upaya perlindungan anak dan perempuan diarahkan pada upaya peningkatan kesetaraan gender yang setara dan adil, pemenuhan hak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kehidupan masyarakat yang berkualitas membutuhkan lingkungan hidup sebagai tempat beraktivitas sekaligus mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan daerah diarahkan pada upaya pelestarian hidup dan mitigasi bencana daerah. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dalam rangka memastikan keberlanjutan pembangunan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dan pemanfaatan inovasi teknologi pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan teknologi digital diarahkan pada peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penegakan regulasi kelestarian lingkungan. Digitalisasi RTRW dan RDTR didorong untuk dapat meningkatkan kepatuhan dan ketertiban terhadap pemanfaatan ruang wilayah, sekaligus implementasi insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang. Ketentuan insentif dan disinsentif dibarengi dengan digitalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kedepan dirasa mampu untuk mengatasi pemanfaatan ruang yang beresiko melanggar.

Sedangkan terkait dengan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana diarahkan pada pengembangan budaya tanggap dan tangguh bencana. Wilayah Lampung Timur yang berisiko tinggi terhadap bencana multi ancaman, perlu disadari oleh seluruh warga masyarakat. Warga masyarakat didorong memiliki sikap tanggap dan tangguh terhadap bencana, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sinergi lintas sektor. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana senantiasa dilaksanakan seiring dengan peningkatan rasio ketersediaan sarana dan prasarana serta personil kebencanaan daerah. Peningkatan rasio ketersediaan sarana dan prasarana serta personil diarahkan pada pemenuhan waktu tanggap (*Time Response Unit*) 15 menit. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar dapat diatasi melalui berbagai inovasi layanan kebencanaan.

Peningkatan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana tersebut juga diarahkan pada upaya mitigasi konflik satwa liar dan masyarakat sekitar hutan. Keberadaan hutan lindung yang dihuni oleh berbagai hewan liar, selain memberikan dampak positif bagi masyarakat, di lain sisi juga memunculkan risiko kejadian konflik satwa liar dan masyarakat yang kerap kali terjadi. Upaya mitigasi konflik satwa liar dan masyarakat dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan nasional sesuai kewenangan.

## **6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**

Lampung Timur Sejahtera 2045 tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kesejahteraan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di segala penjuru wilayah Kabupaten Lampung Timur disertai dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah kecamatan dan desa serta kelompok pendapatan. Kesejahteraan juga harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi.

Misi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan merupakan kerangka implementasi transformasi daerah kedepan, yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi melalui pendekatan pembangunan kewilayahan secara merata dan berkeadilan. Kesenjangan antarwilayah kecamatan maupun desa menjadi tantangan yang harus diatasi dalam dua puluh tahun mendatang. Pembangunan jangka panjang harus memastikan bahwa sumber daya penggerak ekonomi, seperti persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik, dan terampil investasi harus tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

## **7. Sarana dan Prasarana Daerah Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Sebagaimana misi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, misi sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan ditetapkan sebagai kerangka implementasi transformasi daerah kedepan. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar di beberapa wilayah kecamatan dan desa berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, serta produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sebagai pilar pendukung agenda transformasi daerah kedepan.

## **8. Kesenambungan Pembangunan Daerah**

Seluruh transformasi daerah yang diagendakan dalam rencana pembangunan jangka panjang dapat dicapai jika didukung dengan komitmen dan kerjasama para pihak terkait peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah meningkatkan kolaborasi untuk mengimplementasikan program pemerintah daerah. Kolaborasi dan kerja sama antar aktor dalam pembangunan multi sektor penting dilakukan karena proses, tujuan dan tantangan-tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Peningkatan model kolaboratif *penta helix* yang melibatkan 5 (lima) aktor, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media dalam pembangunan daerah kedepan lebih dioptimalkan. Kolaborasi para pemangku kepentingan tersebut



diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis untuk menyelesaikan masalah multi dimesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik kedepan.



**Perda Kab. Lam Tim  
Nomor 08 Tahun 2024  
tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

**BAB V  
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Bendungan Margatiga

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan (rencana pembangunan jangka menengah daerah) yang berpedoman pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang daerah. Dalam konteks penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, arah kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan daerah yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon kepala daerah dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode berkenaan.

Untuk menjamin keselarasan pembangunan jangka panjang Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berpedoman pada Buku 2 Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang ditetapkan menjadi 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan. Tujuh belas arah tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur 2025-2045 ditetapkan sebagai berikut:

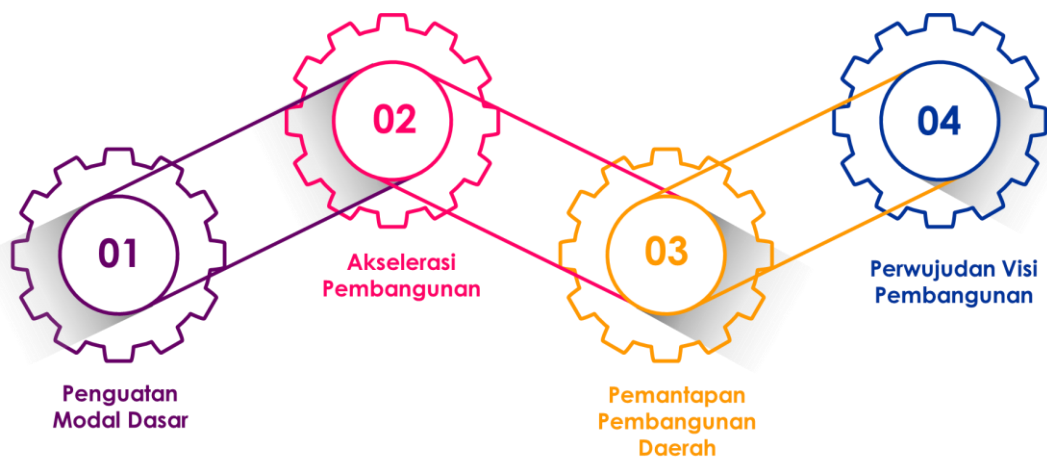
Tabel 5.1  
17 (Tujuh Belas) Arah Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045

17 Arah Tujuan RPJP Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045		
Transformasi	Arah Pembangunan	
Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif	IE1	Kesehatan untuk Semua
	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	IE4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau
	IE6	Transformasi Digital
	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif	IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah	IE10	Ketenteraman dan Ketertiban
	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro
	IE12	Daya Saing Daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur 2025-2045 merupakan kerangka kerja pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dalam periode lima tahunan, dalam rangka pencapaian visi daerah. Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan arah kebijakan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan arah kebijakan yang ditetapkan mencerminkan urgensi pembangunan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan relatif berbeda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Pentahapan arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengahnya. Pentahapan pembangunan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, terukur dan konsisten untuk

mencapai visi jangka panjang daerah. Atas dasar tersebut, tahapan dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dirumuskan sebagai berikut.

Gambar 5.1  
Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD



Pelaksanaan 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD 2025-2045 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan masing-masing misi pembangunan jangka panjang daerah.

### 5.1 Arah Kebijakan Transformasi dan Landasan Transformasi

Arah kebijakan transformasi dan landasan transformasi merupakan rumusan kerangka kerja untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam narasi 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, dan 2 (dua) landasan transformasi pembangunan jangka panjang daerah.

#### 5.1.1 Misi ke-1 : Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif

Kebijakan transformasi pembangunan pada misi ini diarahkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dan penuntasan kemiskinan. Melalui peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan sosial, masyarakat Lampung Timur pada tahun 2045 merupakan masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif yang tercermin dari usia harapan hidup yang mencapai 82 tahun, tingkat pendidikan telah tuntas 13 tahun, dan kemiskinan di bawah 1,5 persen. Masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif menjadi modal dasar untuk mengakselerasi transformasi kedepan. Arah kebijakan untuk melaksanakan transformasi sosial mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif tersebut meliputi dan tidak terbatas pada:

- ✧ Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi
- ✧ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- ✧ Percepatan cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular

- ✧ Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan."
- ✧ Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
- ✧ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
- ✧ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- ✧ Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
- ✧ Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
- ✧ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- ✧ Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- ✧ Penguatan dan pengembangan Pondok Pesantren sebagai *Center of Excellent*
- ✧ Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
- ✧ Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
- ✧ Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
- ✧ Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
- ✧ Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan
- ✧ Percepatan peningkatan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

Tabel 5.2  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-1			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi : Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif</b>	<b>Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan penurunan tingkat kemiskinan</b>	<b>Percepatan pembangunan sumber daya manusia dan penurunan tingkat kemiskinan</b>	<b>Penguatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan</b>	<b>Perwujudan masyarakat yang unggul, produktif, inovatif dan penuntasan kemiskinan</b>
<b>IE1. Kesehatan untuk Semua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan kesadaran masyarakat terkait upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat</li> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</li> <li>★ Percepatan SDG's Bidang Kesehatan</li> <li>★ Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</li> <li>★ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, berkualitas dan berkeadilan.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan implementasi penanggulangan stunting.</li> <li>★ Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya</li> <li>★ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan</li> <li>★ Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</li> <li>★ Pemenuhan SDG's Bidang Kesehatan</li> <li>★ Penguatan layanan penyakit degeneratif, gangguan metabolik dan reproduktif</li> <li>★ Pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</li> <li>★ Optimalisasi layanan digital RS Daerah dan Puskesmas</li> <li>★ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting serta penguatan konvergensi lintas sektor.</li> <li>★ Meningkatkan edukasi kesehatan pada keluarga sebagai upaya meningkatkan pengambilan keputusan terkait kesehatan.</li> <li>★ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> <li>★ Upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui perluasan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan budaya perilaku hidup sehat, gizi seimbang dan olahraga</li> <li>★ Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</li> <li>★ Pemenuhan SDG's Bidang Kesehatan</li> <li>★ Peningkatan layanan kesehatan pada usia lanjut.</li> <li>★ Peningkatan layanan penyakit degeneratif, gangguan metabolik dan reproduktif</li> <li>★ Peningkatan kemandirian jaminan kesehatan masyarakat</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</li> <li>★ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</li> <li>★ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> <li>★ Upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui perluasan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan kawasan sehat Kabupaten</li> <li>★ Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</li> <li>★ Penuntasan SDG's Bidang Kesehatan</li> <li>★ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis.</li> <li>★ Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</li> <li>★ Perluasan pencegahan stunting</li> <li>★ Peningkatan ketahanan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.</li> <li>★ Perwujudan budaya hidup sehat dengan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</li> <li>★ Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan</li> <li>★ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> </ul>
<b>IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan wajib belajar 11 tahun (1 tahun pra sekolah dan 10 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-1			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</li> <li>★ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan pengembangan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama Lainnya sebagai Center of Excellent</li> <li>★ Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan</li> <li>★ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM dan percepatan pemenuhan SDG's Bidang Pendidikan</li> <li>★ Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.</li> <li>★ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</li> <li>★ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</li> <li>★ Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</li> <li>★ Pengembangan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama Lainnya sebagai Center of Excellent</li> <li>★ Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM dan penguatan SDG's Bidang Pendidikan</li> <li>★ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</li> <li>★ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</li> <li>★ Penguatan pengembangan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama Lainnya sebagai Center of Excellent</li> <li>★ Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</li> <li>★ Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM dan penuntasan SDG's Bidang Pendidikan</li> <li>★ Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</li> <li>★ Peningkatan akses dan partisipasi pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</li> <li>★ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</li> <li>★ Terwujudnya Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama Lainnya sebagai Center of Excellent</li> <li>★ Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</li> </ul>
<b>IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan pada wilayah kantong kemiskinan</li> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang sosial</li> <li>★ Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</li> <li>★ Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</li> <li>★ Perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas kabupaten</li> <li>★ Pemenuhan SPM dan percepatan pemenuhan SDG's Bidang Sosial</li> <li>★ Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</li> <li>★ Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique &amp; high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal &amp; nonfiskal bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</li> <li>★ Pemenuhan SPM dan penguatan SDG's Bidang Sosial</li> <li>★ Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan</li> <li>★ Pemenuhan SPM dan penuntasan SDG's Bidang Sosial</li> <li>★ Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-1			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan</li> <li>★ Penguatan regulasi dan percepatan pemberdayaan penyandang disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat</li> <li>★ Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling</li> <li>★ Penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan</li> <li>★ Penguatan perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran</li> <li>★ Pengembangan penyediaan bantuan sosial</li> <li>★ Penguatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</li> <li>★ Percepatan perluasan perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran</li> <li>★ Penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan</li> <li>★ Perluasan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</li> <li>★ Perwujudan perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran secara merata</li> <li>★ Pemenuhan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan</li> <li>★ Terjaminnya kualitas hidup penyandang disabilitas yang layak dan berkelanjutan</li> </ul>

Arah kebijakan untuk melaksanakan transformasi sosial mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif di atas difokuskan pada pencapaian target sasaran pokok yang terbagi dalam kerangka pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.3  
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1

Misi ke-1 : Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE1	Kesehatan untuk Semua					
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,95	75,95	77,95	79,95	82
2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
a)	Angka Kematian Ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	15	11	8	4	1

Misi ke-1 : Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,2	11,4	8,6	5,8	3
3	Penanganan Tuberkulosis					
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	35	90	93	95	96
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	98	98,2	98,5	98,7	98,9
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,65	98,86	99,07	99,28	99,5
<b>IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>						
5	Hasil Pembelajaran:					
	a) Persentase siswa sekolah dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i) Literasi membaca	13,33	40,00	50,00	60,00	73,33
	ii) Numerasi	6,67	30,00	40,00	50,00	66,67
	b) Persentase siswa menengah pertama yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk:					
	i) Literasi membaca	60	70	85	95	100
	ii) Numerasi	40	55	70	85	95
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,44	8,87	9,90	10,97	13,03
	d) Harapan lama sekolah (tahun)	13	13,4	13,76	14,12	14,55
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	4,7	5,42	6,33	7,58	8
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	15,8	17	25	35	56
<b>IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	12,97	10,10	7,24	4,37	1,50
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%)	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00	76,00-80,00
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)	22,6	25	29	38	50

### 5.1.2 Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Kebijakan misi transformasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi daerah diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan hingga mencapai 22,46 persen di tahun 2045. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer yang menjadi sektor basis perekonomian selama ini dilaksanakan melalui penguatan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah

komoditas unggulan lokal. Peningkatan perekonomian daerah tersebut sejalan dengan pengendalian tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Selain itu kebijakan misi ini diarahkan pada peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global serta pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan. Arah kebijakan untuk melaksanakan transformasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi daerah meliputi dan tidak terbatas pada:

- ✧ Percepatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas menuju pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berkelanjutan
- ✧ Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
- ✧ Penguatan dan peningkatan produktivitas UMKM, koperasi dan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal
- ✧ Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
- ✧ Peningkatan akses dan kesempatan kerja
- ✧ Peningkatan inovasi berbasis potensi lokal
- ✧ Percepatan penerapan ekonomi hijau dan sirkular
- ✧ Percepatan transformasi digital sebagai instrumen utama transformasi ekonomi daerah
- ✧ Penguatan integrasi ekonomi antar wilayah

Tabel 5.4  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi : Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah</b>	<b><i>Penguatan IPTEKIN dan infrastruktur mendorong hilirisasi SDA serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif</i></b>	<b><i>Percepatan hilirisasi dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi</i></b>	<b><i>Pemantapan ekonomi daerah berbasis industri terintegrasi dan berkelanjutan</i></b>	<b><i>Perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat</i></b>
<b>IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penyediaan benih/bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</li> <li>★ Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</li> <li>★ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Alih teknologi dan pengembangan benih/bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</li> <li>★ Alih teknologi dan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan kemandirian penyediaan benih/bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</li> <li>★ Percepatan kemandirian penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</li> <li>★ Pemantapan produktivitas produk unggulan dan meningkatkan nilai tambah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Kemandirian penyediaan benih/bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</li> <li>★ Kemandirian penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</li> <li>★ Peremajaan kebun dan penerapan pertanian regeneratif guna</li> </ul>



Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.</p> <p>★ Peningkatan produktivitas lada dan komoditas unggulan lainnya sebagai komoditas strategis daerah</p> <p>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</p> <p>★ Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha peternakan masyarakat</p> <p>★ Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p> <p>★ Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah dan potensi pariwisata, budidaya dan ketersediaan industri pengolahan berbasis inovasi</p> <p>★ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha peternakan dan perikanan.</p> <p>★ Peningkatan penganeekaragaman pertanian (diversifikasi langkah awal modernisasi pertanian)</p> <p>★ Pengembangan pasar hasil usaha tani lokal pada kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p>★ Pengembangan ketersediaan bahan dan alat pertanian, peternakan, dan perikanan yang dimungkinkan</p>	<p>ketahanan &amp; kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian Lampung Timur</p> <p>★ Pengembangan dan penguatan teknologi produktivitas dan hilirisasi lada</p> <p>★ Percepatan pemenuhan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p> <p>★ Peningkatan kualitas akses pembiayaan kredit usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p> <p>★ Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan sirkular</p> <p>★ Modernisasi pertanian, peternakan, dan perikanan.</p> <p>★ Penyediaan infrastruktur kawasan Minapolitan</p> <p>★ Implementasi closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan &amp; petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.</p> <p>★ Perbaikan dan perluasan tanah pertanian</p> <p>★ Peningkatan budidaya komoditas tanaman ekspor</p> <p>★ Penguatan penganeekaragaman pertanian (diversifikasi langkah awal modernisasi pertanian)</p> <p>★ Perluasan pengembangan pasar hasil usaha tani lokal</p> <p>★ Peningkatan alih teknologi produksi bahan dan alat pertanian, peternakan, dan perikanan yang</p>	<p>berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming) dan pengembangan teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>★ Perluasan lahan dan hilirisasi lada dan komoditas unggulan dan strategis lainnya</p> <p>★ Pemenuhan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p> <p>★ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p> <p>★ Percepatan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.</p> <p>★ Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.</p>	<p>mewujudkan pertanian berkelanjutan</p> <p>★ Keberlanjutan peningkatan produktivitas dan hilirisasi lada serta komoditas unggulan dan strategis lainnya</p> <p>★ Menjamin terwujudnya integrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p> <p>★ Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.</p> <p>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan lokal, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>★ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan</p>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>diproduksi secara lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan minat petani milenial</li> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Menciptakan atraksi dan ancillary yang baik serta penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</li> <li>★ Pengembangan agrowisata prioritas berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah (lada, padi, jagung, kakao, dll)</li> <li>★ Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan institusi lokal</li> <li>★ Pengembangan desa wisata berbasis budaya</li> <li>★ Pengembangan industri padat karya terampil untuk menyerap tenaga kerja sektor informal</li> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> </ul>	<p>dimungkinkan diproduksi secara lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan dan penguatan minat petani milenial</li> <li>★ Peningkatan implementasi regulasi pengembangan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Percepatan pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kultural, sport tourism maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif</li> <li>★ Perluasan pengembangan agrowisata desa prioritas berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah (lada, padi, jagung, kakao, dll)</li> <li>★ Penguatan pariwisata berbasis masyarakat dan institusi lokal</li> <li>★ Penguatan keberlanjutan desa wisata berbasis budaya</li> <li>★ Pengembangan kawasan budaya daerah (pasar seni dan sentra kebudayaan)</li> <li>★ Penggalakan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)</li> <li>★ Upscaling industri padat karya terampil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Perluasan dan pengembangan industri berbasis ekspor prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.</li> <li>★ Pengembangan dan penguatan rantai pasok pasar hasil usaha tani lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan DKI Jakarta dan Provinsi Lampung</li> <li>★ Percepatan alih teknologi produksi bahan dan alat pertanian, peternakan, dan perikanan yang dimungkinkan diproduksi secara lokal</li> <li>★ Peningkatan peran petani milenial dalam pembangunan sektor pertanian</li> <li>★ Percepatan pengembangan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Percepatan kemandirian inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Percepatan pengembangan kualitas dan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kultural, sport tourism maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif</li> <li>★ Penguatan agrowisata desa berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah (lada, padi, jagung, kakao, dll)</li> <li>★ Penguatan pariwisata berbasis masyarakat dan institusi lokal</li> <li>★ Penguatan keberlanjutan desa wisata berbasis budaya</li> <li>★ Upscaling industri padat karya terampil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Perluasan dan pengembangan industri berbasis ekspor</li> </ul>	<p>melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.</li> <li>★ Keberlanjutan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.</li> <li>★ Penguatan rantai pasok pasar hasil usaha tani untuk memenuhi kebutuhan pangan DKI Jakarta dan Provinsi Lampung</li> <li>★ Kemandirian produksi bahan dan alat pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Keberlanjutan peran petani milenial dalam pembangunan sektor pertanian</li> <li>★ Terwujudnya produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan secara optimal</li> <li>★ Terwujudnya kemandirian inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Terwujudnya pariwisata unggul berbasis masyarakat dan institusi lokal</li> <li>★ Terwujudnya agrowisata desa berkelanjutan</li> <li>★ Menjamin keberlanjutan desa wisata berbasis budaya</li> <li>★ Keberlanjutan upscaling industri padat karya terampil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Keberlanjutan perluasan dan pengembangan industri berbasis ekspor</li> </ul>
<b>IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis</li> <li>★ Mendorong pengelolaan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan</li> <li>★ Penguatan pengelolaan Hutan Lestari dan lahan pertanian berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi</li> <li>★ Perwujudan Hutan Lestari dan lahan pertanian berkelanjutan</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>Lestari dan lahan pertanian berkelanjutan</p> <p>★ Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.</p> <p>★ Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Penyediaan ketahanan bencana melalui kajian kawasan perkotaan yang selanjutnya diimplementasikan pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i>.</p>	<p>★ Pengembangan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.</p> <p>★ Percepatan perluasan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Penyediaan ketahanan bencana melalui kajian kawasan perkotaan yang selanjutnya diimplementasikan pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i>.</p> <p>★ Mendorong pertanian berkelanjutan dengan pemberian insentif bagi petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi pengolahan limbah organik.</p>	<p>★ Percepatan perwujudan Hutan Lestari dan lahan pertanian berkelanjutan</p> <p>★ Percepatan perwujudan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.</p> <p>★ Perluasan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Percepatan terwujudnya ketahanan bencana melalui kajian kawasan perkotaan yang selanjutnya diimplementasikan pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i>.</p> <p>★ Penguatan pertanian berkelanjutan dengan pemberian insentif bagi petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi pengolahan limbah organik.</p>	<p>★ Perwujudan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.</p> <p>★ Peningkatan produktivitas pertanian menggunakan sumber energi terbarukan dan dukungan investasi dalam penelitian dan teknologi energi terbarukan di sektor pertanian.</p> <p>★ Penguatan kebijakan perlindungan lingkungan dalam mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem, mendorong perlindungan tanah gambut, pemulihan dan pelestarian ekosistem alami.</p>
IE 6. Transformasi Digital	<p>★ Penguatan regulasi pengembangan transformasi digital daerah</p> <p>★ Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada <i>area weak coverage</i> di kawasan perkotaan.</p> <p>★ Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi,</p>	<p>★ Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok</p> <p>★ Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>★ Peningkatan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital</p> <p>★ Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis</p> <p>★ Penguatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi,</p>	<p>★ Percepatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>★ Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan</p> <p>★ Percepatan terwujudnya keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital</p> <p>★ Penguatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis</p> <p>★ Percepatan pemenuhan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan</p>	<p>★ Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat</p> <p>★ Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas</p> <p>★ Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran)</p> <p>★ Pemenuhan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan</p>



Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)</p> <p>★ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi prioritas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan</p> <p>★ Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband ke seluruh wilayah prioritas</p> <p>★ Pembangunan individu kreatif</p> <p>★ Pengembangan ekonomi kreatif kecamatan</p>	<p>serta kepemimpinan digital)</p> <p>★ Perluasan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan</p> <p>★ Perluasan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband ke wilayah strategis dan cepat tumbuh</p> <p>★ Pembangunan individu kreatif</p> <p>★ Pengembangan ekonomi kreatif kecamatan</p> <p>★ Pengembangan Sukadana <i>Smart City</i> dan <i>Smart Distric</i> kabupaten</p>	<p>tinggi, serta kepemimpinan digital)</p> <p>★ Percepatan pemenuhan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan</p> <p>★ Percepatan pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband ke seluruh wilayah</p> <p>★ Pembangunan individu kreatif</p> <p>★ Penguatan kinerja ekonomi kreatif kecamatan</p> <p>★ Penguatan Sukadana <i>Smart City</i> dan <i>Smart Distric</i> sebagai penggerak tumbuhnya creative hub desa</p>	<p>★ Pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband ke seluruh wilayah</p> <p>★ Terwujudnya individu kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal</p> <p>★ Penguatan kinerja ekonomi kreatif kecamatan</p> <p>★ Keberlanjutan tumbuhnya Lampung Timur <i>Smart City</i>, <i>Smart Distric</i> dan <i>Creative Hub</i></p> <p>★ Penguatan integrasi <i>smart distric</i> dan <i>creative hub</i></p>
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<p>★ Penguatan regulasi peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan perhubungan daerah</p> <p>★ Peningkatan konektivitas menuju/ dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyediaan kondisi jalan yang dapat diakses para wisatawan beserta tanda petunjuk tempat wisata</p> <p>★ Peningkatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>★ Peningkatan infrastruktur transportasi &amp; logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan logistik utama kabupaten, pengembangan kawasan pergudangan/ stockyard kabupaten)</p> <p>★ Percepatan peningkatan infrastruktur</p>	<p>★ Penyiapan dukungan <i>multi-infrastructure backbone</i> yang menginterkoneksi antar kawasan strategis</p> <p>★ Penyiapan percepatan pembangunan/ peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan regional</p> <p>★ Pemenuhan infrastruktur kawasan/daerah terisolir</p> <p>★ Perwujudan <i>building beautification</i> gedung kantor pemkab dan kecamatan strategis</p> <p>★ Pembangunan penataan ruang dan bangunan perbatasan wilayah</p> <p>★ Menyeimbangkan kosmopolitanisme dan lokalisme kota</p> <p>★ Penataan infrastruktur penunjang pariwisata daerah</p> <p>★ Penataan kecamatan dan desa atraksi wisata</p> <p>★ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</p> <p>★ Peningkatan dan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai</p>	<p>★ Dukungan terhadap pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan</p> <p>★ Percepatan pembangunan pelabuhan perikanan Labuhan Maringgai</p> <p>★ Pengembangan infrastruktur kawasan/daerah terisolir</p> <p>★ Penuntasan upaya <i>building beautification</i> gedung kantor dan layanan publik secara merata</p> <p>★ Percepatan pemenuhan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk percepatan pengembangan sektor industri manufaktur</p> <p>★ Pengembangan potensi <i>multiinfrastructure</i> daerah terkoneksi (dukungan pembangunan jalan lingkaran luar Metropolitan Lampung Raya)</p> <p>★ Percepatan pemenuhan infrastruktur berkualitas dalam menunjang pariwisata daerah dan desa</p> <p>★ Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang kesejahteraan sosial</p>	<p>★ Percepatan pembangunan pelabuhan pengumpan Labuhan Maringgai</p> <p>★ Pemenuhan dan penuntasan <i>bulding beautification</i> gedung kantor dan layanan publik</p> <p>★ Penuntasan peningkatan dan pengembangan infrastruktur kawasan/daerah terisolir</p> <p>★ Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah</p> <p>★ Perwujudan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global</p> <p>★ Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah</p> <p>★ Perwujudan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan dukungan infrastruktur transportasi</p> <p>★ Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan</p>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>kawasan/daerah terisolir</p> <p>★ Perwujudan <i>building beautification</i> gedung kantor pemkab dan penyelenggara layanan publik strategis</p> <p>★ <i>City beautification</i> perkotaan pusat pertumbuhan (kawasan strategis) dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah</p> <p>★ Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal</p> <p>★ Penyiapan dan pembangunan stadion olahraga</p> <p>★ Penyiapan potensi multiinfrastructure daerah terkoneksi (dukungan pengembangan infrastruktur nasional dan provinsi)</p>	<p>tinggi dengan potensi pasar ekspor/global</p> <p>★ Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Percepatan kemandirian infrastruktur transportasi &amp; logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan logistik utama kabupaten, pengembangan kawasan pergudangan/stockyard)</p> <p>★ Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, ramah lingkungan serta tangguh dalam mengurangi kerentanan bencana, antara lain: pembangkit listrik tenaga gas, pengembangan PLTS; penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; penyediaan akses telekomunikasi dan digital; penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri</p> <p>★ Percepatan pengembangan multiinfrastructure daerah terkoneksi (dukungan pengembangan infrastruktur nasional dan provinsi)</p> <p>★ Percepatan penyediaan Sport Center Kabupaten sebagai pusat kegiatan olahraga dan ruang publik</p>	<p>antara lain: fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja (termasuk perlindungan tenaga kerja)</p> <p>★ Pembentukan regulasi dan kelembagaan dalam pengelolaan pelayanan publik lintas wilayah (pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik antar ibukota kab/kota) ramah lingkungan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan kab/kota sekitar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah</p> <p>★ Percepatan potensi multiinfrastructure daerah terkoneksi (dukungan pengembangan infrastruktur nasional dan provinsi)</p> <p>★ Penyiapan dan pembangunan <i>Sport Center</i> Kabupaten sebagai pusat kegiatan olahraga dan ruang publik</p>	<p>perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.</p> <p>★ Perwujudan multiinfrastructure daerah terkoneksi (dukungan pembangunan jalan lingkar luar Metropolitan Lampung Raya)</p> <p>★ Pemenuhan infrastruktur berkualitas dalam menunjang pariwisata daerah dan desa</p> <p>★ Pemenuhan infrastruktur penunjang kesejahteraan sosial, antara lain: fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja (termasuk perlindungan tenaga kerja)</p> <p>★ Optimalisasi fungsi <i>Sport Center</i> Kabupaten sebagai pusat kegiatan olahraga dan ruang publik</p>
<b>IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>	<p>★ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</p> <p>★ Membangun komoditas UMKM dan kemandirian pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya</p>	<p>★ Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</p> <p>★ Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p> <p>★ Peningkatan kemandirian dan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif</p>	<p>★ Percepatan penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</p> <p>★ Pengembangan ketenagalistrikan khususnya pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan khususnya potensi jaringan gas alam</p> <p>★ Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap</p>	<p>★ Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.</p> <p>★ Pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan khususnya khususnya potensi jaringan gas alam dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya skala besar</p> <p>★ Perwujudan kualitas komoditas UMKM dan kemandirian pada rantai</p>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-2			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>★ Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan</p> <p>★ Penguatan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan</p> <p>★ Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan cooperation collaboration.</p> <p>★ Dukungan terhadap penguatan rantai nilai global skema kerjasama regional dan internasional</p> <p>★ Peningkatan keterkaitan perdesaan dan perkotaan</p> <p>★ Peningkatan daya saing perdesaan</p> <p>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>★ Penguatan regulasi dan pengembangan BUMD dan BUMDes</p>	<p>(termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>★ Penguatan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik massal</p> <p>★ Peningkatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Peningkatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal</p> <p>★ Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</p> <p>★ Peningkatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.</p> <p>★ Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional dan internasional</p> <p>★ Peningkatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>★ Pengembangan klaster UMKM daerah</p> <p>★ Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kuantitas BUMD dan BUMDes</p>	<p>ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>★ Percepatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>★ Percepatan ketahanan bencana</p> <p>★ Percepatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet</p> <p>★ Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal</p> <p>★ Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan</p> <p>★ Percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi.</p> <p>★ Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>★ Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif</p> <p>★ Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>★ Peningkatan kualitas dan kuantitas produk BUMD dan BUMDes guna dapat bersaing di pasar regional atau global</p>	<p>nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>★ Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>★ Perwujudan akses infrastruktur air baku dan air minum secara optimal pada kawasan perkotaan merata</p> <p>★ Perwujudan ketahanan bencana</p> <p>★ Perwujudan kualitas coverage dan kecepatan akses internet</p> <p>★ Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik massal</p> <p>★ Perwujudan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal</p> <p>★ Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>★ Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.</p> <p>★ Perwujudan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional dan internasional</p> <p>★ Perwujudan BUMD dan BUMDes penggerak ekonomi daerah</p>

Arah kebijakan untuk melaksanakan transformasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi daerah di atas difokuskan pada pencapaian target sasaran pokok yang terbagi dalam kerangka pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.5  
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
<b>IE4</b>	<b>Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>					
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,25	9,18	11,79	15,59	22,46
12	Pengembangan Pariwisata					
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,28	1,35	1,45	1,54	1,64
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	0,35	1	2	2,5	3
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	1,84	1,91	2,20	2,49	2,77
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	7,3	8,2	11,3	15,7	17,8
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	22,5	22,9	23,7	26	29
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	2,85	3,14	4,25	5,03
	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,2	0,5	1,3	2,4	2,8
	e) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49	2,25	1,95	1,74	1,58
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,76	58,07	62,34	66,60	69,9
17	Indeks Kapabilitas Inovasi	1,64	2,02	2,36	2,73	3,05
<b>IE5</b>	<b>Penerapan Ekonomi Hijau</b>					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
	a) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
<b>IE6</b>	<b>Transformasi Digital</b>					
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8	6,05	6,35	6,74	7,12
<b>IE7</b>	<b>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>					
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	30,47	31,37	32,51	33,70	35
21	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	1,68	3,95	7,26	10,54	14
<b>IE8</b>	<b>Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>					
22	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan					
	a) Kontribusi PDRB Lampung Timur terhadap PDRB Provinsi (%)	11,72	11,81	11,88	11,93	12
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	69,58	73	79	85	100
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	3,03	3,79	10,23	13,64	18,56
23	Infrastruktur Kota dan Desa Berkualitas					
	a) Indeks Infrastruktur Daerah	0,44	0,5	0,67	0,78	0,85

### 5.1.3 Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif

Kebijakan misi transformasi tata kelola mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif mengacu pada Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Berdasarkan dari nilai-nilai yang ingin dicapai dari sasaran Reformasi Birokrasi General serta mengacu pada kebutuhan kondisi daerah Lampung Timur maka penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah terfokus pada peningkatan indeks reformasi hukum, indeks reformasi birokrasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, indeks penilaian integritas, nilai survey kepuasan masyarakat, dan indeks sistem merit. Arah kebijakan untuk melaksanakan misi transformasi tata kelola mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif meliputi dan tidak terbatas pada:

- ✧ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
- ✧ Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- ✧ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.
- ✧ Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- ✧ Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan integritas partai politik.

Tabel 5.6  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-3			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi : Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif</b>	<b><i>Penguatan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan manajemen ASN</i></b>	<b><i>Percepatan digitalisasi pelayanan publik, dan profesionalitas ASN</i></b>	<b><i>Pemantapan profesionalitas ASN dan layanan publik berkualitas</i></b>	<b><i>Perwujudan tata kelola berintegritas dan adaptif secara merata</i></b>
<b>IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.</li> <li>★ Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan implementasi regulasi di daerah.</li> <li>★ Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan penegakan regulasi di daerah.</li> <li>★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-3			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. ★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi. ★ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	★ Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. ★ Penguatan sistem politik yang berlandaskan Pancasila dengan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi, serta memupuk semangat gotong royong dan toleransi antarwarga negara, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan berkeadilan	profesional dan bebas korupsi. ★ Peningkatan konsolidasi dan modernisasi melalui integrasi sistem informasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan memodernisasi infrastruktur pemerintahan ★ Peningkatan kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat yang lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ★ Penguatan integritas partai politik	kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. ★ Peningkatan keberlanjutan dan inovasi dengan terus melanjutkan reformasi birokrasi yang berfokus pada inovasi, penggunaan teknologi canggih dalam pelayanan publik, serta dengan memperkuat penegakan hukum serta kebijakan anti-korupsi.

Arah kebijakan untuk melaksanakan misi transformasi tata kelola mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif di atas difokuskan pada pencapaian target sasaran pokok yang terbagi dalam kerangka pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.7  
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
24	Indeks Reformasi Hukum	70	90	94	96	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	3,2	3,8	4,4	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	3,1	4,01	4,51	4,59	4,8
27	Indeks integritas nasional (hasil survei penilaian integritas oleh KPK)	68	73	78	80	85
28	Indeks Reformasi Birokrasi	60	70	80	85	92
29	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,47	83	85	87	90
30	Indeks Sistem Merit	260	285	300	326	340

#### 5.1.4 Misi ke-4 : Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah

Kebijakan misi ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah diarahkan pada penciptaan stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat, stabilitas ekonomi makro, dan daya saing daerah. Pencapaian misi ketenteraman dan ketertiban

masyarakat serta stabilitas daerah tercermin dari terkendalinya kasus kriminalitas, meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan efektivitas kerjasama daerah. Arah kebijakan untuk melaksanakan misi ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah meliputi dan tidak terbatas pada:

- ✧ Penguatan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta kepemimpinan daerah
- ✧ Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, dan perdagangan karbon, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- ✧ Penguatan pengendalian inflasi daerah menuju stabilitas ekonomi makro
- ✧ Percepatan peningkatan daya saing dan kerjasama daerah

Tabel 5.8  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-IV

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-4			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi : Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah</b>	<b>Penguatan regulasi dan peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah</b>	<b>Percepatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah</b>	<b>Penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah</b>	<b>Perwujudan masyarakat yang tenteram dan tertib serta stabilitas daerah yang kondusif dan berkelanjutan</b>
<b>IE 10. Ketenteraman dan Ketertiban</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis sosial budaya dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Kebebasan dan perlindungan sipil terjamin bagi semua pihak dalam hak berdemokrasi, hak politik, kritik dan saran penyelenggaraan pemerintah, memperoleh kesetaraan sosial dan ekonomi</li> <li>★ Menyediakan kebijakan yang kuat dalam perlindungan privasi dan keamanan siber</li> <li>★ Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dan penegakan perda</li> <li>★ Penguatan peran keluarga dan perwujudan desa sadar hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan implementasi regulasi perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis sosial budaya dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas</li> <li>★ Dukungan terhadap pos militer/kepolisian dan sarana &amp; prasarana pertahanan keamanan lainnya</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Meminimalisir korban kejahatan siber dengan penguatan keamanan siber dan perluasan literasi digital kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial dan teknologi</li> <li>★ Peningkatan partisipasi, pemahaman dan komitmen masyarakat dalam implementasi perda serta peningkatan upaya penegakan perda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis sosial budaya dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Kebebasan dan perlindungan sipil terjamin bagi semua pihak dalam hak berdemokrasi, hak politik, kritik dan saran penyelenggaraan pemerintah, memperoleh kesetaraan sosial dan ekonomi</li> <li>★ Percepatan terwujudnya pemahaman dan komitmen masyarakat dalam implementasi perda serta peningkatan upaya penegakan perda</li> <li>★ Peningkatan peran masyarakat dalam percepatan perwujudan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Menjaga keberlanjutan situasi keamanan dan ketertiban kondusif berbasis sosial budaya dan kearifan lokal</li> <li>★ Dukungan terhadap pos militer/kepolisian dan sarana &amp; prasarana pertahanan keamanan lainnya</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Peningkatan layanan dan penyempurnaan kebijakan yang kuat dalam perlindungan privasi dan keamanan siber</li> <li>★ Perwujudan pemahaman dan komitmen masyarakat dalam implementasi perda serta peningkatan upaya penegakan perda</li> <li>★ Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat secara paripurna</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-4			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
		★ Peningkatan dan pengembangan kapasitas keluarga dan desa sadar hukum	kesadaran hukum masyarakat	
<b>IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</li> <li>★ Penguatan kelembagaan/ regulasi yang lebih kompetitif dan menyalurkan kemudahan kredit serta sistem pembayaran yang modern dan efektif</li> <li>★ Penguatan regulasi dan pengendalian inflasi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, dan jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).</li> <li>★ Perluasan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</li> <li>★ Peningkatan kemudahan kredit serta sistem pembayaran yang modern dan efektif</li> <li>★ Sinergi pengendalian inflasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, dan perdagangan karbon, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)</li> <li>★ Penguatan kelembagaan/ regulasi yang lebih kompetitif dan menyalurkan kemudahan kredit serta sistem pembayaran yang modern dan efektif</li> <li>★ Perluasan kemudahan kredit serta sistem pembayaran yang modern dan efektif</li> <li>★ Perluasan pengendalian inflasi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, dan perdagangan karbon, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).</li> <li>★ Perwujudan kemudahan kredit serta sistem pembayaran yang modern dan efektif secara merata dan aman</li> <li>★ Menjamin keberlanjutan pengendalian inflasi daerah.</li> </ul>
<b>IE 12. Daya Saing Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dan kerjasama antar daerah</li> <li>★ Penguatan regulasi dan pencegahan serta penanganan konflik sosial</li> <li>★ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal</li> <li>★ Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.</li> <li>★ Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kerjasama regional</li> <li>★ Penguatan stake holder dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial</li> <li>★ Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal</li> <li>★ Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan</li> <li>★ Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kerjasama tingkat nasional</li> <li>★ Penciptaan keberlanjutan situasi kondisi daerah yang kondusif tanpa konflik sosial</li> <li>★ Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal</li> <li>★ Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan</li> <li>★ Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kerjasama tingkat global</li> <li>★ Keberlanjutan situasi kondisi daerah yang kondusif</li> <li>★ Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah</li> <li>★ Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja</li> <li>★ Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa</li> </ul>

Arah kebijakan untuk melaksanakan misi ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah di atas difokuskan pada pencapaian target sasaran pokok yang terbagi dalam kerangka pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.9  
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4

Misi ke-4 : Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
<b>IE10</b>	<b>Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban serta Kepemimpinan Daerah</b>					
31	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	28	27	27	26	25
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	60	75	85	95	100
	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM	75	85	100	100	100
32	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,8	75,7	80,7	85,7	90,05
33	Indeks Demokrasi Indonesia	78,36	82	85	86	87
<b>IE11</b>	<b>Stabilitas Ekonomi Makro</b>					
34	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,15	0,28	0,57	0,89	1,56
35	Tingkat Inflasi (%)	3,28	2,6	2,3	2,2	2
<b>IE12</b>	<b>Daya Saing Daerah</b>					
36	Efektivitas Kerjasama Daerah	70	80	90	100	100
37	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100	100	100	100	100

#### 5.1.5 Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan misi ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada peningkatan kondisi spiritualitas masyarakat dan berkebudayaan yang maju, pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif, lingkungan hidup berkualitas, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan untuk melaksanakan misi ketahanan sosial budaya dan ekologi meliputi dan tidak terbatas pada:

- ✧ Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- ✧ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- ✧ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- ✧ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- ✧ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

- ✧ Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
- ✧ Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- ✧ Pengelolaan risiko bencana dan penguatan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- ✧ Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- ✧ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

Tabel 5.10  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-V

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-5			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<b><i>Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan</i></b>	<b><i>Percepatan pembangunan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan daerah</i></b>	<b><i>Pemantapan pembangunan sosial budaya dan ekologi</i></b>	<b><i>Perwujudan daerah yang berketahanan sosial budaya dan ekologi yang mantap dan merata</i></b>
<b>IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan dukungan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</li> <li>★ Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung kesenian/kebudayaan daerah dan pemberdayaan kesenian/kebudayaan</li> <li>★ Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</li> <li>★ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</li> <li>★ Pengembangan kuantitas dan kualitas sapras gedung kesenian/kebudayaan daerah dan pemberdayaan kesenian/kebudayaan</li> <li>★ Pengembangan upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila serta wawasan kebangsaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perluasan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</li> <li>★ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</li> <li>★ Penguatan kuantitas dan kualitas gedung kesenian/kebudayaan daerah secara merata dan pemberdayaan kesenian/kebudayaan</li> <li>★ Pemantapan upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila serta wawasan kebangsaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</li> <li>★ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</li> <li>★ Penguatan kebudayaan daerah</li> <li>★ Perwujudan kuantitas dan kualitas tinggi gedung kesenian/kebudayaan daerah secara merata dan pemberdayaan kesenian/kebudayaan</li> <li>★ Penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara merata</li> </ul>
<b>IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</li> <li>★ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</li> <li>★ Mendorong tersedianya kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan</li> <li>★ Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</li> <li>★ Peningkatan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</li> <li>★ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Menjamin keberlanjutan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</li> <li>★ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-5			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	★ Penguatan dan perluasan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	★ Peningkatan kemandirian kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi yang dikelola perempuan ★ Percepatan perluasan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang ★ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia secara merata melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
<b>IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas</b>	★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup ★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ★ Penguatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan ★ Penguatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati ★ Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ★ Pengembangan TPA ★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih ★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.	★ Pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup ★ Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ★ Peningkatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan ★ Peningkatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati ★ Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ★ Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ★ Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ★ Pengembangan layanan persampahan RT	★ Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. ★ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. ★ Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ★ Pemantapan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan ★ Pemantapan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati ★ Pemantapan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan ★ Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ★ Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ★ Pengelolaan limbah buangan rumah tangga secara terpadu.	★ Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. ★ Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ★ Perwujudan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan ★ Perwujudan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati ★ Perwujudan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ★ Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ★ Perwujudan hutan lestari melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-5			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Menyediakan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung permukiman yang layak huni, seperti penyediaan, jaringan listrik, air bersih dan sistem sanitasi.</li> <li>★ Pengembangan permukiman yang layak huni didukung kemampuan lahan dan jaminan ketersediaan air.</li> <li>★ Penyediaan RTH publik pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan terutama ruang hijau yang ramah anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Efisiensi penyediaan lahan yang selaras dengan rencana tata ruang untuk pengembangan permukiman yang layak huni didukung kemampuan lahan dan jaminan ketersediaan air</li> <li>★ Penyediaan RTH publik pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan pengawasan dan pengelolaan limbah B3, limbah medis yang berkelanjutan dan membina pengelolaan limbah para pelaku usaha.</li> <li>★ Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman agar tetap selaras dengan rencana tata ruang</li> </ul>
<b>IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan cakupan tutupan lahan Kab. Lampung Timur sehingga dapat dipertahankan atau ditingkatkan fungsinya dalam penyerapan air tanah</li> <li>★ Mengurangi beban pencemaran sungai di seluruh aliran Sungai;</li> <li>★ Penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu dan konservasi non vegetated (sumur resapan, kolam retensi, dan penangkap air lainnya);</li> <li>★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah</li> <li>★ Mendorong penguatan konsumsi listrik per kapita</li> <li>★ Mendorong penguatan intensitas energi/primer</li> <li>★ Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan</li> <li>★ Penguatan kapasitas air baku</li> <li>★ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal</li> <li>★ Penguatan diversifikasi pangan</li> <li>★ Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &amp; kemandirian pangan dan water prosperity melalui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Meningkatkan cakupan tutupan lahan Kab. Lampung Timur sehingga dapat dipertahankan atau ditingkatkan fungsinya dalam penyerapan air tanah</li> <li>★ Menjaga lahan yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung dengan menegakkan larangan berupa penolakan mengeluarkan izin atau persetujuan pada alih fungsi lahan dengan aktifitas yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan</li> <li>★ Perbaikan irigasi dan meningkatkan layanan irigasi masyarakat baik pada jalur desa dan jalur-jalur di perkotaan.</li> <li>★ Mendorong peningkatan penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita</li> <li>★ Mendorong peningkatan pemenuhan intensitas energi//Primer</li> <li>★ Percepatan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan</li> <li>★ Peningkatan pemenuhan kapasitas air baku</li> <li>★ Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal</li> <li>★ Peningkatan diversifikasi pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perluasan tutupan lahan Kab. Lampung Timur sehingga dapat dipertahankan atau ditingkatkan fungsinya dalam penyerapan air tanah</li> <li>★ Penghijauan kembali bagi daerah tepian sungai;</li> <li>★ Percepatan modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan air irigasi</li> <li>★ Mendorong percepatan pemenuhan konsumsi Listrik per Kapita</li> <li>★ Mendorong percepatan intensitas energi/primer</li> <li>★ Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan</li> <li>★ Percepatan kapasitas air baku</li> <li>★ Percepatan skema dan tata kelola serta pemerataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal</li> <li>★ Percepatan diversifikasi pangan</li> <li>★ Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &amp; kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Mempertahankan cakupan tutupan lahan Kab. Lampung Timur sehingga dapat dipertahankan atau ditingkatkan fungsinya dalam penyerapan air tanah</li> <li>★ Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta Kawasan konservasi darat dan perairan;</li> <li>★ Pembangunan daerah resapan air</li> <li>★ Modernisasi sistem irigasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah</li> <li>★ Pemenuhan kebutuhan konsumsi listrik per kapita yang handal</li> <li>★ Intensitas energi/primer yang handal</li> <li>★ Konsumsi Pangan yang handal</li> <li>★ Kapasitas air baku yang handal</li> <li>★ Perwujudan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal</li> <li>★ Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal</li> <li>★ Perwujudan diversifikasi pangan</li> <li>★ Perwujudan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &amp;</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-5			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	<p>pengembangan kawasan strategis pertanian.</p> <p>★ Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal</p>	<p>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &amp; kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian</p> <p>★ Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal</p>	<p>★ Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal</p>	<p>kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian</p> <p>★ Perwujudan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal</p>
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<p>★ Penguatan kebijakan dan peningkatan perlindungan dalam mitigasi konflik satwa liar dan manusia</p> <p>★ Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, khususnya tsunami, kebakaran, angin puting beliung maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</p> <p>★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</p> <p>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim;</p> <p>★ Mempertahankan kondisi asli bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;</p> <p>★ Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan</p> <p>★ Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p>	<p>★ Perluasan dan penguatan perlindungan keselamatan manusia, ternak, dan tanaman terhadap ancaman konflik satwa liar</p> <p>★ Penguatan SDM dan kelembagaan dalam identifikasi potensi bencana serta penguatan kapasitas terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam</p> <p>★ Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana</p> <p>★ Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;</p> <p>★ Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan</p> <p>★ Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p>	<p>★ Percepatan pemenuhan perlindungan keselamatan manusia, ternak, dan tanaman terhadap ancaman konflik satwa liar</p> <p>★ Percepatan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap ketahanan, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim</p> <p>★ Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam</p> <p>★ Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana</p> <p>★ Pemantapan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;</p> <p>★ Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana tinggi.</p> <p>★ Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p>	<p>★ Jaminan keselamatan manusia, ternak, dan tanaman dalam mitigasi konflik satwa liar</p> <p>★ Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>★ Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam</p> <p>★ Perwujudan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana</p> <p>★ Perwujudan bentang alam membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;</p> <p>★ Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan terhadap risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, khususnya di wilayah berisiko tinggi.</p> <p>★ Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi</p>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-5			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	akan potensi bahaya seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ★ Penguatan kebijakan dan regulasi peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air			dan/atau ketersediaan air

Arah kebijakan untuk melaksanakan misi ketahanan sosial budaya dan ekologi di atas difokuskan pada pencapaian target sasaran pokok yang terbagi dalam kerangka pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.11  
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
<b>IE13</b>	<b>Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>					
38	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,73	62,15	64,15	66,15	68,87
39	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07	76,07	78,07	80,07	81,24
<b>IE14</b>	<b>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif</b>					
40	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21 -71,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33 - 76,38
	a) Indeks Perlindungan Anak	64,64	74,64	77,64	80,64	83
	b) Indeks Pembangunan Pemuda	49,53*	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
41	Indeks Ketimpangan Gender	0,387	0,371	0,315	0,275	0,195
<b>IE15</b>	<b>Lingkungan Hidup Berkualitas</b>					
42	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,81	69,82	71,08	72,34	73,86
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1,2	9,11	17,61	27,61	39,61
	c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,62	30,20	45,45	63,20	85
	d) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan (% RT) Sampah	13,15	30,56	50,67	74,34	90
<b>IE16</b>	<b>Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>					
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a) Ketahanan Energi					
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	600	700	1.200	1.696	2.170
	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp. Milyar)	161	161	153	145	137

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8,6	6,2	4,1	2,4	0,8
c)	Ketahanan Air					
	- Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1,06	3	10	45	78
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	183,2	182	170	150	130
45	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen)	128.832,38	181.033,13	282.221,03	443.566,64	762.632,00

## 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana diarahkan pada peningkatan pemerataan dan keadilan pembangunan daerah melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah, yang dilengkapi dengan landasan transformasi pembangunan jangka panjang daerah. Kebijakan pembangunan wilayah berpedoman pada fungsi dan peruntukan kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Guna terciptanya sinergitas dan keterpaduan antar wilayah, kebijakan pembangunan wilayah didukung dengan penguatan kerjasama antardaerah.

### 5.2.1 Arah Kebijakan Kewilayahan Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Penunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar

Arah kebijakan kewilayahan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur akan diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata. Kebijakan pengembangan wilayah disinergikan dengan arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sumatera dan arah pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Percepatan pembangunan melalui pembangunan pada wilayah-wilayah strategis diharapkan dapat mendorong dan menghela perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Optimalisasi potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga menjadi kekuatan pendorong utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Tabel 5.12  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-6			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>	<b>Pembangunan kewilayahan mendukung pengembangan kawasan strategis daerah</b>	<b>Pembangunan kewilayahan mendukung pengembangan pusat pertumbuhan daerah</b>	<b>Percepatan kewilayahan mendukung pengembangan pusat pertumbuhan daerah</b>	<b>Pemantapan pengembangan kewilayahan meluas dan merata</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan ketersediaan dokumen rencana tata ruang wilayah berkualitas dan berkelanjutan</li> <li>★ Peningkatan pemahaman dan implementasi rencana tata ruang wilayah</li> <li>★ Penuntasan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan strategis dan cepat tumbuh</li> <li>★ Pengembangan klaster pariwisata daerah</li> <li>★ Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</li> <li>★ Meningkatkan ketercapaian kesesuaian rencana pola ruang dan pembangunan rencana struktur ruang</li> <li>★ Percepatan pengadaan &amp; pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</li> <li>★ Fasilitasi percepatan pelaksanaan reforma agraria</li> <li>★ Penuntasan penetapan dan penegasan batas desa ibukota kecamatan</li> <li>★ Percepatan penyelesaian RDTR OSS di kawasan strategis dan cepat tumbuh</li> <li>★ Peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali guna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan kecamatan</li> <li>★ Peningkatan upaya fasilitasi dan percepatan pelaksanaan reforma agraria</li> <li>★ Penyediaan transportasi publik yang efisien dan mendukung kawasan strategis serta mendorong mobilitas ekonomi masyarakat</li> <li>★ Peningkatan pengadaan &amp; pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</li> <li>★ Penuntasan penetapan dan penegasan batas desa penyangga ibukota kecamatan termasuk pulau-pulau kecil</li> <li>★ Fasilitasi dan monitoring integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu</li> <li>★ Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</li> <li>★ Peningkatan pelayanan publik dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penuntasan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan kecamatan</li> <li>★ Penguatan pelaksanaan reforma agraria secara merata dan berkelanjutan</li> <li>★ Meningkatkan ketercapaian kesesuaian rencana pola ruang dan pembangunan rencana struktur ruang terutama dalam membangun infrastruktur terpadu</li> <li>★ Penambahan jalur transportasi publik yang efisien dan mendukung kawasan strategis serta mendorong mobilitas ekonomi masyarakat</li> <li>★ Peningkatan pengadaan &amp; pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat.</li> <li>★ Penuntasan penetapan dan penegasan batas desa perbatasan antar wilayah kecamatan dan kabupaten</li> <li>★ Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan termasuk pulau-pulau kecil</li> <li>★ Monitoring dan penguatan implementasi luas integrasi RDTR OSS</li> <li>★ Peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan desa, pengembangan kecamatan, dan pembentukan daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perwujudan pengadaan &amp; pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</li> <li>★ Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kelayakan transportasi publik yang efisien dan mendukung kawasan strategis serta mendorong mobilitas ekonomi masyarakat</li> <li>★ Penuntasan upaya peningkatan penetapan dan penegasan batas desa secara merata.</li> <li>★ Terwujudnya kesesuaian pembangunan dan investasi terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.</li> <li>★ Peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan desa, pengembangan kecamatan, dan pembentukan daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-6			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan desa, pengembangan kecamatan, dan pembentukan daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	memperpendek rentang kendali guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan desa, pengembangan kecamatan, dan pembentukan daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	ketentuan peraturan perundang-undangan	

Dalam pengembangan wilayah ketersediaan sarana dan prasarana wilayah sangatlah penting. Prasarana merupakan suatu faktor potensia yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan daerah tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan prasarana daerah yang memadai. Prasarana dan sarana wilayah merupakan fasilitas publik yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau aktivitas dalam suatu wilayah yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota dan wilayah. Araha kebijakan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang akan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan ramah lingkungan secara merata.

Tabel 5.13  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-7			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi ke-7: Sarana dan Prasarana Daerah Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	<b><i>Penguatan regulasi dan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana daerah berkualitas dan ramah lingkungan</i></b>	<b><i>Peningkatan sarana dan prasarana daerah mendukung pembangunan daerah berkualitas dan berkelanjutan</i></b>	<b><i>Percepatan sinergi pengembangan sarana prasarana daerah berkualitas, berkelanjutan dan merata</i></b>	<b><i>Perwujudan sarana dan prasarana daerah berkualitas dan ramah lingkungan</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penegakan standar bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan</li> <li>★ Penguatan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</li> <li>★ Penguatan pemberian deregulasi, kemudahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan</li> <li>★ Peningkatan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</li> <li>★ Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemantapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan</li> <li>★ Pemantapan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</li> <li>★ Penguatan dan perluasan pemberian deregulasi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Menjamin keberlanjutan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan</li> <li>★ Perwujudan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</li> <li>★ Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan</li> </ul>

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-7			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/ subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. ★ Konsistensi dan kepastian kebijakan investasi	akses ke green/low- cost financing, bantuan/ subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. ★ Percepatan konsistensi dan kepastian kebijakan investasi	kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/ subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. ★ Penguatan konsistensi dan kepastian kebijakan investasi	pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/ subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan. ★ Terwujudnya investasi yang berdaya saing dan unggul dalam mendukung kontinuitas pembangunan daerah

Ketersediaan prasarana dan sarana yang berkualitas sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan wilayah. Pembangunan daerah tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana atau infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang berkualitas dan tersedia cukup akan mendorong kegiatan-kegiatan publik dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Selain juga akan menjadi stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang.

#### 1. Jalan

Sebagai salah satu daerah dengan luas wilayah terbesar, dan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat tinggi. Infrastruktur wilayah yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah infrastruktur konektivitas jalan kabupaten dan desa. Pada tahun 2023, tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 49,17%. Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.884,17 km, 957,72 km diantaranya berada dalam kondisi tidak mantap. Begitupun dengan kondisi jalan desa, dari total panjang 4.088,47 km sebagian besar dalam kondisi tidak mantap.

Tabel 5.14  
Sistem Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
1	SRIBAWONO – TANJUNG AJI	11,44
2	BUMI JAWA – PURBOLINGGO	14,13
3	KIBANG – BTS KOTA METRO	1,06
4	JALAN LOKAL	1.857,54
TOTAL		1.884,17

Meskipun Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setiap tahun dalam kebijakan anggarannya terus mendorong peningkatan kemantapan jalan kabupaten, namun belum dapat meningkatkan kemantapan jalan di atas 70% selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Secara fungsi, jalan kewenangan kabupaten merupakan jalan penghubung antar kecamatan dan desa, dengan belum mantapnya jalan kabupaten tersebut pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dapat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas warga antar kecamatan dan desa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap akselerasi perkembangan wilayah.

Gambar 5.2  
Peta Jaringan Jalan Kewenangan Nasional dan Provinsi Lampung



Jaringan jalan kewenangan nasional di wilayah Kabupaten Lampung Timur terbentang sepanjang 185,58 km, dengan sembilan ruas jalan. Sedangkan jalan kewenangan Provinsi Lampung terbentang sepanjang 305,45 km, yang terdiri dari 7 ruas jalan. Rincian panjang ruas masing-masing jalan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.15  
Sistem Jaringan Jalan Kewenangan Nasional dan Provinsi Lampung

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
<b>JALAN KEWENANGAN NASIONAL</b>		
1	BTS. KAB. LAMTENG/KAB.LAMTIM - WAY JEPARA	51,81
2	WAY JEPARA - WAY SKP. BUNUT (BTS.KAB.LAMSEL/KAB.LAMTIM)	55,85
3	BTS. KOTA METRO - GEDONG DALAM	11,76
4	GEDONG DALAM - BTS. KOTA SUKADANA	7,97
5	JLN. SUKARNO-HATTA (SUKADANA)	4,54
6	WAY GALIH – BERGEN	7,65
7	BERGEN - PUGUNG RAHARJO	21,40
8	PUGUNG RAHARJO - SRI BAWONO	21,75
9	SRI BAWONO - SP. SRI BAWONO	2,85
<b>Sub Total Jalan Kewenangan Nasional</b>		<b>185,58</b>
<b>JALAN KEWENANGAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
1	BELIMBINGSARI - JABUNG	9,31
2	JABUNG - SP. LABUHAN MARINGGAI	22,96
3	METRO – TANJUNG KARI	24,25
4	NYAMPIR – TANJUNG KARI	7,88
5	TANJUNG KARI - PUGUNG RAHARJO	24,49
6	PUGUNG RAHARJO – JABUNG	26,56
7	SUKADAMAI – KIBANG	4,42
<b>Sub Total Jalan Kewenangan Provinsi</b>		<b>119,87</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>305,45</b>

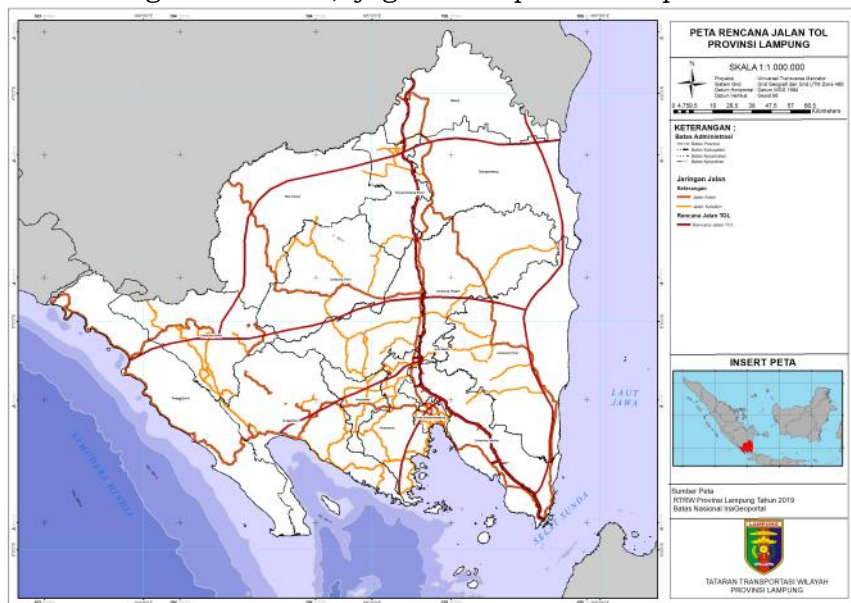
Infrastruktur konektivitas Kabupaten Lampung Timur banyak ditopang oleh kemantapan jalan nasional dan provinsi yang memiliki kemantapan lebih dari 70%, bahkan kemantapan jalan nasional telah mencapai 95% di tahun 2023. Kedepan arah pengembangan wilayah dalam perwujudan jaringan jalan diprioritaskan pada pemeliharaan jalan kolektor primer 2 (dua) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Gedong Dalam, Panjang –Pugung Raharjo, Pugung Raharjo – Bandar Sribhawono, Bandar Sribhawono - Simpang Sribhawono, Sukadana – Jabung, Simpang Maringgai – Jabung, Metro – Gedong Dalam, Gedong Dalam – Sukadana, Metro – Tanjung Kari, Bandar Sribhawono – Tanjung Aji, Simpang NP – Raman Utara dan Bumi Jawa – Purbolinggo.

Selanjutnya perbaikan dan pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan Gunung Sugih-Gedong Dalam, SP Sribhawono-Sribhawono, Pugung Raharjo-Sribhawono, dan Bergen-Pugung Raharjo; ruas jalan Sribhawono-Wana Tanjung Aji,

Raman Raya-Raman Utara, Bumi Jaya-Purbolinggo, dan Kibang-Batas Kota Metro, serta perbaikan dan pemeliharaan jalan lokal primer yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Kedepan, Kabupaten Lampung Timur perlu memproyeksikan pengembangan infrastruktur jalan dan wilayah sebagai bagian dari rangkaian konektivitas baru jalan tol dan jaringan jalan Provinsi Lampung. Pengembangan jalan kabupaten dan desa sebagai penghubung konektivitas jalan tol, jalan nasional, dan provinsi perlu dipersiapkan untuk menunjang konektivitas antar wilayah.

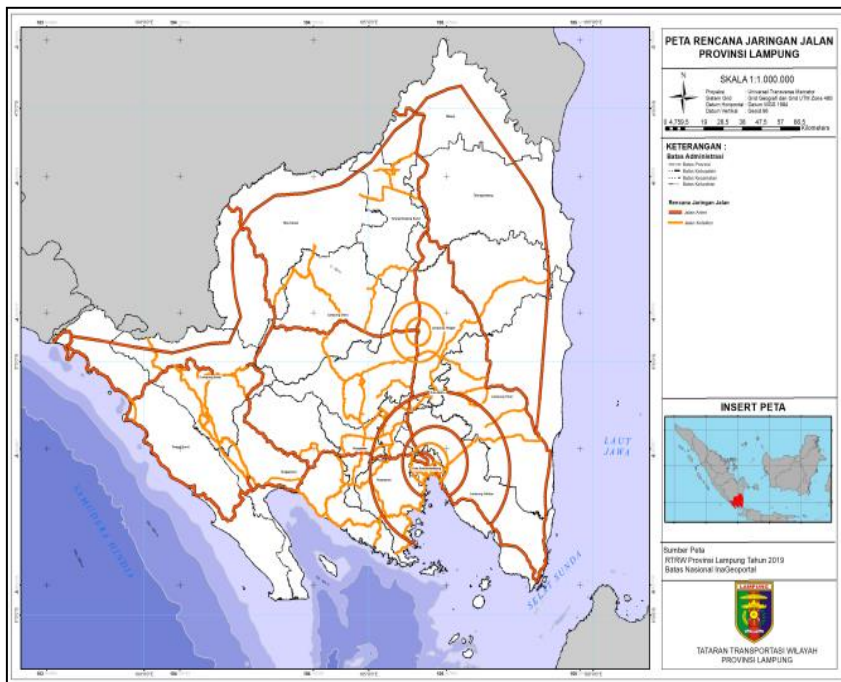
Merujuk rencana pengembangan jalan tol antar kabupaten di Provinsi Lampung tersebut, terlihat wilayah kecamatan yang terlintasi adalah Kecamatan Batanghari Nuban, Way Bungur, Sukadana, Labuhan Ratu, Way Jepara, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, dan Pasir Sakti. Pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Timur tentu dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan kemajuan Kabupaten Lampung Timur. Selain pembangunan jalan tol tersebut mampu meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan perekonomian Kabupaten Lampung Timur dan regional daerah, juga diharapkan mampu menumbuhkan kawasan baru yang



memberikan *multiplier effect* bagi kawasan di sekitarnya. Sehingga memberikan perkembangan yang signifikan dari pemanfaatan ruang yang semula kawasan minim pemanfaatan menjadi kawasan komersial. Perkembangan wilayah baru tentu saja harus

didukung oleh ketersediaan infrastruktur lainnya, seperti penyediaan energi sebagai penunjang tumbuhnya kawasan industri lokal dan sarana dasar permukiman sebagai penunjang tumbuhnya kawasan permukiman.

Lebih lanjut, adanya rencana pembangunan baru jalan provinsi di wilayah Provinsi Lampung kedepan perlu didukung melalui penataan wilayah dan infrastruktur. Adanya jalan lingkar luar kawasan metropolitan Lampung Raya dipastikan akan memberikan dampak luar biasa bagi kecamatan Sekampung Udik, Bandar Sribhawono, Marga Sekampung, Jabung, Batanghari, Sekampung, Metro Kibang, dan Pekalongan. Rencana



pengembangan jalan provinsi tersebut sangat berpengaruh pada peningkatan kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat. Melalui kebijakan penataan ruang yang tepat, keberadaan jalan tersebut dipastikan akan menopang sektor

transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Perhubungan

Luasnya wilayah Kabupaten Lampung Timur belum didukung oleh ketersediaan sarana perhubungan darat yang memadai. Perkembangan terminal perhubungan darat kurun waktu dua dasawarsa terakhir mengalami penurunan. Dari dua terminal yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu Terminal Mataram Baru dan Terminal Sukadana, saat ini tidak ada yang operasional. Padahal terminal memainkan peran penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan, dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat diperlukan. Secara umum, terminal berfungsi



untuk mengendalikan arus kendaraan dan penumpang umum sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk untuk bergerak atau berhubungan dengan berbagai kegiatannya. Kinerja terminal ditentukan dari kapasitas yang tersedia dan kendaraan umum yang menggunakan terminal.

Penurunan ketersediaan terminal tersebut linear dengan jumlah sarana angkutan antar kecamatan yang sangat minim. Untuk menjangkau lokasi, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten, masyarakat sangat tergantung pada kendaraan pribadi, baik roda empat maupun roda dua yang sangat tidak ideal untuk perjalanan jauh. Angkutan darat massal yang layak dan memadai sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas warga masyarakat yang diperkirakan akan semakin tinggi kedepannya.

Untuk angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) saat ini terus berkembang, meskipun cenderung stagnan. Angkutan bus tersebut didominasi bus DAMRI, yang menempuh rute Labuhan Maringgai-Sukadana-Metro-Terminal Raja Basa. Sedangkan untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) saat ini mulai tersedia bus yang melayani rute Sukadana-Stasiun Gambir Jakarta. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kedepan arah perwujudan jaringan prasarana lalu lintas akan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C di Kecamatan Mataram Baru.

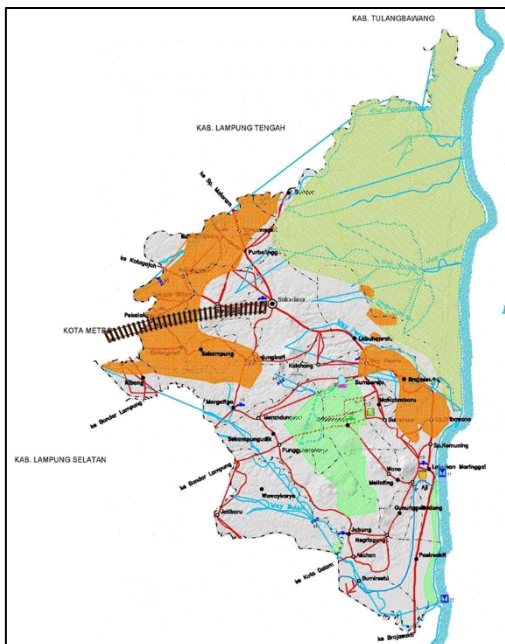
Guna mengantisipasi perkembangan wilayah kedepan, dan semakin tingginya mobilitas penumpang antar kecamatan, arah pengembangan wilayah dalam perwujudan infrastruktur perhubungan darat adalah pembangunan dan pemeliharaan halte di pusat perkotaan di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Jabung, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Way Bungur. Selain itu perlu kembali dilakukan revitalisasi Terminal Sukadana untuk mendukung perkembangan kawasan ibukota kabupaten kedepan.



Masih terkait dengan penyediaan terminal, dalam rangka pengembangan ekspor menunjang pangan ibukota RI dan peningkatan daya saing komoditas pertanian dan peternakan, dapat dikembangkan sub terminal agribisnis di beberapa lokasi. Pemilihan lokasi sub terminal agribisnis disesuaikan dengan lokasi exit tol yang telah tersedia,

sehingga diharapkan akan mampu mengakselerasi perkembangan wilayah kedepan. Pembangunan dan pemeliharaan Sub Terminal Agrobisnis ditetapkan di Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, dan Kecamatan Waway Karya.

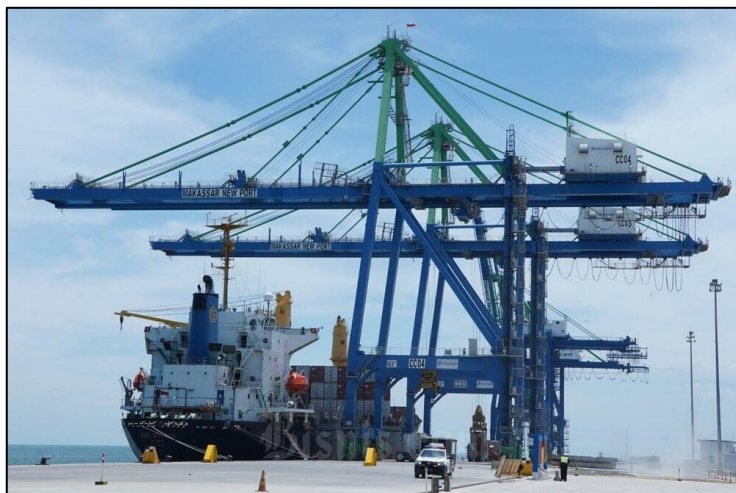
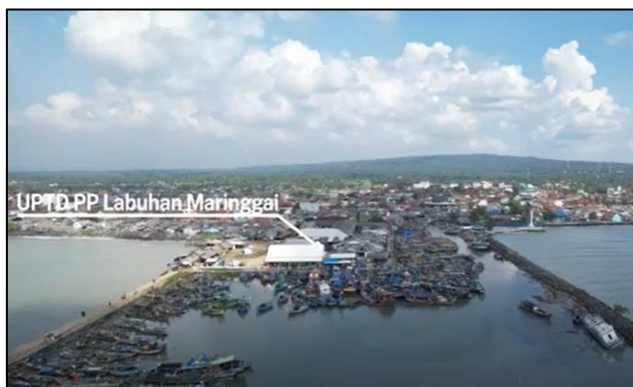
Selanjutnya, terkait dengan sarana transportasi darat lainnya, dalam RTRW Provinsi



Lampung diamanatkan adanya pembangunan sistem jaringan rel dan pembangunan sarana dan prasarana kereta api jalur Pringsewu-Rejosari-Tegineneng-Metro-Sukadana. Pembangunan jaringan kereta api antar daerah tersebut sebaiknya dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memproyeksikan dan merancang keterpaduan transportasi antar moda sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Integrasi jaringan merupakan kunci kesuksesan sistem pelayanan transportasi publik di suatu wilayah atau kota. Hal ini dikarenakan dengan sistem jaringan transportasi publik yang

terintegrasi dapat ditentukan rute jaringan terbaik yang tidak hanya didasarkan pada permintaan kebutuhan perjalanan masyarakat tetapi juga mekanisme jangkauan pelayanan yang optimal.

Selain perhubungan darat, sebagai daerah pesisir Kabupaten Lampung Timur juga memiliki sarana perhubungan laut, khususnya di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti. Sarana perhubungan laut yang tersedia berupa pelabuhan perikanan di Labuhan Maringgai, Way Penet, Kuala Seputih, Way Sekampung, dan Way Seputih. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan kapal di dermaga tersebut mencapai 201 kapal, dengan akumulasi ukuran 2.658.116



GT. Sebagian besar barang dimuat adalah berupa gencar (aneka barang), hewan dan pasir. Dalam operasionalnya, pelabuhan perikanan ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam pengembangan sarana perhubungan laut kedepan, sistem jaringan transportasi

laut dikembangkan dengan didukung oleh adanya pelabuhan dan alur pelayaran, khususnya di Pelabuhan Labuhan Maringgai. Pelabuhan Labuhan Maringgai diproyeksikan sebagai pelabuhan pengumpan regional, dalam rangka meningkatkan peran pelabuhan Labuhan Maringgai sebagai pusat pertumbuhan baru kawasan dan *backbone* logistik daerah yang terintegrasi dengan jaringan transportasi wilayah lainnya. Jarak yang lebih dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan merupakan jalur ALKI-I memberikan keuntungan dalam pengembangan Pelabuhan Maringgai kedepan. Pengembangan Pelabuhan Labuhan Maringgai disertai dengan pengembangan kawasan minapolitan di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti yang terkoneksi dengan wilayah di sekitarnya akan mendukung perwujudan Lampung Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru Pesisir Timur.

### 3. Perumahan dan Permukiman

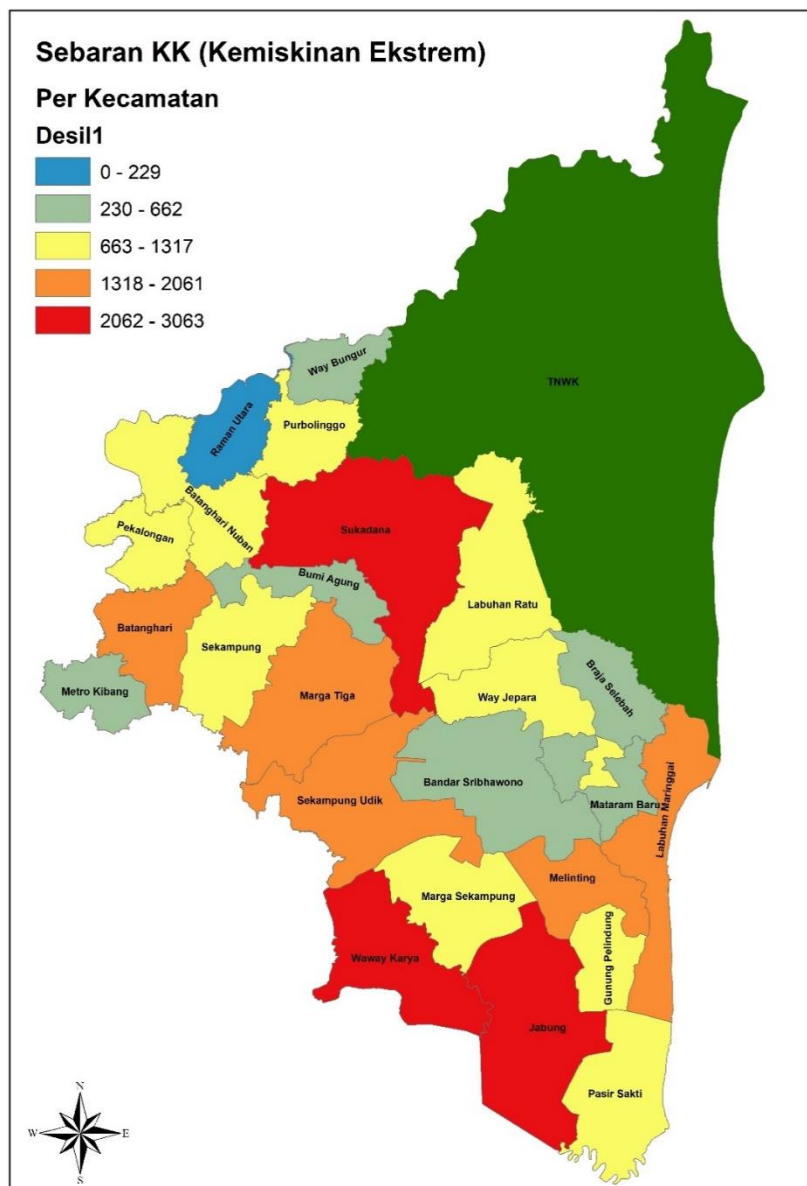
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat miskin ekstrim, dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Keterbatasan infrastruktur yang dimiliki masyarakat miskin ekstrim sangat tinggi dan memerlukan intervensi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah.

Angka kemiskinan ekstrim yang mencapai 29.766 KK di wilayah Kabupaten Lampung Timur memerlukan fokus penanganan yang tepat. Wilayah yang perlu mendapat prioritas utama penanganan adalah Kecamatan Sukadana (Desa Pakuan Aji, Desa Pasar Sukadana, Desa Rantau Jaya Udik II, dan Desa Sukadana Jaya), Kecamatan Jabung (Desa Negara Batin, Desa Jabung, Desa Asahan, Desa Adi Luhur, Desa Mumbang Jaya, dan Desa Pematang Tahalo), dan Kecamatan Waway Karya (Desa Sido Rahayu, Desa Sumber Rejo, Desa Tanjung Wangi, Desa Marga Batin, Desa Mekar Karya, dan Desa Tri Tunggal), yang merupakan kawasan dengan jumlah KK miskin ekstrim terbesar. Selanjutnya adalah Kecamatan Batanghari (Desa Banjar Rejo, Desa Bumi Harjo, dan Desa Sumber Agung), Kecamatan Marga Tiga (Desa Sukaraja Tiga, Desa Gedung Wani, Desa Negeri Kator, dan Desa Tanjung Harapan), Kecamatan Sekampung Udik (Desa Sindang Anom, Desa Gunung Sugih Besar, dan Desa Sidorejo), Kecamatan Melinting (Desa Sidomakmur, Desa Wana, Desa Tebing, dan Desa Tanjung Aji), dan Kecamatan

Labuhan Maringgai (Desa Labuhan Maringgai, Desa Karang Anyar, Desa Muara Gading Mas, dan Desa Sri Gading). Prioritas berikutnya adalah Kecamatan Purbolinggo (Desa Taman Fajar dan Desa Taman Endah), Kecamatan Bumi Agung (Desa Catur Swako dan Desa Bumi Tinggi), Kecamatan Metro Kibang (Desa Marga Jaya dan Desa Sumber Agung), Kecamatan Braja Seleh (Desa Braja Yekti dan Desa Braja Gemilang), Kecamatan Bandar Sribhawono (Desa Sadar Sriwijaya dan Desa Sribhawono), dan Kecamatan Mataram Baru (Desa Mataram Baru dan Desa Teluk Dalem).

Gambar 5.3

Peta Wilayah Prioritas Penanganan Infrastruktur Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem



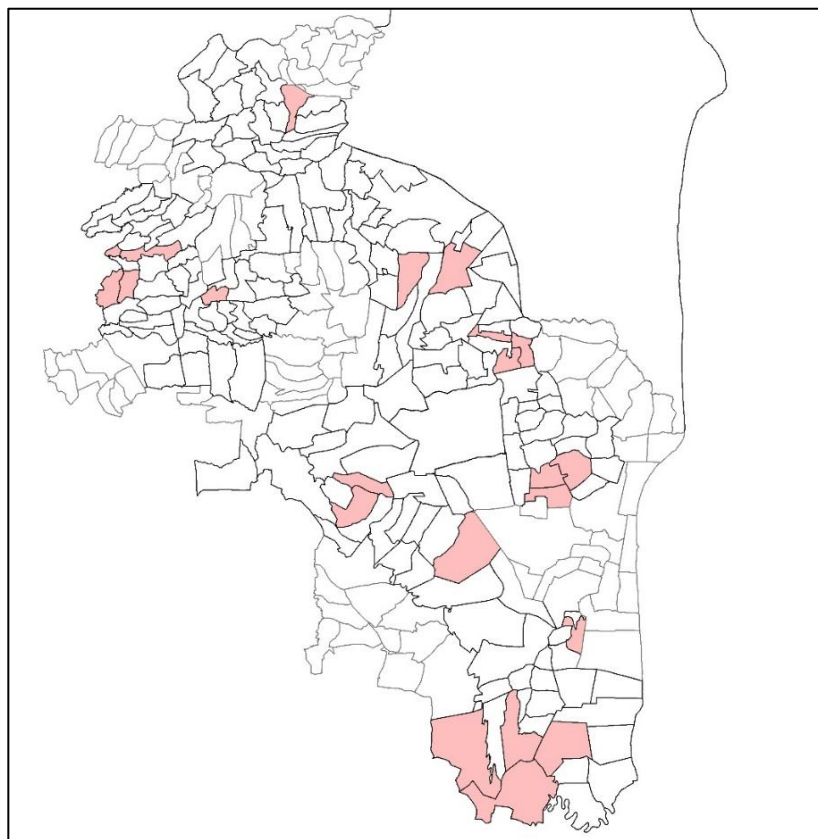
Program prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem, diarahkan pada peningkatan program infrastruktur berbasis masyarakat dan penyediaan perumahan. Program infrastruktur berbasis masyarakat meliputi penyediaan air minum dan sanitasi, dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Sedangkan penyediaan

perumahan dilaksanakan melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).melalui pengembangan skema pembiayaan untuk mengakselerasi target penanganan.

Selanjutnya, arah kebijakan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan akses dan pemenuhan terhadap kebutuhan rumah tinggal akibat peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya diperoleh proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur di tahun 2045 mencapai 266.680 unit. Yang perlu diwaspadai adalah resiko krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah atau bisa disebut sebagai *backlog*. *Backlog* merupakan indikator untuk mengukur kebutuhan rumah yang dihitung dengan angka persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan yang menempati bukan rumah sendiri tetapi memiliki rumah di tempat lain. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023, di Kabupaten Lampung Timur persentase rumah tangga menurut status bangunan tempat tinggal yang ditempati 3,2 persen bukan milik sendiri. Jika dikonversi dalam jumlah unit, ekuivalen dengan 7.312 unit rumah.

Selain *backlog*, kepadatan yang tinggi di suatu kawasan jika tidak diatur dengan baik akan memunculkan kawasan atau permukiman kumuh. Berdasarkan data, lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Lampung Timur mencapai 131 hektar atau sebesar 0,024% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 532.503 hektar.

Gambar 5.4  
Peta Wilayah Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Timur



Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.308/17-SK/2022 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Timur, terdapat 22 kawasan kumuh yang tersebar di Kecamatan Purbolinggo (Dusun 4 Desa Tanjung Inten), Kecamatan Sukadana (Dusun 4 Desa Bumi Nabung Udik), Kecamatan Batanghari (Dusun 5 Desa Banjarejo, Dusun 3 Desa Bumi Harjo), Kecamatan Sekampung (Dusun 5 Desa Sumber Gede), Kecamatan Labuhan Ratu (Dusun 5 Desa Sumber Gede), Kecamatan Labuhan Ratu (Dusun Subing Puspa Barat Desa Rajabasa Lama), Kecamatan Way Jepara (Dusun 3 Desa Labuhan Ratu I, Dusun 1 Desa Braja Sakti, Dusun 4 Desa Sumber Rejo), Kecamatan Mataram Baru (Dusun 4 Desa Mataram Baru), Kecamatan Bandar Sribhawono (Dusun 1 Desa Srimenanti, Dusun 4 Desa Sribhawono), Kecamatan Sekampung Udik (Dusun 3 Desa Pugung Raharjo, Dusun 1 dan 2 Desa Gunung Sugih Besar), Kecamatan Pekalongan (Dusun 4 Desa Adirejo, Dusun 7 Desa Sidodadi), Kecamatan Jabung (Dusun 1 Desa Mekar Jaya, Dusun 2 Desa Mumbang Jaya, Dusun 2 Desa Belimbing Sari), Kecamatan Gunung Pelindung (Dusun 6 Desa Pelindung Jaya), Kecamatan Pasir Sakti (Dusun 2 Desa Rejomulyo), dan Kecamatan Marga Sekampung (Dusun 6 dan 7 Desa Girimulyo).

Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami. Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah daerah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan kawasan permukiman kumuh di lokasi tersebut diarahkan melalui strategi penataan kawasan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan kumuh, yakni melalui *On-site Upgrading* (Perbaikan Fisik Kawasan), *On-site Reblocking* (Penataan Tata Letak Kawasan), *On-site Reconstruction* (Pembangunan Kembali), *Land Sharing* (Pembagian Lahan), dan *Relocation* (Pemindahan Menuju Lokasi Baru).

Kedepan, berdasarkan RTRW arah kebijakan pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan direncanakan tersebar di Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Pekalongan, sebagai pengembangan kawasan permukiman bagian dari Kawasan Penyangga Metropolitan Bandar Lampung dan sekitarnya, Kecamatan Sukadana sebagai kawasan permukiman di pusat pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Waway Karya, Metro Kibang, Sekampung Udik sebagai pengembangan kawasan Penyangga Exit Tol, dan Kecamatan Way Jepara, Mataram Baru, Labuhan Maringgai. Sedangkan untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan direncanakan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

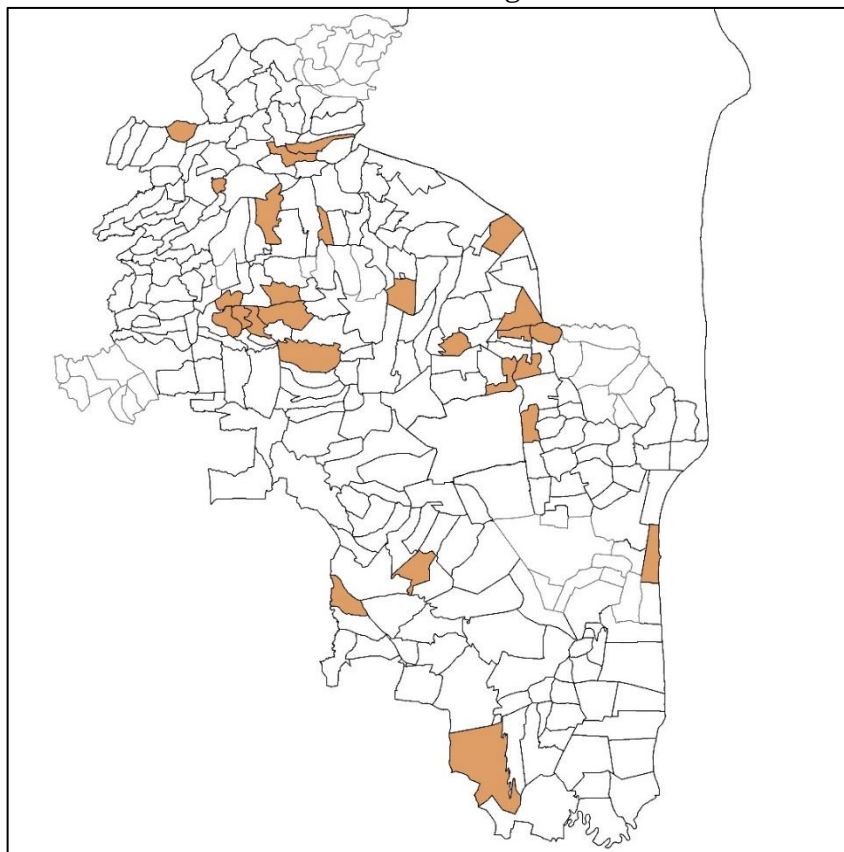
#### 4. Sanitasi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sanitasi sebagai usaha mengendalikan semua faktor lingkungan fisik manusia yang beresiko menimbulkan akibat buruk pada kehidupan manusia, baik kehidupan fisik maupun mental. Mewujudkan lingkungan

yang sehat dalam berbagai aspek kehidupan adalah hal penting. Meskipun menjaga keseimbangan lingkungan bukan tugas yang mudah, apalagi di tengah banyaknya faktor buruk yang dapat merusak lingkungan. Sanitasi yang baik merupakan faktor penting dalam mencegah berbagai macam masalah kesehatan dan gizi, salah satunya adalah untuk mencegah stunting.

Stunting merupakan salah satu permasalahan yang perlu diatasi kedepan. Meskipun prevalensi stunting tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Timur, masih banyak wilayah dengan persentase KK yang sangat berisiko mengalami stunting yaitu di Kecamatan Sukadana (Desa Terbanggi Marga dan Desa Sukadana Selatan), Kecamatan Labuhan Maringgai (Desa Muara Gading Mas), Kecamatan Jabung (Desa Belimbing Sari). Kecamatan Sekampung (Desa Sumber Gede, Desa Hargo Mulyo, Desa Wonokarto, Desa Giri Kelopo Mulyo, Desa Sidodadi, dan Desa Sumber Sari), Kecamatan Way Jepara (Desa Sri Rejosari, Desa Sumber Rejo, Desa Braja Asri, dan Desa Labuhan Ratu Baru), Kecamatan Purbolinggo (Desa Taman Cari dan Desa Taman Endah), Kecamatan Marga Tiga (Desa Negeri Katon), Kecamatan Batanghari Nuban (Desa Kedaton II dan Desa Negara Ratu), Kecamatan Bandar Sribhawono (Desa Mekar Jaya), Kecamatan Waway Karya (Desa Tri Tunggal) Kecamatan Labuhan Ratu (Desa Labuhan Ratu IV, Desa Rajabasa Lama I, Desa Labuhan Ratu VII), dan Kecamatan Marga Sekampung (Desa Peniangan).

Gambar 5.5  
Peta Wilayah Prioritas Peningkatan Sanitasi Lingkungan di Kawasan Berisiko Tinggi Stunting



Prioritas penanganan difokuskan pada upaya peningkatan kondisi lingkungan dan peningkatan akses air bersih, sarana sanitasi layak, dan pengelolaan sampah. Penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi melalui optimalisasi program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) maupun program sejenis kedepan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Intervensi lain yang dilakukan juga mencakup penyediaan infrastruktur air limbah berbasis masyarakat dan tempat pengelolaan sampah terpadu.

#### 5. Sumber Daya Air

Sumber daya air menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat berguna atau memiliki nilai potensial yang tinggi untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu pengelolaan sumber daya air menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur kedepan. Dengan sumber daya air yang memadai tentunya kebutuhan makhluk hidup akan air baik pada masa ini maupun masa yang akan datang dapat terpenuhi. Pengelolaan sumber daya air mencakup upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, hingga pengupayaan penggunaan sumber daya air dengan optimal supaya berhasil guna sekaligus berdaya guna.

Sumber air bersih bagi masyarakat Lampung Timur terdiri dari sumur pompa, sumur gali, mata air, air sungai, dan PPAB. Sumber air yang dipergunakan adalah air bawah tanah (ABT), air tanah dalam (ATD), dan pengolahan air sungai. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2045 mencapai 73 juta kubik pertahun.

Arah pengembangan rencana sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, yang meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian daya rusak air.

Sebagai daerah dengan lahan pertanian terluas kedua di Provinsi Lampung, kebutuhan air untuk mencukupi kebutuhan budidaya pertanian sangat besar. Sumber air lahan sawah seluas 32.836 hektar bersumber dari irigasi, 28.792 hektar sawah dan 108.947 hektar ladang bersumber dari air hujan, rawa, embung, dan sungai. Wilayah sungai yang melintasi Lampung Timur adalah wilayah sungai Seputih-Sekampung yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, dengan daerah aliran sungai meliputi DAS Seputih, DAS Wako, DAS Kapuk, DAS Way Kambas, DAS Jepara, DAS Nibung, dan DAS Sekampung.

Untuk mengaliri lahan pertanian, jaringan irigasi di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional, Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Timur meliputi DI Way Sekampung dengan luas kurang lebih 33.602 hektar;
  1. DI Way Jepara dengan luas kurang lebih 6.651 hektar;
  2. DI Way Curup dengan luas kurang lebih 4.689 hektar;
  3. DI KPD Batanghari dengan luas kurang lebih 4.143 hektar;
  4. DI KPD Pekalongan dengan luas kurang lebih 4.222 hektar;
  5. DI KPD Purbolinggo dengan luas kurang lebih 7.680 hektar;
  6. DI KPD Raman Utara dengan luas kurang lebih 6.034 hektar;
  7. DI KPD Rantau Fajar dengan luas kurang lebih 6.007 hektar; dan
  8. DI KPD Sekampung dengan luas kurang lebih 5.516 hektar.
- b. DI kewenangan kabupaten meliputi:
  1. DI Way Sumber Maju dengan luas kurang lebih 200 hektar;
  2. DI Way Bekarang Atas dengan luas kurang lebih 500 hektar;
  3. DI Way Kekit dengan luas kurang lebih 20,49 hektar;
  4. DI Way Lehan dengan luas kurang lebih 35,11 hektar;
  5. DI Way Kawat dengan luas kurang lebih 114,43 hektar;
  6. DI Way Ramayana dengan luas kurang lebih 100 hektar;
  7. DI Way Bekarang Bawah dengan luas kurang lebih 450 hektar;
  8. DI Way Tangkit dengan luas kurang lebih 20,49 hektar;
  9. DI Way Rawa mangun dengan luas kurang lebih 16,24 hektar;
  10. DI Way Tulang Pies dengan luas kurang lebih 20,68 hektar;
  11. DI Way Napal I dengan luas kurang lebih 13,32 hektar;
  12. DI Way Karang Anyar dengan luas kurang lebih 325 hektar;
  13. DI Way Rawa Sukoharjo dengan luas kurang lebih 21,18 hektar;
  14. DI Way Dono Mulyo dengan luas kurang lebih 78,29 hektar;
  15. DI Way Sumbu Sari I dengan luas kurang lebih 58,8 hektar;
  16. DI Way Handak dengan luas kurang lebih 168 hektar;
  17. DI Way Rawa Tulung Sunting dengan luas kurang lebih 24,96 hektar;
  18. DI Way Bali dengan luas kurang lebih 66 hektar;
  19. DI Way Rawa Kelinting dengan luas kurang lebih 7,13 hektar;
  20. DI Way Pugung Raharjo dengan luas kurang lebih 32,87 hektar;
  21. DI Way Rawa Perbatasan dengan luas kurang lebih 38,39 hektar;
  22. DI Way Kerikil dengan luas kurang lebih 37,64 hektar;
  23. DI Way Rawa Ganefo dengan luas kurang lebih 24,13 hektar;
  24. DI Way Tulung Braja dengan luas kurang lebih 36,42 hektar;
  25. DI Way Tambak Luhur I dengan luas kurang lebih 42,8 hektar;
  26. DI Way Tambak Luhur II dengan luas kurang lebih 10 hektar;
  27. DI Way Rawa Tanjung Kesuma dengan luas kurang lebih 29,09 hektar;

28. DI Way Tegal Ombo dengan luas kurang lebih 62,50 hektar;
29. DI Way Tegal Yoso dengan luas kurang lebih 60 hektar;
30. DI Way Batu Keting dengan luas kurang lebih 374 hektar; dan
31. DI Way Andak II dengan luas kurang lebih 52,96 hektar.

Berdasarkan data, pada tahun 2022 kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten 73,97% berada dalam kondisi rusak berat, dan hanya 8,5% yang dalam kondisi baik. Dalam mendukung peningkatan sektor pertanian, sebagai sektor penting dalam pembangunan daerah, percepatan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi kewenangan kabupaten mutlak dilakukan.

Selanjutnya, arah pengembangan sumber air baku untuk air bersih diarahkan pada pengelolaan kondisi sumber air baku di wilayah:

- a. Sungai Way Sekampung;
- b. sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung dan Danau Way Jepara;
- c. Danau Beringin di Kecamatan Sukadana.

Lebih lanjut, terkait dengan pengembangan jaringan air bersih meliputi pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Purbolinggo.

Arah pengembangan rencana sistem penyediaan air minum meliputi peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk, pengembangan sistem distribusi melalui pipa transmisi PDAM di Kecamatan Bandar

Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana, dan rencana distribusi air minum di kawasan perkotaan akan



dikembangkan dengan sistem perpipaan. Sedangkan arah pengembangan sistem pengendalian daya rusak air meliputi perlindungan terhadap abrasi pantai dengan pengembangan hutan mangrove di sepanjang pantai Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.

## 6. Persampahan

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai ‘pintu masuk’ untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Dengan proyeksi jumlah penduduk Lampung Timur di tahun 2045 yang mencapai 1.127.946 jiwa, maka total produksi sampahnya akan mencapai 389.353 ton per tahun. Jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola secara benar tentu akan menimbulkan banyak masalah. Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah Kabupaten Lampung Timur kedepan diarahkan pada pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Sukadana dengan sistem *sanitary landfill*, serta rencana pengembangan TPA di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting. Selain pengembangan TPA, direncanakan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Sekampung Udik, Bandar Sribhawono, Sekampung, Pekalongan, Melinting, Jabung, Batanghari, Way Bungur, Gunung Pelindung, Mataram Baru, Batanghari Nuban, Raman Utara, Labuhan Maringgai, Braja Sebah, dan Labuhan Ratu.

## 7. Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi yang berkualitas berdampak pada peningkatan aspek-aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat. Kemajuan



teknologi informasi saat ini dan kedepan membutuhkan sistem jaringan telekomunikasi yang merata dan handal. Sistem jaringan telekomunikasi jaringan tetap di Kabupaten Lampung Timur, sementara hanya mencakup Kecamatan Sukadana, Pekalongan, Way Jepara, Labuhan Maringgai, Sekampung, Metro Kibang, Batanghari, dan Pekalongan. Sedangkan untuk jaringan bergerak seluler telah beroperasi total 299 *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah Kabupaten Lampung Timur, meskipun belum merata di 264 desa. Masih terdapat blank spot di beberapa spot wilayah desa.

Arah pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah mencakup pengembangan serat optik menghubungkan antar perkotaan di Kabupaten Lampung Timur, serta penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G).

#### 8. Energi

Sistem jaringan energi adalah pondasi dari pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Infrastruktur minyak, gas bumi dan listrik memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi dalam suatu wilayah. Sistem jaringan energi di Kabupaten Lampung Timur secara eksisting terdiri dari jaringan infrastruktur gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur gas bumi melintasi Kecamatan Raman Utara, Batanghari Nuban, Sukadana, Labuhan Ratu, Braja Selehah, dan Labuhan Maringgai. Melalui pipa *South Sumatera West Java (SSWJ)* gas bumi dialirkan dari Stasiun Gas Bumi Pagardewa di Sumatera Selatan menuju Lampung Timur, dan menjadi penopang kebutuhan gas bumi untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Jawa Bagian Barat.



Berdasarkan data Perusahaan Gas Negara sebagai pengelola jaringan gas bumi tersebut, saat ini pemanfaatan gas bumi wilayah Lampung hanya sekitar 40 persen dari kapasitas pipa yang ada. Kapasitas pipa jaringan distribusi yang ada saat ini mampu mengalirkan 80 Mmscfd. Dengan kondisi

tersebut, pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat terbuka khususnya dalam penyediaan energi bagi kawasan industri maupun proyek strategis lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Kedepan, pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri, juga perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melalui pengembangan jalur pipa rumah tangga, terutama pada wilayah yang terlintasi jalur pipa gas dan pada kawasan perkotaan strategis dan cepat tumbuh. Diperkirakan pemanfaatan gas bumi sebagai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan kedepan masih akan memainkan peran penting di wilayah Indonesia. Peran gas alam dalam transisi energi menjadi lebih penting karena sifat gas yang mudah ditransportasikan dan disimpan, serta faktor emisi karbon yang relatif sangat rendah. Selanjutnya, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik

merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terdapat di Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Braja Selehah. Untuk jaringan transmisi tenaga listrik meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150KV, yaitu jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono; jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari; dan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, dan Sukadana.

Pada tahun 2045, kebutuhan listrik di Kabupaten Lampung Timur untuk mengalir 266.680 unit rumah mencapai 1,3 juta MWh. Kebutuhan listrik tersebut belum memperhitungkan kebutuhan listrik bagi peningkatan sektor industri dan fasilitas lainnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 fasilitas perumahan bersumber penerangan listrik non PLN di Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,05 persen, atau ekuivalen dengan sekitar 114 rumah yang saat ini belum teraliri listrik. Meskipun ketenagalistrikan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk mendorong teralirinya listrik untuk seluruh rumah di daerah melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Kedepan, arah kebijakan pengembangan wilayah khususnya dalam perwujudan kemandirian energi daerah adalah pemanfaatan Bendungan Marga Tiga dan Bendungan



Way Jepara sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Apung. Dengan luas wilayah genangan yang masing-masing mencapai 2.218 hektar dan 3.345 hektar, potensinya sangat luar biasa untuk menjadi lokasi pengembangan PLTS

apung daerah. Tersedianya listrik yang bersumber dari PLTS Apung di kedua bendungan tersebut dapat mendukung suplai kebutuhan listrik di rencana pengembangan kawasan industri terpadu Lampung Timur dan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Lampung Raya kedepan. Selain itu ketergantungan suplai listrik dari Provinsi Sumatera Selatan akan dapat dikurangi dengan adanya proyek PLTS Apung ini. Dapat dikatakan,

proyek PLTS Apung ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kemandirian daerah. Berdasarkan hasil kalkulasi investasi, diperkirakan dari kedua kawasan bendungan tersebut, dapat diperoleh total listrik sekitar 1.132 MW.

### **5.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Dalam proses pembangunan daerah sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan menimbulkan sejumlah dampak, dimana dampak tersebut bisa saja berdampak baik maupun buruk. Sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas dimana penggunaannya akan menciutkan kualitas sumber daya alam sehingga mengurangi kemampuan menopang pembangunan secara berlanjut dan menimbulkan gangguan pada keserasian hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Pembangunan daerah jangka panjang idealnya memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi peluang generasi masa depan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Timur ditetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Taman Nasional Way Kambas, Gunung Balak sebagai kawasan lindung yang berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Jabung. Selanjutnya kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, serta hutan Kota di Kecamatan Sukadana.

Arah kebijakan dalam pengelolaan kawasan tersebut adalah pencegahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahnya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam. Arah kebijakan selanjutnya adalah mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, merencanakan pemantapan kawasan lindung dilakukan dengan melibatkan masyarakat agar berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung, mengendalikan pencemaran serta pembatasan aktivitas pertambangan pada kawasan pesisir; serta menjaga kelestarian biota laut dan mengendalikan fungsi lindung kawasan pantai timur. Lebih lanjut, pengelolaan dan perencanaan SDA harus sesuai zonanya, seperti zona industri, zona pemukiman, zona pertanian dan lain sebagainya.



Dengan daya dukung lingkungannya, setiap daerah dibangun sesuai dengan peruntukan Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW perlu ditingkatkan guna menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan wilayah tersebut. Selanjutnya untuk mengendalikan kerusakan

lingkungan, perlu pula diperhatikan pengelolaan DAS, rehabilitasi dan reklamasi areal bekas penambangan galian C serta pengelolaan wilayah pantai dan pesisir secara terpadu.

### 5.2.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Pengembangan Berdasarkan Klaster Wilayah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan untuk mengurangi kesenjangan, dilakukan pendekatan pembangunan wilayah berdasarkan klaster. Pengklasteran wilayah berbasis kecamatan, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kedekatan jarak, serta fungsi sistem pusat kegiatan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Pendekatan klaster wilayah dengan salah satu wilayah kecamatan menjadi pusat pertumbuhan yang akan memberikan efek sebar (*spread effect*) ataupun efek tetesan kebawah (*trickle down effect*) bagi wilayah penopang di sekitarnya. Kecamatan pusat pertumbuhan menjadi penggerak utama pembangunan daerah yang selanjutnya menyebarkan hasil pembangunan dan dampak pertumbuhannya ke wilayah sekitar.

Untuk memperkuat efek sebar dan efek tetesan kebawah pada wilayah penopang, implementasi arah kebijakan pengembangan wilayah difokuskan pada :

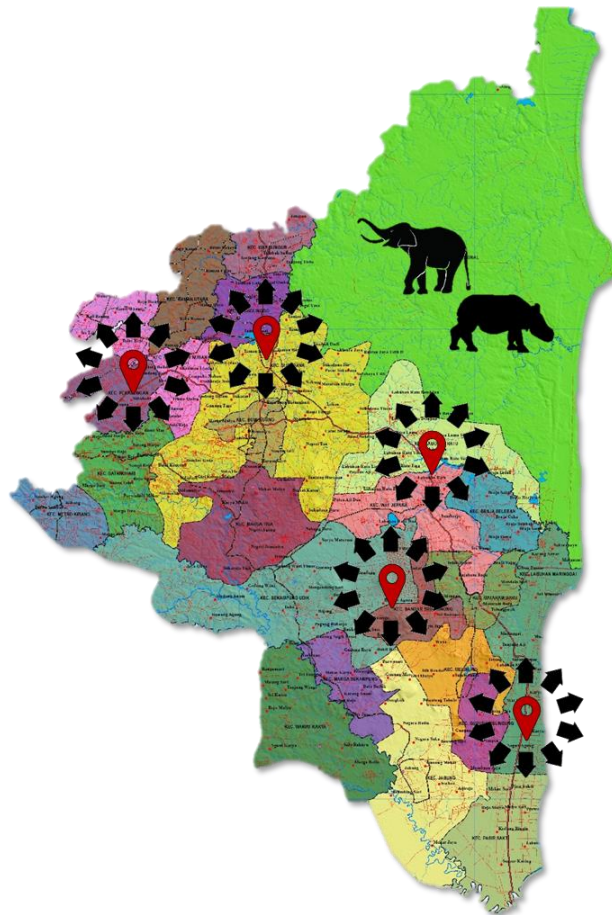
1. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan pembangunan antar pusat pertumbuhan dengan wilayah penopang.
2. Pembangunan wilayah penopang harus seimbang antara penawaran (*supply side*) dengan sisi permintaan (*demand side*)
3. Pada wilayah penopang yang memiliki sumber daya yang potensial dan prospek pasar yang kuat, agar dibangun proyek fisik (investasi fisik) infrastruktur yang mampu menciptakan *comparative advantage*, *marketability*, dan *sustainability*.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah penopang.

Klaster wilayah kecamatan pada rencana pembangunan jangka panjang diterapkan berdasarkan potensi pusat pertumbuhan dan kawasan strategis kabupaten,

dimana pusat pertumbuhan menjadi pusat barang dan jasa yang secara terperinci sebagai pusat industri, pusat perdagangan, perbankan, perusahaan, jasa profesional, jasa administrasi, pelayanan pendidikan dan hiburan bagi kawasan penopang sekitarnya. Berdasarkan potensi tersebut, klaster wilayah kecamatan terbagi sebagai berikut:

1. Klaster I (Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga)
2. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang)
3. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selebah, Mataram Baru)
4. Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung)
5. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya)

Gambar 5.6  
Klaster Pengembangan Wilayah Kecamatan



Rencana struktur ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 membagi kawasan perkotaan kecamatan sebagai kawasan perkotaan penyelenggara fungsi sistem pusat kegiatan. Sistem pusat kegiatan RTRW Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Selanjutnya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Lebih lanjut, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Khusus Perkotaan Sukadana, dengan ditetapkannya Perda Perubahan RTRW Provinsi Lampung, fungsi sistem pusat kegiatan Perkotaan Sukadana disesuaikan menjadi PKL. Kedudukan klaster berdasarkan hirarki wilayah pada rencana tata ruang wilayah ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.16  
Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Hirarki Wilayah RTRW

Klaster	Kecamatan	Hirarki Wilayah Kecamatan pada RTRW Kab/Prov	
I	Sukadana - Purbolinggo - Way Bungur - Bumi Agung - Marga Tiga	PKL	Perkotaan Sukadana
		PPK	Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Way Bungur, Perkotaan Marga Tiga
		PPL	Perkotaan Bumi Agung
II	Pekalongan - Raman Utara - Batanghari Nuban - Sekampung - Batanghari - Metro Kibang	PKLp	Perkotaan Pekalongan
		PPK	Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang
III	Way Jepara - Labuhan Ratu - Braja Selehah - Mataram Baru	PKL	Perkotaan Way Jepara
		PPK	Perkotaan Labuhan Ratu, Perkotaan Braja Selehah, Perkotaan Mataram Baru
		PPL	Perkotaan Braja Selehah
IV	Labuhan Maringgai - Pasir Sakti - Melinting - Gunung Pelindung	PKL	Perkotaan Labuhan Maringgai
		PPK	Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung
V	Bandar Sribhawono - Sekampung Udik - Marga Sekampung - Jabung - Waway Karya	PKLp	Perkotaan Bandar Sribhawono, Perkotaan Sekampung Udik
		PPK	Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Jabung
		PPL	Perkotaan Waway Karya

Klaster wilayah kecamatan juga merujuk pada potensi alam dan potensi pengembangan infrastruktur kedepan, berikut klaster wilayah kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.17  
Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Potensi Wilayah

Klaster	Kecamatan	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
I	Sukadana - Purbolinggo - Way Bungur - Bumi Agung - Marga Tiga	Sukadana sentra tanaman pangan, perkebunan, lada, peternakan, galian	Pusat pemerintahan kabupaten, pusat layanan jasa keuangan dan kesehatan, Kawasan Kota Tua (kawasan wisata budaya), kawasan wisata alam, kawasan permukiman berkepadatan tinggi, pasar daerah, jaringan pipa gas, TPA, agroindustri, ruas jalan kolektor primer K1, rencana jaringan kereta api dan tol
		Purbolinggo sentra tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan	Saluran irigasi teknis, perguruan tinggi, kawasan permukiman berkepadatan sedang, pasar daerah, ruas jalan kolektor primer K1
		Way Bungur sentra tanaman pangan, biofarmaka, dan perikanan	Saluran irigasi teknis, agroindustri, ruas jalan kolektor primer K1
		Bumi Agung sentra tanaman pangan, hortikultura, lada	Pengembangan jasa skala kecamatan
		Marga Tiga sentra tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, perkebunan, lada, galian	Bendungan Marga Tiga, PLTS, kawasan permukiman berkepadatan sedang
II	Pekalongan - Raman Utara - Batanghari Nuban - Sekampung - Batanghari - Metro Kibang	Pekalongan sentra pembibitan tanaman, tanaman hias, tanaman pangan, hortikultura, peternakan	Balai Benih Hortikultura (kawasan peruntukan wisata buatan), agrowisata, perguruan tinggi kawasan permukiman berkepadatan sedang, pusat perdagangan dan jasa, ruas jalan kolektor primer K1, rencana jaringan kereta api, kawasan peruntukan industri kecil, pasar daerah
		Raman Utara sentra tanaman pangan, peternakan	Saluran irigasi teknis
		Batanghari Nuban sentra tanaman pangan	Agroindustri, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan peruntukan industri kecil
		Sekampung sentra tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	Saluran irigasi teknis, ruas jalan kolektor primer, pasar daerah
		Batanghari sentra tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias, peternakan, dan perikanan	Saluran irigasi teknis, ruas jalan kolektor primer
		Metro Kibang sentra tanaman pangan lahan kering, hortikultura, biofarmaka	ruas jalan kolektor primer
III	Way Jepara - Labuhan Ratu - Braja Seleh - Mataram Baru	Way Jepara sentra hortikultura, tanaman pangan, jamur, biofarmaka, lada, dan peternakan	Bendungan Jepara (kawasan wisata alam), kawasan permukiman berkepadatan tinggi, kawasan pendidikan, pasar daerah, dan pondok pesantren, PLTS, TPA, ruas jalan kolektor primer K1
		Labuhan Ratu sentra tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	TNWK (kawasan wisata alam), kawasan peruntukan wisata buatan, pasar daerah, agroindustri, agrowisata, jaringan pipa gas, TPS, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan peruntukan industri kecil
		Braja Seleh sentra tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, dan perkebunan	jaringan pipa gas, TPS, rencana pembangunan embung
		Mataram Baru sentra tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Terminal, rest area, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan wisata alam, kawasan peruntukan industri kecil
IV	Labuhan Maringgai - Pasir Sakti - Melinting - Gunung Pelindung	Labuhan Maringgai sentra perikanan, hortikultura, galian	Minapolitan, kawasan permukiman berkepadatan tinggi, jaringan pipa gas, TPS, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan wisata alam, pasar daerah
		Pasir Sakti sentra perikanan, peternakan, perikanan, dan galian	Kawasan minapolitan, kawasan permukiman berkepadatan sedang, ruas jalan kolektor primer K1
		Melingting sentra perkebunan dan hortikultura, lada	TPA, desa tradisional wana dan Keratuan Melinting (kawasan wisata budaya)
		Gunung Pelindung sentra perkebunan, lada	TPS, rencana jaringan air bersih

Klaster	Kecamatan	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
V	Bandar Sribhawono - Sekampung Udik - Marga Sekampung - Jabung - Waway Karya	Bandar Sribhawono sentra tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan, lada, peternakan	Kawasan Industri Terpadu, jaringan listrik, kawasan permukiman berkepadatan sedang, ruas jalan kolektor primer
		Sekampung Udik sentra tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan, biofarmaka, peternakan	Agroindustri, TPA, ruas jalan kolektor primer, Kota Baru Provinsi, Taman Purbakala Pugung Raharjo (kawasan wisata budaya), kawasan permukiman berkepadatan sedang
		Marga Sekampung sentra hortikultura, biofarmaka, perkebunan, peternakan	kawasan peruntukan industri kecil, kawasan resapan air
		Jabung sentra tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, galian	Agroindustri, pengembangan sumber mata air, TPS, bendung gerak, kawasan permukiman berkepadatan sedang
		Waway Karya sentra tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, perkebunan, peternakan	Kawasan industri kecil, rencana pembangunan embung,

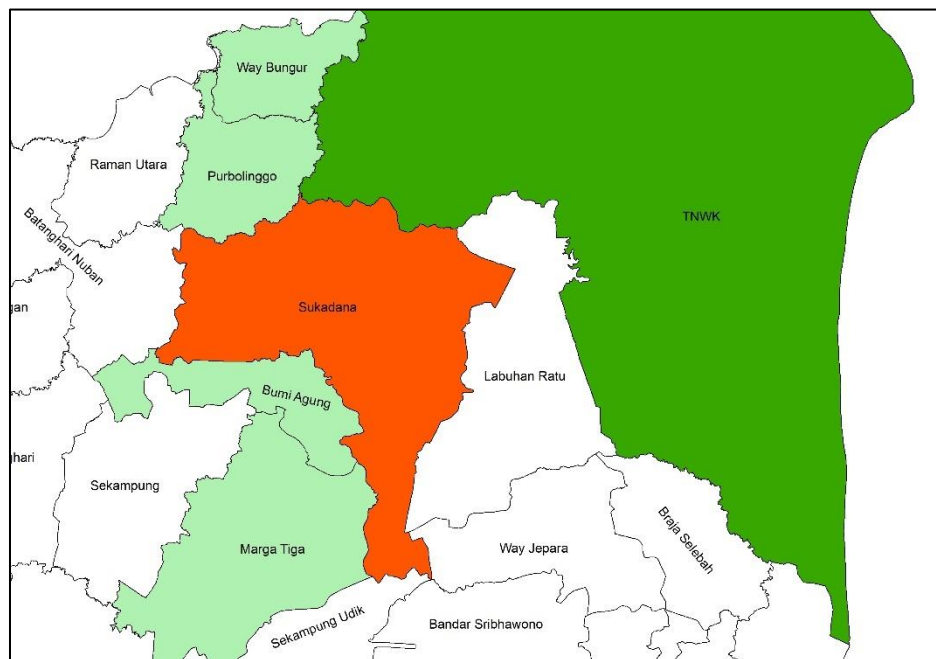
Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan kewilayahan, pada setiap klaster wilayah akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Transformasi sosial bertujuan untuk pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Transformasi ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di kecamatan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

1. Klaster I (Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga)

Peluang pengembangan wilayah Klaster I ini didukung dari letak geografis yang sebagian besar dilalui jalan lintas pantai timur sebagai ruas jalan kolektor primer K1 yang merupakan ruas jalan utama yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Timur dari ujung barat ke wilayah timur. Ruas jalan ini juga menghubungkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah. Dengan posisi tersebut, ruas jalan nasional ini dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan baik logistik maupun perorangan dan merupakan *backbone infrastructure* di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Posisi strategis di ruas jalan tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan ini kedepan. Posisi strategis di pinggir jalan nasional tersebut, dan status sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Timur serta pusat dari perkantoran pemda maupun pusat layanan jasa memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah di kecamatan ini kedepan. Adanya gedung perkantoran pemda, layanan perbankan, rumah sakit daerah, dan kantor instansi vertikal, mendorong pertumbuhan Perkotaan Sukadana lebih maju dibandingkan kecamatan lain disekitarnya. Pertumbuhan tersebut terbukti memberikan efek pengganda bagi sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut akan membutuhkan pasokan bahan baku dan tenaga kerja secara kontinu. Dalam teori pengembangan wilayah, kebutuhan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pusat pertumbuhan, akan ditopang oleh kawasan atau kecamatan di sekitarnya. Kebutuhan akan bahan baku dan tenaga

kerja disediakan oleh kecamatan yang menjadi penopang di sekitarnya. Bahan baku yang dibutuhkan oleh Perkotaan Sukadana sebagai pusat pertumbuhan sebagian besar berupa produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Marga Tiga dapat menopang kebutuhan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa keempat kecamatan tersebut merupakan kecamatan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Gambar 5.7  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster I  
Kec. Sukadana, Kec. Purbolinggo, Kec. Way Bungur, Kec. Bumi Agung, Kec. Marga Tiga



Relasi ekonomi antara Kecamatan Sukadana dengan kecamatan lain disekitarnya diharapkan dapat menciptakan efek sebar (*spread effect*) dan tetesan kebawah (*trickle down effect*) dimana pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Sukadana, menjadi penggerak utama pembangunan yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Efek sebar ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya unit-unit ekonomi baru dan industri pengolahan berbasis bahan baku unggulan lokal di kecamatan sekitarnya.

Salah satu tujuan utama pengembangan klaster kawasan ini adalah peningkatan sektor perdagangan dan jasa berbasis peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dengan mendorong upaya hilirisasi. Dalam dunia bisnis, hilirisasi sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Melalui pengolahan produk agar menjadi lebih bernilai, harga jual dapat ditingkatkan, memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Proses ini juga

berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Rencana pengembangan jalan tol dan jaringan kereta api yang melintasi Sukadana akan semakin memberikan dampak positif bagi perkembangan klaster kawasan kedepan. Pembangunan infrastruktur tersebut memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha. Sejalan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa serta dalam rangka transformasi ekonomi, pengembangan *smart city* dan *creative hub* akan menjadi cikal bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam peningkatan nilai tambah komoditas, optimasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, sebagai penggerak ekonomi daerah.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Penggerak Ekonomi Daerah yang Inklusif, Terintegrasi, Merata, dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi, yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masa depan
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antara ibukota kabupaten dengan kawasan lainnya, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis ibukota, kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pariwisata, kawasan konservasi, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
4. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastruktur* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, dan penguatan infrastruktur perkotaan.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah dan penguatan stabilitas ketentraman dan ketertiban daerah
6. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang inklusif, terintegrasi, merata, dan berkelanjutan.
7. Penuntasan RDTR Kecamatan Sukadana, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Marga Tiga dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah

perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Arah mempercepat pemenuhan dan kemantapan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup klaster kawasan meliputi dan tidak terbatas pada:

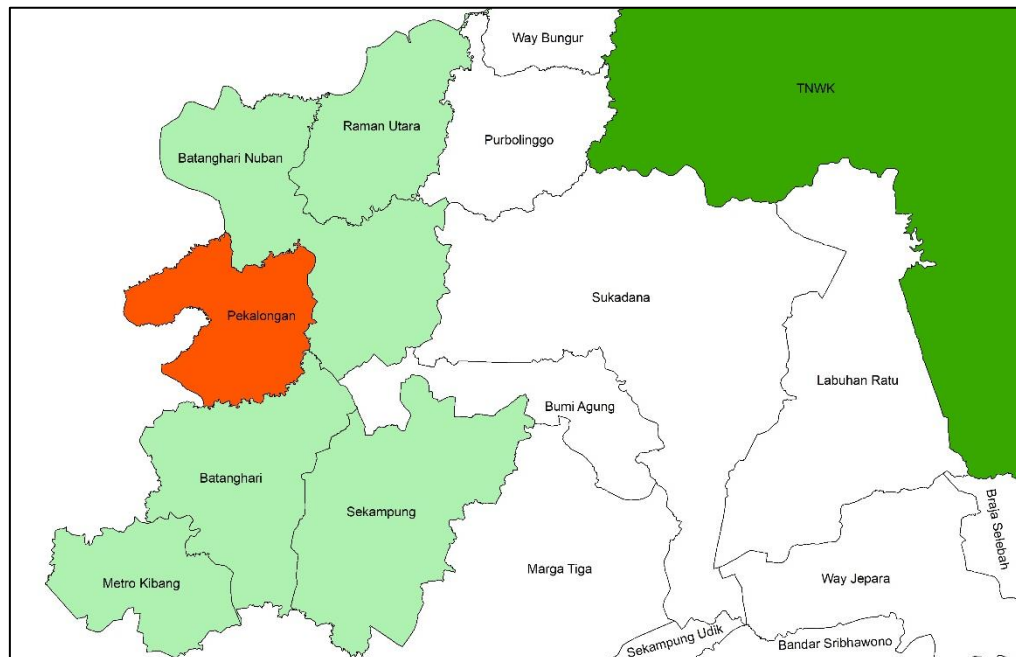
1. Penataan ruang perkotaan dan kawasan publik
2. Revitalisasi kawasan kota tua berbasis kawasan konservasi pusat kota
3. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia
4. Pemafaatan energi baru dan terbarukan sebagai pasokan wilayah, khususnya pengembangan PLTS di Bendungan Marga Tiga
5. Pengembangan *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
6. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
7. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK, antara lain melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok
8. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat
9. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi dan perubahan iklim
10. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan
11. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana
12. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
13. Pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi
14. Peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten
15. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir
16. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
17. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya litigasi risiko bencana
18. Penuntasan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan
19. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
20. Dukungan pengembangan jaringan kereta api Pringsewu-Pesawaran-Metro-Sukadana
21. Percepatan pengembangan jalan tol antar kota Provinsi Lampung
22. Percepatan pengembangan jalan lingkaran luar Metropolitan Lampung Raya

23. Pembangunan ruas jalan jalur lambat Jalinpantim di kawasan Perkotaan Sukadana, mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan.
  24. Peremajaan dan penataan ruang kota strategis.
  25. Rehabilitasi, pembangunan dan penataan bangunan gedung perkantoran pmda dan kecamatan yang modern, nyaman, dan berkarakter
  26. Pembangunan dan penataan ruang dan bangunan perbatasan wilayah
  27. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi
  28. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
  29. Eliminasi BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
  30. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan seluruh sampah terangkut dan tertangani dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah
2. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang)

Potensi klaster kawasan ini adalah besarnya sumber daya alam yang dimiliki. Kecamatan di klaster ini adalah sentra tanaman padi, sentra peternakan, perikanan, perkebunan, dan hortikultura. Letaknya yang strategis di ruas jalan kolektor primer K1 dan kolektor primer kewenangan provinsi, memberikan dorongan bagi perkembangan klaster ini kedepan.

Pusat pertumbuhan kawasan ini adalah Perkotaan Pekalongan. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Pekalongan sebagai sentra perdagangan pembibitan tanaman di Provinsi Lampung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi klaster kedepan. Kecamatan di sekitarnya menjadi penopang pusat pertumbuhan dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh pusat pertumbuhan seperti bahan baku dan tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan Kecamatan Pekalongan, potensi kecamatan disekitarnya pun sangat besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya sentra perdagangan perikanan, peternakan, dan tanaman pangan. Komoditas unggulan tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kecamatan tersebut.

Gambar 5.8  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster II  
Kec. Pekalongan, Kec. Raman Utara, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Sekampung,  
Kec. Batanghari, Kec. Metro Kibang



Daya dorong dan potensi pertumbuhan kawasan ini lainnya adalah letaknya yang berbatasan langsung dengan Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro. Perkembangan Kota Metro saat ini memberikan dampak terhadap kemajuan beberapa wilayah desa yang berbatasan langsung, khususnya Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, dan Kecamatan Metro Kibang, mulai dari pembangunan sarana pendidikan hingga sarana perdagangan dan jasa. Keterbatasan ruang yang dimiliki Kota Metro menjadi peluang bagi perkembangan wilayah ini yang relatif masih tersedia. Selain itu, kebutuhan terhadap komoditas pangan dan sumber daya tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Metro menjadi peluang pertumbuhan ekonomi kawasan ini kedepan, khususnya di sektor agribisnis dan industri pangan lokal. Besarnya potensi dan sumber daya alam yang dimiliki sebagai sentra komoditas pangan berkualitas menjadi pendorong tumbuhnya kegiatan industri berorientasi ekspor, yang menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pusat pertumbuhan Kota Metro.

Permintaan eksternal dan peningkatan ekspor yang dihasilkan kawasan ini kedepan diarahkan untuk membentuk keterkaitan ekonomi, baik kebelakang “*backward linkage*” (sektor produksi) maupun kedepan “*forward linkage*” (sektor pelayanan). Relasi pusat pertumbuhan dan kawasan penopang kedepan diarahkan pada efek sebar (*spread effect*) atau efek tetesan kebawah (*trickle down effect*) dimana pusat pertumbuhan baik Kota Metro maupun Kecamatan Pekalongan menjadi penggerak utama pembangunan yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan

dampak pertumbuhan ke wilayah penopang. Efek negatif *polarization effect* atau *backwash effect* karena kuatnya kota dan pusat pertumbuhan dalam menarik sumber daya dan potensi ekonomi wilayah penopang diupayakan dihindari.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Pusat Pertumbuhan Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Pembangunan sumber daya manusia terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi
2. Pengembangan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pangan, kawasan agrowisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perikanan budidaya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan agroindustri
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis agrowisata, kawasan strategis pendidikan, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
4. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman dan konektivitas untuk mendukung fungsi kawasan
5. Penuntasan RDTR Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Batanghari, dan Kecamatan Metro Kibang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

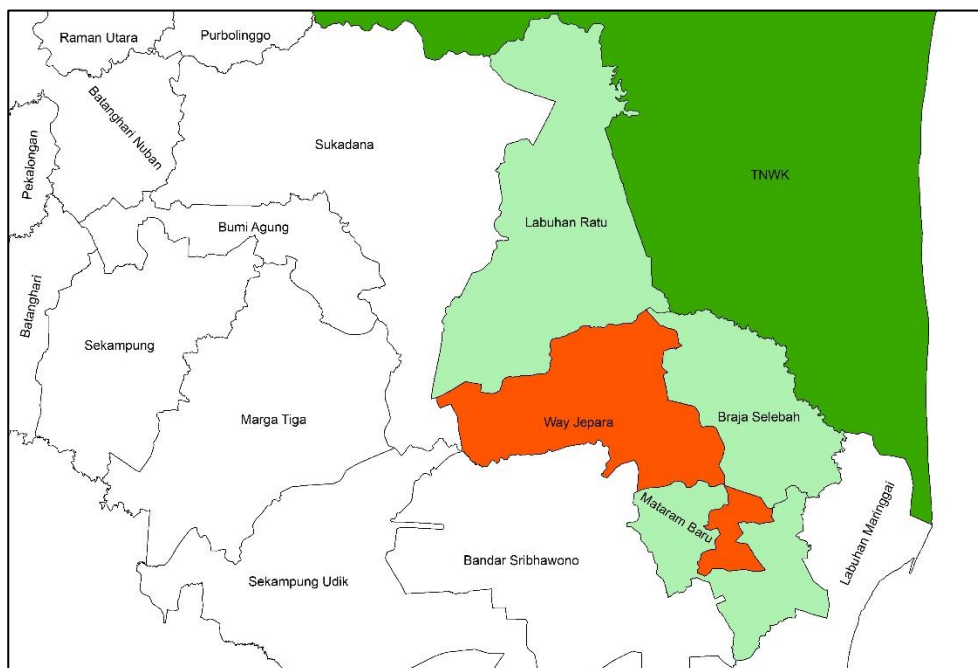
Arah mempercepat pemenuhan dan kemandirian infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup klaster kawasan meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia
2. Pemafaatan energi baru dan terbarukan sebagai pasokan wilayah
3. Pengembangan *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
4. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
5. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK, antara lain melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok

6. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat
  7. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan
  8. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana
  9. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
  10. Pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi
  11. Peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten
  12. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir
  13. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
  14. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya litigasi risiko bencana
  15. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi dan ekosistem
  16. Penuntasan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan
  17. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
  18. Dukungan pengembangan jaringan kereta api Pringsewu-Pesawaran-Metro-Sukadana
  19. Percepatan pengembangan jalan tol antar kota Provinsi Lampung
  20. Percepatan pengembangan jalan lingkar luar Metropolitan Lampung Raya
  21. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi
  22. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
  23. Eliminasi BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman.
  24. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah
  25. Peremajaan dan penataan ruang kota strategis.
  26. Pembangunan dan penataan ruang dan bangunan perbatasan wilayah
3. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selehah, Mataram Baru)
- Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Mataram Baru yang tergabung dalam klaster III ini adalah kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Sebagai kawasan strategis

pariwisata nasional, TNWK menjadi daya tarik kunjungan wisatawan. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan pariwisata adakan menimbulkan peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan daerah, percepatan proses pemerataan pendapatan, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan, memperluas pasar produk dalam negeri dan memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri. Pariwisata sebagai industri jasa yang multidimensi memiliki jaringan industri ke hulu dan hilir dengan mata rantai yang sangat panjang ke wilayah klaster III ini.

Gambar 5.9  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster III  
Kec. Way Jepara, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Braja Selehah, Kec. Mataram Baru



Posisi strategis yang dilintasi oleh jalan lintas pantai timur sebagai jalan kolektor primer K1 mengakselerasi potensi pertumbuhan kawasan ini kedepan. Rencana pengembangan kawasan industri di sepanjang koridor jalinpantim, didukung oleh potensi pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya di Danau Jepara. Pengembangan PLTS di Danau Jepara akan menjadi pasokan listrik bagi pengembangan sektor industri dan pariwisata di kawasan ini.

Tumbuhnya sektor pariwisata dan industri tersebut kedepan akan memunculkan kawasan permukiman di kawasan ini. Sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, dimana kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan permukiman berkepadatan tinggi, maka penyiapan sarana dan prasarana dasar permukiman perlu dipersiapkan dan ditata. Termasuk pengembangan dan penataan kawasan sentra perdagangan dan jasa

di Kecamatan Way Jepara yang akan melayani kebutuhan masyarakat dalam kecamatan maupun melayani masyarakat dari beberapa kecamatan di sekitarnya.

Kecamatan Way Jepara sangat berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di klaster III ini. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa yang ada saat ini, didukung oleh besarnya industri pengolahan (UMKM), akan mendorong tumbuhnya interaksi dengan unit-unit ekonomi di wilayah sekitarnya. Potensi sumber daya alam sebagai sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan memberikan peluang bagi kawasan sekitarnya untuk tumbuh dan mendapatkan manfaat dari pusat pertumbuhan ekonomi kawasan ini.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Mata Rantai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan kawasan kedepan
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru kawasan pariwisata, sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan, serta optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis pariwisata lokal, kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
4. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastruktur* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, penguatan infrastruktur perkotaan serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
5. Penuntasan RDTR Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Mataram Baru dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Arah mempercepat pemenuhan dan kemantapan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup klaster kawasan meliputi dan tidak terbatas pada:

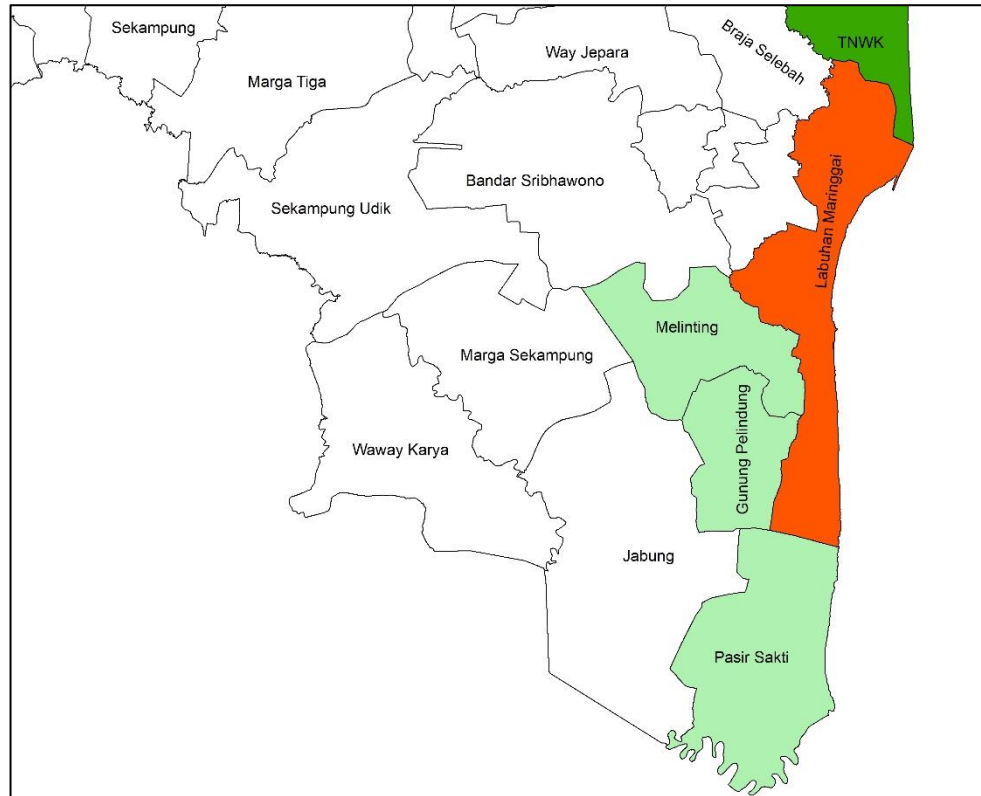
1. Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia

3. Pemafaatan energi baru dan terbarukan sebagai pasokan wilayah
4. Pengembangan *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
5. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
6. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK, antara lain melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok
7. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat
8. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan
9. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi dan perubahan iklim
10. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung
11. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa dan konektivitas spesies yang dilindungi
12. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan
13. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana
14. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
15. Pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi
16. Peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten
17. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir
18. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
19. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya litigasi risiko bencana
20. Pengembangan *Flood Forecasting Early Warning System* (FEWS)
21. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi dan ekosistem
22. Penuntasan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan
23. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
24. Pembangunan ruas jalan jalur lambat Jalinpantim di kawasan Perkotaan Way Jepara, Perkotaan Labuhan Ratu dan Perkotaan Mataram Baru, mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan.
25. Percepatan pengembangan jalan tol antar kota Provinsi Lampung

26. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi
  27. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
  28. Eliminasi BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
  29. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah
  30. Peremajaan dan penataan ruang kota strategis.
4. **Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung)**

Klaster ini terdiri dari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Gunung Pelindung. Pusat pertumbuhan klaster ini ditetapkan yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai, yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal dalam RTRW Provinsi Lampung. Penetapan Kecamatan Labuhan Maringgai menjadi pusat pertumbuhan didukung oleh potensi perikanan yang sangat besar. Pengembangan ekonomi biru Kabupaten Lampung Timur terletak di kawasan ini. Dengan panjang pantai yang mencapai lebih dari 100 km, potensi perikanan tangkap dan budidaya (tambak) akan mendorong pertumbuhan kawasan ini. Saat ini, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti merupakan sentra produksi rajungan, udang, dan bandeng yang telah diekspor ke luar daerah. Selain diekspor dalam bentuk segar, berbagai industri pengolahan ikan telah bermunculan dan mampu memproduksi berbagai macam produk yang memiliki kualitas unggul dengan harga bersaing. Sejalan dengan RTRW Kabupaten Lampung Timur yang menetapkan kawasan ini sebagai pengembangan minapolitan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan minapolitan diarahkan untuk dilaksanakan melalui perancangan dan penataan Perkotaan Labuhan Maringgai. Risiko munculnya kawasan kumuh dan permukiman tidak sehat di sepanjang garis pantai, menjadi tantangan kedepan dalam pengembangan kawasan ini. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan minapolitan kedepan dilengkapi dengan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Labuhan Maringgai. Dengan pembangunan pelabuhan pengumpan ini dipastikan akan muncul berbagai kawasan penunjang pelabuhan, khususnya sentra perdagangan, jasa, perkantoran, industri, dan juga permukiman di Kecamatan Labuhan Maringgai, maupun di wilayah kecamatan penopang atau sekitar.

Gambar 5.10  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster IV  
Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Pasir Sakti, Kec. Melinting, Kec. Gunung Pelindung



Selain potensi sebagai kawasan minapolitan, saat ini perkembangan sektor pariwisata di kawasan ini semakin baik, khususnya pariwisata pantai dan kuliner laut. Meningkatnya pariwisata di kawasan ini juga akan menggerakkan unit ekonomi di wilayah kecamatan sekitar. Kebutuhan pasokan pangan dan cenderamata bagi para wisatawan akan semakin menumbuhkan industri-industri di sekitarnya dan menjadi motor penggerak keterkaitan dan tumbuhnya sektor lainnya. Kecamatan di sekitar Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, yang tidak berada di pinggir pantai memiliki potensi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Di kawasan ini terkenal akan bibit buah-buahan unggul yang telah terkenal di seluruh Indonesia. Selain itu, kawasan ini juga merupakan sentra komoditas lada yang merupakan salah satu komoditas strategis di Provinsi Lampung. Pengembangan komoditas unggulan di kawasan yang sinergi dengan sektor strategis yang telah ada akan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah kedepan.

Selain potensi perikanan, pariwisata, dan pertanian tersebut, kawasan ini juga mengandung potensi sumber daya galian C, khususnya pasir kuarsa. Sebagaimana diketahui bahwa pasir kuarsa merupakan bahan dasar berbagai industri manufaktur. Pertumbuhan sektor industri berbasis komoditas ini secara berkelanjutan dan ramah

lingkungan secara teknis dapat dikembangkan, meskipun harus dengan pengawasan yang ketat dan terbatas.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi
2. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan
3. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas *multi-infrastructure* untuk mendukung fungsi konektivitas perhubungan darat dan laut dengan memanfaatkan ALKI I, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital
4. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis perikanan, kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
5. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastructure* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, penguatan infrastruktur perkotaan serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
6. Penuntasan RDTR Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Gunung Pelindung dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Arah mempercepat pemenuhan dan kemantapan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup klaster kawasan meliputi dan tidak terbatas pada:

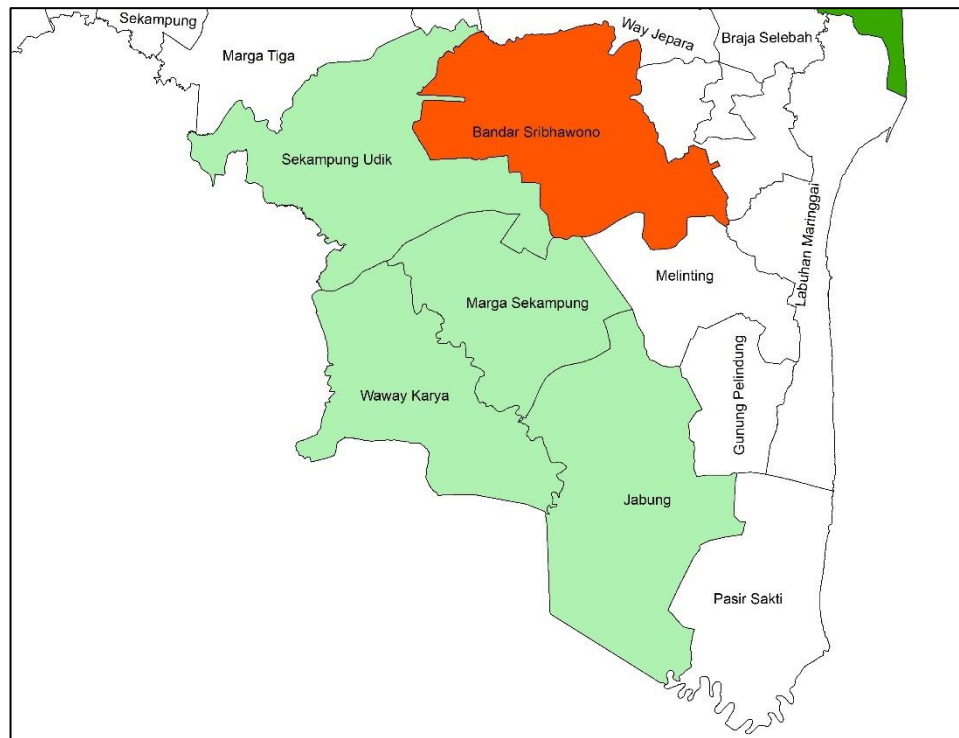
1. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia
2. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai pasokan wilayah
3. Pengembangan *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis

4. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
5. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK, antara lain melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok
6. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat
7. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan
8. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi dan perubahan iklim
9. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung
10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa dan konektivitas spesies yang dilindungi
11. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan
12. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
13. Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai
14. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana
15. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
16. Pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi
17. Peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten
18. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir
19. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
20. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya litigasi risiko bencana
21. Pengembangan *Flood Forecasting Early Warning System* (FEWS)
22. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi dan ekosistem
23. Penuntasan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan
24. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
25. Pengembangan pelabuhan pengumpan Labuhan Maringgai
26. Percepatan pengembangan jalan tol antar kota Provinsi Lampung
27. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi

28. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
  29. Eliminasi BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
  30. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah
  31. Peremajaan dan penataan ruang kota strategis.
  32. Pembangunan dan penataan ruang dan bangunan perbatasan wilayah
5. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya)

Pada klaster kawasan ini, pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang saat ini tumbuh lebih cepat dibandingkan kecamatan di sekitarnya. Masifnya pertumbuhan di kecamatan tersebut dan lengkapnya ketersediaan sarana prasarana perkotaan menjadikan kecamatan tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan ini.

Gambar 5.11  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster V  
Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Sekampung Udik, Kec. Marga Sekampung,  
Kec. Jabung, Kec. Waway Karya



Perkotaan Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang berada di ruas jalan kolektor primer K1, saat ini menjadi pusat perdagangan dan jasa pada kawasan ini. Berbagai barang dan jasa memasok berbagai keperluan yang diperlukan masyarakat di kedua kecamatan tersebut termasuk masyarakat di kecamatan sekitarnya. Kecamatan yang menjadi penopang pertumbuhan adalah Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Marga Sekampung. Ketiga kecamatan ini memiliki wilayah yang sangat luas dan merupakan kecamatan sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, biofarmaka, peternakan, dan hortikultura. Berbagai produk pertanian berkualitas tinggi berasal dari ketiga kecamatan tersebut, termasuk Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang juga merupakan sentra tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Lampung Timur.

Pengembangan kawasan ini kedepan sejalan dengan rencana tata ruang wilayah akan menjadi kawasan agroindustri dan kawasan industri terpadu Kabupaten Lampung Timur. Penyiapan lahan dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri diarahkan disediakan merujuk rencana detail tata ruang. Pemilihan kawasan ini menjadi kawasan industri terpadu dan agroindustri, mengingat jaraknya yang sangat dekat dengan Kawasan Industri Lampung dan Exit Tol Lematang. Lokasi yang strategis ditopang dengan ketersediaan bahan baku yang memadai akan mengakselerasi perkembangan kawasan ini kedepan.

Pertumbuhan sektor industri di suatu kawasan akan memicu timbulnya kawasan-kawasan strategis baru, mulai dari perdagangan dan jasa, permukiman, hingga kawasan pendidikan. Lokasi yang berbatasan dengan lokasi Kota Baru Provinsi Lampung dapat mendorong percepatan pertumbuhan kawasan kedepan. Fasilitas Kota Baru Provinsi Lampung yang telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan gedung perkantoran pemda dan instansi vertikal secara pengembangan wilayah akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan klaster ini, khususnya Kecamatan Sekampung Udik.

Sektor strategis lainnya yang perlu dikembangkan di kawasan ini adalah sektor pariwisata, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik saat ini telah mendorong tumbuhnya berbagai fasilitas pendukung pariwisata skala lokal meskipun belum optimal. Keterbatasan akses dan kurang variatifnya destinasi di sekitarnya menjadi tantangan pengembangan sektor pariwisata kedepan. Pengembangan agrowisata berpotensi dikembangkan di Kecamatan Jabung, Waway Karya, dan Kecamatan Marga Sekampung. Dengan luasnya lahan budidaya pertanian, hortikultura, dan peternakan di wilayah kecamatan tersebut, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata menunjang pertumbuhan sektor pariwisata Kota Bandar Lampung. Selain itu, masih terjaganya desa atau kampung tua di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Marga Sekampung dapat menjadi destinasi alternatif pariwisata kawasan. Tantangan pengembangan pariwisata di kawasan ini adalah menumbuhkan citra positif dan faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Mata Rantai Utama Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan
2. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dengan mendorong upaya hilirisasi
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pariwisata, pertanian dan industri pengolahan.
4. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastructure* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, penguatan infrastruktur perkotaan serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
5. Penuntasan RDTR Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Waway Karya

dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Arah mempercepat pemenuhan dan kemantapan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup klaster kawasan meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia
2. Pemafaatan energi baru dan terbarukan sebagai pasokan wilayah
3. Pengembangan *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
4. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
5. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK, antara lain melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok
6. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat
7. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan
8. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi dan perubahan iklim
9. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung
10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa dan konektivitas spesies yang dilindungi
11. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan
12. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana
13. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
14. Pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi
15. Peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten
16. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir
17. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin*
18. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya litigasi risiko bencana
19. Pengembangan *Flood Forecasting Early Warning System* (FEWS)
20. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi dan ekosistem

20. Penuntasan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan
21. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
22. Percepatan pengembangan jalan tol antar kota Provinsi Lampung
23. Percepatan pengembangan jalan lingkar luar Metropolitan Lampung Raya
24. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi
25. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
26. Eliminasi BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
27. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah
28. Peremajaan dan penataan ruang kota strategis.
29. Pembangunan dan penataan ruang dan bangunan perbatasan wilayah

### 5.3 Kestinambungan Pembangunan Daerah

Kebijakan kestinambungan pembangunan daerah diarahkan untuk mengawal pencapaian visi jangka panjang pembangunan daerah Lampung Timur Sejahtera 2045 yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pencapaian visi jangka panjang pembangunan daerah perlu dipastikan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertahap meskipun terjadi perubahan konstelasi politik daerah. Pelaksanaan misi dan arah kebijakan perlu secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kedepan berpedoman pada sasaran utama dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 5.18  
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-8			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
<b>Misi: Kestinambungan Pembangunan Daerah</b>	<b><i>Peningkatan kolaborasi dan sinergitas seluruh stake holder mendukung penguatan modal dasar transformasi da-erah</i></b>	<b><i>Peningkatan kolaborasi dan sinergitas stake holder mendukung percepatan trans-formasi daerah</i></b>	<b><i>Peningkatan kola-borasi dan sinergitas stake holder mendukung pemantapan pemba-ngunan daerah</i></b>	<b><i>Peningkatan kolaborasi dan sinergitas stake holder mendukung perwujudan visi daerah</i></b>
<b>Kestinambungan Pembangunan Daerah</b>	★ Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> . ★ Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda	★ Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> . ★ Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen	★ Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang	★ Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. ★ Terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang tinggi

Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan dan Tahapan pada Misi ke-8			
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)	Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)	Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)
	berdasarkan sasaran prioritas nasional. ★ Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif ★ Inovasi dan penetapan project investasi strategis jangka menengah dan jangka panjang ★ Promosi pemerintah daerah kepada publik dan eksplorasi mitra pendanaan pembangunan ★ Percepatan pembangunan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan penganggaran ★ Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten ★ Upaya lanjutan percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas	perencanaan pusat dan daerah. ★ Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. ★ Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, aman dan terpercaya. ★ Implementasi kepesertaan masyarakat dan swasta dalam investasi project strategis skala daerah dan nasional secara prudent dan saling menguntungkan. ★ Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk mitigasi perencanaan pembangunan ★ Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten ★ Optimalisasi literasi masyarakat pada sektor keuangan	lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. ★ Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternatif semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal ★ Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk mitigasi perencanaan pembangunan ★ Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten ★ Akses sektor keuangan yang inklusif	★ Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk perencanaan pembangunan selanjutnya ★ Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten ★ Peran sektor keuangan semakin mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, perlu secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sasaran pokok RPJPD yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun harus dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. Untuk selanjutnya, sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan kebijakan pendanaan pembangunan yang searah. Untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan daerah dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan pembangunan daerah, perlu

dilakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kualitas belanja serta pembiayaan pembangunan yang inovatif, integratif, dan tepat sasaran sesuai dengan tahapan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, kolaborasi dan kerja sama antar aktor dalam pembangunan multi sektor penting dilakukan karena proses, tujuan dan tantangan-tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Peningkatan model kolaboratif *penta helix* yang melibatkan 5 (lima) aktor, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media dalam pembangunan daerah kedepan lebih dioptimalkan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan pembangunan daerah yang potensial didukung oleh beranekaragamnya sumber daya masing-masing yang saling berinteraksi secara sinergis. Sinergitas sumber daya tersebut diproyeksikan mampu menyelesaikan masalah multi dimesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik kedepan. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan diarahkan dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan stake holder beserta otoritas di berbagai tingkatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan pembangunan daerah.



**Perda Kab. Lam Tim  
Nomor 08 Tahun 2024  
tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

**BAB VI  
PENUTUP**

Danau Way Jepara

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merujuk regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJPD yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah. Visi dan misi tersebut diikuti dengan arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun yang menjadi fokus utama dengan tidak mengesampingkan bidang lainnya yang menjadi tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPJPD Lampung Timur Tahun 2025–2045 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta seluruh *stake holder* di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lampung Timur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD Kabupaten Lampung Timur disusun dengan pendekatan partisipatif dan teknokratis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam menjamin pencapaian cita-cita pembangunan jangka panjang, pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh *stake holder* pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJPD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi :

**“LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA 2045”**

**“Lampung Timur Semakin Religius, Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”**

---

## 6.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RPJMD dan RKPD, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. (Pasal 165 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
2. Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. (Pasal 167 Ayat 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
3. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. (Pasal 168 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
4. Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
5. Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. (Pasal 169 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
6. Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. (Pasal 171 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
7. Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. (Pasal 176 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
8. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten (Pasal 181 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
9. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan nasional. (Pasal 208 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

10. Kepala BAPPEDA kabupaten melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD; dan melaporkannya kepada Bupati. (Pasal 298 dan 299 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
11. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**